DIMENSI RELIGIUS DALAM PENDIDIKAN POLITIK PARTAI NASDEM JAWA TIMUR
(Perspektif Teori Strukturasi)

DISERTASI
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam

Oleh :

LULUK MASHLUCHAH
NIM. F28312079

PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Luluk Mashluchah
NIM	: F2.8.3.12.0.79
Program	: Doktor (S-3)
Institusi	: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian, karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juni 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
395DBAHF049184569
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Luluk Mashluchah

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul "DIMENSI RELIGIUS DALAM PEDIDIKAN POLITIK PARTAI NASDEM JAWA TIMUR (Perspektif Teori Strukturasi)" yang ditulis oleh **LULUK MASHLUCHAH** ini telah disetujui pada tanggal 25 Juni 2019

Oleh

PROMOTOR

Prof. Masdar Hilmy, MA, Ph. D

PROMOTOR

Dr. Ahmad Nur Fuad, MA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI DISERTASI TERBUKA

Disertasi berjudul "DIMENSI RELIGIUS DALAM PEDIDIKAN POLITIK PARTAI NASDEM JAWA TIMUR (Perspektif Teori Strukturasi)" yang ditulis oleh **LULUK MASHLUCHAH** ini telah diuji dalam ujian Disertasi Terbuka pada tanggal 17 Juli 2019

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag (Ketua) : .....
2. Dr. Khoirul Yahya, M.Si (Sekretaris) : .....
3. Prof. Masdar Hilmy, MA, Ph.D (Promotor/Penguji) : .....
4. Dr. Ahmad Nur Fuad, MA (Promotor/Penguji) : .....
5. Prof. Dr. H. Samsul Arifin, M.Si (Penguji Utama) : .....
6. Prof. Akh. Muzakki, Grad, Dip, SEA, Ph.D (Penguji) : .....
7. Dr. Abd. Chalik, M.Ag (Penguji) : .....

Surabaya, 25 Juni 2019
Mengetahui
Direktur

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA SURABAYA UIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 19660041994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Luluk Mashluchah
NIM : F28312079
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana / Doktor Studi Islam
E-mail address : mashluchahluluk@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis √ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
DIMENSI RELIGIUS DALAM PENDIDIKAN POLITIK PARTAI NASDEM JAWA TIMUR (Perspektif Teori Strukturasi)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Oktober 2019

Penulis

(Luluk Mashluchah)

ABSTRAK

Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji dimensi agama dalam pendidikan politik Partai NasDem Jawa Timur. Tiga persoalan yang hendak dijawab dalam studi ini, yaitu (1) bagaimana praksis pendidikan politik yang diselenggarakan oleh agen-agen kepengurusan Partai NasDem Jawa Timur, (2) bagaimana dimensi-dimensi religius yang terkandung dalam pendidikan politik yang diselenggarakan oleh agen-agen kepengurusan Partai NasDem Jawa Timur dan (3) bagaimana implikasi dari penerapan dimensi religius dalam pendidikan politik yang diselenggarakan oleh agen-agen kepengurusan Partai NasDem Jawa Timur terhadap partai dan kadernya?

Studi menggunakan rancangan metode kualitatif-fenomenologis. Analisis data dilakukan secara induktif dengan menggunakan perspektif teori strukturasi. Hasil studi menunjukkan bahwa *pertama*, pelaksanaan pendidikan politik Partai NasDem Jawa Timur diwujudkan dalam bentuk-bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal seperti sarasehan, seminar, dialog kebangsaan, pembentukan sekolah kader atau sekolah legislatif dan Akademi Bela Negara (ABN). Orientasinya adalah agar kader-kader memiliki wawasan kepartaian, nasionalisme dan ketrampilan berpolitik sesuai dengan *platform* politik Partai NasDem. *Kedua*, disiplin, toleran, inklusif, pluralis, *akhlāq al-karīmah*, politik tanpa mahar, bertanggung jawab, dan berpikir rasional, merupakan nilai-nilai keagamaan yang diadopsi dalam pendidikan politik Partai NasDem Jawa Timur. Dimensi-dimensi keagamaan ini diimplementasikan baik secara eksplisit ke dalam berbagai program kegiatan seperti peringatan hari-hari besar umat beragama, *Ramadhān Mubārak*, Khatm *al-Qurān*, *istigātsah*, pengajian akbar oleh tokoh-tokoh agamawan nasional, maupun implisit ke dalam kurikulum sekolah kader, sekolah legislatif dan Akademi Bela Negara (ABN). *Ketiga*, pelaksanaan pendidikan politik berdimensi agama, telah berdampak konstruktif bagi penguatan citra Partai NasDem Jawa Timur sebagai partai yang nasionalis-religius. Di kala partai-partai lain mensyaratkan mahar bagi calon yang hendak mendapatkan rekomendasi dari partai sebagai tiket untuk berkompetisi dalam Pilkada, tidak demikian halnya dengan Partai NasDem. Alih-alih mensyaratkan mahar, Partai NasDem justru memberikan dukungan penuh kepada kandidat yang memiliki *track record* yang baik.

Pada akhirnya, hasil studi ini memperkuat pandangan teoretis yang menilai bahwa kemampuan dalam mewujudkan tindakan sosialnya bukan semata-mata didasarkan pada kehendak mutlaknya. Sebagai aktor yang berada dalam tarikan dualitas struktur, *enabling* dan *constraining*, kemampuan mereka itu merupakan hasil negosiasi di antara keduanya. Dengan kata lain, praksis pendidikan politik Partai NasDem Jawa Timur dapat terwujud, satu sisi, karena dukungan dari kebijakan Partai NasDem Pusat, yang memang berkepentingan untuk memperkuat image partai dengan karakternya nasionalis-religius. Di sisi lain, para pengurus yang memiliki latar kultural-keagamaan yang beragam, dituntut pula untuk melakukan negosiasi guna merumuskan aspek-aspek keagamaan seperti apa dan dari unsur mana saja yang hendak diadopsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

This study is aimed at examining the dimensions of religion in the political education of the East Java National Democratic Party (Partai Nasionalis demokrat, NasDem). Three issues are attempted to be answered in this study, namely (1) the praxis of political education organized by the East Java Nasdem Party management agencies, (2) the religious dimensions contained in political education organized by party management agents of Nasdem of East Java; and (3) the implications of the application of the religious dimension in political education organized by the East Java Nasdem Party management agencies on their parties and cadres.

The study employs the design of qualitative-phenomenological method. The data analysis was conducted inductively using the perspective of structuration theory. The results of the study reveal that, first the implementation of political education of the East Java Nasdem Party was implemented in forms of formal, non-formal, and informal education such as gatherings, seminars, national dialogues, the formation of school or legislative school cadres and the National Defense Academy (ABN). This aims at providing the partisans with insight into party, nationalism and political skills in accordance with the political platform of the Nasdem party. Second, empowering the partisans with skills of discipline, tolerance, inclusiveness, pluralism, ethics (akhlaqul karimah), politics without political dowry, responsibility, rational thinking, and religious values adopted in the political education of the East Java Nasdem Party. These religious dimensions are implemented both explicitly in various program activities such as the commemoration of religious holidays, Ramadan, and Qur'an recital, as well as implicitly in the school curriculum and the National Defense Academy (ABN). Third, the implementation of the religious dimension of political education has had a constructive impact on strengthening the image of the East Java Nasdem Party as a nationalist-religious party. When other parties require political dowry for candidates who want to get party endorsement as a ticket to compete in the elections, this is not the case with the Nasdem Party. Instead of requiring political dowry, Parati Nasdem actually provides full support to candidates with a good track record.

In the end, the results of this study reinforce the theoretical view that the ability to implementing the party social actions is not solely based on its absolute will. As actors who are in the duality of structure, enabling and constraining, their abilities are the result of negotiations between the two. In other words, the praxis of political education of the East Java Nasdem Party can be realized, on one hand, the support of the policies of the Central Nasdem Party, support an interest in strengthening the party's image with its nationalist-religious character. On the other hand, administrators who have diverse cultural-religious backgrounds are also required to conduct negotiations in order to formulate religious aspects and elements they wish to adopt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ملخص البحث

تهدف هذه الدراسة إلى بحث الأبعاد الدينية في تربية السياسية لدى الحزب الوطني الديمقراطي (Nasdem) في جاوى الشرقية. هناك ثلاث قضايا يمكن الإجابة عليها في هذه الدراسة، وهي (1) كيف تطبيق مبادئ تربية السياسية التي قامت بها وكالات الإدارة للحزب الوطني الديمقراطي (Nasdem) في جاوى الشرقية، و(2) كيف تكون الأبعاد الدينية تحتوي في تربية السياسية بواسطة وكالات الإدارة للحزب الوطني الديمقراطي (Nasdem) في جاوى الشرقية، و(3) ما هي الآثار المترتبة على تربية السياسية التي قامت بها وكالات الإدارة للحزب الوطني الديمقراطي (Nasdem) في جاوى الشرقية نحو الحزب وكوادرها؟

استخدمت الباحث في هذه الدراسة طريقة البحث الكيفي الظواهري. وتم إجراء تحليل البيانات بشكل استقرائي باستخدام منظور النظرية التركيبية. وحصلت الباحث على نتائج الدراسة الآتية: الأول، تم تنفيذ تربية السياسية التي قامت بها الحزب الوطني الديمقراطي (Nasdem) في جاوى الشرقية من خلال أنواع التعليم الرسمي وغير الرسمي مثل التجمعات والندوات والحوارات الوطنية وتكوين المدارس للكوادر أو التشريعية وأكاديمية الدفاع الوطني (ABN). أما الغرض فهو أن يكون للكوادر نظرة ثاقبة في المهارات الحزبية والقومية والسياسية وفقًا للبرنامج السياسي الحزب الوطني الديمقراطي (Nasdem). والثاني، إن الانضباط والتسامح والشمولية والتعددية والأخلاق والسياسة دون المهر والمسؤولية والتفكير العقلاني، هي من القيم الدينية التي تم تبنيها في التعليم السياسي للحزب الوطني الديمقراطي (Nasdem) بجاوى الشرقية. وتم تطبيق هذه الأبعاد الدينية بشكل صريح في كثير من الأنشطة البرنامجية مثل برامج ذكرى الأعياد الدينية، وبرنامج رمضان المبارك، وتختيم القرآن، والاستغاثة، وبرنامج تكبير الأكبر من قبل علماء دينية وطنية، وكذلك بشكل ضمني في المناهج الدراسية للكادرية، والمدرسة التشريعية وأكاديمية الدفاع الحكومية (ABN). والثالث، كان لتطبيق التعليم السياسي للأبعاد الدينية تأثير كبير على بناء تعزيز مثالية للحزب الوطني الديمقراطي (Nasdem) بجاوى الشرقية كالحزب القومي الديني. وعندما كانت الأحزاب الأخرى تطلب المهر للمرشحين الذين يرغبون في الحصول على توصيات من الحزب كتذكرة للتنافس في الانتخابات، فليس هذا هو الحال مع الحزب الوطني الديمقراطي (Nasdem). بل يكون هذا الحزب ، يوفر بالفعل الدعم الكامل للمرشحين الذين لديهم الخبرات جيدة.

وفي النهاية، إن نتائج هذه الدراسة تدعم على النظرية التي تقيّم أن القدرة على تحقيق الأعمال الاجتماعية ليست فقط تعتمد على الإرادة المطلقة. بصفتها ممثلا في ازدواجية الهيكل والتمكين والتقييد، فإن القدرة هي نتيجة للمفاوضات بين الاثنين. بعبارة أخرى، يمكن تحقيق التطبيق العملي للتربية السياسية الحزب الوطني الديمقراطي (Nasdem) بجاوى الشرقية، من ناحية واحدة، بسبب دعم سياسات الحزب الوطني الديمقراطي (Nasdem) المركزي، والتي تهتم بالفعل بتعزيز صورة الحزب مع بطابعه القومي الديني. ومن ناحية أخرى، يُطلب من المسؤولين الذين لديهم خلفيات ثقافية دينية متنوعة إجراء مفاوضات لصياغة الجوانب الدينية مثل ما ومن العناصر التي سيتم اعتمادها.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERSETUJUAN ..... **ii**
PERSETUJUAN TIM PENGUJI ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
TRANSLITERASI ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
ABSTRAK ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xv**
DAFTAR TABEL ..... **xvii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 13
C. Rumusan Masalah 15
D. Tujuan Penelitian 15
E. Kegunaan Penelitian 16
F. Kerangka Teoretik 21
G. Penelitian Terdahulu 54
H. Metode penelitian 63
I. Sistematika Pembahasan 76
BAB II PENDIDIKAN POLITIK BERDIMENSI AGAMA **78**
A. Relasi Agama dan Politik 78
B. Partai Sebagai Aktor Politik 80
C. Sosialisasi dan Pendidikan Politik 84
D. Dimensi Religius dalam Pendidikan Politik 99
BAB III NASDEM JAWA TIMUR DARI ORGANISASI MASSA (ORMAS) MENUJU PARTAI POLITIK) **124**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Konteks Sosial-Politik Masyarakat Jawa Timur 124
B. Historisitas Pembentukan Partai NasDem 134
C. Mendirikan Partai Politik 139
D. Positioning Partai 143
E. Partai NasDem Jawa Timur 163
BAB IV RELIGIUSITAS PENDIDIKAN POLITIK PARTAI NASDEM JAWA TIMUR 195
A. Praksis Pendidikan Politik Partai NasDem 195
B. Dimensi-Dimensi Religius dalam Pendidikan Politik Partai NasDem Jawa Timur 240
C. Implikasi Penerapan Dimensi Religius dalam Pendidikan Politik Partai NasDem Jawa Timur 287
BAB V PENUTUP 341
A. Kesimpulan 341
B. Implikasi Hasil Penelitian 346
C. Keterbatasan Studi 350
D. Rekomendasi 351
DAFTAR PUSTAKA 353
BIODATA PENELITI
LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nama Informan 67

Tabel 1.2 Data Wawancara 68

Tabel 1.3 Data observasi 69

Tabel 1.4 Data Dokumentasi 70

Tabel 4.1 Implikasi Operasional Sekolah Kader 334

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Stratifikasi Tindakan Manusia 31

Gambar 1.2 Dualitas Struktur 46

Gambar 1.3 Analisis Model Miles & Huberman 71

Gambar 3.1 Peta pembagian Wilayah Kebudayaan Jawa Timur.....125

Gambar 3.2 Wilayah Kebudayaan Jawa Mataraman 126

Gambar 3.3 Wilayah Kebudayaan Arek 127

Gambar 3.4 Wilayah Kebudayaan Pulau Madura.....128

Gambar 3.5 Peta Tapal Kuda 129

Gambar 3.6 Wilayah Kebudayaan Pandalungan.....132

Gambar 4.1 Ragam Agen Partai NasDem.....201

Gambar 4.2 Pendidikan Formal Dan Orientasinya 236

Gambar 4.3 Varian Dimensi Religiusitas Partai NasDem 254

Gambar 4.4 Orientasi Riligiusitas Dalam Pembentukan Tindakan Agen.....276

Gambar 4.5 Orientasi Nilai Religius Pada Struktur Partai NasDem.....287

Gambar 4.6 Implikasi Pendidikan Politik Pada Peran struktur Partai NasDem .305

Gambar 4.7 Implikasi Pendidikan Politik Pada tindakan Agen.....319

Gambar 4.8 Implikasi Strukturasi Partai NasDem Dalam Reproduksi Struktur dan Agen 324

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar. 4.9 Implikasi Teoretik Strukturasi Partai NasDem 326

Gambar. 4.10 Implikasi Praksis Pendidikan Politik Partai NasDem 337

Gambar. 5.1 Formulasi Model Pendidikan Politik Berbasis Religius 349

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepanjang periode pasca Orde Baru, banyak partai politik yang bermunculan, namun sedikit yang bisa bertahan atau pada akhirnya banyak yang bubar. Ada sekitar 141 Parpol yang terdaftar dalam Departemen Kehakiman dan HAM, meski hanya 48 partai saja yang akhirnya memenuhi kriteria untuk bersaing dalam pemilihan umum Juni 1999. Menariknya lagi, dari 48 Parpol itu, 41 Parpol memiliki kecenderungan ideologi-politik yang relatif seragam, yakni religius (Islam).[1] Dalam perjalanannya, Parpol yang benar-benar bertahan dan berkiprah dalam sistem perpolitikan Indonesia pasca Orde Baru, tidak lebih dari 20 Parpol saja.[2]

[1] Pada 1999, terdapat 41 partai Islam yang masing-masing memiliki asas, basis massa, dan tujuan yang mirip. Dari segi asas partai, misalnya, PSII (Partai Sarekat Islam) 1905, PSII (Partai Sarekat Islam), PPP, PMB (Partai Masyumi Baru), PUI (Partai Umat Islam), dan PBB (Partai Bulan Bintang) sama-sama menjadikan al-Qur'an dan al-Hadis sebagai asas meski dinyatakan dengan sebutan berbeda. Sedangkan 8 partai lainnya seperti PUMI (Partai Umat Muslimin Indonesia), Partai Suni (Solidaritas Uni Indonesia), PNU (Partai Nahdlatul Ummah), PCD (Partai Cinta Damai), PKU (Partai Kebangkitan Umat), PAY (Partai Abul Yatama), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), masing-masing menyebut Pancasila sebagai dasar, namun tetap membawa simbol Islam. http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999.

[2] Pada Pemilu 2014, misalnya, Parpol yang dinyatakan lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu sebanyak 15 partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Damai Aceh (PDA), Partai Nasional Aceh (PNA), dan Partai Aceh. http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama periode itu pula, sorotan publik akademik terhadap Parpol pada umumnya terkonsentrasi pada sepak terjangnya dalam perpolitikan praktis.[3]

Hal ini dapat dimengerti mengingat kiprah Parpol memang dominan berurusan dengan persaingan dan pertarungan untuk memperebutkan akses kekuasaan negara. Padahal, keberadaan Parpol memiliki fungsi, kedudukan dan peranan ideal,[4] terutama dalam proses demokratisasi. Meski tarik ulur kepentingan politik praktis tidak bisa dihindarkan sepenuhnya, namun idealnya Parpol tetap mampu menyeimbangkan peran politiknya, bukan sebatas pada persaingan untuk memperebutkan kekuasaan, namun juga mendemokratisasikannya.

Pada saat bersamaan, sepak terjang Parpol dalam melaksanakan aktivitas non-politik praktis justru kurang mendapakan perhatian yang memadai dari publik akademik. Keterlibatan Parpol dalam beragam aktivitas sosial, pendidikan dan keagamaan, cenderung kurang menarik perhatian dan minat kalangan akademisi. Boleh jadi, hal ini berkaitan erat dengan cara pandang sebagian kaum akademisi yang menilai bahwa aktivitas apapun yang

---

[3] Perilaku politik Parpol kerap dikritik terlampau praktis-pragmatis, atau transaksional, dalam perpolitikannya. Siapa mendapatkan apa, bagaimana dan kapan, merupakan nalar politik dominan dalam politik kepartaian Indonesia pasca Orde Baru. Menguatnya penggunaan *money politic* merupakan salah satu indikator yang paling telanjang dari pragmatism politik Parpol. Demi memenangkan pertarungan dan mendapatkan kekuasaan, Parpol rela menggunakan kekuatan uang untuk membeli suara pemilih. Burhanudin Muhtadi, "Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi antara " Party-ID" dan Patron-Klien", *Jurnal Penelitian Politik,* Vol. 10, No. 1 2013, 41-58.

[4] Di antara fungsi dan peran ideal Parpol antara lain adalah sosialisasi politik, komunikasi politik, pendidikan politik, melahirkan kepemimpinan nasional, mengawal kepentingan dan kebijakan public, menjadi fasilitator antara warga dengan pemerintah, dan pengelolaan konflik *(conflict management)*. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 405-410.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan Parpol merupakan bentuk perpolitikan yang berdimensi kepentingan praktis-pragmatis. Dalam nalar ekonomi-politik, aktivitas demikian itu lebih dipahami sebagai bentuk komodifikasi *(commodification).*[5]

Secara faktual, tidak cukup banyak kajian akademik yang mengulas aspek-aspek ideal dari aktivitas Parpol. Pendidikan politik merupakan salah satu aspek ideal dimaksud yang luput dari *concern* publik akademik. Padahal, hampir semua Parpol yang ada bersinggungan dengan aktivitas pendidikan politik dalam beragam bentuknya. Tentu saja, terdapat sejumlah kajian tentang pendidikan politik, namun kebanyakan melihatnya dari segi pendidikan politik secara umum ataupun pendidikan kewargaan *(civic education)* tanpa mengaitkan dengan dimensi keagamaan (baca: religiusitas) yang menjadi salah satu unsur penting di dalamnya.

Dengan mengambil segmen religiusitas pendidikan politik kepartaian, tentu saja penelitian ini memiliki signifikansinya tersendiri. Di samping dapat mengisi kekosongan *(lacuna)* yang ditinggalkan oleh studi-studi terdahulu (pada umumnya fokus pada konstelasi kekuasaan praktis), penelitian ini dapat mengangkat aspek-aspek ideal yang sesungguhnya *inherent* pada diri Parpol, namun keberadaannya kurang mendapatkan ekspose memadahi dari kalangan

---

[5] Secara sederhana, komodifikasi dapat dimengerti sebagai suatu proses transformasi barang dan jasa yang semula dinilai karena nilai gunanya (misalnya, nilai guna minuman untuk menghilangkan dahaga, cerita untuk berkomunikasi atau berbagi pengalaman), menjadi komoditas yang bernilai karena ia bisa mendatangkan keuntungan di pasar setelah dikemas menjadi minuman dalam botol dan buku novel ataupun misalnya, komersialisasi pertanian untuk menjual makanan dan produksi drama untuk penyiaran komersial. Dalam kata-kata Mosco *commodification is defined as the process of transforming goods and services, including communication, which are valued for their use, into commodities which are valued for what they will bring in the marketplace*. Idi Subandi dan Bachruddin Ali Akhmad, *Komunikasi & Komodifikasi: Mengkaji Media dan Budaya dalam Dinamika Globalisasi* (Jakarta: Obor, 2014), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

publik akademik.

Menonjolnya dimensi pragmatisme dalam Parpol, tidak lantas dimaknai sebagai matinya atau hilangnya sama sekali dimensi idealistik dari institusi politik modern ini. Meskipun arus utama Parpol-Parpol sekarang ini cenderung pragmatis, namun ia tetaplah institusi politik yang masih memiliki ide, wacana, fungsi dan peran idealistik dalam mendorong proses demokratisasi di Indonesia pasca Orde Baru. Munculnya pemimpin-pemimpin negara baik di tingkat nasional maupun daerah, tidak bisa dilepaskan sama sekali dari peran dan fungsi Parpol dalam melakukan sosialisasi, komunikasi, partisipasi dan rekruitmen politik.[6]

Sebenarnya, pelibatan aspek-aspek religiusitas dalam dunia politik kepartaian bukan sesuatu yang baru sama sekali. Hampir semua Parpol di Indonesia akrab dengan simbol-simbol dan aktivitas keagamaan. Bukan sebatas Parpol-Parpol berbasis agama (Islam) seperti PPP dan PKS, Parpol sekular pun seperti PDIP, Golkar, Gerindra, Hanura dan NasDem, juga membawa simbol-simbol, atribut, ritus, dan aktivitas keagamaan ke dalam dunia perpolitikannya. Hal ini cukup bisa dimengerti mengingat mayoritas warga Indonesia yang menjadi ceruk suara bagi Parpol adalah masyarakat beragama (religius). Karenanya tidak heran jika setiap Parpol berlomba-lomba menarik simpati publik dengan membangun image dan melegitimasi diri sebagai Parpol yang religius.[7]

---

[6] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 149-154.
[7] Dalam konteks ini, memasukkan agama dalam bagian simbol-simbol perpolitikan dapat dimengerti sebagai wujud pemenuhan terhadap tuntutan konstituen. Saat bersamaan, elit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam diskursus sosial-politik, pelibatan agama dalam dunia perpolitikan praktis selalu memunculkan perdebatan. Sebagian memahami hal itu sebagai bentuk kapitalisasi agama dan sebagian lainnya lebih memahaminya dari sudut pandang agamaisasi politik.[8] Bagi Parpol yang berasaskan agama (Islam) seperti PKS, pelibatan agama dalam politik kerap dikaitkan dengan kepentingan agamaisasi politik. Tidak sedikit sarjana yang mengidentifikasi PKS sebagai Parpol Islamis ataupun Islam politik yang lekat dengan agenda Islamisasi daripada demokratisasi. Bagi Parpol ini, agama diposisikan lebih sebagai ideologi politik dari pada sumber etik, moral, nilai dan pengetahuan bagi proses perpolitikannya. Sebagai Parpol, tidak disangsikan jika PKS memiliki kepentingan politik praktis-pragmatis seperti perebutan kekuasaan. Namun di balik kepentingan pragmatismenya itu, ia memiliki keunikan tersenidiri yang berkaitan dengan Islamisasi kekuasaan.[9]

Aktivitas keagamaan yang mereka lakukan dalam berbagai bentuknya mulai dari pembentukan kelompok majlis ta'lim, istighōtsah, dzikir akbār, pemberian santunan kepada anak yatim dan fakir miskin, dan sejenisnya, berkelanjutan dan erat dengan kepentingan politik kepartaian. Dalam hal ini, agama telah menjadi religio-political power atau meminjam istilah Bourdieu

---

politik memiliki agenda dan bentuk kesadaran spiritualitas dan moralitasnya sendiri, yang dalam Bahasa Machiavelli disebut dengan moralitas berkuasa. Dengan kata lain, moralitas agama adalah instrumen dominasi. Zainuddin Maliki, *Agama Priyayi: Makna Agama di Tangan Elite Penguasa*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004), 40.

[8] Peneliti memaknai agamaisasi politik sebagai proses berpolotik yang dilakukan dengan kayakinan agama.

[9] Ahmad Adi Husada, "Pengaruh Gerakan Revivalisme Islam al-Ikhwanu al-Muslimin dalam Gerakan Revivalisme Islam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia", *Thesis*, (Malang: Faculty of Social Science, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal kultural-simbolik (symbolic-cultural capital),[10] bagi Parpol untuk memperkuat legitimasi institusi politiknya dan sekaligus menarik dukungan massa dari kalangan umat beragama.[11]

Terlepas dari dua pandangan oposisional itu (kapitalisasi versus agamaisasi), peneliti memahami jika pemanfaatan sumber-sumber keagamaan dalam dunia politik kepartaian, berkaitan dengan banyak hal tidak saja kompleks, melainkan memiliki jalinan relasional yang rumit, saling bersinggungan dan bahkan bertabrakan (kontradiksi). Secara empirik, pemanfaatan agama oleh para politik Parpol, bagaimanapun, tidak bisa dilepaskan dari kepentingan dominasi ataupun pencarian legitimasi. Secara inherent, moralitas para politisi sekalipun mereka itu santri, adalah bermoralitas–meminjam bahasa Machiavelli-- berkuasa. Karena itu, menjadi penting untuk selalu dikritisi bahwa pemanfaatan agama dalam kepolitikan mereka, hampir dipastikan, sarat dengan muatan kepentingan politik praktis. Dalam konteks ini, aspek-aspek moralitas keagamaan yang kerap digaungkan oleh para politisi, tidak lebih sebagai instrumen dominasi.[12]

Meski demikian, memahami para politisi sebagai makhluk politik yang selalu berburu kekuasaan dengan menghalalkan berbagai cara, termasuk mengkapitalisasi agama, tidaklah sepenuhnya benar. Sebagai makhluk politik,

---

[10] Haryatmoko, "Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa: Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu", dalam *Basis* Nomor 11-12, Tahun Ke-52, November-Desember, (Yogyakarta: Kanisius. 2003).

[11] Menurut Berger, secara historis agama memang merupakan instrumentalitas legitimasi yang paling tersebar dan efektif karena agama menghubungkan konstruksi realitas rawan yang empiric dengan realitas purna yang keramat dan transcendental. Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1991), 42- 43.

[12] Niccolo Machiavelli, *Sang Penguasa, Surat Seorang Negarawan kepada Pemimpin Republik* (Jakarta: Gramedia, 1987), 91-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian dari mereka masih memiliki standar moral dan etika yang berorientasi untuk berkuasa dan mengelola kekuasaan dengan cara-cara yang lebih terhormat. Mereka itu menjadikan agama bukan semata-mata sebagai komoditas politik, praktek dominasi dan pencarian legitimasi, melainkan untuk merepresentasikan kesadaran dan kesalehan religiusitasnya. Dengan membawa serta dimensi etik agama dalam perpolitikan, mereka justru berkepentingan agar agama mampu mewarnai dunia politik agar lebih berkeadaban. Bila agama menjadi etika politik, kekuasaan dan kedudukan lebih dipandang sebagai 'amanah' dan 'ibadah' yang wajib dipertanggungjawabkan.[13]

Dalam kaitan itu, menarik untuk dilakukan penyelaman lebih mendalam perihal pergulatan Parpol dalam melaksanakan pendidikan politik berdimensi religius. Partai NasDem, merupakan salah satu Parpol yang memiliki visi ideal kebangsaan yang terkenal dengan jargon khasnya Restorasi Indonesia. Gagasan ini berkaitan erat dengan gerakan yang dilakukan Partai NasDem untuk memulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi pemerintahan Indonesia pada cita-cita Proklamasi 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.[14]

Usaha Partai NasDem untuk dapat mewujudkan gagasan besarnya itu, tentu tidak mudah dilakukan. Dibutuhkan kader-kader politik yang memiliki kemampuan dalam memahami, menterjemahkan, dan membumikan cita-cita

---

[13] Azyumardi Azra, *Kesalehan Priyayi Jawa: Perspektif Kekuasaan,* dalam Zainuddin Maliki, "Agama Priyayi, Makna Agama di Tangan Elit Penguasa" (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004), xxvii-xxix.

[14] Manifesto Partai NasDem (Jakarta, 26 Juli 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partainya ke dalam kehidupan publik. Pendidikan politik dipilih Partai NasDem sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan impiannya itu. Sebagaimana pendidikan pada umumnya, esensi pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai NasDem mengacu pada usaha-usaha transformatif potensialitas (al-taqāh al-quswā) manusia yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan potensi peserta didik agar memiliki kecakapan (intelektual, spiritual, dan etika-moral) yang pada gilirannya dapat berperan penting dalam membentuk budaya dan peradaban suatu bangsa.[15]

Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Partai NasDem dalam prakteknya, tidak hanya dilaksanakan di tingkat nasional, melainkan juga regional (provinsi) dan bahkan lokal (kabupaten). Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Timur yang menjadi tempat penelitian ini, tercatat sebagai salah satu partai yang selama ini dikenal aktif menyelenggarakan pendidikan politik kepartaian bagi kader-kadernya. Selama periode kepemimpinan Effendy Choirie misalnya, Partai NasDem Jawa Timur telah melangsungkan kurang lebih 85 kali kegiatan pendidikan politik, terdiri dari 4 kali Sekolah Legislatif, 39 kali Sekolah kader, dan 42 kali pertemuan-pertemuan dalam sejumlah kegiatan pendidikan kepartaian.[16]

Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai NasDem Jawa Timur tidak sebatas berisi hal-hal yang berhubungan dengan persoalan politik kekuasaan, kebangsaan dan kenegaraan, tanpa dikaitkan dengan aspek

---

[15] Moh Suardi, *Pengantar Pendidikan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta, PT. Indeks), 71; Cholisin, *Konsolidasi Demokrasi Melalui Pengembangan Karakter Kewarganegaraan Jurnal Civics* (2004), Vol. 1, No. 1, Juni, 14-28.

[16] Dokumentasi Partai NasDem Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberagamaan (religiusitas). Sebagai Parpol yang tidak masuk berlatar belakang Islam,[17] Partai NasDem menghendaki agar kader-kader terdidiknya tidak hanya memiliki karakter nasionalisme demokrat, melainkan juga religius. Dalam cita-citanya, Parpol ini menggambarkan demokrasi Indonesia berbasis kewarganegaraan yang kuat, nasionalisme religius dalam bingkai kebhinekaan. Dalam manifesto politiknya, Parpol ini menegaskan bahwa:

> Partai NasDem mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang yang menjadi tempat persandingan keberagaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan dan kebebasan dengan kesejahteraan. Partai NasDem mencita-citakan demokrasi berbasis warga negara yang kuat, yang terpanggil untuk merebut satu masa depan yang gemilang dengan keringat dan tangan sendiri. Partai NasDem berdiri atas nama gagasan sosial demokrasi yang mengedepankan kehadiran negara dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Partai NasDem berdiri untuk membangun politik warga negara, keberagaman sesuai dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.[18]

Dipilihnya Parpol NasDem Jawa Timur sebagai lokus penelitian bukan tanpa pertimbangan yang cukup mendasar. Posisi peneliti sebagai bagian dari kader Parpol NasDem Jawa Timur, tentu memahami betul bagaimana pergulatan internal partai dalam menggagas dan melancarkan aktivitas pendidikan politik berdimensi agama.

Tidak sedikit pegiat partai yang memiliki visi ideal dan berkepentingan untuk merealisasikannya dalam aktivitas kepartaian. Hal ini sebelum berubah

---

[17] Jamhari mencirikan tiga tipe partai berlatar belakang Islam. *Pertama*, partai yang menginginkan penggunaan Islam sebagai asas dan memperjuangkan nilai-nilai keislaman. *Kedua*, partai yang berasaskan Pancasila, tetapi tetap mempertimbangkan konstituen tradisional Islam. *Ketiga*, partai yang memiliki hubungan khas dengan kalangan muslim, tetapi tidak membatasi diri pada umat Islam dan kepentingan khasnya. Jubair Situmorang, 246.

[18] Manifesto Partai NasDem, (Jakarta, 26 Juli 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

status menjadi Parpol, NasDem merupakan organisasi *civil society*[19] besar yang berambisi untuk melakukan perubahan sosial-politik.[20] Restorasi Indonesia menjadi manifesto politik yang muncul sejak NasDem berposisi sebagai organisasi *civil society* dan terus dilanjutkan di saat ia berposisi sebagai Parpol. Artinya, posisinya perpol dewasa ini merupakan transformasi dari agen komunitas perubahan sosial. Begitupun pegiatnya, tentu akarnya tidak didasarkan dan dibentuk oleh dunia politik.

Parpol NasDem juga berkepentingan untuk meneguhkan citra dirinya sebagai Parpol nasionalis yang tetap memegang teguh nilai-nilai religius. Namun NasDem bukanlah Parpol agama (dilihat dari asas, tujuan dan basis massanya), melainkan yang haluan ideologinya sebenarnya Nasionalisme-Demokrat. Meski demikian, Parpol ini berkepentingan pula untuk melengkapi *brand*/karakter kepartaiannya dengan citra religius. Kenyataan bahwa masyarakat Indonesia adalah warga negara yang religius, maka pelabelan semacam itu, tampaknya menjadi suatu keniscayaan. Dengan *double branding* tersebut, Parpol NasDem, sebagai *new comer* dalam kancah perpolitikan Indonesia pasca reformasi, dapat menarik simpati, empati dan pada akhirnya dukungan dari berbagai kalangan baik kalangan nasionalis maupun kalangan religius.

---

[19] Secara umum, *civil society* dapat dipahami sebagai ruang yang terletak antara negara di satu pihak, dan masyarakat di pihak lain. Dalam ruang tersebut terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. Affan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 177-180.

[20] Bagaimanapun peran-peran transformasi dan reformasi sosial-politik demokratis dan pelonggaran berbagai kekangan otoriter, karena kerap diasosiasikan dengan kepentingan *civil society*. Vedi R. Hadiz, *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto* (Jakarta: LP3ES, 2005), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Parpol NasDem Jawa Timur tercatat sebagai salah satu DPW yang sangat pro-aktif dalam menindaklanjuti gagasan ideal dari Parpol NasDem tersebut. Banyaknya kader, politisi dan pegiat Parpol yang berasal dari kalangan santri, memberi nuansa tersendiri pada aktivitas kepartaian, terkhusus pendidikan politik partai.21 Sekolah legislatif dan sekolah kader merupakan salah satu bentuk formal dari pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Parpol NasDem Jawa Timur. Dalam prakteknya, aktivitas pendidikan politik itu melibatkan ajaran, nilai, dan aspirasi dari agama Islam dengan karakternya yang moderat. Hal ini bisa dimaklumi mengingat kebanyakan kader, politisi dan pegiat Parpol dari kalangan santri itu berlatar Islam tradisionalis dan modernis.

Selain pendidikan formal, Parpol NasDem Jawa Timur juga menyelenggarakan berbagai bentuk pendidikan non-formal yang kental nuansa religiusitasnya. Pelaksanaan pengajian, bakti sosial, dan aktivitas perpolitikan yang disertai dengan penggunaan atribut, simbol, dan ritual keagamaan, merupakan bagian dari bentuk-bentuk pendidikan politik berdimensi agama. Bagaimanapun, aktivitas-aktvitas itu dimaksudkan untuk salah satunya, menyampaikan pesan-pesan politik ataupun mengedukasi kader dengan mendasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Bagi Parpol NasDem, agama diposisikan sebagai sumber etik, moral, dan nilai yang dapat mengarahkan perpolitikan kader secara lebih baik.

Dalam konteks sosial-politik Jawa Timur, agenda pendidikan politik

[21] Dokumentasi Partai NasDem Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdimensi religius yang diselenggarakan oleh Parpol NasDem, tidak bisa dilepaskan dari kenyataan empirik bahwa Jawa Timur adalah kawasan santri. Karena itulah, agar Parpol ini bisa diterima oleh sebagian besar warga masyarakat Jawa Timur, maka diperlukan citra Parpol yang religius pula. Tentu saja, religiusitas yang disematkannya bukanlah religiusitas yang ideologis melainkan religiusitas yang moderat. Dalam hal ini, religiusitas yang dikonstruk oleh Parpol NasDem berbeda dengan religiusitasnya Parpol-Parpol Islamis seperti PKS, Islam politik model PPP, dan bahkan religiusitasnya Parpol berbasis massa Islam seperti PKB dan PAN.

Penelitian ini secara spesifik, mengulas dinamika pergulatan Parpol NasDem Jawa Timur dalam menyelenggarakan pendidikan politik berdimensi religius bagi kader-kadernya. Sebagai Parpol sekuler, upaya Partai NasDem dalam membawa dimensi-dimensi keagamaan dalam praksis pendidikan politiknya, menjadi isu kajian yang cukup menantang. Penelitian berargumen bahwa ada hal-hal yang tidak sebatas pragmatis, melainkan juga idealistik yang berada di balik praksis pendidikan politik berdimensi religius yang diselenggarakan Parpol NasDem. Alih-alih bertujuan untuk melembagakan praktek dominasi dan pencarian legitimasi, penggunaan sumber-sumber agama dalam praksis pendidikan politik oleh Parpol NasDem berorientasi pula untuk mentransmisikan dan mentransformasikan visi ideal kepartaian yang terkenal dengan jargon utamanya, Restorasi Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Indentifikasi Masalah

Berdasarkan kajian pendahuluan maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa hal diantaranya :

a. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh Parpol selalu bersinggungan langsung maupun tidak langsung, dengan dimensi sosialisasi politik, termasuk di dalamnya pendidikan politik.
b. Terdapat pesan-pesan tertentu yang hendak disampaikan oleh Parpol kepada publik. Ide, nilai, norma, simbol dan atribut yang dianggap sebagai sesuatu yang ideal dan baik yang melekat *(embeded)* pada diri dan menyertai setiap aktivitas kepartaian, merupakan bentuk dari pesan politik tersebut.
c. Kampanye pemilu legislatif, debat kandidat dalam pemilihan kepimpinan nasional, aksi sosial tanggap darurat dalam membantu korban bencana alam, pengajian dan berbagai aktivitas yang dilaksanakan oleh Parpol, dapat dikategorikan sebagai bentuk Pendidikan politik.
d. Pendidikan partai politik yang berbentuk agenda-agenda ritual keagamaan.
e. Kader NasDem Jawa Timur memiliki latarbelakang sosial, ekonomi, budaya, etnik, Pendidikan, dan agama yang plural.

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, pendidikan politik dibatasi pada :

a. Aktivitas-aktivitas Parpol yang dirancang secara formal maupun non-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

formal untuk mentransmisikan dan sekaligus mentransformasikan pesan-pesan politik kepada para kadernya. Muara dari aktivitas edukatif ini tidak lain adalah terbentuknya kader-kader Parpol yang memiliki pemahaman, kesadaran, sikap dan perilaku dalam mendukung berfungsinya sistem perpolitikan yang demokratis.

b. Begitu banyaknya aspek yang terkandung dalam pendidikan politik, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penggalian ide, gagasan atau wacana pemikiran politik, pilihan format dan strategi yang dikembangkan oleh Parpol NasDem Jawa Timur.

c. Basis intelektual (pengetahuan) yang ditransmisikan oleh Parpol, kapasitasnya sebagai agen pendidikan politik, tentunya cukup beragam. Di Indonesia dengan negara penduduk Muslim terbesar di dunia, agama menjadi salah satu sumber pengetahuan (di samping legitimasi) penting yang dimanfaatkan oleh setiap Parpol dalam mendukung aktivitas pendidikan politiknya.

d. Aspek-aspek keagamaan yang penting dipertimbangkan dalam penelitian ini meliputi paham, pemikiran, bahasa dan ritus. Dimensi-dimensi keagamaan ini dimainkan atau diadopsi oleh Partai NasDem Jawa Timur dalam praksis pendidikan politiknya, merupakan persoalan yang menarik untuk ditelusuri lebih jauh dan mendalam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada dimensi religius dalam pendidikan politik partai NasDem Jawa Timur. Secara rinci, fokus dan pertanyaan penelitian ini diuraikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praksis pendidikan politik yang diselenggarakan oleh agen-agen kepengurusan Partai NasDem Jawa Timur?
2. Bagaimana dimensi-dimensi religius yang terkandung dalam pendidikan politik yang diselenggarakan oleh agen-agen kepengurusan Partai NasDem Jawa Timur?
3. Bagaimana implikasi dari penerapan dimensi religius dalam pendidikan politik yang diselenggarakan oleh agen-agen kepengurusan Partai NasDem Jawa Timur terhadap partai dan kadernya?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai fokus dan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menemukan praksis pendidikan politik yang dilaksanakan oleh agen-agen kepengurusan Partai NasDem Jawa Timur.
2. Untuk menganalis dan menemukan dimensi-dimensi religius yang terkandung dalam pendidikan politik yang diselenggarakan agen-agen kepengurusan oleh Partai NasDem Jawa Timur.
3. Untuk menganalis dan menemukan implikasi dari penerapan dimensi religius dalam pendidikan politik yang diselenggarakan oleh agen-agen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepengurusan Partai NasDem Jawa Timur terhadap partai dan kader-kadernya.

E. Kegunaan Penelitian

Pendidikan politik berdimensi agama merupakan persoalan yang menarik untuk dielaborasi lebih mendalam. Kebanyakan studi yang ada lebih banyak memahaminya dari segi komodifikasi politik yang bermuara pada penguatan legitimasi dan dominasi Parpol, perspektif yang lebih bersifat Weberian menjadi penting untuk dipertimbangkan. Bagaimanapun, aktivitas pendidikan yang dirancang secara sengaja oleh Parpol NasDem Jawa Timur dengan posisi sebagai Parpol baru dengan haluan Nasionalisme-Demokratik, memiliki motif dan tujuan yang tidak sepenuhnya bersifat materialistik. Artinya, ada dimensi religius yang akan menjadikan Parpol ini memiliki citra dan legitimasi nasionalisme-demokratik-religius sehingga memiliki daya pikat dan pada akhirnya didukung oleh sebagian besar warga negara, adalah satu keniscayaan.

Namun demikian, di saat bersamaan, Parpol ini juga dituntut untuk ikut bertanggung jawab dalam mentransmisikan dan mentransformasikan visi ideal kepolitikannya itu, pertama-tama dan paling utama, kepada kader-kadernya. Tidak sebatas berhenti di situ, Parpol NasDem diyakini betul berkepentingan pula dalam mendorong kader-kader potensialnya untuk berpartisipasi dalam mentransmisikan dan mentransformasikan gagasan ideal kepolitikannya itu kepada warga negara pada umumnya.

Muara dari praksis pendidikan politik kader yang diinisiasi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan Partai NasDem yang berkorelasi pula dengan perwujudan cita-cita politik kebangsaan, yakni memperkuat Indonesia sebagai negara-bangsa (nation-state) demokratis berdasarkan Pancasila.

Dengan memahami upaya Parpol NasDem Jawa Timur dalam melaksanakan aktivitas pendidikan politik berdimensi keagamaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penting bagi peningkatan mutu keilmuan dalam pokok persoalan religiusitas pendidikan politik dan sekaligus bagi kehidupan praktis (praktek perpolitikan) di Indonesia pasca jatuhnya rezim Suharto. Lebih jelasnya, detil manfaat penelitian bagi kedua aspek tersebut (teoretis dan praktis) dapat dikemukakan di bawah ini.

1. Kegunaan Teoretis

Kajian mengenai dimensi religius dalam pendidikan politik Partai NasDem ini ditempatkan dalam ranah disiplin *Islamic studies.* Pendidikan Islam merupakan salah satu sub-disiplin yang masuk dalam area studi keislaman. Adakah kaitan antara topik dengan rumpun disiplin keislaman dimaksud? Apa pula yang dapat disumbangkan oleh kajian mengenai topik ini terhadap pengembangan keilmuan Pendidikan Islam? Tulisan ini berpandangan bahwa topik yang diangkat tetap memiliki relevansi dan kontribusi penting terhadap sub-disiplin keilmuan pendidikan Islam pada khususnya dan studi keislaman pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana dipahami bersama bahwa ada tiga diskursus kajian keislaman. Menurut Eliade ada tiga cakupan yang dianggap sebagai kajian Islam.[22] *Pertama*, Studi normatif agama Islam. Pada umumnya kajianya dilakukan oleh umat Islam untuk memperoleh pengetahuan tentang kebenaran agama. Ini menyiratkan studi tentang ilmu agama Islam: tafsir *Al-Qur'ān* (tafsir), ilmu tradisi (*'ilm al-hadiṭs*), jurisprodensi (fiqh), dan teologi metafisik (kalam). Studi normatif ini juga dapat dilakukan oleh orang-orang non-Muslim, seperti orang-orang Kristen yang ingin melakukan dakwah di kalangan umat Islam atau untuk mengembangkan teologi agama-agama di mana suatu tempat tertentu ditugaskan Islam.

Kedua, Studi non-normatif agama Islam yang biasannya dikaji di Universitas-universitas. Pada umumnya kajiannya mencakup apa yang dianggap oleh umat Islam sebagai Islam yang benar (khususnya ilmu agama Islam) dan apa yang dianggap sebagai Islam yang hidup (ekspresi keagamaan faktual umat Islam). Agama studi non-normatif ini dapat dilakukan baik oleh Muslim maupun non-Muslim. Yang terpenting mematuhi aturan umum penelitian ilmiah. Ini adalah penelitian yang umumnya disebut "Islam studies".

Ketiga, Studi non-normatif tentang aspek-aspek Islam dari budaya dan masyarakat Muslim dalam arti yang lebih luas tidak diarahkan ke Islam. Dibutuhkan konteks yang lebih luas untuk dipertimbangkan, mendekati hal-hal yang Islami dari sudut pandang sejarah dan sastra atau antropologi

[22] Mircea Eliade, *The Encyclopedia of Religion*, vol. 7 (New York: Macmillan Press, 1987), 457-458.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budaya dan sosiologi, dan bukan dari perspektif studi agama secara khusus.

Penelitian ini nampaknya merupakan kajian keislaman non normatif yang tentu dilakukan oleh orang muslim. Kajian pada penelitian ini akan mematuhi aturan keilmiahan sebab memang merupakan bagian dari kajian keislaman universitas. Jadi sekilas penelitian ini masuk pada point kedua dalam pembahasan di atas.

Namun jika dipahami lebih luas, kajian dalam penelitian ini masuk pada klasifikasi ke tiga. Sebab penelitian ini adalah kajian non-normatif tentang aspek-aspek Islam dari budaya dan masyarakat Muslim dalam arti yang lebih luas tidak diarahkan ke Islam. Penelitian ini ingin memahami dimensi religius (keislaman) dalam pendidikan politik kepartaian, bagaimanapun, berurusan dan beririsan dengan isu-isu pendidikan Islam. Pendidikan politik sendiri dapat dimasukkan ke dalam ruang lingkup pendidikan Islam. Saat bersamaan, aktivitas perpolitikan Parpol, bersinggungan pula dengan persoalan-persoalan keagamaan dan kependidikan dalam komunitas umat Islam.

Sedangkan sumbangan yang dinilai cukup penting yang dapat diberikan oleh kajian ini antara lain adalah diperolehnya konstruksi pemikiran yang bersifat konsepsional-teoretis mengenai kaitan antara agama dan pendidikan politik kepartaian. Temuan penelitian diyakini dapat mengembangkan perspektif konstruksionisme mengenai bagaimana aktor-aktor politik itu merumuskan gagasan idealnya dan mengimplementasikannya dalam praktik pendidikan politik. Dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelami dimensi ideasional yang hampir pasti dimiliki dan menjadi pertimbangan oleh para aktor untuk bertindak, kajian ini dinilai bisa berkontribusi dalam melengkapi cara pandang yang lebih bercorak strukturalisme seperti teori legitimasi, kapitalisasi atau komodifikasi agama untuk kepentingan politik.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diyakini dapat memberikan sumbangan berharga untuk kepentingan yang bersifat praktis. Disadari bahwa pendidikan politik tidak akan berhasil tanpa mempertimbangkan dan melibatkan agama. Dalam konteks Indonesia –suatu negara dengan penduduk mayoritas umat beragama (terutama Muslim), pertimbangan-pertimbangan keagamaan menjadi mutlak untuk tidak dikesampingkan. Ibarat pisau bermata dua, agama sendiri dapat digunakan untuk kepentingan negatif seperti legitimasi bagi aktivitas perpolitikan sebagaimana dimanfaatkan oleh kalangan radikalis dan teroris.

Di sisi lain, agama dapat didayagunakan untuk kepentingan yang lebih positif, sebagai sumber nilai, etik, dan pengetahuan dalam mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih demokratis. Tentunya tujuan yang kedualah yang penting dan secara terus menerus untuk disosialisasikan. Parpol yang secara *inherent* memiliki fungsi dan peran untuk melakukan sosialisasi politik, penting untuk ikut mendayagunakan energi positif dari agama. Penggunaan agama secara konstruktif oleh Parpol akan berdampak konstruktif pula dalam pembangunan politik yang demokratis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kerangka Teoretik

Aktivitas pendidikan politik yang mengusung aspek-aspek keagamaan yang diselenggarakan oleh Parpol NasDem Jawa Timur, pastinya melibatkan berbagai proses sosial-politik yang kompleks. Secara subjektif, pegiat Parpol pasti memiliki pertimbangan tersendiri (baik idealis maupun politis) dalam memahami dan memilih aspek-aspek keagamaan apa saja yang penting untuk ditawarkan dalam pendidikan politik kepartaian. Dalam perspektif konstruktivisme, penghadiran dimensi religius dalam pendidikan politik itu, tidak lahir dari alam kesadaran aktor tanpa kaitan interaksionalnya dengan berbagai hal yang melingkupinya seperti konteks sosial, kultural dan politik baik di internal Parpol NasDem maupun eksternal, terutama Jawa Timur.

Sekalipun konstruktivisme mengandaikan bahwa aktor memiliki peran yang cukup besar untuk menentukan pilihan tindakan sosialnya (memasukkan dimensi religius dalam praksis pendidikan politik kepartaian), namun dalam prakteknya aktor harus bernegosiasi dengan berbagai hal yang potensial menjadi penghambatnya. Secara objektif, pegiat Parpol dihadapkan pada kenyataan bahwa Parpol NasDem di Jawa Timur memiliki kader dan konstituen yang plural, terutama dari latar sosial-keagamaan. Sebagai partai Nasionalis-Demokrat-Religius, Parpol NasDem membutuhkan sumbangan ajaran dan nilai agama yang sesuai dengan platform-nya dan sekaligus menutup rapat-rapat celah bagi munculnya dominasi agama tertentu. Pada akhirnya, konstruksi pemikiran dan tindakan aktor politik akan sangat tergantung pada hasil negosiasi dengan berbagai dimensi struktural (dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kultural) dalam isntitusi kepartaian NasDem.

Bertolak dari kenyataan di atas, penelitian ini lebih mempertimbangkan penggunaan paradigma strukturasi yang dikembangkan oleh Anthony Giddens. Melalui paradigma ini, pelibatan aspek-aspek keagamaan dalam pendidikan politik oleh Parpol NasDem dipahami dalam kerangka dialektis antara agen (aktivis dan politisi santri) dan struktur. Paradigma ini dinilai memiliki kelebihan tersendiri, terutama dalam menghindarkan diri dari kecenderungan teori-teori sosial yang terperangkap dalam fundamentalisme subyektif ataupun fundamentalisme obyektif.[23]

Hubungan antara agen dan struktur ditegaskan sebagai hubungan antara aktor atau pelaku dengan struktur yang terdiri atas aturan dan sumber daya. Struktur tersebut pada satu sisi membatasi dan mengekang (constraining), namun pada sisi lain dapat memberdayakan (enabling). Menurut Giddens, hubungan antara aktor dengan struktur merupakan bentuk dualitas (bukan dualisme) dimana antara keduanya tidak terpisahkan namun justru saling mempengaruhi.

Menurut Priyono, agen atau pelaku adalah orang-orang yang kongkrit dalam arus kontinum tindakan dan peristiwa di dunia. Struktur adalah aturan dan sumber-daya (rules and resources) yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktek sosial. Konsep ruang dan waktu menurut Giddens bersifat konstitutif, yakni dengan adanya ruang dan waktu maka individu melakukan

[23] Kecenderungan tersebut diklasifikasikan oleh Ritzer sebagai ilmu yang berparadigma ganda yakni paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial dan paradigma perilaku sosial. Lihat; George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan dan pengorganisasian masyarakat.[24]

1. Teori Strukturasi

Problem hubungan antara manusia dan masyarakat atau tindakan dan struktur sosial berada pada inti persoalan teori sosial dan filsafat ilmu sosial.[25] Perdebatannya berkaitan lebih penting mana antara individu dan struktur. Biasanya, beberapa pemecahan yang diambil dititikberatkan pada satu istilah dengan cara mengabaikan yang lain, baik struktural sosial yang diambil sebagai objek pokok penerapan analisanya dan alat yang secara efektif justru berlebihan. Atau individu-individu yang hanya dilihat sebagai unsur pokok dari kelompok aksi dan reaksi sosial. Dalam teori sosial terdapat pertanyaan yang kadang diajukan sebagai keinginan kuat untuk membangun analisa yang mapan, seperti pertanyaan bagaimana dan dengan cara apa tindakan yang dihasilkan agen-agen individu berkaitan dengan ciri-ciri struktural masyarakat yang didiami.[26]

Teori Strukturasi sebagai bagian dari contoh hasil perdebatan atas hubungan agen-struktur (di Eropa), dan hubungan makro-mikro (di Amerika).[27] Giddens menawarkan konseptualisasi ulang antara makro dan mikro berkaitan dengan cara bagaimana interaksi dalam konteks pertemuan muka dilibatkan secara struktural dalam sistem-sistem perentangan ruang dan waktu yang luas, dengan kata lain, bagaimana sistem-sistem seperti ini

---

[24] Lihat, B. Herry Priyono, *Anthony Giddens*, 19-20.
[25] John. B Thompson, *Analisis Ideologi; Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia.* Terjemahan oleh Haqqul Yakin (Yogyakarta: Ircisod, 2003), 56.
[26] John. B Thompson, *Analisis Ideologi*, 238.
[27] George Ritzer dan Douglas Goodman, *Teori Sosiologi Modern*. Terjemahan Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2004), 203:471-505.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjangkau sektor-sektor luas dari ruang dan waktu.[28] Teori Strukturasi muncul berasal dari kekosongan teori aksi dalam ilmu-ilmu sosial.[29] Isu utama yang diperdebatkan adalah seputar bagaimana konsep-konsep tindakan, makna dan subjektivitas harus dijelaskan dan bagaimana kaitannya dengan gagasan-gagasan tentang struktur dan kekangan. Jika sosiologi interpretatif didasarkan atas imperialisme subjek, fungsionalisme dan strukturalisme mengetengahkan imperialisme objek sosial. Salah satu tujuan utama dalam merumuskan teori Strukturasi adalah mengakhiri masing-masing imperialisme ini.[30]

Giddens memulai pikirannya dengan mengkritik Fungsionalisme dan Strukturalisme. Ada 3 kritik Giddens atas Fungsionalisme, pertama, Fungsionalisme menghilangkan fakta bahwa anggota masyarakat bukanlah orang- orang dungu. Individu bukan robot yang bergerak berdasarkan naskah. Kedua, Fungsionalisme merupakan cara berfikir yang mengklaim bahwa sistem sosial mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan ketiga, Fungsionalisme membuang dimensi waktu dan ruang dalam menjelaskan proses sosial. Sementara, terkait Strukturalisme, Giddens menganggap Strukturalisme terlalu menyingkirkan subjek.[31]

Strukturalisme dan Fungsionalisme menekankan secara kuat

---

[28] Anthony Giddens, *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial* Masyarakat. Terjemahan oleh Maufur dan Daryanto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010) xxvii.

[29] Anthony Giddens, *Problematika Utama dalam Teori Sosial; Aksi, Struktur, dan Kontradiksi dalam Analisis Sosial*. Terjemahan oleh Dariyatno (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), xiii.

[30] Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*, 3.

[31] B. Herry Priyono,. *Sebuah Terobosan Teoritis. Dalam Basis Nomor 02. Tahun ke-49*, Januari-Februari 2000, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keunggulan keseluruhan sosial atas bagian-bagian individualnya. Strukturalisme sangat menentang tradisi Hermeneutik yang dianggap memberi kekuasaan subjektivitas sebagai pusat kebudayaan dan sejarah.[32] Begitu juga dengan Fungsionalis, Fungsionalis menentang tradisi sosiologi interpretatif. Sebab, dalam sosiologi interpretatif, tindakan dan makna mendapat posisi utama dalam penjelasan tentang perilaku manusia. Konsep-konsep struktural tidak dianggap begitu penting dan tidak ada banyak pembahasan tentang kekangan. Akan tetapi, Fungsionalisme dan Strukturalisme lebih diutamakan ketimbang tindakan dan sifat-sifat mengekang dari struktur sangatlah ditekankan.

Fungsioanalisme dan Strukturalisme barangkali merupakan tradisi besar intelektual yang terkemuka dalam teori sosial sepanjang tiga atau empat puluh tahun yang silam. Baik Fungsionalisme dan Strukturalisme, jika ditelusuri, akar pikirannya masih kembali ke Durkheim. Walaupun demikian, dalam menyusun Teori Strukturasi, Giddens juga meminjam beberapa term Strukturalisme dan Fungsionalisme. Biarpun teori Strukturasi berusaha mencari titik temu antara hubungan agen-struktur atau makro-mikro, teori Strukturasi masih bernuansa memberi tekanan pada agen. Agen Giddens lebih banyak mempunyai kekuasaan, Hal ini berbeda dengan teori yang dikembangkan oleh Bourdieu.

Bourdieu lebih menekankan Habitus, sehingga nuansa teori yang

[32] Ibid.,3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibangunnya lebih mekanis.[33] Dalam menyusun Teori Strukturasi, Giddens sedikit banyak berhutang pada gagasan-gagasan Strukturalisme. Hal tampak dalam catatan-catatan Giddens[34] atas Strukturalisme, yaitu (1) Teori Strukturalis menunjukkan pentingnya penciptaan ruang melalui perbedaan dalam proses konstitusi bahasa dan masyarakat, (b) pemikiran Strukturalis berupaya memasukkan dimensi waktu ke dalam pusat analisis itu sendiri, (c) pemikiran strukturalis menunjukkan bahwa jarak dan waktu dalam beberapa aspek pentingnya sama dengan jarak etnografis, (d) Teori Strukturalis menawarkan kemungkinan pemahaman yang lebih memuaskan tentang totalitas sosial daripada yang ditawarkan oleh Fungsionalisme.

Menurut Fungsionalisme, masyarakat bisa di potret sebagai pola hubungan diantara bagian-bagian, sementara Teori Strukturalis mengajukan gagasan bahwa masyarakat seperti bahasa, sebaiknya dipandang sebagai sistem maya[35] dengan sifat berulang, dan (e) dalam Teori Strukturalisme ada upaya gerakan untuk melampaui dualisme subjek/objek.

Sementara itu, Giddens[36] juga memberikan catatan atas gagasan Levi-Strauss, yaitu (1) struktur bermakna sebuah model yang dibangun oleh pengamat, dan menurut kata-katanya tidak ada sangkut pautnya dengan dunia empiris. Giddens berpendapat struktur memiliki eksistensi maya, (2) strukturalisme Levi-Strauss kekurangan konsep stuktur sebagai strukturasi, (3) pendekatan Levi-Strauss tampaknya ambigu ketika menganggap struktur

[33] George Ritzer dan Douglas Goodman, *Teori Sosiologi,* 541.
[34] Anthony Giddens, *Problematika Utama,* 68-73.
[35] Giddens menggambarkan struktur sebagai tatanan virtual yang ada di benak agen. Tampaknya konsep ini diambil dari kaum Strukturalis.
[36] Anthony Giddens, *Problematika Utama,* 108-111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai relasi diantara serangkaian unsur atau oposisi simpulan. Giddens tidak memandang struktur, dalam pengertiannya yang paling dasar, merujuk pada bentuk-bentuk himpunan, namun lebih mengacu kepada aturan dan sumber daya, yang dalam reproduksi sosial mengikat waktu, (4) gagasan tentang struktur yang digunakan oleh Levi-Strauss berkaitan dengan kelemahan dasar, dalam kaitannya penciptaan ruang semantik praksis. Berbicara secara ketat itu tidak ada sesuatu yang disebut aturan transformatif; semua aturan sosial berciri transformasional, dalam pengertian bahwa struktur tidak termanifestasikan ke dalam empiris aspek-aspek social, (5) jikalau struktur hadir (dalam ruang-waktu) hanya dalam wujud sekilas, maka struktur pasti meliputi acuan ke fenomena yang sangat asing bagai upaya Strauss untuk mengatasi formalisme dengan menekankan bentuk sebagai perwujudan isi; fenomena yang berkaitan dengan kekuasaan.

Pada sisi lain, Interaksionalisme simbolik sangat menitikberatkan pandangan tentang kehidupan sosial sebagai sebuah prestasi aktif dari para aktor yang berpengetahuan, bertujuan, dan interaksionisme simbolik dikaitkan dengan teori subjek, seperti yang diuraikan Mead bahwa asal usul sosial bagi kesadaran refleksif. Interaksionalisme simbolik diyakini sebagai sosiologi mikro yang berurusan dengan hubungan antar-pribadi, skala kecil, sedangkan tugas-tugas sosiologi makro yang lebih luas ditangani oleh fungsionalisme.[37]

Bagi Giddens, apa yang dipaparkan interaksionalisme simbolik tidak

[37] Anthony Giddens, *Problematika Utama*, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memadai untuk menjelaskan perilaku manusia. Bagi Giddens, pelaku manusia, pertama, harus dikaitkan dengan teori tentang subjek yang beraksi, dan kedua harus menempatkan aksi ke dalam ruang dan waktu sebagai arus perilaku yang terus mengalir, bukannya memperlakukan tujuan, alasan, dan lain-lain sebagai sesuatu yang dihimpun bersama-sama.[38] Perilaku aktor di dalam masyarakat harus disikapi sebagai hasil dari perpaduan antara determinan sosial dan psikologis, ketika determinan sosial mendominasi determinan yang dialamatkan kepada unsur-unsur normatif.[39]

Giddens memahami teori subjek mencakup model stratifikasi kepribadian yang disusun berdasarkan tiga lapis hubungan, yaitu alam tak sadar, kesadaran praktis, dan kesadaran diskursif. Inilah yang nantinya menjadi fundamental Teori Strukturasi. Giddens berusaha melintasi orientasi yang bermacam-macam itu dengan memikirkan kembali tujuan, dan hubungan antara tindakan dan struktur. Term yang digunakan adalah dualitas struktur. Melalui dualitas struktur, Giddens memaksudkan bahwa struktur sosial (keduanya) terdapat dalam lembaga sosial dan pada saat yang sama struktur tersebut menjadi aturan yang sangat sederhana. Setiap tindakan produksi secara bersamaan berarti tindakan reproduksi: struktur yang memungkinkan suatu tindakan dikembangkan.[40]

Bagi Giddens, objek utama ilmu sosial bukanlah peran sosial seperti dalam fungsionalisme parsons, bukan kode tersembunyi seperti dalam

[38] Anthony Giddens, *Problematika Utama,* xiv.
[39] Ibid., 87.
[40] John. B Thompson, *Analisis Ideologi*, 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

strukturalismenya Levi-Strauss, bukan juga keunikan-situasional seperti dalam Interaksionisme Goffman.[41]

Menurut Teori Strukturasi, domain kajian ilmu-ilmu sosial adalah praktik-praktik sosial yang terjadi disepanjang ruang dan waktu. Maksudnya, aktivitas-aktivitas sosial itu tidak dihadirkan oleh para aktor sosial, melainkan terus menerus diciptakan oleh mereka melalui sarana-sarana pengungkapan diri mereka sebagai aktor. Melalui aktivitas-aktivitas mereka, para agen memproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan keberadaan aktivitas-aktivitas itu.[42] Konsep Teori Strukturasi terletak pada ide-ide mengenai agen, struktur, sistem, dan dualitas struktur.[43]

2. Agen dan Tindakan

Banyak teori sosial, terutama yang berhubungan dengan sosiologi struktural, memandang agen tidak banyak memiliki pengetahuan, padahal yang benar sebaliknya.[44] Bagi Giddens, individu adalah agen yang memiliki pengetahuan banyak *(knowledgeable agent*) dan kemampuan memahami tindakannya sendiri. Mereka bukan lapisan budaya atau para penopang hubungan-hubungan sosial belaka, akan tetapi mereka adalah para aktor terampil yang memiliki pengetahuan yang banyak tentang dunia yang mereka geluti.[45]

---

[41] B. Herry Priyono, *Sebuah Terobosan Teoritis, Basis Nomor 02. Tahun ke-49*, Januari-Februari 2000, 6.
[42] Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*, 3.
[43] Gaya italic ditambahkan oleh penulis sebagai penanda kekhasan atau kata kunci teori yang digunakan dalam Teori Strukturasi.
[44] Anthony Giddens, *Teori Strukturalisasi*, xxxiv.
[45] John. B Thompson, *Analisis Ideologi*, 240-241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua aktor sosial adalah teoritisi sosial dan harus seperti itu untuk menjadi agen-agen sosial yang sesungguhnya. Salah satu kontribusi khas dari fenomenologi adalah menunjukkan bahwa (1) beroperasinya kehidupan sosial terus menerus melibatkan kegiatan berteori, (2) bahkan kebiasaan-kebiasaan yang paling bertahan lama atau norma-norma yang paling mapan sekalipun melibatkan perhatian refleksif yang terus menerus dan mendetail. Rutinitas merupakan elemen penting dalam kehidupan sosial; tetapi semua rutinitas, selalu tidak dapat dipastikan dan merupakan pencapaian yang berpotensi mudah hancur.[46] Para aktor awam sendiri adalah para teoritisi sosial yang teoritis. Mereka berperan membentuk aktivitas-aktivitas dan insitusi yang menjadi objek kajian para peneliti sosial atau para ahli ilmuwan sosial, inilah yang dinamakan hermeneutika ganda.

Tafsir pertama dilakukan oleh aktor, sedangkan tafsir kedua dilakukan oleh ahli ilmu sosial. Tidak ada batas yang jelas antara refleksi sosiologis sadar yang dilakukan oleh para aktor awam dan usaha-usaha serupa dari kalangan para ahli. Ilmuwan sosial sama sekali tidak memiliki hak untuk memonopoli teori-teori inovatif maupun penyeledikan-penyelidikan empiris atas apa yang mereka pelajari.[47]

Setiap aktor yang kompeten memiliki pengetahuan yang luas, namun akrab dan halus, tentang masyarakat yang menjadi induknya. Dalam Teori Stukturasi, pengetahuan dipahami dalam istilah kesadaran praktis sekaligus

[46] Anthony Giddens, *Metode Sosiologi Kaidah-Kaidah Baru*. Terjemahan oleh Eka Adi Nugraha dan Wahmuji. 2010. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1993), xvi.
[47] Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*, xxxviii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diskursif, dan setiap aktor individual hanyalah salah satu diantara sekian dalam masyarakat, harus diakui bahwa sesuatu yang diketahui oleh seorang anggota masyarakat yang kompeten mengalami peragaman warna di dalam konteks yang merentang melampaui konteks aktivitas sehari-hari. (3) parameter kesadaran praktis dan diskursif terikat secara spesifik, yang berhubungan dengan sifat aktivitas aktor yang menempati ruang, namun tidak direduksi menjadi sifat.[48]

Aspek tindakan dan agensi yang bermacam-macam merupakan bagian dari apa yang oleh Giddens disebut sebagai model stratifikasi tindakan. Model ini menggambarkan batasan-batasan usaha menganalisis tindakan dengan memfokuskan pada agen individu. Giddens menggambarkan aktor dan tindakannya dalam stratifikasi tindakan seperti pada gambar.

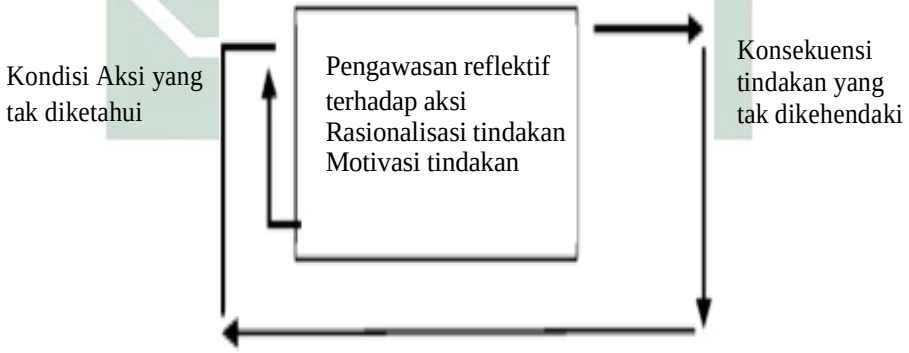

Gambar 1.1
Stratifikasi Tindakan Manusia

Tindakan manusia dimulai dari pengawasan reflektif terhadap perilaku yang mengacu pada sifat intensionalitas atau bertujuan melalui

[48] Anthony Giddens, *Problematika Utama*, 127-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan manusia; aspek ini menekankan kesengajaan sebagai proses. Kesengajaan semacam itu merupakan sifat tetap perilaku manusia, dan tidak menyiratkan bahwa para aktor memiliki tujuan pasti yang disadari sepenuhnya di dalam benak sepanjang berlangsungnya aktivitas mereka.[49]

Pengawasan reflektif atas tindakan merupakan satu unsur tetap dari tindakan sehari hari dan melibatkan tidak hanya perilaku individu, namun juga perilaku dari individu-individu lainnya. Maksudnya, para aktor tidak hanya memonitor secara terus menerus arus aktivitas mereka dan orang lain melakukan hal yang sama, melainkan para aktor juga secara rutin memonitor aspek-aspek baik sosial maupun fisik, dari konteks-konteks tempat dimana mereka bergerak.[50]

Dalam melakukan tindakan, agen dibatasi oleh konsekuensi tindakan-konsekuensi tindakan yang tidak dikendaki *(unintended consequences of action)* atau kondisi-kondisi tindakan yang tidak diketahui *(uncknowledge condition of action)*. Konsekuensi yang tidak disengaja dapat menjadi kondisi-kondisi yang tidak diketahui sepanjang konsekuensi yang tidak disengaja tersebut merupakan pengembangan dari struktur yang akan memungkinkan tindakan selanjutnya.[51]

Sedangkan yang dimaksud dengan rasionalisasi tindakan adalah bahwa para aktor-juga secara rutin dan kebanyakan tanpa perdebatan-mempertahankan suatu pemahaman teoritis yang secara terus menerus

[49] Anthony Giddens, *Problematika Utama*, 95-96.
[50] Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*, 7-8.
[51] John. B Thompson, *Analisis Ideologi*, 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang landasan-landasan aktivitas mereka.[52] Rasionalisasi tindakan merujuk kepada alasan-alasan yang ditawarkan pada agen dalam menjelaskan tindakannya, maka motivasi tindakan merujuk pada motif-motif dan keinginan-keinginan yang mendorong munculnya tindakan itu.[53]

Giddens membedakan antara pengawasan reflektif dan rasionalisasi tindakan dari sisi motivasinya. Alasan mengacu kepada dasar-dasar tindakan, motif mengacu kepada keinginan-keinginan yang mendorongnya. Motivasi mengacu kepada potensi tindakan, bukan kepada cara tindakan yang dilakukan terus menerus oleh agen yang bersangkutan. Aktor kompeten hampir selalu bisa melaporkan secara diskursif maksud-maksud dan alasan-alasan mereka saat sedang melakukan tindakan, mereka tidak mesti bisa melakukan hal yang sama terhadap motif-motif mereka. Gagasan tentang kesadaran praktis, kesadaran diskursif dan motif-motif tidak sadar sangat penting dalam teori Strukturasi. Giddens menawarkan konsep ini dalam rangka mengganti tritunggal psiko analis tradisional, yaitu ego, super ego, dan Id.[54]

Kesadaran diskursif mengandung kemampuan untuk melukiskan tindakan individu dengan kata-kata. Kesadaran praktis meliputi tindakan-tindakan yang diterima begitu saja oleh para aktor, tanpa mampu mengungkapkan dalam kata-kata apa yang sedang mereka lakukan.[55]

---

[52] Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*, 8.
[53] John. B Thompson, *Analisis Ideologi*, 242.
[54] Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*, 8-11.
[55] George Ritzer dan Douglas Goodman, *Teori Sosiologi*, 891.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindakan merupakan sebuah proses berkesinambungan, sebuah arus yang didalamnya memiliki kemampuan introspeksi dan mawas diri yang dimiliki individu sangat penting bagi pengendalian terhadap tubuh yang biasa dijalankan oleh para aktor dalam kehidupan keseharian mereka. Keberlangsungan kehidupan sehari-hari (*durèe of day to day life*) mengalir sebagai arus tindakan disengaja. Namun, tindakan-tindakan memiliki konsekuensi yang tidak disengaja. Konsekuensi tidak disengaja bisa secara sistematis memberikan umpan balik untuk menjadi konsekuensi tidak terkenali dari tindakan-tindakan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan konsekuensi tidak disengaja? Ada anggapan bahwa agensi manusia bisa ditetapkan manusia berdasarkan maksud-maksud. Artinya, agar sebuah perilaku bisa dianggap sebagai tindakan, siapapun yang melakukannya harus bermaksud melakukan tindakan, jika tidak, maka perilaku itu hanyalah respon reaktif belaka. Sebuah kejadian dianggap sebagai agensi jika apa yang dilakukan agen itu disengaja berdasarkan deskripsi, sekalipun agen keliru mengenai deskripsi itu.

Untuk memahami apa itu melakukan sesuatu secara tidak sengaja, pertama harus dirumuskan dulu pengertian disengaja. Giddens memaknai disengaja sebagai tindakan yang diketahui atau diyakini oleh pelakunya akan memiliki kualitas atau hasil tertentu dan ketika pengetahuan seperti itu dimanfaatkan oleh pelaku untuk memperoleh kualitas ini.[56]

Dengan konsep ini, Giddens memisahkan antara perbuatan seorang

[56] Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*, 12-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agen dari maksud kesengajaan perbuatan. Semakin jauh rentang dan waktu konsekuensi-konsekuensi dari konteks tindakan pertama, maka semakin kecil kemungkinan konsekuensi-konsekuensi disengaja- namun anggapan ini dipengaruhi oleh lingkup daya pengetahuan yang dimiliki oleh para aktor dan daya kuasa memobilisasi.[57]

2. Struktur dan Dualitas Struktur

Tujuan teori Strukturasi adalah menjelaskan hubungan dialektika dan saling pengaruh mempengaruhi antara agen dan struktur. Dengan demikian, agen dan struktur tidak bisa dipahami dalam keadaan saling terpisah satu sama lain. Agen dan struktur saling menjalin tanpa terpisahkan dalam praktik atau aktivitas manusia. Mereka adalah dualitas.[58] Aktivitas manusia bukanlah hasil sekali jadi oleh aktor sosial, tetapi secara terus menerus mereka ciptakan ulang melalui suatu cara, dan dengan cara itu juga mereka menyatakan diri mereka sendiri sebagai aktor. Di dalam dan melalui aktivitas mereka, agen menciptakan kondisi yang memungkinkan aktivitas ini berlangsung. Secara umum, Giddens memusatkan perhatian pada proses dialektika dimana praktik sosial, struktur, dan kesadaran diciptakan.[59]

Giddens memaknai struktur sebagai aturan dan sumber yang disusun sebagai sifat-sifat sistem sosial. Struktur hanya hadir sebagai sifat-sifat struktural. sifat struktural atau lebih tepatnya sifat pemolahan merujuk pada sifat-sifat pemolahan yang memungkinkan untuk mengikat waktu dan ruang

[57] Ibid., 17.
[58] George Ritzer dan Douglas Goodman, *Teori Sosiologi*, 889.
[59] Ibid., 508.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sistem sosial. Giddens berpendapat bahwa sifat-sifat ini dapat dipahami sebagai aturan dan sumber daya, yang terus menerus terlibat ke dalam reproduksi sosial. Struktur hadir secara paradigmatik, sebagai serangkaian perbedaan yang tidak kasat mata (virtual), yang hanya hadir secara temporal dalam wujud sekilasnya, dalam momen-momen membentuk sistem sosial.[60]

Struktur bisa dikonseptualisasikan secara abstrak sebagai dua aspek dari aturan, yaitu unsur- unsur normatif dan kode penandaan. Sumber daya juga memiliki dua jenis, sumber daya otoritatif yang berasal dari koordinasi aktivitas para agen manusia, dan sumber daya alokatif, yang berasal dari kontrol atas produk material atau aspek-aspek dunia material.[61] Struktur berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang ditetapkan sebagai standar, dengan demikian sangat berhubungan dengan institusionalisasi dan memberi bentuk pada pengaruh-pengaruh yang sangat dominan dalam kehidupan sosial.[62]

Giddens membedakan antara stuktur sebagai aturan-aturan dan sumber daya-sumber daya (dalam kesatuan), dan struktur sebagai seperangkat aturan dan sumber daya (terpisah) dengan alasan sebagai berikut, yaitu (a) aturan kerap dipahami sebagai ketentuan formal, aturan dalam reproduksi sosial secara umum tidaklah demikian, (b) aturan sering dipahami sebagai bentuknya yang tunggal, padahal dalam stuktur Giddens tidaklah demikian, (c) aturan tidak dapat dikonseptualisasikan terpisah dari

---

[60] Anthony Giddens, *Problematika Utama,*111.
[61] Anthony Giddens, *Teori Strukturalisasi*, xxxvi.
[62] Anthony Giddens, *Metode Sosiologi Kaidah-Kaidah Baru*. Terjemahan oleh Eka Adi Nugraha dan Wahmuji (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), xx.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber daya, yang merujuk pada cara-cara bagaimana relasi-relasi transformatif sebenarnya terlibat dalam proses produksi dan reproduksi praktik-praktik sosial. Oleh karena itu, kelengkapan struktural memperlihatkan dominasi dan kekuasaan (d) aturan mengandaikan prosedur-prosedur metodis. Aturan terutama bersinggungan dengan praktik-praktis sosial dalam kontekstualitas perjumpaan tertentu, (e) bagi mereka, aturan memiliki dua aspek dan penting untuk membedakan keduanya secara konseptual, karena sejumlah penulis filsafat cenderung menggabungkan kedua aspek itu.

Giddens memaknai struktur seperti itu untuk melepaskan diri dari karakter tetap atau mekanis penggunaan struktur dalam sosiologi ortodoks. Konsep tentang sistem dan strukturasi banyak mendominasi sehingga struktur banyak membantu menjelaskan.[63]

Bagi para pemerhati strukturalis, struktur tampil sebagai sesuatu yang berada diluar tindakan manusia, sebagai sumber pengekang inisiatif bebas subjek yang mandiri. Di sisi lain, konseptualisasi strukturalis dan post-strukturalis tentang gagasan struktur lebih menarik. Bagi strukturalis dan strukturalisme, struktur dipandang sebagai bukan penciptaan pola-pola terhadap kehadiran, melainkan sebagai persinggungan antara kehadiran dan ketidakhadiran, kode-kode pokok harus diperoleh dari penampakan-penampakan luar.[64]

---

[63] Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*, 28-29.
[64] Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berangkat dari sudut pandang tersebut, teori Strukturasi dipahami melalui pengenalan-pengenalan terhadap pembedaan antara konsep struktur dan konsep sistem. Ketika menganalisis relasi-relasi sosial, harus mengakui dimensi sintagmatik,[65] penciptaan pola relasi-relasi sosial dalam ruang dan waktu yang melibatkan reproduksi praktik- praktik sosial tertentu, dan dimensi paradigmatik[66] yang melibatkan tatanan sesungguhnya dari cara-cara penstrukturan, yang terus menerus dilibatkan dalam reproduksi semacam itu.[67]

Dalam analisis sosial, struktur merujuk pada kelengkapan-kelengkapan penstrukturan yang memungkinkan pengikatan waktu-ruang dalam sistem-sistem sosial. Kelengkapan-kelengkapan ini memungkinkan keberadaan praktik-praktik sosial dalam rentang ruang dan waktu yang sangat beragam sekaligus memberikan praktik-praktik sosial itu suatu bentuk sistemik. Mengatakan bahwa struktur adalah tatatan sesungguhnya dari relasi-relasi transformatif berarti bahwa sistem sosial, sebagai praktik-praktik sosial yang direproduksi, tidaklah memiliki struktur, melainkan tepatnya menampilkan kelengkapan-kelengkapan struktural. Hal ini berarti

---

[65] Hubungan sintagmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tataran, yang tersusun secara berurutan. Menurut Kridalaksana, hubungan sintagmatik ini bersifat liniar. Misalnya dalam kalimat Saya menulis artikel, terdapat hubungan sintagmatik antara saya, menulis dan artikel dalam pola kalimat SPO (Subyek - Predikat - Obyek).

[66] Sedangkan hubungan paradigmatik, menurut Kridalaksana, merupakan hubungan antara unsur- unsur bahasa dalam tataran tertentu dengan unsur-unsur lain di luar tataran itu yang dapat dipertukarkan. Dalam kalimat di atas Saya menulis artikel kata Saya dapat dipertukarkan dengan kalimat sejenis. Karena unsur kata Saya merupakan kata benda dan hidup (animate) yang berfungsi sebagai subyek dalam kalimat tersebut, maka kata saya dapat dipertukarkan dengan kata adik, Budi, atau Orang itu.

[67] Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa struktur itu ada, sebagai kahadiran ruang dan waktu, hanya dalam perwujudannya dalam praktik-praktik tersebut dan sebagai jejak-jejak ingatan berorientasi pada perilaku para agen manusia pintar.[68]

Struktur tidak boleh disamakan dengan kekangan, namun meskipun demikian struktur bersifat mengekang dan membolehkan. Tentu saja, ini tidak berarti kelengkapan-kelengkapan terstruktur dari sistem-sistem sosial tidak bergerak, dalam, ruang dan waktu, di luar kontrol sosial dari masing-masing aktor.[69] Bagi kelengkapan-kelengkapan struktural yang mengakar paling kuat dan terlibat dalam reproduksi totalitas kemasyarakatan disebut dengan dasar-dasar struktural *(structural principles).* Sementara praktik-praktik yang memiliki perluasan ruang dan waktu terbesar didalam totalitas disebut dengan institusi- institusi.[70]

Kebanyakan analisis sosial menganggap ruang dan waktu sekedar sebagai lingkungan-lingkungan tindakan dan menerima begitu saja tentang waktu itu, seperti jam waktu yang bisa diukur. Geografi-waktu berkenaan dengan pengekang-pengekang yang membentuk rutinitas kehidupan sehari-hari dan bersama teori Strukturasi memberikan penekanan pentingnya sifat praktis dari aktivitas-aktivitas sehari-hari, dalam keadaan pertemuan muka, bagi terbentuknya perilaku sosial. Regionalisasi mesti dipahami tidak hanya sebagai lokalisasi dalam ruang, namun juga mengacu pada penentuan zona ruang dan waktu dalam kaitannya dengan praktik-praktik sosial rutin. Salah

[68] Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*, 27.
[69] Ibid., 41.
[70] Ibid., 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu dari karakter regionalisasi adalah tingkat ketersediaan-kehadiran terkait dengan bentuk-bentuk lokal tertentu. Gagasan ketersediaan-kehadiran merupakan tambahan yang sangat penting bagi gagasan pertemuan muka.

Relevansi antara regionalisasi dengan strukturasi tampak pada pen-zona-an dalam situasi berbeda. Konsep muka dan depan[71] berkaitan dengan pemosisian tubuh di dalam perjumpaan-perjumpaan. Regionalisasi tubuh menjelaskan bagian-bagian luar tubuh memiliki mitra ruang dalam regionalisasi konteks-konteks interaksi. Regionalisasi dipagari oleh zona-zona ruang dan waktu, yang memungkinkan dipertahankannya relasi khas antara bagian depan dan belakang yang digunakan oleh para aktor dalam menyusun kontekstualitas tindakan dan pemeliharaan rasa aman ontologis.[72]

Sistem sosial melibatkan hubungan ketergantungan timbal-balik yang teratur diantara individu atau kelompok, yang lazimnya dapat dianalisis dengan sebaik-baiknya sebagai praktik-praktik sosial berulang. Sistem, dalam terminologi ini memiliki struktur, atau lebih akuratnya memiliki sifat-sifat struktural; sistem bukanlah struktur itu sendiri. Struktur secara otomatis merupakan sifat sistem atau kolektifitas, dan ditandai oleh ketidakhadiran subjek. Mengkaji Strukturasi suatu sistem sosial berarti mengkaji cara-cara untuk memproduksi dan mereproduksi sistem tersebut didalam interaksi melalui penerapan aturan dan sumber umum dan di dalam konteks hasil-hasil yang tidak dikehendaki.

---

[71] Konsep ini tampaknya Giddens banyak dipengaruhi oleh Dramaturginya Goffman dengan istilah panggung depan dan belakang.
[72] Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*, 169-191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Giddens memaknai struktur sebagai aturan dan sumber yang disusun sebagai sifat-sifat sistem sosial. Struktur hanya hadir sebagai sifat-sifat struktural. Sistem merupakan relasi yang direproduksi diantara aktor atau anggota kolektif, yang disusun sebagai praktik sosial yang teratur. Dan strukturasi merupakan aneka kondisi yang mempengaruhi kontinuitas atau transformasi struktur dalam reproduksi sistem.[73]

Giddens perlu membedakan penggunaan antara struktur dengan sistem.[74] Sebab, di kalangan fungsionalis, struktur dan sistem sering kali dipertukarkan dalam penggunaannya. Sistem lebih merujuk kepada pengertian struktur dalam pandangan Durkheim. Struktur terlibat secara terus menerus dalam reproduksi sosial; unsur-unsur terlembagakan sistem sosial memiliki kelengkapan-kelengkapan struktural. Kelengkapan struktural dalam pengertian bahwa hubungan-hubungan distabilisasikan di sepanjang masa dan ruang. Sistem sosial, berbeda dengan struktur, hadir di dalam ruang dan waktu, dan dibentuk oleh praktik-praktik sosial. Konsep sistem sosial, yang dipahami dalam pengertian terluasnya, merujuk pada ketergantungan timbal balik aksi hasil reproduksi; dengan kata lain, merujuk pada suatu hubungan yang perubahan pada satu atau lebih komponen anggotanya dapat memicu perubahan pada komponen anggota lainnya, dan perubahan ini pada gilirannya menghasilkan perubahan terhadap bagian-bagian yang menjadi tempat berlangsungnya perubahan awal.[75]

---

[73] Anthony Giddens, *Problematika Utama,*114-115.
[74] Anthony Giddens, *Problematika Utama,* xv.
[75] Anthony Giddens, *Problematika Utama,*129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam upaya menitikberatkan pentingnya sumber daya sabagai sifat-sifat struktural sistem sosial, Giddens menekankan keutamaan konsep kekuasaan bagi teori sosial. Kekuasaan dimaknai kemampuan (a) aktor mewujudkan keinginannya, bahkan dengan mengorbankan keinginan/ kepentingan orang lain yang boleh jadi menentangnya, (b) kekuasaan dipandang sebagai milik bersama (kolektivitas). Bagi Giddens, cara pandang kekuasaan seperti itu tidak tepat jika dipisah-pisahkan. Giddens memandang keduanya sebagai ciri-ciri dualitas struktur. Giddens memperlakukan sumber daya sebagai landasan atau kendaraan, yang digali oleh para pihak dari dan untuk interaksi serta direproduksi melalui dualitas struktur. Kekuasaan dimunculkan oleh bentuk-bentuk pasti dominasi secara sejajar dengan keterlibatan aturan dalam praktik sosial.[76]

Giddens membedakan institusi dengan sistem sosial atau kolektivitas. Institusi dipandang sebagai pola baku perilaku yang memainkan peran dasar dalam penciptaan ruang dan waktu sistem sosial. Standarisasi perilaku dalam ruang-waktu mencakup rekonstruksi terus menerus dalam konteks potensial aktivitas sosial sehari-hari. Temporalitas memasuki reproduksi sistem sosial melalui tiga cara (a) dalam jalinan interaksi langsung, (b) dalam reproduksi anggota sistem sosial, dan (c) dalam reproduksi institusi.[77]

Institusi tidak semata-mata berfungsi dibelakang para aktor sosial yang memproduksi dan mereproduksinya. Setiap anggota masyarakat yang

[76] Ibid.,119-121.
[77] Ibid,180-181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkompeten sangat mengenal institusi masyarakat sendiri; pengetahuan semacam itu tidak bersifat kebetulan akibat berfungsinya masyarakat, namun secara otomatis ikut aktif di dalamnya.[78] Garis yang menghubungkan signifikansi-dominasi-legitimasi bukanlah hubungan sebab akibat, namun semata-mata menunjukkan ketergantungan timbal balik. Giddens membagi 3 jenis institusi, yaitu institusi simbolik, politik, dan ekonomi.[79]

Dualitas struktur merupakan landasan utama bagi keterulangan-keterulangan dalam reproduksi sosial di sepanjang ruang dan waktu. Pada gilirannya, hal ini mempersyaratkan kemampuan instrospeksi dan mawas diri (*reflexive monitoring*) dari para agen di dalam, dan sebagai bentuk dualitas struktur dalam aktivitas sosial sehari-hari.[80] Menurut gagasan dualitas struktur, aturan dan sumber daya diterapkan oleh para aktor dalam melakukan interaksi, namun sebagai konsekuensinya juga ditanamkan ulang melalui interaksi semacam itu. Dengan demikian, struktur merupakan pola yang digunakan oleh hubungan antara momen dengan totalitas untuk mengekspresikan dirinya dalam reproduksi sosial.[81]

Dualitas struktur memandang struktur dan agen berinteraksi dalam proses produksi dan mereproduksi institusi dan hubungan-hubungan sosial. Artinya, aktor merupakan hasil dari struktur, akan tetapi aktor juga menjadi mediasi bagi pembentukan struktur yang baru.[82] Hubungan ini berbeda

---

[78] Anthony Giddens, *Problematika Utama,*125.
[79] Ibid.,199.
[80] Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*, 43.
[81] Anthony Giddens, *Problematika Utama,*124.
[82] Muhammad Basrowi Soenyono, *Teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Surabaya: Yayasan Kamousina, 2004), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hubungan yang ikut terlibat dalam relasi antara bagian dengan keseluruhan dalam mengorganisasikan para aktor dan kelompok dalam sistem sosial seperti yang terungkap dalam teori fungsionalis. Artinya, perbedaan yang membentuk sistem sosial sesungguhnya merefleksikan dialektika antara kehadiran dan ketidakhadiran di dalam ruang dan waktu. Perbedaan hanya hadir dan direproduksi melalui tertib maya perbedaan struktur (*virtual order of differences of structure*) yang terungkap melalui dualitas struktur.[83]

Struktur, sebagai seperangkat aturan dan sumber daya yang terorganisasikan secara rutin, berada di luar ruang dan waktu, tersimpan dalam koordinasi dan instansinya dalam bentuk jejak-jejak ingatan, dan ditandai ketidakhadiran subjek. Sebaliknya, sistem-sistem sosial yang secara rutin melibatkan struktur terdiri dari aktivitas-aktivitas tertentu para agen manusia, dan direpoduksi sepanjang ruang dan waktu. Menganalisis strukturasi dari sistem-sistem sosial berarti mempelajari bagaimana cara sistem-sistem seperti itu, yang tertanam dalam aktivitas-aktivitas aktor tertentu berpegang pada aturan-aturan dan sumber daya-sumber daya dalam beragam konteks tindakan, diproduksi dan direproduksi dalam interaksi.

Komposisi antara agen dan struktur-struktur bukanlah dua perangkat terpisah, atau sebuah dualisme, melainkan mewakili sebuah dualitas. Menurut gagasan dualitas, kelengkapan-kelengkapan struktural sistem-sistem sosial adalah sarana sekaligus hasil dari praktik-praktik yang

[83] Anthony Giddens, *Problematika Utama,*124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terorganisir secara rutin.

Struktur tidak berada di luar individu; sebagai jejak-jejak ingatan[84] dan ketika terwujudkan dalam praktik-praktik sosial, struktur dalam pengertian tertentu berada di dalam bukannya di luar sebagaimana pengertian Durkheimian.[85] Konsentrasi terhadap analisis kelengkapan-kelengkapan struktural dari sistem sosial harus menjadi penekanan, dan menjadi prosedur yang valid jika ia menempatkan suatu ephoce terhadap-dengan menjaga kelenturannya-perilaku sosial yang dimonitor secara refleksif. Dibawah *ephoce* seperti itu, bisa dibedakan tiga dimensi struktural dalam sistem sosial signifikansi, dominasi, dan legitimasi.[86]

[84] Jejak-jejak ini lebih dekat dengan teori skemata dalam teori membaca yang banyak dikaji dalam bidang pendidikan. Teori Skemata menyatakan bahwa aktivitas membaca merupakan aktivitas meletakkan titik-titik dalam otak manusia. Semakin banyak titik yang di letakkan, maka akan semakin banyak kemungkinan hubungan yang bisa dirangkai antar titik.
[85] Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*, 40-41.
[86] Ibid., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Giddens menggambarkan relasi antara struktur dan tindakan sebagaimana Gambar dibawah ini.

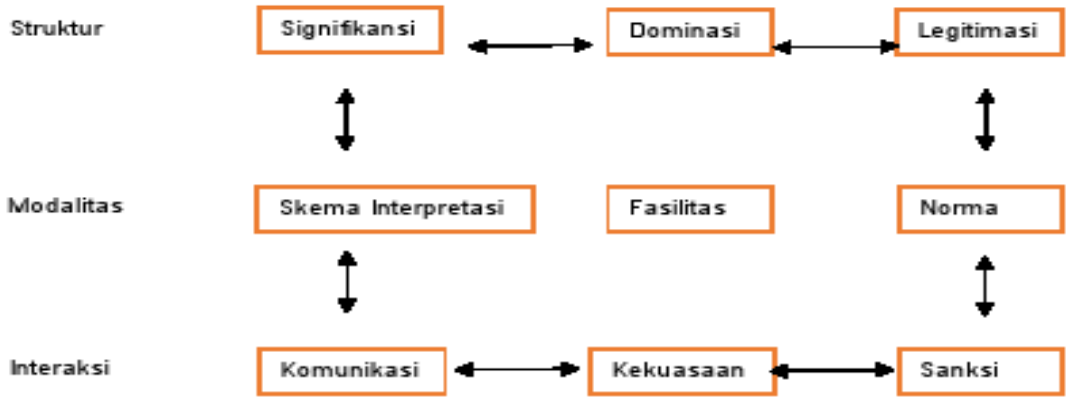

Gambar 1. 2.
Dualitas Struktur

Modalitas strukturasi merepresentasikan dimensi utama dualitas struktur di dalam penciptaan interaksi. Modalitas strukturasi dimanfaatkan oleh para aktor untuk melakukan dan menciptakan interaksi, namun pada saat yang sama juga menjadi sarana untuk mereproduksi aneka komponen struktural sistem interaksi. Ketika analisis institusional difokuskan, maka modalitas diperlakukan sebagai khazanah ilmu pengetahuan dan sumber daya yang dimanfaatkan oleh para aktor dalam melakukan interaksi sebagai prestasi yang menunjukkan kecakapan dan keahlian, di dalam kondisi-kondisi terbatas rasionalisasi tindakan.[87] Modalitas mengacu pada mediasi interaksi dan struktur dalam proses reproduksi sosial. Konsep dibaris pertama, merupakan karakterisasi struktur, sementara baris ketiga mengacu kepada properti interaksi.

[87] Anthony Giddens, *Problematika Utama*,143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komunikasi makna dalam interaksi melibatkan penggunaan skema interpretasi yang dengan demikian pengertian dibuat oleh para partisipan dari apa yang setiap orang katakan dan lakukan (struktur signifikansi). Struktur signifikansi selalu harus dipahami dalam kaitannya dengan dominasi dan legitimasi. Pemahaman ini harus diarahkan pada pengaruh kuat kekuasaan dalam kehidupan sosial. Dominasi dan kekuasaan tidak bisa dipikirkan hanya dari sisi asimetris distribusi, melainkan harus dikenali sebagai tak terpisahkan dalam asiasi sosial.[88] Penerapan skema kognitif semacam itu, dalam sebuah kerangka pengetahuan bersama, bergantung pada dan ditarik dari sebuah tatanan kognitif yang didiami bersama-sama oleh masyarakat; namun ketika menggunakan tatanan kognitif itu, penerapan skema interpretatif pada saat bersamaan menyusun ulang tatanan itu.

Penggunaan kekuasaan dalam interaksi melibatkan aplikasi fasilitas yang digunakan para partisipan agar mampu memberikan hasil dengan mempengaruhi perilaku orang lain; fasilitas ditarik dari sebuah tatanan dominasi dan pada saat bersamaan, saat tatanan itu diterapkan; mereproduksi tatanan dominasi (struktur dominasi). Kemudian, penyusunan moral atas interaksi melibatkan penerapan norma yang diambil dari suatu tatanan yang sah, tetapi dengan aplikasi itu juga menyusun ulang-ulang tatanan yang bersangkutan (struktur legitimasi). Seperti halnya komunikasi, kekuasaan dan moralitas juga merupakan elemen integral dari interaksi,

[88] Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*, 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga signifikansi (pengertian), dominasi dan legitimasi hanya secara analitis merupakan properti terpisah dari struktur. Struktur pengertian dapat dianalisis sebagai kaidah semantik, struktur dominasi sebagai sistem sumber- sumber, struktur legitimasi sebagai sistem kaidah moral.[89] Komunikasi makna didalam interaksi tidak berlangsung secara terpisah dari pelaksanaan atau operasionalisasi relasi kekuasaan, atau diluar konteks-konteks sanksi-sanksi normatif.[90]

Struktur tidak memiliki esksistensi yang terpisah dari pengetahuan agen tentang apa yang mereka lakukan dalam aktivitas keseharian mereka. Para agen manusia selalu mengetahui apa yang sedang mereka lakukan pada tataran kesadaran diskursif melalui sebuah deskripsi. Namun demikian, apa yang agen lakukan bisa saja asing menurut deskripsi-deskripsi lain, dan mereka mungkin tidak banyak tahu tentang berbagai konsekwensi dari aktivitas-aktivitas yang sedang mereka lakukan. Namun demikian, pengetahuan manusia selalu terbatas. Arus tindakan terus melahirkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak disengaja oleh para aktor, dan konsekwensi tidak disengaja ini juga membentuk kondisi-kondisi tak terkenali dari tindakan-tindakan melalui cara umpan balik.[91]

3. Monitoring Refleksif Tindakan

Tidak seluruh tindakan memiliki tujuan, dalam arti memiliki maksud yang jelas seperti terdapat dalam pikiran sang agen, tapi kebanyakan

[89] Anthony Giddens, *Metode Sosiologi*,172-173.
[90] Anthony Giddens, *Problematika Utama*,144.
[91] Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*, 42-43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan mengandung tujuan, artinya tindakan tersebut dibawah pantauan sang pelaku yang secara terus menerus mengukur apa yang sedang mereka lakukan, bagaimana orang lain melakukan reaksi terhadap apa yang mereka lakukan. Hal ini penting dari pemantauan tidak sengaja (*reflexive monitoring*) terhadap suatu tindakan adalah kemampuan sang agen untuk menjelaskan, baik kepada dirinya maupun kepada orang lain, serta alasan mengapa mereka bertindak sesuai dengan pemberian alasan-alasan terhadap tindakan tersebut.[92] Pengawasan refleksif terhadap perilaku berfungsi berdasarkan latar belakang rasionalisasi tindakan (yang dimaknai Giddens sebagai kemampuan pelaku manusia untuk menjelaskan alasan atas perilakunya) dan dalam konteks kesadaran praktis yang lebih inklusif. Pengawasan refleksif terhadap aksi meliputi pengawasan terhadap setting interaksi yang tidak hanya berupa perilaku dari aktor-aktor tertentu secara terpisah. Rasionalisasi aksi, sebagai sifat berulang perilaku sehari-hari, merupakan karakteristik norma perilaku para pelaku sosial berkompeten, dan benar-benar menjadi landasan utama bagi orang-orang lain untuk menilai kompetensi mereka.[93]

Dalam hal tindakan, Giddens membedakan antara pilihan (*option*) dan pilihan yang mungkin (*feasible option*). Seorang individu yang memiliki satu pilihan bukanlah seorang agen, karena itu tidak dapat dikatakan bahwa individu itu melakukan sebaliknya. Tetapi, seorang individu memiliki satu pilihan yang mungkin, ia adalah seorang agen,

[92] John. B Thompson, *Analisis Ideologi*, 240.
[93] Anthony Giddens, *Problematika Utama*, 96-98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena pilihan tinggal satu dalam artian bahwa keinginan dan hasrat yang dimiliki individu tersebut hanya satu yang memungkinkannya dilihat sebagai agen yang layak untuk bertahan.[94] Para aktor manusia tidak hanya mampu memonitor aktivitas-aktivitas mereka sendiri dan aktivitas-aktivitas orang lain dalam perulangan perilaku sehari- hari; mereka juga mampu memonitoring itu dalam kesadaran diskursif. Skema interpretatif adalah cara penjenisan yang tersimpan dalam gudang pengetahuan para aktor, dan diterapkan secara refleksif ketika melangsungkan komunikasi. Bekal pengetahuan yang para aktor gunakan dalam produksi dan reproduksi interaksi sama seperti bekal pengetahuan yang membuat mereka mampu menciptakan cerita-cerita, mengemukakan alasan-alasan, dan lain sebagainya.[95]

Tindakan (action), bagi Giddens, harus dipahami sebagai aliran intervensi yang terus menerus di dunia ini yang dilakukan oleh agen-agen otonom. Tindakan harus dibedakan dari bertindak (*acts*). Bertindak adalah bagian-bagian tertentu suatu tindakan sebagai gambaran dari aliran yang terus menerus tersebut dalam melakukan proses kategorisasi dan deskripsi secara nyata. Kebanyakan tindakan mengandung tujuan, artinya tindakan tersebut dibawah pantauan sang pelaku secara terus menerus mengukur apa yang sedang mereka lakukan, bagaimana orang lain melakukan reaksi terhadap apa yang sedang mereka lakukan dan bagaimana keadaan saat

[94] John. B Thompson, *Analisis Ideologi,*167.
[95] Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan itu dilakukan.[96] Tindakan disengaja tidak tersusun atas gabungan atau sekumpulan maksud, alasan, dan motif terpisah. Apa yang disebut dengan cara stratifikasi dari sisi pelaku melibatkan pembicaraan tentang monitroing refleksif, rasionalisasi, dan motivasi tindakan sebagai sederet proses yang melekat.[97]

Rasioanalitas tindakan merujuk kepada kesengajaan (*intentionality*) sebagai proses, adalah karakteristik rutin perilaku manusia dalam cara yang biasa. Rasionalitas tindakan, dalam keanekaragaman keadaan interaksi, merupakan basis utama bagi orang lain dalam mengevaluasi kompetensi umum para aktor.[98] Para aktor merasionalisasi dunia mereka dalam usaha mendapatkan rasa aman. Rasionalisasi ialah perkembangan rutinitas yang tidak hanya memberi rasa aman bagi para aktor, tetapi juga memampukan mereka menangani kehidupan sosialnya secara efesien.

Para aktor juga mempunyai motivasi untuk bertindak, dan motivasi-motivasi itu meliputi keinginan dam hasrat mendorong tindakan, oleh karena itu, meskipun rasionalisasi dan refleksitas senantiasa terlibat di dalam tindakan, motivasi itu dianggap sebagai potensi tindakan.[99] Muatan purposif dari tindakan sehari-hari tercakup dalam pengawasan sukses tanpa henti oleh aktor tentang aktivitasnya sendiri, hal ini mengindikasikan sebuah pengawasan sambil lalu atas rangkaian kejadian sehari-hari yang biasa tidak dipertanyakan aktor. Menyelidiki tujuan aktor atas apa yang dia lakukan

[96] John. B Thompson, *Analisis Ideologi*, 241.
[97] Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*, 4-5.
[98] Ibid., 5.
[99] George Ritzer dan Douglas Goodman, *Teori Sosiologi*, 890-891.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti menyelidiki keterlibatannya dalam rangkaian kejadian dan mempertanyakan. Menanyakan alasan sebuah tindakan berarti secara konseptual memotong aliran tindakan, yang tidak melibatkan rangkaian diluar dawai alasan yang berlainan. Menyelidiki rasionalisasi tingkah laku semacam itu, menurut Giddens adalah menyelidiki (a) hubungan logis antara beragam bentuk tindakan, atau proyek purposif, dan (b) landasan teknis dari pengetahuan yang diterapkan sebagai alat dalam tindakan purposif untuk megamankan hasil tertentu.[100]

Agar aktivitas seseorang dapat dipertanggungjawabkan, berarti orang-orang itu harus menjelaskan alasan-alasan dan memberikan landasan normatif yang membenarkan aktivitas tersebut. Unsur-unsur normatif dalam interaksi selalu berpusat pada relasi-relasi antara hak dan kewajiban yang diharapkan dari mereka dan ikut andil dalam rangkaian konteks interaksi.[101] Ambiguitas atau pengaburan antara perilaku yang dianggap sebagai tanggungjawab agen sendiri, dan oleh karenanya potensial ditanya untuk pembenarannya, dan perilaku yang dianggap diluar tanggungjawab mereka memungkinkan adanya beragam bentuk manuver atau kebohongan yang digunakan orang untuk mencari jalan keluar dari sanksi atas apa yang mereka lakukan, atau sebaliknya mengklaim hasil tertentu sebagai pencapaian mereka sendiri.

Tujuan dari agensi bisa ditunjukkan dalam dua cara; bahwa agen mungkin mencapai maksudnya, apa yang disengaja mereka lakukan, tetapi

[100] Anthony Giddens, *Metode Sosiologi*, 106-107.
[101] Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak melalui agensi mereka; dan bahwa tindakan sengaja membawa rangkaian konsekwensi, yang cukup sah dianggap sebagai perbuatan aktor, tetapi sebenarnya tidak sengaja mereka lakukan.[102] Giddens mendefinisikan punya maksud dan punya tujuan sebagai semua tindakan dimana agen yang tahu bisa diharapkan untuk menunjukkan kualitas atau hasil tertentu, dan dimana pengetahuan ini dipergunakan oleh aktor untuk memproduksi kualitas atau hasil itu.

Penjelasannya sebagai berikut: (a) karena tindakan memiliki maksud, agen tidak harus mampu merumuskan pengetahuan yang mereka terapkan sebagai dalil abstrak juga perkara pengetahuan itu tidak harus valid, (b) tujuan pastinya tidak dibatasi pada tindakan manusia.[103] Untuk memahami secara konseptual proses-proses produksi termonitor, harus dilakukan pembedaan-pembedaan tertentu yang sesuai dengan apa sebenarnya sistem-sistem sosial sebagai praktik-praktik yang direproduksi dalam latar interaksi. Setiap sistem sosial mempunyai derajat kerenggangan dan perembasan yang berbeda. Ini bisa dikenali dengan dua hal, pertama adalah sarana yang umumnya sangat menonjol dalam fungsionalisme, dimana saling ketergantungan dipahami sebagai proses homeostatis yang menyerupai mekanisme regulasi diri yang bekerja dalam organisme.[104]

---

[102] Anthony Giddens, *Metode Sosiologi*, 97-98.
[103] Ibid., 97.
[104] Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Penelitian Terdahulu

Kajian ini mengulas dimensi religius dalam pendidikan politik kepartaian dengan mengambil Parpol NasDem Jawa Timur sebagai lokus kajiannya. Topik ini sengaja dipilih karena belum banyak kajian yang secara komprehensif mengulasnya. Secara umum, kajian-kajian yang ada lebih banyak mengulas sepak terjang Parpol dalam perpolitikan praktis (seperti perilaku politik Parpol), wacana kepolitikan/kekuasaan elit Parpol, dan sejenisnya. Demikian halnya, kajian-kajian yang menyinggung relasi antara agama dan politik, cenderung mengelaborasinya dari sisi ideologisasi dan politisasi ataupun komodifikasi agama dalam aktivitas perpolitikan praktis.

Harus diakui bahwa kajian-kajian yang mengulas kaitan antara pendidikan dan politik memang sudah ada, termasuk di dalamnya pendidikan kewarganegaraan (civic education) dan sosialisasi ataupun pendidikan politik (political socialization/education). Hanya saja, belum ditemukan kajian yang mengulas secara komprehensif aspek religiusitas dalam pendidikan politik kepartaian tersebut. Bertolak dari kenyataan bahwa sebagian aktor politik kepartaian seperti Parpol NasDem Jawa Timur, yang berasal dari segmen kaum santri turut berperan dalam memunculkan wacana pemikiran mengenai pendidikan politik kepartaian yang melibatkan aspek-aspek religiusitas, tentunya penting diperhitungkan.

Terlepas dari kepentingan politis (yang memang tidak mungkin dinafikan), konstruksi pemikiran dan aktualisasi nilai-nilai dan ide-ide keagamaan (Islam) dalam aktifitas pendidikan politik kepartaian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diselenggarakan oleh Parpol NasDem Jawa Timur menjadi persoalan yang tentu saja penting dikaji secara lebih mendalam. Dalam konteks ini pula, kajian ini dapat mengisi kekosongan (deficiencies) yang ditinggalkan oleh kajian-kajian yang ada sementara ini.

Setidaknya terdapat sejumlah hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai refrensi untuk memperkuat argumentasi peneliti, di antaranya ialah: Pertama, penelitian Redi Panuju dengan Judul The Politicization of Religion, Ironi of Ideology and Clash of Discourse Approaching 2019 General Election. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dan diterbitkan di IAIN Pekalongan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sampai taraf tertentu, agama sering digunakan sebagai ideologi dalam memperjuangkan politik, perannya sering kali bias, sehingga tidak dapat dibaca dengan jelas, di mana ideologi sesungguhnya dari suatu kekuatan politik. Yang tersisa adalah pertempuran wacana, dalam bentuk produksi wacana dari satu kubu, untuk kemudian direproduksi lagi oleh fraksi lain dalam mengangkat pemilihan menuju pemilihan 2019.[105]

Penelitian terdahulu ini adalah merupakan penelitian yang memiliki kesamaan dalam hal penelitian yang sama-sama mengangkat agama dan politik. Penelitian terdahulu ini lebih umum karena mengangkat hubungan agama dan politik. Perbedaan dengan penelitian ini adalah kajiannya yang lebih umum. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa

[105] Redi Panuju, "*The Politicization of Religion, Ironi of Ideology and Clash of Discourse Approaching 2019 General Election*," Jurnal Penelitian, 11 Mei 2018, 1, v 15.1357.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang dilakukan ini lebih menyoroti pada dimensi agama dalam pendidikan partai politik.

Kedua, penelitian Hariyanti Dkk dengan judul The Role of Political Parties in Building Loyalty Women Cadres through Political Education. Penelitian ini diterbitkan dalam ACEC 2018.

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa materi pendidikan politik yang diberikan oleh partai NasDem kepada kader mengacu pada visi dan misi partai. Hal ini dilakukan dengan memberikan pencerahan kepada kader di sekitar landasan hukum konsep politik di Indonesia, etika dan norma politik untuk membangun masyarakat demokratis, pemberdayaan di bidang ekonomi dan kepemimpinan dalam memperkuat peran dalam keluarga dan komunitasnya. Partai NasDem tidak membedakan bentuk kegiatan pendidikan politik kader laki-laki dan perempuan serta kegiatan yang tidak berkelanjutan.

Kegiatannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi politik yang terjadi dan cenderung mengarah pada penguatan organisasi internal partai. Pendidikan politik yang dilakukan semata-mata sosialisasi ideologi partai.[106]

Penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni sama-sama mengangkat tentang pendidikan politik Partai NasDem. Perbedaannya dengan reseach ini lokusnya yang berbeda dan kajian penelitan ini fokus mengakaji dimensi relgiusitasnya.

---

[106] Hariyanti, Cecep Darmawan, dan Iim Siti Masyitoh, "*The Role of Political Parties in Building Loyalty Women Cadres through Political Education*," Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2018), 2018, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, penelitian Suryanef Dkk dengan judul Political Education for Female Cadres as an Effort to Gender Equality in Politics. Penelitian ini oleh Atlantis Press dan dipublikasikan oleh ICSSIS pada tahun 2018.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa Kegiatan pendidikan politik di Dewan Eksekutif Daerah (DPW) Partai NasDem tidak membedakan bentuk pendidikan politik bagi kader laki-laki dan perempuan. Dalam meningkatkan partisipasi politik kader perempuan melalui pendidikan politik, partai tampaknya belum melakukan upaya secara optimal karena beberapa alasan. Adapun alasannya adalah prinsip demokrasi, prinsip keuntungan, prinsip keberlanjutan.[107]

Keempat, penelitian Muhammad Sabri dengan judul Citizens Democracy Education-Based Religions and Cultures: Consideration of Democracy School in Jeneponto, Indonesia. Penelitian ini dipresentasikan dalam International Conference on Asean Comparative Education Research Network tahun 2016.

Hasil dalam penelitian ini menggambarkan bahwa pendidikan dalam sekolah ini bertujuan untuk mengubah nilai, pengetahuan, dan keterampilan konsep demokrasi di Indonesia dengan mempertimbangkan agama dan budaya. Dengan berdiskusi tentang demokrasi, agama, dan budaya yang diikuti dengan pelatihan dan penguasaan instrumen demokrasi, para pesertanya mampu mengaktualisasikan diri mereka melalui pemahaman teoretis, pengalaman

[107] Suryanef dkk., "*Political Education for Female Cadres as an Effort to Gender Equality in Politics*," Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences and Interdisciplinary Studies (ICSSIS 2018), 2019, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggalian, refleksi, dan implementasi demokrasi dalam kerangka masyarakat sipil.[108]

Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian yang memiliki kesamaan pada fokus pendidikan atas dasar agama. Sebagaimana dipahami sebelumnya bahwa penelitian yang akan dilakukan ini juga menyangkut tentang pendidikan berdimensi agama. Namun bedanya penelitian ini akan membahas tentang pendidikan religius dalam partai politik.

Kelima, penelitian Donal J Porter dengan judul Managing Politics and Islam in Indonesia. Penelitian ini diterbitkan menjadi sebuah buku yang diterbitkan di London Tahun 2002.

Penelitian terdahulu ini mempersoalkan dimensi agama dalam politik. Salah satu dari kesimpulan yang penting dalam penelitian ini adalah kala mempersoalkan hubungan kepentingan agama dan kepentingan kekuasaan. Studi ini mengidentifikasi hubungan dan struktur kekuasaan tertentu yang mengikat kepentingan negara dan politik Islam ke dalam serangkaian hubungan yang kompleks. Studi ini memberikan wawasan lebih lanjut tentang pola pergeseran dari represi, kooptasi, akomodasi, dan konflik antara negara dan Islam. Meskipun para sarjana telah menerapkan kerangka kerja korporatis dalam analisis mereka tentang politik Indonesia, tidak ada studi substansial tunggal pada korporatisasi kepentingan Muslim.[109]

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan

---

[108] Muhammad Sabri, Muh. Ikhsan, dan Ismail Suardi Wekke, "*Citizens Democracy Education-Based Religions And Cultures: Consideration Of Democracy School In Jeneponto,* Indonesia," 9 November 2017, https://doi.org/10.31227/osf.io/7ud3a.

[109] Donald J Porter, *Managing Politics and Islam in Indonesia* (London: Routledge, 2002),4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan adalah pada tema yang sama-sama mengkaji tentang dimensi keagamaan dalam dunia politik. Persamaannya sangat sedikit sekali dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu lebih mempersoalkan kepentingan politik agama pada dunia politik. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji agama sebagai alat pendidikan.

Keenam, Penelitian Moh. Nurhakim, tentang pemaknaan agama dalam partai politik dalam konteks reformasi, studi perbandingan PPP, PKB dan PAN. Penelitian ini dimuat dalam jurnal Humanity.

Penelitian ini memiliki temuan, yaitu: Pertama, pemaknaan agama Islam oleh ketiga Parpol (PPP, PKB dan PAN) dimaknai secara beragam. PPP memaknai agama Islam sebagai alat pemersatu bangsa dan motivator pembangunan. Sementara PKB memaknai agama Islam sebagai motivator kebangkitan bangsa. Sedangkan PAN menekankan operasionalisasi nilai-nilai Islam sebagai amanat yang harus diwujudkan dalam konteks nasional. Kedua, posisi agama Islam juga dimaknai secara beragam pula. PPP condong mengintegrasikan agama ke dalam politik, dan di antara keduanya tidak dapat dipisahkan. PPP memposisikan agama Islam sebagai asas partai, dengan begitu maka politik simbol di PPP cukup kuat karena menjadi bagian dari identitas dari partai ini. Sementara itu, PKB memposisikan agama terparsialkan dari politik, dan antara keduanya diposisikan terpisah, meski diakui masih memiliki koneksitas. Agama memang tidak masuk dalam struktur partai, tetapi masuk sebagai landasan etik politik. Namun demikian, acapkali PKB menggunakan simbol dan identitas agama sebagai instrumen politiknya untuk memperoleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

simpati dan dukungan masyarakat. Sedangkan PAN memposisikan agama terpisah dengan Parpol. Tetapi nilai-nilai agama diinternalisasikan (dikonkritkan) ke dalam politik praktis melalui program-programnya.[110]

Persamaan pada penelitian yang akan dilakukan ini adalah pada kajiannya yang mempersoalkan integrasi agama dengan partai politik. Walaupun demikian perbedaanya sangat mencolok sekali adalah pada fokus masalah penelitian ini yang mengkaji dimensi agama dalam pendidikan politik.

Ketujuh, Willy Aditya, Indonesia di jalan Restorasi (Politik Gagasan Surya Paloh). Penelitian ini meghasilkan temuan bahwa Sejarah kebangsaan Indonesia lahir berkat kematangan rumusan penuh visi seperti yang digodok dalam rapat-rapat BPUPKI. Kelahiran Orde Baru dirumuskan dalam sebuah seminar Angkatan Darat yang menghasilkan visi serta konsep Trilogi pembangunan sebagai platform bersama. Kekosongan gagasan baru terasa di era Reformasi yang digaungkan hanya dengan sentimen dan kemarahan memuncak terhadap kekuasaan Orde Baru, tanpa ada konsep yang jelas. Tidak ada plat form bersama sebagai landasan berjalannya Reformasi. Reformasi tidak berjalan dengan konsep yang terarah. Sistem ekonomi pun semakin terliberalisasi tak terkendali, kian menjauhi amanat konstitusi.

Gerakan Restorasi Indonesia ingin mengembalikan basis-basis kebangsaan yang telah lama pudar. Di tengah perkembangan zaman yang penuh benturan ini diperlukan semangat baru untuk menemukan kembali nilai-

[110] Moh. Nurhakim, "Pemaknaan Agama Dalam Partai Politik Dalam Konteks Reformasi, Studi Perbandingan PPP, PKB dan PAN", Jurnal Humanity, Volume 1 Nomer 1, September 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai kebangsaan. Indonesia mempunyai nila-nilai yang kuat, sesungguhnya Indonesia memiliki Pancasila dan UUD 1945 yang mencerminkan keadiluhungan ideologi sebuah bangsa beradap. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbentuk dari sejarah solidaritas dan kesamaan cita-cita. Diperlukan sebuah gerakan kebangsaan untuk mengembalikan (restorasi) karakter solidaritas dan cita-cita para founding fathers. Sebuah gerakan sederhana, yang tidak hanya berangkat dari amarah semata, tetapi dari pemikiran yang sadar, matang, dan terkonsep. Itulah Restorasi Indonesia, gerakan yang berasas pada semangat perjuangan yang diusung Surya Paloh.[111]

Penelitan terdahulu ini kesamaannya hanya terletak pada fokus kajian yang menelisik tentang Ideologi Partai NasDem. Penelitian terdahulu masih memberikan ruang pada penelitian ini untuk lebih dalam mengkaji tentang ideologi kepartaian Partai NasDem. Apalagi pada titik singgungan agama sebagai dimensi politiknya tentu masih sangat luas ruang kajiannya.

Kedelapan, Penelitian Jaqueline L. Bornstein yang berjudul *Religion and Art as Peacebuilding Tools: a Case Study of The Education of Arts Appreciation Program*, Solo, Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian tugas akhir program doktoralnya.

Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa dimensi religius dapat berubah menjadi nilai-nilai yang merekatkan perbedaan dan menjadi dasar etik dalam kehidupan sosial. Nilai religius yang mampu berubah bentuk menjadi nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian menyuguhkan bagaimana dimensi religius

[111] Willy Aditya, *Indonesia di jalan Restorasi (Politik Gagasan Surya Paloh)*, (Jakarta; Populis Institute, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terintegrasi dalam sebuah seni. Integrasi seni dan agama menjadikan dimensi agama lebih masuk pada aspek kebudayaan manusia itu sendiri.[112]

Beberapa kajian terdahulu di atas nampaknya masih membuka ruang dan celah bagi penelitian pendidikan agama berdimensi religius ini. Beberapa penelitian terdahu tidak ada satupun yang meneliti tentang pendidikan berdimensi religius dalam sebuah partai. Semua penelitian terdahulu nampak hanya meneliti dalam satu sudut penelitian ini saja. Misalnya pada Redi Panuju hanya meneliti peran agama dalam politik. Begitupun pada penelitian Hariyanti dan Suryanef juga hanya bicara satu sudut saja, yakni pada pendidikan politik NasDem saja, tanpa terfokus masuknya nilai religius di dalamnya.

Ada juga penelitian terdahulu yang hanya terfokus pada mendalami ideologi partai saja, seperti penelitiannya Willy Aditya. Ia hanya menfokuskan pada gagasan Surya Paloh. Ada yang hanya berbicara dimensi raligius saja, seperti Jaqueline L Bornstein. Ia hanya menggambarkan bagaimana dimensi agama dapat menjadi ruh perdamaian dalam dunia seni. Jadi secara keseluruhan pembahasan dari penelitian terdahulu tidak satupun yang memiliki kesamaan yang utuh dengan penelitian ini.

Apalagi jika dilihat dari teori atau analisis studi yang dipakai, tidak ada yang sama dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu nampaknya tidak ada satupun yang melakukan pendekatan agency dan strukturasi. Padahal untuk menggambarkan realitas kesadaran, tindakan dan proses pendidikan dan dunia

[112] Bornstein Jaqueline L, "*Religion and Arts as Peacebuilding tools:a Case Study of The Education of Arts Appreciation Program,* Solo, Indonesia" (Desertasi, Department of Peace, Studies University of Bradford, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik, lebih tepat untuk membaca terlebih dahulu struktur dan agen yang terkait di dalamnya. Tanpa pendekatan strukturasi dan agen, tentu pemahaman secara menyeluruh tidak akan diperoleh.

Sebagaimana dipahami bersama kajian tentang agensi dan strukturasi akan menggambarkan kompleksitas proses pembentukan tindakan sosial politik kemasyarakatan. Bahkan dengan pendekatan tersebut sebuah kesadaran dan nalar pengetahuan yang nantinya dapat membentuk sebuah tindakan akan secara lugas tergambarkan. Hal inilah yang kemudian begitu sangat membedakan dengan kajian dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya. Hanya penelitian inilah yang memakai pendekatan agency dan strukturasi dalam mengkaji realitas dimensi religius dan pendidikan politik.

H. Metode penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini mengungkap makna di balik aktivitas pendidikan politik berdimensi keagamaan yang dilakukan oleh Parpol NasDem Jawa Timur. Sebagai sebuah proses yang mampu membentuk tindakan sosial *(social action)* aktor (para aktivis politik, politisi dan pegiat Parpol NasDem), pendidikan politik memiliki motif ataupun tujuan yang menarik diungkap. Apa yang ditampilkan oleh aktor secara simbolik dan verbalistik dalam bentuk pendidikan politik formal (seperti kegiatan pengkaderan) dan non-formal (seperti pengajian dan bakti sosial), pastinya diorientasikan untuk tujuan tertentu. Apa makna di balik semua itu? merupakan persoalan utama yang dicari oleh penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejalan dengan itu, penelitian ini cenderung memilih metode kualitatif dengan jenis pendekatannya yang bercorak fenomenologis. Pendekatan ini dinilai relevan dalam upaya menggali pemaknaan atas pendidikan politik berdimensi religius berdasarkan pemahaman para aktifis politik, politisi dan pegiat Parpol NasDem Jawa Timur, yang terlibat dan memiliki pengalaman sama dalam peristiwa dimaksud. Berdasarkan pendekatan ini, maka pemaknaan yang dicari oleh peneliti bukanlah makna individual, melainkan makna universal yang disistematisasikan berdasarkan makna-makna yang berasal dari individu-individu yang menjadi subjek penelitian tersebut.[113]

Melalui pendekatan fenomenologi, peneliti memfokuskan diri pada pemahaman mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian (aktor-aktor Parpol NasDem Jawa Timur) dan bagaimana mereka mengalaminya dalam aktivitas pendidikan politik kepartaian. Mendapatkan pemaknaan persoalan yang ditelitinya berdasarkan pengalaman subjek penelitian, merupakan inti dari kerja fenomenologi yang juga diterapkan dalam penelitian ini. Sebagai bagian dari kader NasDem, peneliti sadar betul bahwa peneliti sedikit banyak terpengaruh oleh pengalaman peneliti ketika terlibat dan melibatkan diri dalam peristiwa pendidikan politik kepartaian. Dihadapkan pada problem demikian ini, peneliti berusaha untuk sebisa dan sejauh mungkin,

[113] Studi fenomenologis tidak lain adalah mendeskripsikan pemahaman sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka terkait realitas di sekitarnya. Tujuan utama dari fenomenologi adalah untuk mereduksi pengalaman individu pada fenomena menjadi deskripsi tentang esensi atau intisari universal. Lengkapnya lihat. John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pengurungan ataupun penyingkiran pengalaman peneliti sendiri, untuk lebih memperoleh perspektif yang segar (baru) terhadap fenomena yang sedang dipelajari. Selaras dengan perspektif fenomenologi transcendental.[114] Segala sesuatu yang terkait dengan aktivitas pendidikan politik oleh Parpol NasDem, peneliti pahami sebagai sesuatu yang baru, seolah-olah untuk pertama kalinya meneliti bagi peneliti.

2. Informan

Dalam mencari pemahaman mengenai dimensi religius dalam pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Parpol NasDem Jawa Timur, peneliti mengumpulkan informasi dari sejumlah kalangan pengurus Parpol, kader yang duduk di anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah, Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), kader yang duduk di eksekutif seperti kepala/wakil kepala daerah yang diusung oleh NasDem, kader yang duduk di berbagai organisasi yang menjadi sayap politik Parpol NasDem seperti badan advokasi hukum (BAHU), gerakan massa Buruh (Gemuruh), liga Mahasiswa, garnita (Garda Wanita), garda pemuda (GP), persatuan petani, dan lainnya.

Para kader Parpol NasDem Jawa Timur tersebut, sengaja dipilih

[114] Setidaknya ada dua varian studi fenomenologi yang kerap dijadikan sebagai pendekatan riset, yaitu fenomenologi hermeneutic dan fenomenologi transcendental. Pendekatan fenomenologi hermenutik diarahkan pada pengalaman hidup dan ditujukan untuk menafsirkan 'teks' kehidupan. Sedangkan fenomenologi transcendental kurang berfokus pada penafsiran dari peneliti, melainkan lebih diarahkan pada deskripsi tentang pengalaman dari para partisipan tersebut. John W.Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014),109-110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara purposive sebagai informan dengan berbagai pertimbangan. Para pengurus DPW dipilih menimbang posisinya yang cukup menentukan dalam mengambil berbagai kebijakan dalam kaitannya dengan aktivitas pendidikan politik kepartaian seperti format kegiatan, materi, nara sumber, dan peserta, serta keberlangsungan kegiatan pendidikan poltik tersebut.

Kader partai yang berposisi sebagai anggota dewan (pusat, provinsi dan kabupaten), pejabat pemerintah daerah (Bupati/Walikota), dan aktivis Parpol yang aktif di berbagai organisasi sayap DPW NasDem Jawa Timur, dipilih dengan pertimbangan bahwa mereka itu terlibat dan pastinya memiliki pengalaman yang sama dalam mengikuti pendidikan politik kepartaian.

Berikut ini adalah tabel nama-nama Informan Kader dari unsur Pengurus DPD/DPW/DPP, Eksekutif dan Legislatif partai NasDem Jawa Timur;

KATAGORI						
PENGURUS PARTAI			**EKSEKUTIF**	**LEGISLATIF**		
KORWIL	**DPW**	**DPD**	**BUPATI**	**DPR RI**	**DPRD PROVINSI**	**DPRD KAB/KOTA**
Ibu Jeaned Sujdunadi (Korwil NasDem Jatim 1) Dr. A. Effendy Choirie (Korwil NasDem Jatim 2)	Dr. Rendra Kresna (Ketua DPW), Aminurrahman SE, MM., (Sekretaris), Nico	Sudarsono (Surabaya) Gus Iwan (Gresik) Joko Cahyono (Kab Pasuruan) KH Malik (Bondowoso) Moch Subhan (Lumajang) M. Fadly	Dr. Faida MMR (Jember) Ipong Muchlisoni (Ponorogo)	Drs. H. Hasan Aminuddin M.Si, drg.Yayuk Sri Rahayu Ningsih, M.M.,M.H., KresnaDewanata	Muzammil Syafi'I SH, M.Si, (Ketua Fraksi NasDem Jatim) Achmad Heri (Anggot	Abdul Muid (Surabaya), Zulfikar (Kota Probolinggo), Fajri Yugorahman (Situbondo), Nyai Jakfaroh (Jember), Antok Pramungkajaya (Kab Kediri), Nyamin (Kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Ainul Yakin (OKK), dr. Beni Utomo (Bendahara)	(Kota Malang) Lutfi (Kab Kediri) Neng Muklina (Jombang) Ra Nasikh as-Schall (Bangkalan Ra Abdullah Ibrahim (Pamekasan) Aziz Syabibi (Sumeneb)		Prosakh	a Fraksi NasDem Jatim)	Madiun), HM Sholeh (Kab Mojokerto), Ilham (Tuban), Gus Hudi (Gresik), Ra Bir Ali (Bangkalan),
2 orang	**3 orang**	**11 orang**	**2 orang**	**3 Orang**	**3 orang**	**12 orang**

Tabel 1.1
Nama Informan Kader dari unsur Pengurus DPD/DPW/DPP, Eksekutif dan Legislatif Partai NasDem Jawa Timur

3. Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dari beragam sumber mulai dari informasi, orang, kegiatan, tempat, photo, gambar, dan lainnya. Menimbang jenis data penelitian cukup beragam, maka proses penggaliannya pun dilakukan dengan menggunakan beragam cara pula. Secara garis besar, teknik penggalian data yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup (a) wawancara mendalam (*in-depth interview*), (b) observasi atau pengamatan peran serta (*participant observation*), dan dokumentasi.[115]

a. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Peneliti menggunakan tiga rangkaian wawancara mendalam (*indepth interview*) sebagaimana yang dijelaskan Hadi, yaitu (1) Wawancara yang mengungkap konteks pengalaman informan (2) Wawancara yang memberikan kesempatan partisipan untuk

[115] H.B. Sutopo, *Telaah Karya Penelitian, Sumbangsih Jurnal Penelitian* (Universitas sebelas Maret, No 1 Tahun IV 1988), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merekonstruksi pengalamannya atau wawancara pengalaman detail, dan (3) Wawancara yang mendorong partisipan merefleksikan makna dari pengalaman yang dimiliki.[116]

Peneliti dalam melakukan wawancara mendalam menggunakan pola pertanyaan 5 W (*what, where, when, who,why*), dan 1 H (*how*) dengan meminta informan untuk menceritakan secara mendetail tentang pengalaman selama ada di partai politik, dalam hal ini baik posisinya sebagai ketua partai, pengurus, dewan perwakilan rakyat, kepala daerah atau politisi. Data wawancara yang diperoleh peneliti dijabarkan dalam kisi-kisi berikut di bawah ini :

NO	FOKUS	INDIKATOR
1	Pendidikan politik	a. Perencanaan pendidikan politik b. Pengorganisasian pendidikan politik c. Penggerakan pendidikan politik d. Pengawasan/pengendalian pendidikan politik
2	Dimensi-dimensi religius yang terkandung dalam pendidikan politik partai NasDem Jawa Timur	a. Dimensi Aqidah b. Dimensi Ibadah c. Dimensi Akhlak
3	Implikasi penerapan manajemen pendidikan politik berbasis religius partai NasDem Jawa Timur	a. Implikasi Teoritis penerapan pendidikan politik berbasis religius partai NasDem b. Implikasi Praksis penerapan pendidikan politik berbasis religius partai NasDem baik bagi partai, pengurus, kader, konstituen dan masyarakat.

Tabel 1.2
Data wawancara

b. Pengamatan Berperan serta/*Participant Observation*

Menurut Guba dan Lincoln, observasi peran serta dilakukan

[116] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan alasan: (1) pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung, (2) teknik pengamatan juga memungkinkan peneliti dapat melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya, (3) pengamatan dapat digunakan untuk mengecek keabsahan data, (4) tekhnik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, dan (5) dalam kasus-kasus tertentu dimana penggunaan teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, maka pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.[117]

Adapun hal pokok yang diamati dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	SITUASI YANG DIAMATI
1	Kegiatan rutin Partai Politik
2	Kegiatan berkala/periodik Partai
3	Sarana dan prasarana Partai
4	Media yang digunakan dalam Pendidikan Politik
5	Strategi yang digunakan dalam Pendidikan Politik
6	Prilaku Kader Partai
7	Kegiatan-Kegiatan Pendidikan Politik

Tabel 1.3
Data Observasi

c. Dokumentasi

Dokumen penelitian digunakan untuk acuan selain bahan atau rekaman yang tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu

[117] Lincoln, *Naturalistic Inquiry* (New Delhi: Sage Publication, inc, 1995), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti surat-surat, buku harian, foto-foto, naskah pidato, buku pedoman pendidikan.[118]

Data dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi peran serta sebagai penguat data serta untuk membandingkan data-data yang diperoleh melalui wawancara. Beberapa hal yang akan diperoleh melalui studi dokumentasi secara garis besar meliputi sebagaimana tabel berikut :

NO	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN
1	Profil Partai NasDem Jawa Timur	a. Sejarah b. Manivesto Politik c. Visi Misi d. Program kerja e. Struktur organisasi
2	Pendidikan Politik	a. Dokumen Program Partai b. Naskah/dokumen kurikulum c. Instrumen Pengawasan d. Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan e. Jadwal Kegiatan Partai f. Foto Kegiatan Pendidikan g. Dokumen Lain yang relevan

Tabel 1.4
Data Dokumentasi

4. Analisis Data

Mengingat data dalam penelitian ini berupa hasil wawancara pernyataan, deskripsi kalimat dan lainnya maka terdapat beberapa alur yang difungsikan dalam analisis data; reduksi data, interpretasi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.[119] Reduksi data adalah proses

[118] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Rosdakarya: Bandung, 2000), 161.
[119] Lisa Harrison, *Political Research: An Introduction* (New York and London: Routledge, 2001), 74-80. Alan Bryman, *Research Methods and Organization Studies*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan dan pemusatan data,[120] penyederhanaan data, abstraksi dan transformasi data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan model interaksi menurut Miles & Huberman.[121] Model tersebut tergambar sebagai berikut;

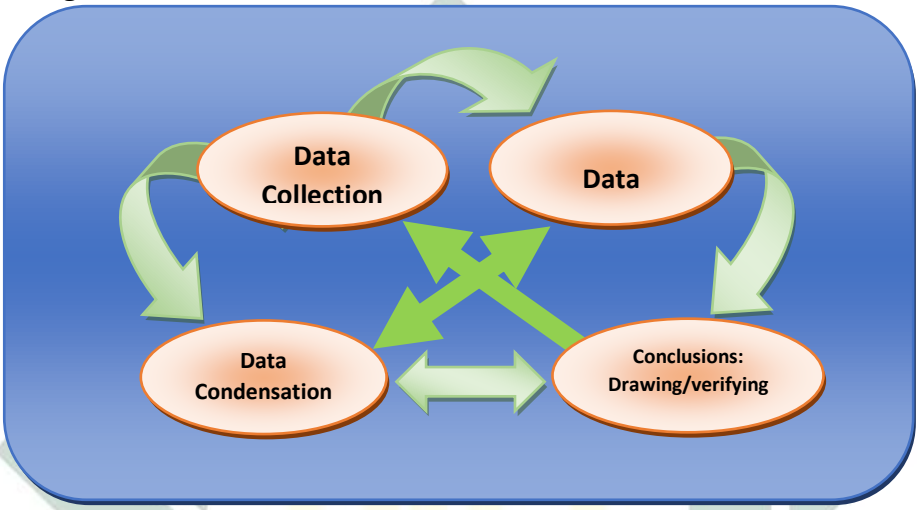

Gambar 1.3
Analisis Model Milles & Huberman

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa alur analisis individu

---

(London and New York: Routledge, 1989), 119-122. Menurut Scott dan Darlington, Sebagai metode koleksi data, wawancara mendalam juga mempunyai kelemahan dan kelebihan. Diantara kekuatan yang dimiliki wawancara mendalam adalah; pertama, memperoleh keuntungan besar yang diperoleh dari wawancara tatap muka. Kedua, wawancara mendalam ini membuka akses terhadap apa yang dinyatakan oleh masyarakat. Wawancara mendalam dalam penelitian kualitatif melibatkan lebih dari sekedar interaksi aktual. Terdapat beberapa tahapan yang perlu dipertimbangkan dalam wawancara mendalam ini; menemukan dan menyeleksi partisipan, membangun koneksi atau hubungan, mempunyai kontak nama, wawancara, membuat rekaman, mengakhiri wawancara. Lihat, Yvonne Darlington and Dorothy Scott, *Qualitative Research in Practice* (Newsouth Wales: Allen and Unwin, 2002), 46-61.

[120] Dalam fenomenologi terdapat suatu pendekatan yang disebut dengan reduksi eidetik yang meliputi; Pertama, proses epos, yakni meletakkan sebagian asumsi atau presuposisi tentang pengalaman. Kedua, membentuk narrative digest, yakni bentuk ringkasan dengan penghapusan narasi yang terlalu detail. Ketiga, reduksi tematik, yakni mempertahankan struktur tematik berkaitan dengan pengalaman secara umum. Lihat, Richard Steven *Phenomenological Approaches to the Study of Conscious Awareness dalam Max Velmans, ed, Investigating Phenomenal Consciousness* (Philadelphia: John Benjamins Publishing Co, 2000), 109.

[121] M.B. Miles, & A.M. Huberman, *qualitatif analysis*, (Penerjemah: Rohidi, R. T.). (Jakarta: UI-Press., 1992), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari gambar analisis Miles & Huberman maka langkah-langkah analisis diantaranya:

a. Kondensasi data

Kondensasi data ini mengacu pada proses memilih, memfokuskan penyederhanaan, abstrak, dan membentuk data yang muncul dalam korpus atau catatan lapangan yang ditulis, baik berupa transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Dengan kondensasi, mampu menjadikan data lebih kuat dan gampang dipahami.

Kondensasi data terjadi secara terus menerus sepanjang kehidupan yang berorientasi kualitatif proyek. Bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan, kondensasi data antisipatif terjadi ketika peneliti memutuskan (seringkali tanpa kesadaran penuh) kerangka kerja konseptual mana yang terjadi, pertanyaan penelitian mana, dan pendekatan pengumpulan data mana yang harus dipilih.

Ketika pengumpulan data berlanjut, lebih lanjut dari kondensasi data terjadi pada penulisan ringkasan, pengkodean mengembangkan tema, menghasilkan kategori, dan proses transformasi kondensasi berlanjut setelah pekerjaan selesai, sampai laporan akhir selesai menulis analitik.

Kondensasi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Akan tetapi merupakan bagian dari analisis. Keputusan peneliti - data mana yang dipecah menjadi kode dan yang harus ditarik, label mana yang paling baik merangkum sejumlah isi dan mengembangkan cerita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menceritakan semua pilihan analitik. Kondensasi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, menyortir, memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian data

Cara ini peneliti lakukan dengan jalan memaparkan data secara rinci dan sistematis setelah dianalisis ke dalam format yang disiapkan untuk itu. Namun data yang disajikan ini masih dalam bentuk sementara untuk kepentingan peneliti dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut secara cermat hingga diperoleh tingkat keabsahannya. Jika ternyata data yang disajikan telah teruji kebenarannya dan telah sesuai, maka dapat dilanjutkan pada tahap penarikan kesimpulan sementara. Namun jika ternyata data yang disajikan belum sesuai, maka konsekuensinya belum dapat ditarik kesimpulan, melainkan dilakukan reduksi kembali bahkan tidak menutup kemungkinan untuk menjaring data baru.[122]

c. Penarikan kesimpulan/temuan sementara

Sejak awal proses pengumpulan data di lapangan, peneliti dimungkinkan untuk menarik kesimpulan. Pada saat peneliti memberi arti atau memaknai data-data yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara maupun studi dokumentasi berarti peneliti telah menarik kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan ini masih bersifat sementara, sebab pada awalnya belum jelas, dan masih berpeluang untuk berubah sesuai

[122] Miles dan Huberman, *Qualitatif Data Analysis* (California: Sage Publication Inc, 1988), 21-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi yang berkembang di lapangan.

Proses ini disebut sebagai proses verifikasi, setelah dilakukan reduksi data secara berulang dan diperoleh kesesuaian dengan penyajian data. Proses ini merupakan jalan dalam menemukan kesimpualan sementara penilitian ini.

d. Penarikan kesimpulan/temuan akhir

Setelah temuan-temuan sementara dilakukan verifikasi melalui teknik-teknik pengecekan keabsahan temuan penelitian, selanjutnya dirumuskan kesimpulan temuan-temuan yang merupakan hasil-hasil penelitian.

Data-data termaksud hasil catatan dari selama proses di lapangan. Sementara reduksi data lebih jauh dilakukan dengan jalan meringkas data, mengode data, menelusuri tema dan membuat gugus-gugus. Sementara penyajian atau presentasi data adalah penyusunan informasi atau data yang telah direduksi. Model presentasi data berbentuk dua macam, yakni teks naratif atas data atau informasi dari lapangan dan matriks atau grafik.

Dari penegasan di atas, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahap sebagaimana ditegaskan oleh Creswell yang meliputi: peneliti mulai mendeskripsikan seluruh pengalamannya, peneliti menemukan pernyataan dan pernyataan tersebut dikelompokan kedalam unit-unit bermakna, merefleksikan pemikiran informan, mengonstruksi penjelasan tentang makna dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

esensi, integrasi pengungkapan pengalaman peneliti dengan informan.[123]

5. Keabasahan Data

Dalam pengecekan data diperlukan teknik pemeriksaan, pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas kriteria tertentu.[124] Dalam hal ini peneliti menggunakan pengecekan data dengan kredibilitas. Kriteria kredibilitas data digunakan untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan peneliti mengandung nilai kebenaran, baik bagi pembaca pada umumnya maupun subjek penelitian. Untuk menjamin validitas data, ada lima teknik pencapaian kredibilitas data, perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangngulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, dan pengecekan anggota. Agar diperoleh temuan-temuan yang dapat dijamin tingkat keterpercayaannya, maka peneliti berupaya dengan menempuh cara yang disarankan oleh Lincoln, Guba dan Moleong, yang hanya dipih salah satunya yaitu pengujian melalui triangngulasi. Cara ini dilakukan oleh peneliti sebagai upaya untuk membandingkan dan mengecek derajat keterpercayaan temuan melalui triangngulasi sumber. Adapun selanjutnya dilakukan Triangngulasi sumber. Pada sisi ini yang peneliti lakukan adalah dengan membandingkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian ini dari berbagai sumber untuk permasalahan sejenis melalui informan yang satu dengan informan lainnya tentang fokus penelitian.

---

[123] John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions* (London: Sage Publications, 1998), 147-150.
[124] Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif.* (Rosdakarya: Bandung, 2000), 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini akan dijelaskan kerangka pemikiran yang digunakan dalam menyusun disertasi ini, yang mana pembahasannya dibagi menjadi dua, yaitu pembahasan secara teoretis berdasarkan literatur yang ada, serta pembahasan analisis yang berdasarkan data-data yang diperoleh dilapangan, untuk mempermudah dan memperjelas proses penyusunan disertasi ini. Adapun sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut.

Bab *pertama*, Pendahuluan. Bab ini menjabarkan beberapa aspek yang melatarbelakangi penelitian ini. Bab ini juga meliputi identitifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretik dan beberapa penelitian terdahulu.

Bab *kedua*, kajian tentang Pendidikan Politik Berdimensi Agama, ini difungsikan untuk mendukung tema atau topik di atas. Bab ini memuat beberapa konsep dan teori dari berbagai sumber yang mendukung topik kajian ini. Beberapa konsep dan teori tersebut disistematisasikan ke dalam beberapa sub-bab.

Bab *ketiga* adalah profil Partai NasDem Jawa Timur yang berawal dari organisasi massa, proses berdirinya Partai NasDem menjadi partai politik, positioning partai, realitas Partai NasDem Jawa Timur.

Realitas dimensi religius dalam pendidikan politik Partai NasDem Jawa Timur yang berisikan dimensi religiusitas Partai NasDem Jawa Timur, pendidikan politik Partai NasDem Jawa Timur, praksis pendidikan politik Partai NasDem Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab *keempat*, adalah penyajian data analisis yang berisi tentang deskripsi data tentang dimensi-dimensi religius yang terkandung dalam pendidikan politik Partai NasDem Jawa Timur berurutan yaitu pendidikan politik Partai NasDem dan dimensi-dimensi religius pendidikan, implikasi penerapan pendidikan politik berbasis religius Partai NasDem Jawa Timur.

Analisis pendidikan politik berbasis religius Partai NasDem Jawa Timur menggunakan persepektif stukturasi Anthony Giddens. Melalui paradigma ini, pelibatan aspek-aspek keagamaan dalam pendidikan politik oleh Parpol NasDem dipahami dalam kerangka dialektis antara agen (aktivis dan politisi santri) dan struktur. Sekaligus membahas analisis konsepsi dimensi religius. Analisis ini terfokus pada proses pembentukan konsepsi dimensi religius berikut unsur-unsur di dalamnya. Di samping itu, bab ini memuat analisis strukturasi dengan perangkat konseptual berupa model stratifikasi tindakan dan model stratifikasi struktur serta aspek pemberdayaan dan pengekangan. Meski demikian, analisis ini tidak bisa mengabaikan triangngulasi teoritik sebagai bagian dari dialektika antar teori namun tetap berpusat pada perspektif strukturasi tersebut, Selain itu juga membahas tentang analisis manifestasi dimensi religius. Analisis ini menitikberatkan pada bagaimana dimensi tersebut dimanifestasikan dalam fungsi dan peran struktural kader baik pengurus, legislator, eksekutor, dengan menggunakan perspektif strukturasi.

Bab *kelima*, Penutup. Bab terakhir ini terdiri atas kesimpulan, implikasi teoretik, keterbatasan kajian dan rekomendasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENDIDIKAN POLITIK BERDIMENSI AGAMA

A. Relasi Agama dan Politik

Pelibatan agama dalam aktivitas perpolitikan praktis, termasuk di dalamnya pendidikan politik, yang diselenggarakan oleh partai politik (baca: parpol) tertentu, selalu memunculkan perdebatan di kalangan para ahli. Setidaknya, terdapat dua kutup cara pandang yang terlihat bertolak belakang (kontradiksi) satu sama lain. Pertama, pandangan yang menilai pemanfaatan agama dalam perpolitikan lebih dilihat sebagai bentuk kepentingan aktor dalam melakukan agamaisasi (ideologisasi keagamaan) politik. kedua, pandangan yang melihat penggunaan agama dalam perpolitikan lebih sebagai bentuk politisasi agama untuk kepentingan politik praktis.[1]

Jika dirunut ke belakang, pandangan pertama lebih banyak dipengaruhi oleh aliran integralisme ataupun teosentrisme yang melihat kesatuan antara agama dan politik. Dalam Islam, pandangan ini banyak dianut oleh kalangan Islamis ataupun Islam politik yang dalam aktivitas perpolitikannya selalu berorientasi pada formalisasi Islam dalam kehidupan politik. Prinsip utama aliran teosentrisme ini adalah bahwa antara agama dan politik itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam konsepsinya, mereka itu bahkan mendefinisikan Islam sebagai *al-dịn wa al-daulah* (kesatuan agama dan kekuasaan/politik).

[1] Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer, Konsep, Genealogi, dan Teori* (Yogyakarta: Suka Press: UIN Sunan Kalijaga, 2012), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu, pandagan kedua banyak dipengaruhi oleh pemikiran kritis ekonomi-politik Marxisme sebagai kritik terhadap praktek kapitalisme modern. Dalam dunia kapitalisme, semua hal, termasuk agama, senyampang bisa dikomodifikasi untuk mendatangkan keuntungan material, maka ia akan dimanfaatkan sedemikian rupa. Agama yang selama ini menjadi musuh modernitas ataupun kapitalisme, ternyata cukup ampuh dikapitalisasi ataupun dikomodifikasi sedemikian rupa yang muaranya tidak lain adalah mendapatkan keuntungan material melalui penciptaan mistifikasi di kalangan masyarakat beragama. Cara pandang kedua ini dikenal dengan sebutan kapitalisasi, komersialisasi dan komodifikasi.

Di luar dua kutub tersebut, terdapat pandangan yang mencoba menawarkan alternatif cara pandang teoretis yang tidak sepenuhnya bersifat deterministik. Secara normative, agama memang berisi ajaran dan nilai luhur yang dapat mendorong umatnya untuk bertindak sesuai dengan imperative agama. Hanya saja dalam prakteknya, ketika agama sudah berada di tangan umatnya, maka percampuradukan antara imperatif ketuhanan dan hasrat kemanusiaan, menjadi realitas yang tidak bisa dihindarkan. Di tangan aktor politik tertentu, agama bisa menjadi sumber etik, nilai, moral, dan ajaran yang dapat digunakan untuk mengarahkan aktivitas perpolitikan secara lebih luhur. Tidak menutup kemungkinan pula agama di tangan aktor politik lainnya bisa menjadi ideologi dan bahkan modal yang dikapitalisasi untuk kepentingan agama ataupun perpolitikan itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks pendidikan politik yang diselenggarakan oleh aparat Partai NasDem dan parpol-parpol lainnya, kapasitasnya sebagai agen atau aktor politik (political agents), pelibatan dimensi-dimensi keagamaan (religiusitas) dalam aktivitas pendidikan politik, tentu saja membuka peluang bagi berbagai kemungkinan, mulai dari ideologisasi, kapitalisasi dan bahkan sumber etik, moral dan nilai. Semua ini tergantung pada beragam kepentingan aktor yang tidak pernah tunggal. Bagaimanapun setiap parpol dan/atau politisi inherent memiliki kepentingan yang bersifat baik praktis-pragmatis maupun idealistik. Karena itulah, pemahaman terhadap aktivitas pendidikan politik berdimensi agama yang dilakukan aktor, penting untuk mempertimbangkan kompleksitas jalinan relasional beragam kepentingan itu.

Lebih lanjut, bab ini menyajikan diskursus konseptual dan teoretis terkait dengan pokok persoalan riset. Partai politik sebagai aktor, aktvitas aktor dalam menyelenggarakan pendidikan politik, dan pemanfaatan agama dalam pendidikan politik, merupakan sejumlah persoalan konseptual-teoretis yang dipandang penting untuk dielaborasi dalam bab kajian teori ini. Principle, pemaparan teori di sini dimaksudkan sebagai mitra dialog peneliti dalam memahami dan menjelaskan pokok persoalan secara dialektik.

B. Partai Sebagai Aktor Politik

Dalam berbagai literatur, parpol sendiri dipahami sebagai kumpulan sekelompok individu yang terorganisir dengan tujuan untuk memperebutkan kekuasaan dan sekaligus menciptakan kebajikan publik. Carl Friendrich, misalnya, memberikan batasan konsepsional parpol sebagai sekelompok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin materiil dan idiil kepada para anggotanya. Dalam pengertian yang hampir sama, Saltou menjelaskan bahwa parpol itu sebagai sesuatu yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan yang memanfaatkan kekuasaannya untuk kebijakan umum yang mereka buat.[2]

Secara historis, kehadiran parpol di setiap negara tidaklah seragam, melainkan beragam. Setidaknya ada tiga teori yang menjelaskannya yaitu, teori kelembagaan, teori situasi historic, dan teori pembangunan. Pertama, teori kelembagaan yang menjelaskan bahwa parpol dibentuk oleh kalangan legislatif dan eksekutif karena ada kebutuhan para anggota parlemen (yang ditentukan berdasarkan pengangkatan) untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari mereka. Tidak sebatas oleh pemeritah, kemunculan parpol juga bisa berasal dari elemen masyarakat yang sadar politik berdasarkan penilaian bahwa parpol yang dibentuk pemerintah tidak mampu menampung dan memperjuangkan kepentingan mereka.[3]

Kedua, teori situasi historic yang berpandangan bahwa krisis situasi historis terjadi manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang berstruktur kompleks. Dalam kondisi semacam ini, berbagai perubahan pun bermunculan seperti ledakan penduduk karena perbaikan fasilitas kesehatan, perluasan Pendidikan, perubahan pola

[2] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 148.
[3] Ibid., 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan, partisipasi media, peningkatan aspirasi dan harapan baru dari masyarakat.

Perubahan-perubahan ini menimbulkan, sekurang-kurangnya, tiga krisis utama, yakni legitimasi, integrasi dan partisipasi. Dampaknya, masyarakat pun kian memiliki keberanian untuk mempertanyakan prinsip-prinsip yang mendasari legitimasi kewenangan pihak yang memerintah, menimbulkan masalah dalam hal identitas sebagai warga negara, dan timbulnya tuntutan yang semakin besar untuk ikut serta dalam proses politik. Dalam konteks historis demikian inilah, parpol yang berakar kuat dalam masyarakat dihadirkan oleh sekelompok individu untuk mengendalikan pemerintahan sehingga terbentuk pola hubungan kewenangan yang berlegitimasi antara pemerintah dan masyarakat.[4]

Ketiga, teori pembangunan yang melihat parpol sebagai produk modernisasi sosial-ekonomi. Keberlangsungan pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pedidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan negara, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. Dalam konteks ini, kehadiran parpol dapat dimengerti sebagai produk logis dari modernisasi sosial-ekonomi yang berlangsung dalam kehidupan suatu Negara.[5]

[4] Ibid., 145.
[5] Ibid., 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut, kehadiran parpol dalam negara modern yang menganut sistem politik demokrasi, dipandang sebagai suatu keniscayaan. Bagaimanapun, parpol merupakan elemen determinan yang menjamin keberlangsungan proses demokratisasi. Tanpa keterlibatan parpol, sistem politik demokrasi, yang salah satunya dicirikan oleh pengaturan kekuasaan negara, dapat dipastikan, berlangsung kacau. Pemilihan umum (Pemilu) yang dijadikan sebagai instrumen politik demokratis dalam memilih pemimpin negara ataupun perwakilan rakyat di parlemen, juga mensyaratkan kehadiran parpol. Demikian halnya dengan partisipasi publik dalam proses-proses perpolitikan seperti pemilu, tidak akan bisa berlangsung tanpa keterlibatan parpol. Singkatnya, keberadaan parpol merupakan prasyarat utama bagi proses keberlangsungan dan keberjalanan proses perpolitikan negara-bangsa yang menganut sistem demokrasi.

Sebagai instrumen politik-demokrasi, parpol tepat pula diposisikan sebagai aktor politik yang memiliki tugas riil berupa melaksanakan fungsi dan tugas politik dalam mendorong perwujudan demokrasi. Hal ini tidak berlebihan mengingat parpol memiliki peran dan fungsi kepolitikan yang cukup banyak seperti sosialisasi politik,[6] partisipasi politik,[7] komunikasi politik,[8] pengendalian konflik,[9] kontrol politik,[10] dan lain-lain.

---

[6] Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat melalui mekanisme yang disengaja seperti pendidikan politik (formal, informal, non-formal) maupun tidak disengaja seperti kontak dan pengalaman sehari-hari. Ibid., 149-150.

[7] Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Dalam hal ini, parpol memiliki fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota masyarakat untuk menggunakan parpol sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Ramlan Ibid., 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Sosialisasi dan Pendidikan Politik

1. Pengertian

Hampir setiap pembahasan mengenai pendidikan politik *(political education)* tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan sosialisasi politik *(political sucialization).* Menurut Ramlan Surbakti, dalam memberikan pengertian tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik. Surbakti berpendapat bahwa sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.[11]

Pendapat di atas secara tersirat menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik. Pendidikan politik

---

[8] Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya. Dalam hal ini, parpol berfungsi sebagai komunikator politik yang menyampaikan tidak saja segala keputusan pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), 152-153.

[9] Konflik yang dimaksud di sini adalah konflik dalam pengertian luas yang mencakup mulai dari perbedaan pendapat sampai pertikaian fisik antar-individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam negara modern, setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasinya sehingga konflik sulit untuk dihindarkan. Meski demikian, potensi konflik yang ada penting untuk dikelola secara demokratis pula. Parpol sendiri memiliki fungsi pengendali konflik melalui cara dialog, menampung aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), 153-154.

[10] Kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Tolok ukur control politik tidak lain berupa nilai-nilai ideal dan baik (ideologi) yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan atau peraturan perundangan. Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), 154.

[11] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia 1999).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajarkan masyarakat untuk lebih mengenal sistem politik negaranya. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

David Easton dan Jack Dennis dalam bukunya *Children in the Political System* memberikan batasan mengenai *political sosialization* sebagai *political sosializationis development process which persons acquire arientation and paterns of behaviour*.[12] Sedangkan Fred I. Greenstain dalam bukunya *Political Socialization* berpendapat bahwa:

> *Political socialization is all political learning formal and informal, delibrete and unplanne, at every stage of the life cycle inchiding not only explicit political tearning but also nominally nonpolitical learning of political lie relevant social attitudes and the acquistion of politically relevant personality characteristics*.[13]

Kedua pendapat di atas mengungkapkan bahwa pendidikan politik adalah suatu bentuk pendidikan yang dijalankan secara terencana dan disengaja baik dalam bentuk formal maupun informal yang mencoba untuk mengajarkan kepada setiap individu agar sikap dan perbuatannya dapat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku secara sosial. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa pendidikan politik tidak hanya mempelajari sikap dan tingkah laku individu, namun juga mengaitkan sikap dan tingkah laku individu tersebut dengan stabilitas dan eksistensi sistem politik.

---

[12] David Easton and Jack Dennis, *Children in the Political System: Origins of Political Legitimacy* (Pp. xvi, 440. New York: McGraw-Hill, 1969), 9.95.
[13] Al Muchtar, Suwarma *Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia* (Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2000).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kartini Kartono memberikan pendapatnya tentang hubungan antara pendidikan dengan politik yaitu pendidikan dilihat sebagai faktor politik dan kekuatan politik. Sebabnya, pendidikan dan sekolah pada hakekatnya juga merupakan pencerminan dari kekuatan-kekuatan sosial-politik yang tengah berkuasa, dan merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada.[14]

Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita ketahui bahwa pendidikan dan politik adalah dua unsur yang saling mempengaruhi. Pengembangan sistem pendidikan harus selalu berada dalam kerangka sistem politik yang sedang dijalankan oleh pemerintahan masa itu. Oleh karena itu segala permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan akan berubah menjadi permasalahan politik pada saat pemerintah dilibatkan untuk memecahkannya.

Pengertian dari pendidikan politik yang lebih spesifik dapat diambil dari pendapatnya Alfian yang mengatakan bahwa: Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka rnemahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.[15]

Dari dua definisi yang tertera di atas, dapat kita ambil dua tujuan utama yang dimiliki oleh pendidikan politik. Pertama, dengan adanya pendidikan politik diharapkan setiap individu dapat mengenal dan

---

[14] Kartini, Kartono, *Wawasan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1990).

[15] Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, Kumpulan Karangan* (Jakarta: PT Gramedia, 1981), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan. Kedua, bahwa dengan adanya pendidikan politik setiap individu tidak hanya sekedar tahu saja tapi juga lebih jauh dapat menjadi seorang warga negara yang memiliki kesadaran politik untuk mampu mengemban tanggung jawab yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kadar partisipasi dalam dunia politik.

Rusadi Kartaprawira mengartikan pendidikan politik sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.[16] Berdasarkan pendapat Rusadi Kartaprawira tersebut, maka pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Pembelajaran pendidikan politik yang berkesinambungan diperlukan, mengingat masalah-masalah di bidang politik sangat kompleks, bersegi banyak, dan berubah-ubah.

Merujuk pada semua pengertian pendidikan politik yang disampaikan oleh beberapa ahli di atas, pada akhirnya telah membawa peneliti sampai pada kesimpulan yang menyeluruh. Bahwa yang dimaksud dengan pendidikan politik adalah suatu upaya sadar yang dilakukan antara pemerintah dan para anggota masyarakat secara terencana, sistematis, dan dialogis dalam rangka untuk mempelajari dan menurunkan berbagai konsep,

[16] Rusadi, Kantaprawira, *Sistem Polilik Indonesia: Suatu Model Pengantar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

simbol, hal-hal dan norma-norma politik dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

2. Fungsi Pendidikan Politik

Fungsi pendidikan politik sangat penting sebab pendidikan politik meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik yang pada gilirannya akan mendorong timbulnya kesadaran politik secara maksimal dalam suatu sistem politik. Merujuk pada beberapa pengertian pendidikan politik yang telah disebutkan sebelumnya, maka pendidikan politik mempunyai dua tujuan utama. *Pertama*, fungsi pendidikan politik adalah untuk mengubah dan membentuk tata perilaku seseorang agar sesuai dengan tujuan politik yang dapat menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang bertanggung jawab. *Kedua*, fungsi pendidikan politik dalam arti yang lebih luas untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang sesuai dengan tuntutan politik yang ingin diterapkan. Inti dari pendidikan politik adalah mengenai bagaimana rakyat direkrut dan disosialisasikan. Jadi, fungsi dari pendidikan politik adalah untuk menjelaskan proses perekrutan dan upaya sosialisasi kepada rakyat untuk mengerti mengenai peranannya dalam sistem politik serta agar dapat memiliki orientasi kepada sistem politik.

Fungsi yang disampaikan di atas lebih menonjolkan fungsi pendidikan politik dalam mengubah tatanan masyarakat yang ada menjadi lebih baik dan lebih mendukung tercapainya proses demokrasi. Sedangkan fungsi pendidikan politik bagi individu antara lain adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Peningkatan kemampuan individual supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalu lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin padat penuh sesak dan terpolusi oleh dampak bermacam-macam penyakit sosial dan kedurjanaan.
b. Disamping mengenai kekuasaan, memahami mekanismenya, ikut mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat.

Hubungan Partai politik dengan pendidikan politik bisa dirunut dari fungsi partai itu sendiri. Karena partai politik memiliki 4 fungsi yang salah satu dari fungsi tersebut adalah pendidikan politik untuk anggota partai itu sendiri maupun untuk masyarakat umum.

Sementara Partai politik menurut Miriam Budiardjo adalah organisasi atau golongan yang berusaha untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan. Yang mana dalam memperoleh kekuasaan itu dibutuhkan cara dan teknis maupun ideologi untuk memperolehnya. Partai politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa, dan negara sekaligus sebagai sarana kondensasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional.[17]

Sedangkan fungsi partai politik dalam negara demokrasi ada empat yaitu

a. Sebagai sarana komunikasi politik.

[17] Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai media atau perantara antara rakyat dengan pemerintah. Fungsi tersebut dilaksanakan dengan mendengarkan, menggabungkan, dan merumuskan aspirasi yang berasal dari masyarakat, lalu dituangkan dalam bentuk program partai. Perumusan dalam bentuk program tersebut mencerminkan inti dari aspirasi yang berasal dari masyarakat untuk diperjuangkan dalam proses pembuatan kebijaksanaan umum. Apabila fungsi ini tidak dapat terlaksana, maka akibatnya aspirasi dan kepentingan masyarakat akan hilang, atau bahkan dapat memunculkan konflik kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan demikian, partai politik menjadi penyalur aspirasi yang datang dari bawah (masyarakat).

b. Sebagai sarana sosialisasi politik.

Dalam proses sosialisasi, partai politik berfungsi untuk menyebarluaskan dan menerangkan serta mengajak masyarakat menghayati norma-norma dan nilai-nilai politik. Melalui kegiatan ini partai politik ikut membina serta memantabkan norma-norma dan nilai-nilai politik yang berlaku di masyarakat. Usaha sosialisasi dapat diwujudkan melalui penerangan hak dan kewajiban warga negara, pentingnya ikut pemilihan umum, menyelenggarakan kursus-kursus kader, dan lain sebagainya.

c. Sebagai sarana rekrutmen politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). Dengan demikian, partai politik turut serta dalam memperluas partisipasi politik masyarakat. Contoh nyata dalam kehidupan bernegara adalah, adanya usaha untuk mewariskan nilai-nilai dari generasi terdahulu kepada generasi muda melalui rekrutmen dan pembinaan generasi muda.

d. Sebagai sarana pengatur konflik dalam masyarakat.

Dalam suasana demokratis, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Namun apabila sampai terjadi konflik, partai politik wajib berusaha untuk mengatasinya. Dalam masyarakat yang sangat heterogen sifatnya, perbedaan etnis, status, sosial ekonomi, ataupun agama, sangat mudah sekali mengundang konflik. Konflik-konflik yang timbul semacam itu dapat diatasi dengan bantuan partai politik, minimal dapat memperkecil akibat-akibat negatif yang timbul dari konflik-konflik tersebut.

Fungsi pendidikan politik bagi individu yang tertera di atas tidak hanya mengubah individu tapi juga membentuk individu yang baru. Dalam artian bahwa seseorang individu dengan melalui pendidikan politik tidak hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang politik tapi juga mempunyai kesadaran dan sensitifitas dalam berpolitik yang direalisasikan dalam bentuk perbuatan yaitu dengan ikut berpartisipasi atau ditunjukkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sikap dan perilaku positif yang lebih luas dalam usahanya untuk mencapai tujuan politik.

3. Tujuan Pendidikan Politik

Tujuan diadakannya pendidikan politik secara formal terdapat dalam Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda yang menyatakan bahwa: Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.[18]

Berdasarkan pemaparan tentang tujuan pendidikan politik di atas, peneliti berpendapat bahwa yang menjadi tujuan utama dari pendidikan politik adalah agar generasi muda saat ini memiliki kemampuan untuk memahami situasi sosial politik penuh konflik. Aktifitas yang dilakukan pun diarahkan pada proses demokratisasi serta berani bersikap kritis terhadap kondisi masyarkat di lingkungannya. Pendidikan politik mengajarkan mereka untuk mampu mengembangkan semua bakat dan kemampuannya, aspek kognitif, wawasan kritis, sikap positif, dan keterampilan politik. Kesemua itu dirancang agar mereka dapat mengaktualisasikan diri dengan jalan ikut berpartisipasi secara aktif dalam bidang politik.

[18] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda di Jakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tujuan pendidikan politik di atas, dapat dilihat bahwa antara tujuan pendidikan politik dengan fungsi yang dimilikinya hampir sama. Tercapainya fungsi dan tujuan pendidikan politik merupakan keberhasilan dari diadakannya pendidikan politik itu sendiri.

4. Bentuk Pendidikan Politik

Keberhasilan pendidikan politik tidak akan dapat tercapai jika tidak dibarengi dengan usaha yang nyata di lapangan. Penyelenggaraan pendidikan politik akan erat kaitannya dengan bentuk pendidikan politik yang akan diterapkan di masyarakat nantinya. Oleh karena itu, bentuk pendidikan politik yang dipilih dapat menentukan keberhasilan dari adanya penyelenggaraan pendidikan politik ini.

Bentuk pendidikan politik menurut Rusadi Kartaprawira dapat diselenggarakan antara lain melalui:

a. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum.
b. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media).
c. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal.[19]

Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita lihat bahwa pendidikan politik dapat diberikan melalui berbagai jalur. Pemberian pendidikan politik tidak hanya dibatasi oleh lembaga seperti persekolahan atau organisasi saja,

[19] Rusdi, Kantaprawira, *Sistem Polilik Indonesia: Suatu Model Pengantar, (*Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun dapat diberikan melalui media, misalnya media cetak dalam bentuk artikel.

Apapun bentuk pendidikan politik yang akan digunakan dan semua bentuk yang disuguhkan di atas sesungghnya tidak menjadi persoalan. Aspek yang terpenting adalah bahwa bentuk pendidikan politik tersebut mampu untuk memobilisasi simbol-simbol nasional sehingga pendidikan politik mampu menuju pada arah yang tepat yaitu meningkatkan daya pikir dan daya tanggap rakyat terhadap masalah politik. Selain itu, bentuk pendidikan politik yang dipilih harus mampu meningkatkan rasa keterikatan diri (sense of belonging) yang tinggi terhadap tanah air, bangsa dan negara.

Apabila diasosiasikan dengan bentuk politik yang tertera di atas, maka menurut peneliti yang menjadi tolak ukur utama keberhasilan pendidikan politik terletak pada penyelenggaraan bentuk pendidikan politik yang terakhir yaitu melalui jalur lembaga atau asosiasi dalam masyarakat. Dalam hal ini peneliti sangat sependapat bila pendidikan politik lebih ditekankan melalui jalur pendidikan formal. Pendidikan politik formal yaitu pendidikan politik yang diselenggarakan melalui lembaga resmi (sekolah).

5. Urgensi Pendidikan Politik

Pendidikan politik dapat dikatakan sebagai media penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk membuat warga negara menjadi lebih melek politik. Warga negara yang melek politik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapat ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap proses pembangunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan politik diperlukan keberadaannya terutama untuk mendidik generasi muda saat ini yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa.

Eksistensi pendidikan politik di sini adalah sebagai tongkat estafet kepada generasi selanjutnya dalam memahami konsep-konsep politik kenegaraan. Fungsi pendidikan politik yang paling penting adalah sebagai penyaring (filter) terhadap berbagai pemikiran baru, ideologi baru dan berbagai ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Pemerintah telah menyadari bahwa generasi muda saat ini tengah hidup di dalam era globalisasi yang penuh dengan persaingan dan kompetisi antar individu. Kebebasan menjadi satu bagian yang penting dalam era ini. Sadar akan hal tersebut, pemerintah mencoba untuk membangun tameng yang dapat melindungi generasi muda saat ini dari pelunturan dan penghilangan jati diri bangsa. Kehawatiran pemerintah ini tercermin dalan Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda yang di dalamnya menyebutkan bahwa: Kaum muda dalam perkembangannya berada dalam proses pembangunan dan modernisasi dengan segala akibat sampingannya yang bisa mempengaruhi proses pendewasaanya sehingga apabila tidak memperoleh arah yang jelas maka corak dan warna masa depan negara dan bangsa akan menjadi lain dari pada yang dicita-citakan.20

[20] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda di Jakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkembangan zaman yang terasa sangat cepat jika tidak dibarengi dengan wawasan berpikir yang luas hanya akan membawa generasi muda bangsa ini ke dalam kehidupan yang lepas kendali. Oleh karena itu, pendidikan politik diperlukan sebagai filter terhadap segala pengaruh buruk yang mungkin datang.

Jadi, pada kesimpulannya pendidikan politik merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam memberikan arah pada generasi muda saat ini agar memiliki pemahaman yang jelas terhadap arah tujuan bangsa.

6. Pokok-Pokok Materi Pendidikan Politik

Pokok-pokok materi pendidikan politik sepenuhnya tertuang sebagai muatan yang terkandung dalam kurikulum pendidikan politik. Kurikulum pendidikan politik adalah jarak yang harus ditempuh oleh seorang siswa dalam mencapai target yaitu melek politik yang ditandai dengan menguatnya daya nalar terhadap berbagai aktifitas politik dalam infrastruktur maupun suprastruktur politik

Robert Brownhill mengajukan beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam proses pembuatan kurikulum pendidikan politik, yaitu:

a. Suatu etika yang mendasar harus dikembangkan, yang mencakup penghormatan terhadap yang lain, toleransi, dan pemahaman tentang prinsip memperlakukan orang lain sebagaimana diri sendiri ingin diperlakukan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebuah pertimbangan tentang bagaimana aturan dapat diubah;
c. Sifat aturan dan otoritas/hak;
d. Konsep kewajiban untuk melegitimasi otoritas/hak;
e. Pemahaman tentang beberapa konsep politik dasar, misalnya, kebebasan, persamaan, keadilan, supremasi hukum, dan beberapa argumen yang terkait dengan konsep-konsep ini;
f. Pemahaman tentang struktur dasar pemerintah pusat dan daerah.
g. Beberapa pemahaman tentang kinerja ekonomi nasional dan internasional;
h. Beberapa pengetahuan tentang sejarah Brotish dan internasional terkini;[21]

Berdasarkan pendapat Robert Brownhill di atas, jelas terlihat bahwa dalam mengembangkan kurikulum pendidikan politik, seorang guru harus pula memasukkan mata pelajaran lain yang sekiranya ada hubungannya dengan pendidikan politik seperti di atas disebutkan yaitu mata pelajaran sejarah dan ekonomi dalam artian bahwa mata pelajaran lain tersebut bersifat sebagai pelengkap (komplementer) terhadap pendidikan politik.

Kurikulum pendidikan politik yang dicanangkan oleh Robert Brownhill di atas telah cukup lengkap. Seperti kita lihat, Brownhill tidak hanya memasukkan unsur materi politik namun juga terdapat unsur etika, ketaatan pada hukum dan kekuasaan, pemahaman terhadap jalannya pemerintahan dan pembuatan kebijakan, serta masalah ekonomi dan sejarah.

[21] Brownhill, Robert and Patricia Smart. *Political Education* (London and New York: Routledge: 1989), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal-hal yang mengenai kurikulum pendidikan politik diatur dalam Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda yang menyebutkan bahwa bahan pendidikan politik antara lain: (a) penanaman kesadaran berideologi, berbangsa, dan bernegara; (b) kehidupan dan kerukunan hidup beragama; (c) motivasi berprestasi; (d) pengamalan kesamaan hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia; (e) pengembangan kemampuan politik dan kemampuan pribadi untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginan ikut serta dalam politik; (f) disiplin pribadi, sosial, dan nasional; (g) kepercayaan pada pcmcrintah; (h) kepercayaan pada pembangunan yang berkesinambungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa terdapat satu materi yang membedakan kurikulum pendidikan politik menurut Brownhill dengan bahan kurikulum pendidikan politik di Indonesia. Dalam kurikulum pendidikan politik di Indonesia, telah memasukkan unsur materi agama yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam bahan pendidikan politik.

Bahan pendidikan politik di Indonesia harus bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan berbagai makna yang dipetik dari perjuangan bangsa Indonesia. Semua bahan ajar pendidikan politik tersebut telah tercakup dalam mata pelajaran PKn.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Dimensi Religius dalam Pendidikan Politik

1. Pengertian Religius

Kata dasar dari religius adalah religi yang berasal dari bahasa asing *religion* sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. Sedangkan religius berasal dari kata *religious* yang berarti sifat religi yang melekat pada diri seseorang.[22]

Religius menurut Suparlan adalah sebagai salah satu nilai karakter sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.[23] Karakter religius ini sangat dibutuhkan oleh kader dalam menghadapi perubahan zaman dan degradasi moral, dalam hal ini kader diharapkan mampu memiliki dan berprilaku dengan ukuran baik dan buruk yang di dasarkan pada ketentuan dan ketetapan agama.

Hal senada juga disampaikan Sindung Haryanto bahwa agama mempunyai kriteria moral yang ditransendensikan dalam kehidupan sehari-hari dengan menghubungkan pengalaman personal dengan kerangka kejelasan sistemik mengenai prilaku yang baik dan buruk. Fungsi laten ini mentransendensikan karya baik ruang maupun waktu, menghubungkan

---

[22] A. Thontowi, *Hakekat Religiusitas*, 2012.
[23] Suparlan, *Pendidikan Karakter Sedemikian Pentingkah dan Apa yang Harus Kita Lakukan*, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa lalu, kini, dan masa mendatang dan menghubungkan tindakan yang terpisah dalam masyarakat.[24]

Definisi Religius menurut James menekankan pada perasaan dan pengalaman beragama. Menurutnya, agama memberikan energi spiritual, dimana agama dapat menggairahkan semangat hidup, meluaskan kepribadian, memperbarui daya hidup, dan memberikan makna dan kemuliaan baru pada hal-hal yang biasa dalam kehidupan. Orang yang beragama akan mencapai perasaan tenteram dan damai. James juga mengatakan bahwa agama adalah sumber kebahagiaan.[25]

Dari istilah agama dan religi muncul istilah keberagamaan dan religiusitas (*religiosity*) *yang* berarti seberapa jauh pengetahuan, kokohnya keyakinan, pelaksanaan ibadah dan kaidah, serta penghayatan atas agama yang dianutnya.[26] Religiusitas dapat mempengaruhi manusia dalam bertindak dan bertingkah laku, semakin kuat religiusitas seseorang, semakin kuat pula seseorang tersebut dalam mengontrol setiap tindakan dan tingkah lakunya.[27]

Kendler dkk mencoba mengukur religiusitas maupun spiritualitas secara luas, dan *menurutnya* religiusitas dan spiritualitas adalah hal yang tidak bisa dipisahkan karena mereka saling berhubungan satu sama lain.[28]

---

[24] Sindung Haryanto, S*osiologi Agama :Dari Klasik hingga Postmodern* (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2016), 165.
[25] Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, (Yogyakarta: Sipress, 1999), 54.
[26] Bernard Lewis, *The Political Language of Islam* (Chicago: Univesity of Chicago Press, 1988), 62.
[27] Qomaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyyah*, terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1983), 59.
[28] Yasraf A. Piling, *Tranpolitika: Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas* (Bandung: Jalasutra, 2006), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kendler *dkk* mencoba mengembangkan teknik analisis keberagamaan menjadi lebih mudah dengan menguraikannya menjadi beberapa dimensi untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif.[29]

Menurut *Gay* Hendricks dan Kate Ludeman terdapat beberapa sikap religius yang tampak dalam diri seseorang dalam menjalankan tugasnya. Peneliti mendiskripsikan berdasarkan perspektif Islam diantaranya ialah :

a. Kejujuran

Kejujuran dalam Islam atau dikenal dengan istilah As-*ṣidqu* ialah kesesuaian pembicaraan dengan kenyataan menurut keyakinan orang yang berbicara, As-*ṣidqu* ini kebalikan dari Al-*Kādzibu* (bohong). Ada yang mengatakan As-*ṣidqu* ialah kesesuaian ucapan hati dengan sesuatu yang dikabarkan (dhahirnya) secara bersamaan, jika salah satu syarat tersebut hilang maka tidak dinamakan jujur secara sempurna. As-*ṣidqhu* ini memiliki keutamaan yang agung, pahala yang besar/banyak, serta kedudukan yang mulia. Jujur dan benar di antara bagian dari Ash-Shidqu.[30]

Allah SWT. telah memerintahkan hamba-hamba-Nya yang mukmin agar terus bersama orang-orang yang jujur (*ṣiddīqīn*) dan menetapi kejujuran dalam setiap keadaannya. Kejujuran adalah jalan keselamatan dari kehidupan dunia dan adzab akhirat. Allah ta'ala berfirman:

---

[29] Robert A. Dahl, *Modern Political Analysis* (New Delhi: Prentice-Hall of India Limited, 1979), 47.
[30] Hamid, *Kejujuran dalam Perspektif Islam*, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ[31]

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang shiddiiqin.

b. Keadilan

Salah satu skill seseorang yang religius adalah mampu bersikap adil kepada semua pihak, bahkan saat ia terdesak sekalipun. adil yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

c. Bermanfaat bagi orang lain

Hal ini merupakan salah satu bentuk sikap religius yang tampak dari diri seseorang. Karl Marx menyatakan, manusia ada dan dinyatakan hidup jika manusia mampu berusaha untuk mengendalikan alam dalam rangka mempertahankan hidupnya. Di samping itu, René Descartes, seorang ahli filsafat modern pernah mendefinisikan, manusia ada dan dinyatakan hidup di dunia bila ia melakukan aktivitas berpikir.

[31] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro,. 2010), Q. 9: 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semboyan yang sangat terkenal dari aliran filsafat ini berbunyi, *Corgito Ergo Sum* yang berarti, Saya berpikir maka saya ada.[32]

Menurut Islam, makna hidup yang sesungguhnya dijabarkan lebih luas dan lebih mendalam. Manusia hidup di dunia bukan hanya semata-mata menikmati apa yang telah diberikan Sang Pencipta. Seorang muslim dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas hidup sehingga eksistensinya bermakna dan bermanfaat di hadapan Allāh SWT.

Agar menjadi bermanfaat bagi orang lain, seorang muslim diwajibkan untuk beribadah, bekerja, berkarya, berinovasi atau dengan kata lain beramal saleh. Melakukan pekerjaan yang menantang akan lebih banyak memberi manfaat kepada orang lain. Terlalu betah berlama-lama dalam zona nyaman hanya akan menghabiskan waktu dengan sia-sia.

Larry White dari departemen studi kepustakaan dan informasi di University of Buffalo menemukan bahwa lingkungan kerja yang menantang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan maupun manajer. Pengalaman bekerja di lingkungan yang tidak menantang mungkin umumnya tidak mengasah kreativitas, inovasi, komunikasi, dan melatih kemampuan pemecahan masalah, pungkasnya.

Semakin tinggi kreativitas, inovasi, komunikasi, dan kemampuan pemecahan masalah, semakin banyak manfaat yang akan diberikan bagi

[32] Mumtazah Akhtar, *Memaknai hidup dengan memberi Manfaat bagi orang lain*, 2015, 21-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebaikan orang banyak. Hidup bukanlah tentang siapa yang pintar, siapa yang kaya, dan siapa yang punya jabatan. Tapi, hidup ialah mengenai apa yang telah kita lakukan untuk kebaikan orang banyak. Menjadi bermanfaat untuk Allāh SWT. dan sesama manusia adalah makna hidup yang sesungguhnya.33 Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

خَيْرُ النَاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَاسِ

> Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. [34]

d. Rendah hati

Sikap rendah hati merupakan sikap tidak sombong mau mendengarkan pendapat orang lain dan tidak memaksakan gagasan dan kehendaknya. Pengertian rendah hati atau dalam Islam disebut *tawādhu'* adalah tidak sombong, orang yang *tawādhu'* adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah SWT. Yang dengan pemahamannya tersebut maka tidak pernah terbersit sedikitpun dalam hatinya kesombongan dan merasa lebih baik dari orang lain, tidak merasa bangga dengan potensi dan prestasi yang sudah dicapainya. Ia tetap rendah diri dan selalu menjaga hati dan niat segala amal shalehnya dari segala sesuatu selain Allah. Tetap menjaga keikhlasan amal ibadahnya hanya karena Allah.

Tawādhu ' ialah bersikap tenang, sederhana dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan takabbur (sombong), ataupun sum'ah ingin diketahui

---

[33] *Ibid*., 140.

[34] HR. Ahmad, ath-Thabrani, Ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul* Jami' no: 3289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain amal kebaikan kita. Di dalam kerendahan hati terdapat kekuatan jiwa, karena seorang yang memiliki rendah hati akan selalu bisa menjadikan pikiran dan hatinya dalam mengendalikan nafsu. Sebaliknya orang yang tidak memiliki sifat rendah hati, mereka mudah menonjolkan kesombongan, arogan, takabur, memamerkan keangkuhan, kecongkakan. Sehingga hanya aura syetan dan iblis yang muncul dalam sikap dan perilakunya baik lisan, hati dan gerakan/perilaku. Firman Allah SWT dalam Al-qur'an:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.[35]

e. Bekerja Efisien

Mereka mampu memusatkan semua perhatian mereka pada pekerjaan saat itu dan begitu juga saat mengerjakan pekerjaan selanjutnya. Efisien adalah perbandingan yang terbaik antara input dan output, antara daya usaha dan hasil usaha, atau antara pengeluaran dan pendapatan. Dengan kata lain, efisien adalah segala sesuatu yang dikerjakan dengan berdaya guna atau segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat, dan selamat.

[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro,. 2010), Q. 31:18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bekerja efisien atau disebut etos kerja, etos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Ethos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh, budaya serta sistem nilai yang diyakininya. Dari kata etos ini dikenal pula kata etika yang hampir mendekati pada pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik buruk moral sehingga dalam etos tersebut terkandung gairah atau semangat yang amat kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal lebih baik dan bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sesempurna mungkin.

Di dalam al-Qur'an dikenal kata *itqān* yang berarti proses pekerjaan yang sungguh-sungguh, akurat dan sempurna. Etos kerja seorang muslim adalah semangat untuk menapaki jalan lurus, dalam hal mengambil keputusan pun, para pemimpin harus memegang amanah terutama para hakim. Hakim berlandaskan pada etos jalan lurus tersebut sebagaimana Dawud ketika ia diminta untuk memutuskan perkara yang adil dan harus didasarkan pada nilai-nilai kebenaran, maka berilah keputusan (hukumlah) di antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjuklah (pimpinlah) kami ke jalan yang lurus.[36]

Ethos kerja seorang muslim ialah semangat menapaki jalan lurus, mengharapkan ridha Allah SWT. Etika kerja dalam Islam yang perlu

[36] Anonim, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Depag; 1990).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperhatikan adalah:(1) Adanya keterkaitan individu terhadap Allah sehingga menuntut individu untuk bersikap cermat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja, berusaha keras memperoleh keridhaan Allah dan mempunyai hubungan baik dengan relasinya. (2) Berusaha dengan cara yang halal dalam seluruh jenis pekerjaan. (3) tidak memaksakan seseorang, alat-alat produksi atau binatang dalam bekerja, semua harus dipekerjakan secara professional dan wajar.(4) tidak melakukan pekerjaan yang mendurhakai Allah yang ada kaitannya dengan minumankeras, riba dan hal-hal lain yang diharamkan Allah.(5) Professionalisme dalam setiap pekerjaan.[37]

f. Visi Kedepan

Mereka mampu mengajak orang ke dalam angan-angannya. Kemudian menjabarkan begitu rinci cara untuk menuju kesana. Allah SWT berfirman:

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

Dan diantara mereka ada orang yang berdo'a: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka . Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.[38]

---

[37] Anonim, Konsep *dan etika kerja dalam Islam* (Almadani, 1997).

[38] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro,. 2010), Q, 2: 201-202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbicara tentang visi, berarti berbicara tentang gambaran-gambaran apa yang akan dilakukan dan mungkin terjadi di masa depan. Seseorang yang hidup dengan berbagai aktivitas dan pekerjaanya idealnya tidak bisa lepas dari visi tentang hidup dan kehidupannya. Apa hidup itu baginya, Untuk apa dia hidup, Mengapa dia hidup, Bagaimana cara mengisi hidup, Dan bagaimana mempertanggungjawabkan hidup ini untuk kehidupan setelahnya.

Seorang Muslim sejati harus mempunyai visi yang jelas dalam hidupnya. Visi sangat penting dalam rangka menjadi *guide* atau pemandu setiap gerak-geriknya agar tetap dalam jalan yang benar (*on the right track*). Muslim sejati harus bisa memetakan apa yang akan dilakukan untuk kehidupannya di dunia serta di akhirat. Sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi di kehidupannya, bahkan bisa merealisasikan tentang gambaran-gambaran ideal tentang kehidupannya tersebut. Belajar dari tokoh kelas dunia seperti *Bill Gates* pemilik Microsoft, dan pendiri *Apple Stave Job* merupakan sedikit orang yang visioner. Kemampuan mereka untuk bisa melihat dan memprediksi apa yang akan terjadi sungguh sangat memukau. Mereka bukan hanya bisa melihat, tapi juga merealisasikan apa yang diprediksinya secara nyata. Demikian juga seharusnya seorang Muslim sejati itu, tentu dalam konteks yang lebih substansial, kebahagiaan dunia dan akhirat.

g. Disiplin Tinggi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedisiplinan tumbuh dari semangat penuh gairah dan kesadaran bukan dari keharusan dan keterpaksaan. Dalam Islam, disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih.

Dalam ajaran Islam banyak ayat Al-Qur'an dan Hadist yang memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan, antara lain surat An-Nisa ayat 59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ

Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada rasul-Nya dan kepada Ulil Amri dari (kalangan) kamu.[39]

Disiplin adalah kunci sukses, sebab dalam disiplin akan tumbuh sifat yang teguh dalam memegang prinsip, tekun dalam usaha maupun belajar, pantang mundur dalam kebenaran, dan rela berkorban untuk kepentingan agama dan jauh dari sifat putus asa. Perlu kita sadari bahwa betapa pentingnya disiplin dan betapa besar pengaruh kedisiplinan dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa maupun kehidupan bernegara.

[39] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro,. 2010), Q, 4:59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Keseimbangan

Seseorang yang memiliki sifat religius sangat menjaga keseimbangan hidupnya. Setiap orang pasti memiliki kepercayaan baik dalam bentuk agama ataupun nonagama. Agama sendiri, mengikuti penjelasan intelektual Muslim Nurcholish Madjid, bukan hanya kepercayaan kepada yang ghaib dan melaksanakan ritual-ritual tetentu. Agama adalah keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji, yang dilakukan demi memperoleh ridho Allah SWT.[40]

Dengan demikian menjadi jelas bahwa nilai religius merupakan nilai pembentuk karakter yang sangat penting. Artinya manusia berkarakter adalah manusia yang religius. Banyak pendapat yang mengemukakan bahwa religius tidak selalu sama dengan agama. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa banyak orang yang beragama namun tidak menjalankan agamanya dengan baik. Mereka dapat disebut beragama tapi tidak religius. Sementara itu terdapat orang yang perilakunya sangat religius namun kurang perduli terhadap ajaran agama. Religius memang tidak selalu identik dengan kata agama. Religius adalah pengahayatan dan implementasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku politik memiliki arti yang sangat luas. Keluasan arti perilaku politik bukan saja karena perilaku politik merupakan perilaku setiap warga negara di hadapan

[40] Ngainun Naim, *Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa* (Jogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara, melainkan karena perilaku politik menyangkut bidang-bidang kehidupan lain yang demikian kompleks (sosial, ekonomi, budaya, dan politik itu sendiri).

Menurut Smith ada tiga hal pokok dalam agama yang secara psikologis menentukan pembentukan sikap dan perilaku politik: (1) otoritas dogmatis, atau kebenaran yang bersifat mutlak; (2) otoritas terarah, atau ketuntasan pengaturan; dan (3) pelembagaan otoritas, atau pemaduan pemahaman dan penggunaan kebenaran mutlak dalam perumusan aturan yang memperkuat struktur keagamaan.[41]

Otoritas dogmatis dalam Islam sangat kuat. Kebenaran Islam diyakini mutlak, universal dan tidak dapat diubah. Wahyu al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah wahyu terakhir untuk menuntun kepentingan hidup seluruh umat manusia. Otoritas terarah, yang merupakan seperangkat aturan komprehensif yang harus ditaati oleh umat Islam, terdapat dalam syari'ah.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa syari'ah lebih luas daripada sekedar sistem hukum. Ia merupakan katalog komprehensif perintah-perintah dan aturan-aturan Allah untuk membimbing umat Islam. Cakupan syari'ah begitu luas yang meliputi hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan masyarakatnya. Pelembagaan otoritas adalah adanya hirarki kepemimpinan yang

[41] Donald Eugene Smith, *Agama dan Modernisasi Politik* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terorganisasi dalam Islam yang akan mengawal pelaksanaan dan berlakunya syari'ah.

2. Religiusitas sebagai Salah Satu Nilai Karakter

a. Karakter Religius

Kata dasar dari religius adalah religi yang berasal dari bahasa asing religion sebagaibentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. Sedangkan religius berasal dari kata religious yang berarti sifat religi yang melekat pada diri seseorang. Religius sebagai salah satu nilai karakter dideskripsikan oleh Suparlan sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Karakter religius ini sangat dibutuhkan oleh generasi bangsa dalam menghadapi perubahan zaman dan degradasi moral, dalam hal ini generasi bangsa kita diharapkan mampu memiliki dan berprilaku dengan ukuran baik dan buruk yang di dasarkan pada ketentuan dan ketetapan agama.[42]

Salah satu ciri manusia, seperti dikatakan Mircea Eliade, bahwa ia adalah jenis makhluk homo religious.43 Menurutnya, Homo religious adalah tipe manusia yang hidup dalam alam yang sakral, penuh dengan nilai-nilai religius (keagamaan), dan dapat menikmati sakralitas yang ada

[42] Elearning Pendidikan, *Membangun Karakter Religius Pada Siswa Sekolah Dasar*, 2014.
[43] Sastrapratedja, *Sociology of Religion*, (Victoria: Penguin Books Australia Ltd. (ed.) 1982), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tampak pada alam semesta. Dalam pandangan homo religious kehidupan di dunia ini tidak semata-mata bersifat alamiah (profan).

Kehidupan di dunia terikat dengan kehidupan dunia lain yang digambarkan dengan kehadiran Tuhan. Tuhan menjadi pusat kehidupan dunia. Seperti dikatakan Nottingham: Sesuatu yang sakral lebih mudah dikenal daripada didefinisikan. Ia berkaitan dengan hal-hal yang penuh misteri baik yang sangat mengagumkan maupun yang sangat menakutkan. Dalam semua masyarakat yang kita kenal terdapat perbedaan antara yang suci dengan yang biasa atau, sering kita katakan, antara yang sakral dan yang sekuler atau duniawi. Meskipun demikian hampir tidak ada sebuah benda pun yang ada di surga (langit) ataupun di bumi yang pada suatu saat belum pernah dianggap sakral oleh sekelompok orang.44

Kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia di dunia telah melahirkan adanya seperangkat keyakinan, norma, dan praksis yang berpusat kepada-Nya. Kumpulan dari seperangkat keyakinan, norma, dan praksis ini kemudian disebut agama, religion, dan al-dīn. Dalam realitas sosial, adanya agama dipandang sebagai fenomena yang sudah sangat tua. Bahkan disebutkan kalau fenomena agama ini senantiasa menyertai kehidupan manusia di mana dan kapan pun. Oleh karena itu dikatakan bahwa fenomena agama merupakan fenomena yang universal.45

---

[44] Nottingham, Elizabeth K. *The Religion of Java*, Penerjemah Aswab Mahasin, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1985), 9-10.
[45] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kenyataan menunjukkan, sebagian besar umat manusia di bumi menjadi pemeluk suatu agama tertentu, semisal Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Taoisme, dan Sinto. Fenomena umat manusia yang tidak lepas dari agama menunjukkan bahwa agama menempati tempat yang penting dalam kehidupannya.

Dimensi-dimensi keagamaan (religiusitas) kelengkapan yang sempurna yang dapat mengarahkan seseorang mencapai tingkat kesadaran agama adalah dengan terpenuhinya semua dimensi keagamaan. Dimensi-dimensi keagamaan ini seperti yang dikemukakan Glock and Stark ada lima, yaitu: dimensi keyakinan (belief), dimensi peribadatan atau praktek agama (practical), dimensi pengalaman (experiential), dimensi pengamalan (consequential), dan dimensi pengetahuan agama (intellectual). Dalam ungkapan resminya, Glock dan Stark mengatakan bahwa:

Five such dimensions can be distinguised; within one or another of them all of the many and diverse religious prescriptions of the different religions of the world can be classified. We shall call these dimensions: belief, practice, experience, consequences, and knowledge.[46]

Pertama, dimensi keyakinan. Dimensi ini berisi seperangkat keyakinan yang terpusat pada keyakinan adanya Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan ini kemudian melahirkan seperangkat keyakinan yang berkaitan dengan kehidupan alam gaib dan alam nyata. Bagaimana misalnya tentang konsep penciptaan alam, penciptaan manusia dan

[46]Robertson, Roland, *Religion And Society*, Penerjemah Abdul Muis Naharong, *Agama dan Masyarakat:* Suatu *Pengantar Sosiologi Agama* (Jakarta: Rajawali Press. (ed.). 1972), 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya roh dalam diri manusia. Begitu pula tentang dunia lain yang akan menjadi tempat kembalinya manusia kelak. Dimensi ini pada umumnya memberikan muatanmuatan yang bercorak doktrinal.

Kedua, dimensi praktek agama atau peribadatan (ritual). Dimensi ini pada hakekatnya merupakan refleksi langsung dari dimensi pertama. Ketika agama menkonsepsikan adanya Tuhan yang menjadi pusat penyembahan, pada saat bersamaanharus ada mekanisme yang bisa dijadikan cara untuk melembagakan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Pelembagaan hubungan manusia dengan Tuhan diwujudkan dengan cara yang beraneka ragam, tetapi memiliki tujuan yang sama. Pelaksanaan praktek atau peribadatan ini biasanya mengikuti siklus tertentu. Ada yang bercorak harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Semua bentuk peribadatan itu, tidak lain merupakan sarana untuk melestarikan hubungan manusia dengan Tuhan. Lestarinya hubungan ini akan berakibat pada terlembaganya agama itu secara permanen.

Ketiga, dimensi pengalaman. Pengalaman keagamaan adalah bentuk respon kehadiran Tuhan yang dirasakan oleh seseorang atau komunitas keagamaan. Respon kehadiran Tuhan dalam diri seseorang atau komunitas keagamaan tercermin pada adanya emosi keagamaan yang kuat. Terdapat rasa kekaguman, keterpesonaan dan hormat yang demikian melimpah, atau *mysterium tremendum et fascinosum"* terhadap Tuhan.[47] Adanya dimensi ini telah menyebabkan seseorang atau

[47] Djamari, Ilmu, *Fisafat dan Agama* (Surabaya: Penerbit Bina Ilmu, 1988), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunitas keagamaan demikian hormat dengan segala sesuatu yang dikaitkan dengan Tuhan. Sesuai dengan sifat Tuhan yang suci, segala yang terkait dengan Tuhan memiliki sifat kesucian. Kumpulan firman-Nya yang dibukukan, kemudian dipandang suci, dan mensyaratkan kesucian bagi orang yang menyentuhnya. Tempat-tempat peribadatan juga dijaga untuk tetap dalam keadaan suci. Di tempat itulah dilakukan penyembahan yang ditujukan kepada Tuhan. Begitu juga bagi orang yang melakukan peribadatan, dia harus dalam keadaan suci. Sakralitas atau kesucian Tuhan berimplikasi pada semua perbuatan manusia yang beragama.

Keempat, dimensi pengamalan. Dimensi ini berupa pelaksanaan secara konkrit dari tiga dimensi di atas. Pengamalan adalah bentuk nyata dari semua perbuatan manusia yang disandarkan kepada Tuhan. Hidup dalam pengertian ini merupakan pengabdian yang sepenuhnya diabdikan kepada Tuhan. Orientasi dari semua perilaku dalam hidup semata tertuju kepada Tuhan. Komitmen seorang pemeluk suatu agama akan nampak dari dimensi yang keempat ini.[48]

Kelima, dimensi pengetahuan. Dimensi ini memuat konsep-konsep yang terdapat dalam suatu agama, baik berkaitan dengan sistem keyakinan, sistem norma dan nilai, mekanisme peribadatan, dan bagaimana caranya seorang beragama memiliki penghayatan yang kuat terhadap agamanya. Dimensi ini akan sangat mendukung bagi munculnya

[48] T & T. Clark. Wach, Joachim, *Recent Religious Psychology*, (Edinburgh: 1984), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesadaran keagamaan dalam diri seseorang yang beragama. Memperhatikan pembahasan di muka, pengetahuan keagamaan memiliki signifikansi yang kuat terhadap lahirnya kesadaran keagamaan dalam diri seseorang. Oleh karena itu dapat dimaklumi apabila dalam lingkungan agama-agama muncul semangat dakwah yang tidak hanya ditekankan pada aspek penyebaran agama, tetapi pada usaha untuk mentransferensikan pengetahuan keagamaan melalui dakwah-dakwah tersebut. Dakwah dalam pengertian ini terutama dipakai dalam lingkungan internal dari suatu komunitas keagamaan. Karena seperti pada analisis di muka, kurangnya pengetahuan agama berakibat negatif terhadap perkembangan keagamaan (*religiusitas*) seseorang. Dalam menuju kesadaran beragama ini, usaha yang mesti dilakukan adalah bagaimana caranya menempatkan pengetahuan keagamaan pada posisi yang *fundamental-substantial*.

Dalam agama Islam, pendidikan karakter memiliki kesamaan dengan pendidikan akhlak. Istilah akhlak bahkan sudah masuk dalam bahasa indonesia yaitu akhlak. Akhlak, menurut Ahamad Muhammad Al-Hufy dalam *Min Akhlāq al-Nabī,* ialah *'azīmah* (kemauan) yang kuat tentang sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi adat (membudaya) yang mengarah pada kebaikan atau keburukan. Karena itu, dikenalkan adanya istilah akhlak yang mulia atau baik *(al-akhlāq al-karīmah)* dan akhlak yang buruk *(al-akhlāq al-syū).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ajaran tentang akhlak dalam Islam sangatlah penting sebagaimana ajaran tentang aqidah (keyakinan), ibadah, dan mu'amalah (kemasyarakatan). Nabi Muhammad s.a.w, bahkan diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, *innamā bu'itstu li*-utammima *makārim al-akhlāq*. Menyempurnakan akhlak manusia berarti meningkatkan akhlak yang sudah baik menjadi lebih baik dan mengikis akhlak yang buruk agar hilang serta diganti oleh akhlak yang mulia. Itulah kemuliaan hidup manusia sebagai makhluk Allah yang utama. Betapa pentingnya membangun akhlak sehingga melekat dengan kerisalahan Nabi.[49]

Kemudian secara universal, Thontowi mengemukakan 6 (enam) komponen religius, antara lain: (a) *ritual*, yaitu perilaku seromonial baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama; (b) *emotion*, yaitu adanya perasaan seperi kagum, cinta, takut, dan sebagainya; (c) *doctrin*, yaitu penegasan tentang hubungan individu dengan Tuhan; (d) *knowledge*, yaitu pengetahuan tentang ayat-ayat dan prinsip-prinsip suci; (e) *ethics*, yaitu atauran-aturan untuk membimbing perilaku interpersonal membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk; (f) *community*, yaitu penegasan tentang hubungan manusia dengan makhluk atau individu yang lain.

Menurut perspektif Thontowi religius memiliki 5 (lima) dimensi utama. Kelima dimensi tersebut adalah (a) dimensi ideologi atau

[49] Haidar Nashir, *Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Budaya* (Yogyakarta: Multi Presindo, 2013), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keyakinan, yaitu dimensi dari keberagamaan yang berkaitandengan apa yang harus dipercayai, misalnya kepercayaan adanya Tuhan, malaikat, surga, dan lain-lain; (b) dimensi peribadatan, yaitu dimensi keberagaman yang berkaitan dengan sejumlahperilaku, dimana perilaku tersebut sudah ditetapakan oleh agama, seperti tata cara ibadah, pembaptisan, pengakuan dosa, berpuasa, shalat atau menjalankan ritual-ritual khusus pada hari-hari suci; (c) dimensi penghayatan, yaitu dimensi yang berkaitan dengan perasaan keagamaan yang dialami oleh penganut agama atau seberapa jauh seseorang dapat menghayati pengalaman dalam ritual agama yang dilakukannya, misalnya kekhusyukan ketika melakukan sholat; (d) dimensi pengetahuan, yaitu berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan seseorang terhadap ajaran-ajaran agama yang dianutnya; (e) dimensi pengamalan, yaitu berkaitan dengan akibat dari ajaran-ajaran agama yang dianutnya yang diaplikasikan melalui sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.[50]

Menurut Jalaluddin dalam bukunya Psikologi Agama mengungkapkan bahwa sesorang dikatakan memiliki perilaku religiusitas jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaitu: [51]

1) Menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan;
2) Cenderung bersifat realis, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam perilaku dan tingkah laku;

[50] A. Thontowi, *Hakekat Religiusitas*, 2012.
[51] Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Berperilaku positif terhadap ajaran dan norma-norma agama dan berusaha untuk mempelajari dan mendalami pemahaman keagamaan;
4) Tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan tanggung jawab diri hingga sikap religiusitas merupakan realisasi dari sikap hidup;
5) Bersikap lebih terbuka dan wawasan lebih luas;
6) Bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama sehingga kemantapan beragama selain didsarkan atas pertimbangan pikiran, juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani;
7) Sikap keberagamaan cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing, sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami serta melaksanakan ajaran agama yang diyakininya;
8) Terlihat adanya hubungan antara sikap religiusitas dengan kehidupan sosial, sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial sudah berkembang.

b. Macam-macam Nilai Religius

Landasan religius dalam pendidikan merupakan dasar yang bersumber dari agama. Tujuan dari landasan religius dalam pendidikan adalah seluruh proses dan hasil dari pendidikan dapat mempunyai manfaat dan makna hakiki. Agama memberikan dan mengarahkan fitrah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia memenuhi kebutuhan batin, menuntun kepada kebahagiaan dan menunjukkan kebenaran.

Budaya menjadi penting karena sebagai sumber nilai dalam pendidikan budaya dan pendidikan karakter bangsa. Sedangkan tujuan dari pendidikan nasional menurut UU. No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, betujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.[52]

Menurut Nurkholis madjid, sumber nilai yang berlaku dalam kehidupan manusia digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1) **Nilai *Rabbāniyyah***

Nilai Rabbāniyyah adalah nilai yang berhubungan dengan ketuhanan atau habul minallah, dimana inti dari ketuhanan adalah keagamaan. Kegiatan menanamkan nilai keagamaan menjadi inti kegiatan pendidikan. Nilai-nilai yang paling mendasar adalah: (a) *imān*, yaitu sikap batin yang penuh kepercayaan kepada Allah; (b) *Islām*, yaitu sebagai kelanjutan dari iman, maka sikap pasrah kepadaNya dengan menyakini bahwa apapun yang datang dari Allah mengandung hikmah kebaikan dan pasrah kepada Allah; (c) *ihsān,*

[52] Zayadi, Desain *Pendidikan Karakter* (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2001), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah senantiasa hadir atau berada bersama kita di manapun kita berada; (d) *taqwā,* yaitu sikap menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah; (e) *ikhlās,* yaitu sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan tanpa pamrih, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah; (f) *tawakaāl,* yaitu sikap yang senantiasa bersandar kepada Allah, dengan penuh harapan kepada Allah.;(g) *syukūr,* yaitu sikap dengan penuh rasa terimakasih dan penghargaan atas ni'mat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah; (h) sabar, yaitu sikap batin yang tumbuh karena kesadaran akan asal dan tujuan hidup yaitu Allah.

2) Nilai *Insāniyyah* (Kemanusian)

Nilai *Insāniyyah* adalah nilai yang berhubungan dengan sesama manusia atau *hablun minan al-nās* yang berisi budi pekerti. Berikut adalah nilai yang tercantum dalam nilai *insaniyah*: (a) *Silaturrahịm*, yaitu petalian rasa cinta kasih anata sesama manusia; (b) *Al-Ukhuwwāh,* yaitu semangat persaudaraan; (c) *Al-Musawwāh,* yaitu pandangan bahwa harkat dan martabat semua manusia adalah sama; (d) *Al-'Adalāh,* yaitu wawasan yang seimbang; (e) *Husnudzdzān,* yaitu berbaik sangka kepada sesama manusia;(f) *tawādlū',* yaitu sikap rendah hati; (f) *al-Wafā,* yaitu tepat janji; (g) *insyirāh,* yaitu lapang dada; (h) *amānah,* yaitu bisa dipercaya; (i) *iffāh* atau *ta'āfūf,* yaitu sikap penuh harga diri, tetapi tidak sombong tetap rendah hati; (j) *qawāmīyah,* yaitu sikap tidak boros; (k) *al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Munfikūn, kaum beriman yang memiliki kesediaan yang besar menolong sesama manusia.[53]

[53] Nurkholis Madjid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Lazis Paramadina, 1997), 137-139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

NASDEM JAWA TIMUR:
DARI ORGANISASI MASSA MENUJU PARTAI POLITIK

A. Konteks Sosial-Politik Masyarakat Jawa Timur

Jawa Timur menjadi provinsi yang paling luas dibandingkan 6 provinsi lainnya di Pulau Jawa. Dengan bentangan wilayah seluas 47.922 km², terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota, mayoritas penduduk di Jawa Timur merupakan suku Jawa dan sama-sama berbahasa Jawa dan beberapa menggunakan bahasa Madura. Dalam tulisan Ignatius Kristanto dan Yohan Wahyu yang dimuat KOMPAS,[1] menilik nama "Jawa" yang melekat pada "Jawa Timur" sekilas menumbuhkan kesan bahwa sifat budaya masyarakatnya pasti monokultur. Tapi, ternyata tidak. Jawa Timur kalau ditelisik lebih dalam sebenarnya sangatlah plural.

Budayawan Universitas Jember, Ayu Sutarto mengatakan, wilayah Jatim ini terbagi ke dalam sepuluh Tlatah atau kawasan kebudayaan.[2] Tlatah kebudayaan besar ada empat, yakni Mataraman, Arek, Madura Pulau, dan Pandalungan. Sedangkan Tlatah yang kecil terdiri atas Jawa Panoragan, Osing, Tengger, Madura Bawean, Madura Kangean, dan Samin (Sedulur Sikep). Tlatah ini yang kemudian membedakan karakteristik masyarakat di Jawa Timur berdasarkan wilayahnya.

---

[1] Kompas.com - 21/07/2008, 00:59 WIB.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kuali Peleburan di Tlatah Jawa Timur", https://nasional.kompas.com/read/2008/07/21/00594333/kuali.peleburan. di.Tlatah. jawa.timur.
[2] Ayu Sutarto. Menguak Pergumulan antara Seni, Politik, Islam, dan Indonesia, (2004).

Mengapa wilayah Jawa Timur terbagi ke dalam Tlatah tersebut? Konon Tlatah ini bukanlah untuk membeda-bedakan masyarakat Jawa Timur melainkan untuk menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Timur merupakan masyarakat yang unik dan kaya akan budaya dan kearifan lokal. Pun perbedaan ini tidak membuat Jawa Timur saling memisahkan diri, tetap menyatu sebagai

satu kawasan provinsi.

Gambar.3.1
Peta pembagian wilayah kebudayaan Jawa Timur

Menurut Koentjaraningrat, terdapat tujuh unsur kebudayaan yang akhirnya membuat Jawa Timur terbagi ke dalam sepuluh Tlatah tersebut. Tujuh

unsur itu di antaranya: sistem religi, sistem organisasi masyarakat, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian dan sistem ekonomi, sistem teknologi, peralatan, bahasa, dan kesenian. Lantas apa saja perbedaan Tlatah kebudayaan tersebut?

Gambar 3.2
Wilayah Kebudayaan Jawa Mataraman

Wilayah Mataraman merupakan wilayah yang masih dekat dengan kultur Kerajaan Mataram yang berpusat di Yogyakarta dan Surakarta, salah satu daerahnya adalah Ponorogo. Wilayah ini mencangkup daerah-daerah di bagian barat Jawa Timur, yakni Kabupaten Ngawi, Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten dan Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Bojonegoro.

Diberinama Mataraman lantaran wilayah ini masih mendapat pengaruh yang kuat dari budaya Kerajaan Mataram. Bila melihat dari adat istiadatnya, masyarakat di wilayah Mataraman memang mirip dengan masyarakat di daerah Jawa Tengah terutama Yogyakarta dan Surakarta. Hal yang paling mencolok adalah penggunaan bahasa Jawa yang masih terkesan halus meski tidak sehalus masyarakat di Yogyakarta dan Surakarta.

Gambar.3.3
Wilayah Kebudayaan Arek

Adapun sebelah timur Mataraman adalah Tlatah arek yang menjadi wilayah kebudayaan yang cukup dikenal dengan ciri khas Jawa Timurnya. Masyarakat Arek dikenal punya semangat juang yang tinggi, terbuka, dan

mudah beradaptasi. Dan satu yang menjadi ciri khas masyarakat Arek adalah bondo nekat.

Surabaya dan Malang menjadi pusat kebudayaan Arek. Kedua kota besar ini menjadi pusat kebudayaan Arek karena kondisi sosial masyarakatnya yang begitu komplek dan heterogen, bisa dikatakan menjadi pusat bidang pendidikan, ekonomi, dan parawisata di Jawa Timur. Setelah industrialisasi masuk, wilayah ini menjadi menarik bagi pendatang. Menjadikannya salah satu *melting pot* atau kuali peleburan kebudayaan di Jatim. Pendatang dari berbagai kelompok etnis ada di sini untuk mencari ”gula” ekonomi yang tumbuh pesat. Meski luas wilayahnya hanya 17 persen dari keseluruhan luas Jatim, separuh (49 persen) aktivitas ekonomi Jatim ada di kawasan ini.

Gambar.3.4
Wilayah kebudayaan Pulau Madura

Masyarakat Pulau Madura terkenal dengan karakternya yang suka berkelana. Komunitas Madura Pulau menjadi komunitas pleburan Tlatah

terbesar ke tiga yang wilayahnya mencangkup Pulau Madura. Karakteristik kultur masyarakat Madura pun berbeda dengan masyarakat di Tlatah Matraman. Menurut Kuntowijoyo dalam buku Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940, keunikan Madura adalah bentukan ekologis tegal yang khas, yang berbeda dari ekologis sawah di Jawa. Pola permukiman terpencar, tidak memiliki solidaritas desa, sehingga membentuk ciri hubungan sosial yang berpusat pada individual, dengan keluarga inti sebagai unit dasarnya.

Meski begitu, masyarakat Madura Pulau punya jiwa penjelajahan yang kuat seperti masyarakat Bugis dan Minangkabau. Lantaran tanah mereka tidak cukup subur untuk bercocok tanam, akhirnya masyarakat Madura Pulau bermigrasi ke Pulau Jawa, Jawa Timur di bagian timur untuk mengejar rejeki. Wilayah ini merupakan tanah tumpah darah - kedua orang Madura Pulau. Lalu, di Pulau Jawa-lah masyarakat Madura bermukim dan hidup bersandingan dengan masyarakat Jawa.

Gambar 3.5
Peta Tapal Kuda

Tapal Kuda adalah nama sebuah daerah di provinsi Jawa Timur, tepatnya di bagian timur provinsi tersebut. Dinamakan Tapal Kuda, karena bentuk kawasan tersebut dalam peta mirip dengan bentuk tapal kuda. Kawasan Tapal Kuda meliputi Pasuruan (bagian timur), Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi.

Menurut sejarahnya, daerah Tapal Kuda ini pada zaman Majapahit dahulu disebut dengan Blambangan atau dalam budaya Jawa (dalam hal ini Jawa baku atau Jawa Mataraman) disebut daerah brang wetan (seberang timur), karena kawasan ini tidak pernah menjadi bagian dari kerajaan Mataram, sampai akhirnya imigran dari kawasan Mataraman datang dan mengisi beberapa wilayah kawasan pesisir selatan sekitar abad ke-15. Namun kini, istilah Blambangan hanya ditujukan untuk wilayah yang sekarang masuk Kabupaten Banyuwangi. Meskipun begitu, wilayah tapal kuda ini cenderung bernuansa Madura daripada Mataraman. Pengaruh Madura mulai berkembang ketika banyak suku Madura bermigrasi ke arah selatan secara besar-besaran sekitar abad ke-18 hingga mencapai daratan tapal kuda itu atau yang mereka sebut "Madura baru" karena kemiripan kondisi wilayahnya yang sama-sama gersang. Wilayah itulah yang sekarang kita kenal sebagai bekas Karesidenan Besuki (Probolinggo sebelah timur, Situbondo, Bondowoso, Lumajang utara, sebagian utara Jember, dan sebagian utara dan timur laut Banyuwangi).[3]

Di kawasan Tapal Kuda terdapat tiga pegunungan besar: Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru (dengan puncak tertingginya Gunung Semeru / 3.676

[3] Sholeh, Anwar. *Sejarah Tapal Kuda di Kawasan Jawa Timur,* (1 September 2014).

mdpl), Pegunungan Iyang (dengan puncak tertingginya Gunung Argopuro / 3.088 mdpl), dan Pegunungan Ijen (dengan puncak tertingginya Gunung Raung / 3.344 mdpl).

Kawasan Tapal Kuda seringkali dianggap sebagai daerah yang cukup tertinggal di Jawa Timur, karena berdasarkan peta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur, beberapa daerah di kawasan ini berada pada jajaran yang rendah. Kota-kota besar di kawasan Tapal Kuda adalah Probolinggo, Jember, dan Banyuwangi. Kawasan pantai utara Tapal Kuda juga merupakan salah satu lokasi paling strategis secara ekonomi di Indonesia, karena dilewati jalur penghubung utama antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Secara geografis, daerah Panarukan yang merupakan ujung timur dari Jalan Raya Pos yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels, terletak di kawasan Tapal Kuda ini. Di kawasan ini juga terdapat PLTU Paiton yang merupakan salah satu PLTU terbesar di Indonesia yang mengalirkan listrik Jawa-Bali. Sebagai salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia, aspek sosial masyarakat sekitar PLTU Paiton juga dapat menjadi hal yang menarik bagi para peneliti.

Kebudayaan di daerah Tapal Kuda disebut Pendalungan, yang merupakan hasil akulturasi antara kebudayaan Jawa Timuran, Madura, dan Islam, mengingat banyaknya penduduk suku Madura yang berada di wilayah ini, meskipun secara geografis masih termasuk wilayah Pulau Jawa. Kebudayaan Pendalungan ini mendapat pengaruh terbesar dari budaya Madura dan Islam. Kesenian yang berkembang di wilayah ini juga hasil akulturasi

budaya Jawa-Madura. Ciri khas kebudayaan Pendalungan adalah dasar-dasar nilai ke-Islaman yang sangat kuat dalam berbagai corak kesenian dan perilaku masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Gambar.3.6
Wilayah kebudayaan Pandalungan

Warga Madura dan Jawa yang hidup saling bersandingan membuat wilayah ini disebut dengan wilayah Pandalungan. Menurut Prawiroatmodjo, kata pandalungan berasal dari bentuk dasar bahasa Jawa dhalung yang berarti 'periuk besar'.[4] Wadah bertemunya budaya sawah dengan budaya tegal. Budaya Jawa dengan budaya Madura, membentuk budaya baru, Pandalungan. Hasilnya, masyarakat berciri agraris-egaliter, bekerja keras, agresif, ekspansif, dan memiliki solidaritas yang tinggi, tetapi masih menempatkan pemimpin agama Islam sebagai tokoh sentral. Daerahnya meliputi Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Lumajang dan Jember.

[4] Prawiroatmodjo, S. *Bausastra Jawa-Indonesia*, jilid 1, cetakan 3 (Jakarta; PT Karya Unipress), 1988.

Ada hal yang unik dari kebahasaan masyarakat Pandalungan. Bila kita berbincang dengan seseorang dari Pandalungan kita mungkin akan mengira ia adalah orang Madura, mendengar dari bahasa tuturnya. Namun, sebenarnya mereka bukan orang Madura dan bahasa mereka lebih condong ke bahasa Jawa. Namun akulturasi budaya Madura dan Jawa yang begitu kental membuat dialek masyarakat Pandalungan menjadi terdengar seperti dialek Madura.

Tradisi politik, ciri sosial dan budaya juga berpengaruh terhadap tradisi politiknya. Pengaplingan politik berlaku pula di sini. Masyarakat di Tlatah Mataraman dari sejak 1955 hingga 2004 selalu ”loyal” kepada partai-partai nasionalis. ”Mereka (orang Mataraman) tidak suka yang mencolok-colok, misalnya Islam yang terlalu Islam itu tidak suka karena dianggap tidak nasionalis. Jadi, partai-partai yang berlabel nasionalis akan laku di sini.”[5] Sebaliknya, mayoritas masyarakat di Tlatah Madura dan Pandalungan lebih loyal kepada partai yang berbasis massa Islam Nahdlatul Ulama, seperti Partai Kebangkitan Bangsa. Ulama dan kiai masih menjadi tokoh panutan di sana. Pengaruhnya pun ikut merambah ke ranah pilihan politik warganya.

Lalu bagaimana dengan wilayah Arek? Daerah ini sering disebut daerah ”abu-abu” karena keberimbangan antara pendukung partai-partai nasionalis dan partai-partai ”warga NU”. Pemilu 1999 dimenangi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ”merah”. Lima tahun kemudian berubah, PKB yang ”hijau” berhasil unggul. Dengan demikian, ”kuali peleburan” telah membentuk Jatim menjadi unik. Menjadikannya berbeda dengan saudara Jawa lainnya,

[5] Ayu Sutarto. Menguak Pergumulan antara Seni, Politik, Islam, dan Indonesia, (2004).

Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Baik sisi budaya maupun politiknya. Itulah, jika ingin menarik simpati warga Jatim, para kontestan setidaknya harus ”bersusah-susah” untuk membuat tiga bentuk slogan berbahasa lokal. Bagaimana ini, Bung? Yok opo iki, Rek? Piye iki, Cah? Dha' ramma areya, Cong?. [6]

Ditinjau dari agama Mayoritas Suku Jawa umumnya menganut agama Islam, sebagian kecil lainnya menganut agama Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Sebagian Suku Jawa juga masih memegang teguh kepercayaan Kejawen. Agama Islam sangatlah kuat dalam memberi pengaruh pada Suku Madura. Suku Osing umumnya beragama Islam. Sedangkan mayoritas Suku Tengger menganut agama Hindu. Orang Tionghoa umumnya menganut agama Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu dan sebagian kecil menganut Islam, bahkan Masjid Cheng Ho di Surabaya dikelola oleh orang Tionghoa, dan memiliki arsitektur layaknya kelenteng.

Pembagian wilayah kebudayaan ini menunjukkan bahwa Jawa Timur memang dinamis dengan perbedaan-perbedaan karakter wilayah dan masyarakatnya. Keunikan ini menjadi kearifan lokal khas Jawa Timur yang menunjukkan kekayaan budaya Indonesia.

B. Historisitas Pembentukan Partai NasDem

Dalam sejarah perpolitikan Indonesia, kemunculan partai politik (parpol) mengambil berbagai format, sebagian muncul sedari awal sebagai parpol, sebagian merupakan transformasi dari fraksi yang mewakili golongan

[6] Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kuali Peleburan di Tlatah Jawa Timur",https://nasional.kompas.com/read/2008/07/21/00594333/kuali.peleburan.di.Tlatah.jawa.timur.

tertentu, dan sebagian lainnya berasal dari organisasi massa. Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan sejenisnya mengambil format yang pertama. Golkar fraksi golongan karya yang menjadi alat politik kekuasaannya. Rezim Orde Baru yang bermetamorfosis menjadi parpol seiring dengan perubahan politik pasca reformasi mewakili varian kedua. Partai Nahdlatul Ulama (PNU) mewakili parpol yang sebelumnya berstatus sebagai organisasi sosial-keagamaan.[7]

Hampir sama dengan Partai NU, NasDem dan juga Perindo merupakan parpol baru pasca reformasi yang kehadirannya juga berawal dari organisasi massa. Bedanya, organisasi NU muncul, pertama-tama dan paling utama, sebagai respon kritis terhadap gerakan purifikasi keagamaan yang dilancarkan oleh kelompok Muslim modernis. Perubahan organisasi keagamaan ini menjadi parpol, sebagian juga merupakan bentuk protes karena kecewa dengan Masyumi parpol yang menjadi kendaraan perjuangan politik dari berbagai faksi Islam. Selebihnya, perubahan status NU menjadi parpol tentunya dilandasi pula oleh keinginan para proponen organisasi ini untuk mewujudkan agenda perjuangan politiknya yang selama ini tidak pernah diwakili dan disuarakan oleh parpol lain, terutama Masyumi.[8]

Sementara itu, kemunculan organisasi massa (ormas) bernama NasDem, sebagai respon terhadap isu-isu kebangsaan ataupun perpolitikan nasional. Dalam pandangan para proponen ormas ini, gerak reformasi yang sudah

[7] Robin Bush, *Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia,* (Singapore: ISEAS,2009), 49-52.
[8] Ibid., 40-48.

menapaki perjalanan selama 10 tahun lebih belum banyak membawa Indonesia ke arah kemajuan yang benar-benar demokratis. Alih-alih semakin demokratis, Indonesia pasca reformasi justru dihadapkan pada ancaman disintegrasi, konflik dan kemunduran dalam berbagai bidang. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadi agenda utama reformasi, justru tumbuh semakin subur dan bahkan menggurita. Karena itulah, diperlukan perubahan dan perbaikan (restorasi) mendasar dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.[9]

Secara subjektif, kemunculan ormas NasDem tidak bisa dilepaskan dari kekecewaan sejumlah tokoh di Partai Golkar, terutama Surya Paloh, yang kecewa akibat kalah bersaing dengan Aburizal Bakri dalam perebutan ketua umum parpol berlambang beringin pada Munas Bali 2009. Kekecewaan politik Surya Paloh, tidak lantas disalurkan dengan cara-cara tetap bertahan dan berkiprah di Partai Golkar ataupun membentuk Partai Golkar tandingan sebagaimana konflik internal partai pada umumnya seperti yang terjadi dalam PPP (kubu Romahurmuzi *versus* kubu Djan Farid), PKB (kubu Abdurrahman Wahid *versus* Muhaimin Iskandar), dan PDI (kubu Megawati Sukarno Putri *versus* Suryadi), melainkan keluar dari Golkar untuk menggagas kendaraan politik baru.[10]

---

[9] Viktor B. Laiskodat, *Restorasi Parlemen Dua Tahun Fraksi NasDem DPR RI Bersama Rakyat*, (Jakarta: RMBOOKS dan Fraksi Partai NasDem, 2017), 3-6.

[10] Dalam Rakernas Partai NasDem di Ancol, 1 Desember 2013, Surya Paloh terang-terangan mengungkapkan kekecewaannya sebagaimana terekam dalam ucapannya bahwa "saya adalah seorang pemuda yang mendarmakan idealismenya pada parpol. Dalam jabatan yang tidak ada apa-apanya, sampai pada suatu positioning jabatan tertinggi di partai pernah saya alami. Pasti sebagai manusia biasa saya memiliki kekecewaan". Kekecewaan inilah yang menjadi alasan Surya Paloh untuk meninggalkan Golkar. http:// www. tribunnews.com/nasional/2014/11/23/pengamat-setiap-munas-golkar-berpotensi-munculkan-partai-baru.

Ikhtiar Surya Paloh dan para supporternya dalam membentuk kendaraan politik baru itu, tidak langsung diwujudkan dalam bentuk pendirian parpol, melainkan ormas. Dengan jargon 'Restorasi Indonesia'.[11] Surya Paloh aktif mempromosikannya kepada para tokoh bangsa untuk ikut berpartisipasi dalam menggagas dan mewujudkan wadah perjuangan politik kebangsaan di luar perpolitikan formal. Bersama kopatriot utamanya, Sri Sultan Hamengkubuwono, dan para tokoh nasional.[12] Surya Paloh secara resmi mendeklarasikan Ormas NasDem pada 26 Juli 2011.[13]

Tidak berselang lama pasca deklarasi, organisasi dan kepengurusan NasDem di berbagai wilayah, terutama di tingkat provinsi, segera dibentuk. Bagaimanapun, ketokohan sang ketua umum, Surya Paloh, dengan kekuatan finansial dan media informasinya (terutama Metro TV dan Media Indonesia),

---

[11] Partai NasDem mendefinisikan Restorasi Indonesia sebagai gerakan memulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi pemerintahan Indonesia pada cita-cita Proklamasi 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dari pengertian ini, Partai NasDem kemudian mengolah empat kata kerja sebagai kata kunci dari konsep restorasi yang diusungnya, yaitu: (a) Memperbaiki; (b) Mengembalikan; (c) Memulihkan; dan (d) Mencerahkan. Lihat: Tim Peneliti INFID dan LIPI, *Partai Politik, Pemilihan Umum, dan Ketimpangan Sosial & Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sempu, Infid dan LIPI, 2014), 7.

[12] Deklarator Ormas Nasional Demokrat: (1) Abdul Malik Haramain; (2) Ade Supriatna; (3) Ahmad Rofiq; (4) Ahmad Syafi'i Maarif; (5) Akbar Faisal; (6) Ali Umri; (7) Anies Baswedan; (8) Bachtiar Ali; (9) Bahri Anwar; (10) Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM.; (11) Budi Supriyanto, SH, MH.; (12) Budiman Sudjatmiko, M.Sc, M.Phil.; (13) Danny P. Thaharsyah; (14) Prof. Dr. Didik J. Rachbini; (15) Drs. Djafar H. Assegaff; (16) Edison Betaubun, SH, MH.; (17) Ir. A. Edwin Kawilarang; (18) Eep Saefulloh Fatah; (19) Drs. Enggartiasto Lukito; (20) Erik Satrya Wardhana; (21) Ferry Mursyidan Baldan; (22) Franky Sahilatua; (23) Prof. Dr. Fredrik L. Benu, M.Si, Ph.D.; (24) Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin; (25) Jeffrie Geovanie; (26) Dra. Khofifah Indar Parawansa; (27) Martin Manurung, SE, MA.; (28) Melkiades Laka Lena; (29) Meutya Viada Hafid, B.Eng.; (30) Paskalis Kossay, S.Pd, MM.; (31) Patrice Rio Capella, SH.; (32) Dr. Poempida Hidayatullah, B.Eng., Ph.D, DIC.; (33) Dr. Rizal Sukma; (34) Rommy HR Soekarno; (35) Samuel Nitisaputra; (36) H. Sayed Fuad Zakaria, SE.; (37) Dr. (HC) Ir. H. Siswono Yudo Husodo; (38) Prof. Dr. Soleh Solahuddin; (39) Sugeng Suparwoto; (40) H. Syamsul Mu'arif, BA.; (41) Prof. Dr. Tarnama Sinambela; (42) Prof. Dr. Thomas Suyatno; (43) Willy Aditya, S.Fil., MDM.; (44) Ir. H. Zulfadhli; dan (45) Drs. Zulfan Lindan.

[13] Partai NasDem dideklarasikan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. Deklarasi ini hanyalah salah satu tahapan dari suatu proses panjang perjalanan partai. https://www.partaiNasDem.id/ pages/sejarah- Partai-NasDem.

menjadi faktor penting yang turut melapangkan jalan bagi pendirian ormas NasDem di seluruh provinsi, termasuk Jawa Timur.

Perluasan ormas juga dilakukan dengan pembentukan organisasi sayap, dua di antaranya ialah Garda Pemuda dan Garnita Malahayati. Kedua organisasi sayap yang bersifat otonom ini didirikan tidak sebatas di tingkat nasional, melainkan juga di tingkat daerah (provinsi). Di tingkat nasional, Garda Pemuda dipercayakan kepimpinannya kepada Martin Manurung, sedangkan Garnita Malahayati dipimpin oleh Irma Chaniago. Dalam perkembangannya, kedua organisasi otonom ini di kemudian hari juga turut berubah satus dan berfungsi menjadi sayap politik partai ketimbang sayap ormas NasDem.[14]

Selama menjadi ormas, pergerakan NasDem, baik pusat maupun provinsi, sudah barang tentu banyak bersinggungan dengan persoalan politik kerakyatan dibandingkan dengan politik kekuasaan. Sebagaimana ormas atau organisasi civil society lainnya, upaya NasDem untuk mewujudkan gagasan restorasinya itu dilancarkan melalui gerakan-gerakan sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat sipil (civil society empowerment) untuk memperkuat otonominya dalam interaksinya dengan kekuasaan Negara. Berbeda dari corak gerakan civil society era Orde Baru, pergerakan ormas NasDem dan organisasi civil society lainnya pasca reformasi, tidak selalu vis a vis dengan kekuasaan negara. Posisi NasDem lebih banyak menjadi

[14] Selain keduanya, terdapat pula organisasi sayap lainnya yang menjadi underbow ormas dan sekaligus parpol NasDem, yaitu Liga Mahasiswa NasDem (LMN), Gerakan Massa Buruh (Gemuruh), dan Petani NasDem. Lihat: AD/ART Partai NasDem.

penyeimbang, penyambung lidah, komunikator, dan negosiator yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan negara.

Gerakan NasDem Jawa Timur dan nasional pada umumnya, selalu berpijak dan berorientasi pada cita-cita yang telah digariskannya. Secara umum, garis perjuangan dan pergerakan NasDem dituangkan dalam manifesto politik yang berisikan bahwa:

> Reformasi telah dan tengah mengantar Indonesia sebagai negara demokrasi. Tetapi, kami menolak demokrasi yang hanya sekadar merumitkan tata cara berpemerintahan tanpa mewujudkan kesejahteraan umum. Kami menolak demokrasi yang hanya menghasilkan rutinitas sirkulasi kekuasaan tanpa kehadiran pemimpin yang berkualitas dan layak diteladani. Kami menolak demokrasi tanpa orientasi pada publik. Kami menolak demokrasi yang sekadar menjadi proyek reformasi tanpa arti. Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keberagaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, dan kebebasan dengan kesejahteraan. Kami mencita-citakan sebuah demokrasi berbasis warga negara yang kuat, yang terpanggil untuk merebut masa depan yang gemilang, dengan keringat dan tangan sendiri.[15]

C. Mendirikan Partai Politik

Setelah satu tahun berjalan, hasrat sebagian pengurus Ormas Nasional Demokrat untuk berpolitik praktis sulit untuk dibendung lagi. Perjuangan yang mereka lakukan dipandang tidak cukup hanya dilakukan dari luar arena perpolitikan praktis. Bagi mereka, usaha untuk mendemokratisasikan Indonesia dengan cara menghadirkan pemerintahan yang bersih, kepemimpinan yang berkualitas dan menjadi teladan, mengelola keragaman dalam kesatuan, akan sulit diwujudkan hanya dengan mengandalkan peran ormas dari arena perpolitikan praktis. Sulit diwujudkan hanya dengan mengandalkan kekuatan

[15] Lihat. ADART NasDem.

ormas. Mereka menginginkan Nasional Demokrat membentuk parpol tanpa harus merubah status keormasannya.

Dalam pandangan sebagian pengurus, langkah yang ditempuh Nasional Demokrat jika membentuk sayap perpolitikan praktis, justru dinilai strategis dalam kaitannya dengan perwujudan manifestonya. Bagi mereka, keberadaan ormas dan Parpol NasDem akan saling mengisi dan melengkapi satu sama lain dalam perjuangan politiknya. Bagaimanapun, muara dari perjuangan kedua organisasi Nasional Demokrat, ormas dan parpol sama, yakni sama-sama berkepentingan untuk mewujudkan manifesto politiknya, yakni Indonesia yang demokratis dan berkemakmuran.[16]

Keinginan sebagian kader Nasional Demokrat dalam membentuk parpol bukan tanpa perdebatan dan pertentangan, terutama dari kader yang menghendaki Nasional Demokrat tetap dalam posisinya sebagai ormas. Bagi kelompok kedua, pembentukan parpol justru akan mengganggu kinerja dan boleh jadi dapat memalingkan orientasi perjuangan Nasional Demokrat. Ketika Nasional Demokrat memiliki sayap politik praktis, ormas Nasional Demokrat akan kalah pamor dibandingkan dengan parpolnya. Saat bersamaan, kerja-kerja politik Nasional Demokrat akan banyak bersinggungan dengan perpolitikan praktis daripada politik kebangsaan.

Dalam perdebatan tersebut, trend sebagian besar pengurus dan kader tampaknya lebih banyak yang berkepentingan agar Nasional Demokrat membentuk parpol. Selaku ketua umum, Surya Paloh, mempertimbangkan

---

[16] Tim Peneliti INFID dan LIPI, *Partai Politik, Pemilihan Umum, dan Ketimpangan Sosial & Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sempu, Infid dan LIPI, 2014), 7.

betul aspirasi dan desakan dari kader-kadernya baik yang pro maupun yang kontra. Sebagai jalan tengahnya, Surya Paloh bersama jajaran pengurus lainnya, kemudian mengambil pilihan untuk tetap mempertahankan Nasional Demokrat sebagai ormas[17] dan sekaligus menfasilitasi kadernya yang hendak menyalurkan aspirasi politik praktisnya melalui pembentukan sayap politik bernama Partai NasDem yang didaftarkan secara resmi kepada Kemenkumham RI pada Maret 2011.[18]

Setelah resmi menjadi parpol, maka keberadaan Partai NasDem merupakan sayap politik ormas Nasional Demokrat yang secara spesifik bergerak di jalur perpolitikan praktis. Sedangkan, Ormas Nasional Demokrat tetap berada di jalurnya sebagai organisasi kemasyarakatan dengan orientasi gerakannya bukan pada politik praktis melainkan politik kebangsaan. Posisi dilematis NasDem dan terobosan yang diambilnya ini, hampir sama dengan Ormas Nahdlatul Ulama (NU) ketika dihadapkan pada situasi keterbukaan pasca reformasi. Pilihan yang diambil NU saat itu, tidak lain adalah tetap mempertahankan NU sebagai organisasi sosial-keagamaan sembari menfasilitasi pembentukan parpol yang dikenal dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 1998.[19] Bedanya, kalau Partai NasDem menjadi sayap politik resmi bagi Ormas Nasional Demokrat, PKB bukanlah sayap politik praktis bagi NU.

---

[17] Dalam sebuah pidatonya Surya Paloh menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan tetap menjadi organisasi non-profit dan tidak akan menjadi partai politik (Antara, 27 Januari 2011).

[18] https://www.partai NasDem.id/pages/sejarah-partai-NasDem.

[19] Robin Bush, *Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia*, (Singapore: ISEAS, 2009), 121-22.

Setelah membentuk parpol, Partai NasDem berkomitmen untuk merealisasikan apa yang menjadi tujuan dan fungsi kepartaian. Tujuan pendirian Partai NasDem sendiri tidak lain adalah untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkeadilan dan berkedaulatan.[20] Sedangkan fungsinya meliputi antara lain (1) memperkuat kedaulatan dan keutuhan NKRI; (2) mewujudkan Negara kesejahteraan sesuai mandat konstitusi; (3) mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis, partisipatif dan beradab; (4) menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip demokrasi ekonomi; (5) menegakkan keadilan sosial dan kedaulatan hukum; (6) memenuhi HAM dan hak warga Negara Indonesia; (7) mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial budaya yang egaliter berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.[21]

Sebagai parpol baru, Partai NasDem yang saat itu diketuai oleh Patrice Rio Cappela untuk pertama kalinya menggelar Kongres[22] pada 25-26 Januari 2013 guna mengesahkan AD/ART dan memilih ketua umumnya. Di antara hasil kongres yang penting ialah memilih dan menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem periode 2013-2018. Seluruh 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 497 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan empat organisasi sayap (Gerakan Massa Buruh, Liga

[20] Lihat: Bab IV Pasal 8 Anggaran Dasar Partai NasDem.
[21] Lihat: Bab IV Pasal 9 Anggaran Dasar Partai NasDem, 37.
[22] Kongres I Partai NasDem saat itu diikuti 66 orang yang mewakili 33 DPW, 994 orang mewakili 497 DPD, 9 orang mewakili Majelis Tinggi, dan 2 orang anggota Dewan Pakar. Selain peserta yang memiliki hak suara, Kongres juga dihadiri 800 orang peninjau yang datang dari seluruh penjuru Indonesia.

Mahasiswa, Badan Avokasi Hukum, dan Petani NasDem), memberikan suaranya untuk Surya Paloh dalam kongres tersebut.

D. *Positioning* Partai

Dibandingkan dengan parpol-parpol yang lain, Partai NasDem memiliki karakter yang relatif unik. Berbeda dari Golkar, Gerindra, Demokrat dan bahkan PDI-P, misalnya, corak ideologi-politik Partai NasDem lebih merupakan kombinasi antara sosialisme, nasionalisme dan demokrasi. Dalam diskursus akademik, bahasa 'manifesto' sendiri diambil dari *term* yang selama ini popular digunakan oleh kalangan intelektual dan aktivis yang berhaluan sosialisme, terutama Marxisme. Namun demikian, Partai NasDem sendiri menegaskan jati diri politiknya sebagai parpol yang berhaluan nasionalisme-religius.

Partai NasDem juga sangat berbeda dari parpol-parpol yang selama ini mendasarkan ideologi dan basis massanya dari umat beragama. PPP dan PKS, misalnya, jelas-jelas merupakan parpol Islam yang mendasarkan asas kepartaiannya pada Islam. Sedangkan PKB dan PAN, meskipun tidak menjustifikasi diri sebagai parpol Islam, melainkan parpol berbasis kebangsaan yang terbuka bagi beragam masyarakat dengan identitas keagamaannya yang berbeda-beda, namun sulit untuk dipungkiri jika keduanya merupakan parpol yang menyandarkan diri pada dukungan umat Islam, PAN selama ini banyak mendapatkan dukungan dari sebagian besar warga Muhammadiyah dan PKB mendapatkan dukungan utamanya dari nahdliyīn atau NU. Kedua partai yang

terakhir ini, kerap mengidentifikasi diri sebagai partai berhaluan nasionalis-religius.

Berbeda dari parpol-parpol yang ada, sebagaimana dikemukakan di atas, Partai NasDem mencoba untuk merumuskan jati dirinya sebagai parpol berhaluan nasionalisme-religius dengan platform politiknya yang khas. Setidaknya, platform perpolitikan Partai NasDem dapat dicermati dari imaginasi politiknya yang diterjemahkan ke dalam visi, misi dan manifesto politik sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Visi dan Misi Partai

Sebagai parpol baru, NasDem mencoba menawarkan visi ideal mengenai perwujudan Indonesia sebagai negara-bangsa *(state-nation)* yang merdeka, berdaulat dan berkebudayaan. Redaksional, rumusan visi Partai NasDem adalah Indonesia yang merdeka sebagai negara-bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya.[23] Dalam hal ini, kemerdekaan, kedaulatan dan kebudayaan merupakan tiga pilar penting bagi setiap negara-bangsa, termasuk Indonesia. Tanpa ketiganya, Indonesia niscaya akan kehilangan eksistensi dan jati dirinya sebagai sebuah negara-bangsa.

Untuk mewujudkan visi di atas, Partai NasDem mengembangkan misi yang secara garis besar dituangkan ke dalam tiga poin penting, yaitu: *pertama*, membangun politik demokratis berkeadilan, yang akan dilakukan dengan langkah-langkah: (i) menciptakan tata ulang demokrasi yang

[23] Lihat: Bab II Pasal 4 Anggaran Dasar Partai NasDem, 35.

membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan. (ii) Mengembang-kan model pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa dan Negara (*nation and character building*). (iii) Melakukan perubahan menuju efisiensi sistem Pemilu. (iv) Memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan masyarakat. (v) Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan UUD 1945 sebagai kontrak politik kebangsaan.[24]

Kedua, menciptakan demokrasi ekonomi melalui tatanan demokrasi ekonomi maka tercipta partisipasi dan akses masyarakat dalam kehidupan ekonomi negara, termasuk di dalamnya distribusi ekonomi yang adil dan merata yang akan berujung pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan cita-cita ini maka perlu untuk mendorong: (i) penciptaan lapangan kerja, (ii) sistem jaminan sosial nasional, (iii) penguatan industri nasional, (iv) mendorong kemandirian ekonomi di tingkat lokal.[25]

Ketiga, menjadikan budaya gotong royong sebagai karakter bangsa.[26] Dalam mewujudkan ini, maka perlu dibuat sistem yang menjamin terlaksananya sistem pendidikan nasional yang terstruktur dan menjamin hak memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan (civic education)yang menciptakan solidaritas dan soliditas nasional, sehingga seluruh rakyat Indonesia merasakan cita rasa sebagai sebuah bangsa dan menjadikan

[24] Ibid,. 35.
[25] Ibid,. 36.
[26] Ibid,. 36.

gotong royong sebagai amalan hidup keseharian. Kebudayaan ini akan menciptakan karakter bangsa yang bermartabat dan menopang kesiapan Negara dalam kehidupan global.

Visi Partai NasDem tersebut di atas kemudian di-*breakdown* dalam kerangka misi sebagai berikut:

a. Membangun politik demokratis berkeadilan yang berarti:
   1) Menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan,
   2) Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa.
   3) Melakukan perubahan menuju efisiensi sistem Pemilu.
   4) Memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan masyarakat.
   5) Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan UUD 1945 sebagai kontrak politik kebangsaan.
b. Menciptakan demokrasi ekonomi melalui tatanan demokrasi ekonomi maka tercipta partisipasi dan akses masyarakat dalam kehidupan ekonomi Negara, termasuk di dalamnya distribusi ekonomi yang adil dan merata yang akan berujung pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan cita-cita ini maka perlu untuk mendorong:
   1) Penciptaan lapangan kerja.
   2) Sistem jaminan sosial nasional.
   3) Penguatan industri nasional.

4) Mendorong kemandirian ekonomi di tingkat lokal.

c. Menjadikan budaya gotong royong sebagai karakter bangsa. Dalam mewujudkan ini maka sistem yang menjamin terlaksananya sistem pendidikan nasional yang terstruktur dan menjamin hak memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan yang menciptakan solidaritas dan soliditas nasional, sehingga seluruh rakyat Indonesia merasakan cita rasa sebagai sebuah bangsa dan menjadikan gotong royong sebagai amalan hidup keseharian. Kebudayaan ini akan menciptakan karakter bangsa yang bermartabat dan menopang kesiapan Negara dalam kehidupan global.[27]

2. Manifesto Politik

Berpartai bukan hanya bagaimana menjadi pengurus, wakil rakyat (DPR, DPRD) atau menduduki jabatan publik di eksekutif dan yudikatif, melainkan berkaitan erat dengan perjuangan untuk mentransmisikan nilai-nilai ke-NasDem-an dalam realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam kaitan itu, setiap kader Partai NasDem diharapkan untuk benar-benar memahami dan menyelami gagasan-gagasan ideal yang menjadi visi dan misi partai, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh partai. Sebagian dari gagasan, pemikiran, dan nilai yang dijadikan sebagai *platform* Partai NasDem, dapat ditemukan dalam manifesto politiknya. Partai NasDem yang sejak awal didesain sebagai partai gagasan dan

[27] Lihat: Bab II Pasal 5 Anggaran Dasar Partai NasDem, 35.

pergerakan memiliki konsep manifesto politik yang intinya adalah sebagai berikut:

> Partai NasDem mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang yang menjadi tempat persandingan keberagaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan dan kebebasan dengan kesejahteraan. Partai NasDem mencita-citakan demokrasi berbasis warga negara yang kuat, yang terpanggil untuk merebut satu masa depan yang gemilang dengan keringat dan tangan sendiri. Partai NasDem berdiri atas nama gagasan sosial demokrasi yang mengedepankan kehadiran negara dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Partai NasDem berdiri untuk membangun politik warga negara, keberagaman sesuai dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.
>
> Partai NasDem adalah perwujudan dari nasionalisme kebangsaan, kedaulatan nasional yang bertumpu pada masyarakat yang sejahtera, kekuatan yang demokratik seluruh komponen bangsa, kemandirian ekonomi, dan negara bangsa yang memiliki martabat dalam pergaulan internasional. Kehadiran Partai NasDem dipersembahkan untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk bangsa dan tanah air yang kita cintai hingga akhir hayat.28
>
> Manifesto politik Partai NasDem di atas didedikasikan untuk mengembalikan tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan

[28] Diadaptasi dari Naskah Materi Rakerwil I DPW Partai NasDem Jawa Timur, pada 25 Juli 2015 di JX. International, Surabaya.

Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yakni negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sedangkan misinya adalah Menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat melalui garis politik yang jelas, yakni gerakan perubahan restorasi Indonesia, yakni sebuah gerakan yang diproyeksikan untuk memulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi pemerintahan Indonesia kepada cita-cita Proklamasi 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam manifesto politik Partai NasDem di atas juga telah melahirkan ideologi, garis politik, visi-misi, tujuan dan fungsi didirikannya partai NasDem. Dari sini, kita dapat melihat potret utuh partai NasDem tersebut dalam posisinya sebagai salah satu pilar demokrasi yang salah satunya mengemban sebuah misi pembebasan, yakni membebaskan masyarakat dari belenggu hari ini menuju masa depan yang lebih cerah (Yukhrijuhum min al-ḍzulumāti ila al-Nūr).

Manifesto Politik Partai NasDem itu merupakan pedoman politik bagi seluruh kader partai untuk dikontestualisasikan dalam keseluruhan proses pembangunan bangsa dan negara dengan tujuan akhir kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

3. Ideologi dan Garis Politik

Ideologi Partai NasDem adalah nasionalisme dan demokratisasi. Nasionalisme disebutnya sebagai ciri sekaligus komitmen setiap warga bangsanya yang berdaulat sekaligus sebagai modal untuk membangun negerinya melalui pendekatan demokrasi. Demokrasi dalam perspektif Partai NasDem harus dibaca secara reflektif yang bersifat faktual, di mana keberagaman (pluralitas) merupakan *sunnatullāh* yang harus diposisikan setara dan tidak diskriminatif satu dengan lainnya.

Bagi Partai NasDem, ideologi yang menjadikan nasionalisme dan demokratisasi merupakan sesuatu yang rawan jika dilihat dari realitas bangsa Indonesia yang heterogen. Kerawanan itu juga bisa terjadi jika dikaitkan dengan kondisi geografis negara Indonesia dengan 17 ribu lebih pulau yang secara riil politik penduduknya memiliki karakteristik yang berbeda. Pilihan ideologi nasionalisme dan demokratisasi dimaksudkan untuk membentengi NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945 dan ideologi negara Pancasila sebagai pilihan final dalam proses demokrasi.[29]

Sebagai sebuah ideologi, nasionalisme dan demokratisasi adalah sebuah kerangka filosofi yang menawarkan perubahan melalui proses normatif yang bersifat mengikat bagi setiap kader Partai NasDem. Empat pilar (NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan Pancasila) adalah tiang yang menyokong berdirinya sebuah negara bernama Indonesia. Tiang-tiang

[29] Sambutan Viktor B. Laiskodat, Ketua Fraksi DPR-RI Partai NasDem pada acara Kemah Restorasi Partai NasDem Jawa Timur di Taman Dayu, Pandaan, Pasuruan, 18-20 Desember 2015.

ini yang akan terus memperkokoh konsep kebangsaan dan kenegaraan di masa lalu, kini dan akan datang.

Konsep kebangsaan dan kenegaraan itu menurut Ardiansyah, harus merujuk kepada empat pokok pikiran, yaitu: (i) perlindungan terhadap semua unsur nation demi integrasi bangsa. (ii) perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. (iii) mewujudkan demokrasi dan nomokrasi dalam hidup bernegara. Nomos (hukum) menjadi penguasa atas penguasa), serta (iv) menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan keadaban dalam hidup beragama.[30]

Garis politik partai NasDem adalah Gerakan Perubahan-Restorasi Indonesia, yang memiliki arti memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, dan mencerahkan atas masalah-masalah yang berhubungan dengan konsep dasar bernegara atau sistem dan tata kelola pemerintahan, serta para penyelenggara itu sendiri. Restorasi Indonesia harus diletakkan pada cita-cita luhur para pendiri bangsa (founding fathers) yang tercermin dalam cita-cita Proklamasi 1945.

Bagi Partai NasDem, syarat utama restorasi adalah perubahan mendasar, menyeluruh, dan terpadu, melibatkan populasi besar dengan pengerahan energi berpikir yang kuat dan terarah dalam jangka waktu panjang.[31] Menurut Surya Paloh, gagasan restorasi dimaksudkan oleh Partai NasDem adalah sebagai langkah untuk memperbaiki kondisi Indonesia yang dinilai sudah carut-marut. Restorasi yang ia maksud adalah menguatkan lagi

30 Ardiansyah. Kajian Magister Ilmu Hukum Garis Politik Hukum Indonesia Menurut Konstitusi, costumlawyer.wordpress, 2017.

31 Tim Peneliti INFID dan LIPI, *Partai Politik, Pemilihan Umum dan ketimpangan Sosial & Ekonomi di Indonesia* (Jakarta: Pustaka SEMPU, INFID dan LIPI, 2014), 7.

segala hal yang telah dimiliki Indonesia, mulai dari ideologi Pancasila, konstitusi, kearifan lokal, dan lain-lain.[32]

Sementara itu, KH Hasyim Muzadi berpandangan bahwa Partai NasDem memiliki karakter tersendiri dibandingkan dengan partai-partai lain. Dalam diskusi bertajuk hikmah hijrah untuk restorasi Indonesia yang digelar DPW Partai NasDem Jawa Timur, beliau menyebutkan bahwa Restorasi Indonesia yang menjadi ciri Partai NasDem setidaknya memiliki tiga makna:[33] Pertama, restorasi negara. Restorasi dalam konteks negara dimaksudkan agar konsep bernegara yang digagas founding father negeri ini sebagaimana tercermin dalam cita-cita Proklamasi Kemerdekaan RI hendaknya dijadikan sebagai pondasi yang dipedomani oleh seluruh warga bangsa, khususnya penyelenggara negara. Kehadiran Partai NasDem tidak hanya memberikan pesan moral, tetapi juga tindakan nyata, di mana endingnya adalah bagaimana seluruh warga bangsa dilindungi, dimerdekakan, disejahterakan, dicerdaskan tanpa ada diskriminasi, serta terciptanya perdamaian abadi, baik dalam konteks kehidupan ke-Indonesiaan maupun kehidupan sebagai warga dunia.

Kedua, restorasi penyelenggara negara atau pemerintah. Restorasi dalam konteks ini dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi-fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat atau public service (al-Khādimu al-Ummah). Bukan malah minta dilayani sebagai watak dari feodalisme.

---

[32] Tempo.co (8/3/2014).

[33] KH Hasyim Muzadi merupakan undangan yang hadir dalam Buka bersama yang dilaksanakan oleh DPP NasDem pada tanggal 9 Juni 2016. Hadir pada acara tersebut selain beliau juga Presiden dan Wapresnya.

Penyelenggara negara harus mengerti dan paham denyut nadi masyarakat, tahu akan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, serta melahirkan kebijakan yang benar-benar berpihak bagi masyarakat.

Ketiga, restorasi partai politik. Restorasi dalam konteks ini dimaksudkan agar Partai Politik mampu melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang negarawan bukan penguasa yang cenderung menghegemoni rakyatnya. Pemimpin yang negarawan akan memimpin dengan pikiran visioner, hati dan jiwa yang tulus, tidak diskriminatif dan berorientasi kepada keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan atau kemakmuran.[34]

Bagaimanapun, pandangan K.H. Hasyim Muzadi di atas, sangat relevan dengan makna restorasi dalam perspektif NasDem, terlebih jika dikaitkan dengan substansi nilai-nilai ke-Islaman. Selengkapnya, restorasi dalam pandangan Partai NasDem bermakna memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, dan mencerahkan. Benang merah yang dapat ditarik dari makna tersebut yaitu: (i) memperbaiki akhlak masyarakat atau warga bangsa (makārim-al aḥlāq), sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad Saw ketika beliau diutus oleh Allah Swt ke muka bumi; (ii) mengembalikan sesuatu pada tempatnya (tidak dzalim), tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya (tidak korupsi), dan bertindak adil dalam mengambil kebijakan; (iii) memulihkan situasi dan kondisi masyarakat-warga bangsa pada yang normal, dan segala sesuatunya harus berjalan on the track (qul kullu ya'malū 'alā tsāqilatihī); dan (iv) mencerahkan adalah tidak membodohi masyarakat,

[34] Pesan Hijrah KH. Hasyim Muzadi pada acara Pembukaan Bulan Restorasi bertajuk *Hikmah Hijrah untuk Restorasi Indonesia* yang diadakan DPW Partai NasDem Jawa Timur pada 14 November 2015.

sebaliknya memberikan harapan dan membebaskan masyarakat dari belenggu hari ini menuju hari esok yang lebih cerah (yuḥkrijuhum min aḍ-ḍzulumāti- ila an-nūr).[35]

Pada sisi lain, jargon restorasi yang disandingkan dengan kata gerakan perubahan memiliki makna yang universal dalam perspektif agama. Jargon ini memiliki benang merah yang juga determinan dengan konsepsi Islam. Meskipun berlaku universal, dalil-dalil tentang perubahan cukup banyak ditemukan dalam Al-Qur'an, antara lain Q.S Ar-Ra'du:11 yang artinya:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

> Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.[36]

Firman Allah SWT dan hadits Nabi Muhammad SAW di atas sekaligus menepis sebuah anggapan yang menyebut Partai NasDem sebagai partai sekuler-lawan sekular adalah religius. Tetapi dalam konteks ini, Partai NasDem lebih pas jika disebut sebagai Partai Nasionalis-Religius.[37]

---

[35] Effendy Choirie dalam sebuah paparan Sekolah Kader yang diselenggarakan DPD Partai NasDem se-Jawa Timur, 2015-2016.

[36] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro,. 2010), 370.

[37] Wawancara dengan Nico Ainul Yakin, Wakil Ketua OKK DPW Partai NasDem Jawa Timur pada 5 Maret 2017 di kantor Partai NasDem Jatim, Jl. Kartini 88 Surabaya. Anggapan ini juga dibenarkan oleh Rendra Kresna dan Effendy Choirie.

4. Pendidikan Politik Partai NasDem

a. Maksud dan Tujuan Akademi Bela Negara (ABN)

Akademi Bela Negara (ABN) merupakan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai NasDem. Maksud dari pendidikan politik dalam konsep Akademi Bela Negara Partai NasDem (ABN) ini diselenggarakan adalah sebagai tanggung jawab moral Partai NasDem yang merupakan pengejahwantahan semangat cinta tanah air. Sedangakan tujuannya adalah bahwa ABN Partai NasDem bertujuan membentuk kader partai yang militan dan berloyalitas tinggi dalam rangka mengamankan, mengawal, serta menjalankan seluruh kebijakan Partai secara internal. [38]

b. Visi dan Misi Akademi Bela Negara (ABN)

Visi ABN adalah Eksistensi NKRI yang mantap; persatuan bangsa yang kuat; kesejahteraan rakyat meningkat; pertumbuhan ekonomi yang tinggi; keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Misi ABN adalah Membentuk pengurus partai menjadi kader yang sadar dan kuat untuk menjalankan Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia.

c. Persyaratan Siswa ABN

1) Warga Negara Republik Indonesia.
2) Pengurus Partai NasDem dan Sayap-sayap Partai NasDem di tingkat DPP, DPW, DPD, DPC dan DPRt.
3) Usia 20 – 40 Tahun (Jenis kelamin tergantung dari angkatan).

[38] Dokumentasi garis besar Akademi Bela Negara (ABN) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem.

4) Surat keterangan sehat jasmani dan sehat kejiwaan.
5) Menyerahkan Fotocopy : KTP, KK, Ijazah Terakhir (Min. D3 (Diploma 3) /Sederajat), dan SKCK.
6) Bersedia tinggal di Asrama selama masa pendidikan 4 bulan.
7) Apabila mengundurkan diri atau dikeluarkan karena melaksanakan pelanggaran berat selama proses pendidikan maka akan dikenakan denda Rp.,- (Rupiah).

d. Hak Siswa ABN

1) Mendapatkan fasilitas akomodasi di asrama Akademi Bela Negara Partai NasDem.
2) Mendapatkan fasilitas 3 x makan dan 2 x makanan sela (extrafooding) setiap hari.
3) Mendapatkan fasilitas seragam peserta (wearpack, baju dan celana PDH, baju dan celana PDL, pakaian olahraga, sepatu PDL, sepatu PDH, topi lapangan, baret, kaos kaki).
4) Biaya transportasi PP dari ibu kota propinsi tempat asal ke Akademi Bela Negara Partai NasDem (sesuai dengan tabel).
5) Mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan kelas 2 selama 4 bulan pendidikan.
6) Mendapatkan uang saku Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) / bulan.
7) Menerima sertifikat Akademi Bela Negara Partai NasDem (bagi yang lulus) dan cincin alumni.

e. Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Bela Negara (ABN)

1) Materi Pendidikan dan Pelatihan

Doktrin dan Ideologi Partai NasDem, Manajemen Kepartaian, Moralitas, Perbandingan Ideologi, Manajemen Pemenangan Pemilu dan *Cyber War*. Doktrin Bela Negara, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Budi Pekerti, Pemikiran Dasar Bapak Bangsa, Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia. Sejarah Perpolitikan di Indonesia, Komunikasi Politik, Materi Sistem Demokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia dan Geo Politik International. Materi Kedisiplinan, Pengenalan diri dan Ketahanan Mental.

2) *Team Building*

Bentuk: Pendidikan Bela Negara, Metode: Oratori, Public Speaking, Building Report, Ceramah, Diskusi, Simulasi/Debat, Aplikasi dan Praktek Lapangan, Sifat: Satu pihak dikendalikan.

3) Rekrutmen siswa

Peserta Akademi Bela Negara (ABN) terdiri dari 600 orang pengurus Partai dan Sayap- sayap Partai NasDem dari seluruh Indonesia. Dengan rincian sebagai berikut: Jawa Timur: 100 peserta, Jawa Barat: 100 peserta, Jawa Tengah: 90 peserta, Sumatera Utara: 30 peserta, Sulawesi selatan: 30 peserta, Banten: 20 peserta, DKI Jakarta: 20 peserta, Lampung: 15 peserta, Sumatera Selatan: 15 peserta, Ntt: 15 peseta, Aceh: 15 peserta, Diy: 10 peserta, Bali: 10 peserta, Ntb: 10 peserta, Kalimantan Barat: 10 peserta, Kalimantan Selatan: 10 peserta, Jambi: 10 peserta,

Papua:10 peseta, Babel, Bengkulu, Kepri, Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Selawesi Tengah, Sulawesi Barat, Dan Papua Barat, @ 5 orang peserta.

4) Pelaksanaan Pendidikan

1 tahun terdiri dari 3 angkatan: 2 angkatan laki-laki dan 1 angkatan perempuan. Peresmian ABN Partai NasDem : Tgl 20 Mei 2017 oleh Presiden Republik Indonesia.

5) Akhir Pendidikan

Peserta memperoleh Sertifikasi, Penghargaan 10 siswa terbaik, Evaluasi, dan Penugasan di Lapangan.

6) Tenaga Pengajar

Pengajar Tetap, Pengajar Tamu; Para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, KAPOLRI, Pimpinan Teras TNI dan POLRI, Duta Besar, Pimpinan Teras Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara, Tokoh-tokoh dunia usaha, profesional terkemuka TOMAS, TOGA, TODAT tingkat nasional, Politisi dari partai-partai politik lain di dalam dan luar negeri.

7) Tempat dan Waktu

Tempat : Balai diklat akademi bela negara Partai NasDem

Waktu : 4 bulan

a). 1 Mei - 31 Agustus 2017, angkatan pertama : laki-laki

b). 1 September – 31 Desember 2017, angkatan kedua : laki-laki

c). 1 Januari – 30 April 2018 : angkatan ketiga : perempuan.

5. Dimensi-dimensi Religius Pendidikan Politik Partai NasDem

Ada dua dimensi religius yang terkandung dalam pendidikan Partai NasDem. Dimensi religius yang pertama adalah yang bersifat ritual-simbolik, dimensi ini mengajarkan nilai-nilai keagamaan yang sejalan dengan nilai-nilai keadaban modern seperti sikap rasional, militan, disiplin dan bertanggungjawab, terbuka, memperjuangkan aspirasi publik, memihak pada kepentingan rakyat, politik tanpa mahar, berakhlakul karimah dan selalu ikhlas. Berbeda dengan dimensi yang bersifat ritual-simbolis sebagaimana yang terkandung dalam berbagai program dan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh Partai NasDem sebagai berikut:

Surya Paloh bahkan mengatakan ideologi NasDem memang Nasionalis Demokratis. Akan tetapi nasionalis dan demokratisnya berdimensi religius. Sehingga ia menyebutnya sebagai parpol yang selain nasionalis demokratis yang didasarkan pada dimensi relegius. Dalam sambutannya, Surya Paloh menegaskan sikap NasDem sebagai partai politik berhaluan nasionalis religius.[39]

> “Partai NasDem adalah partai nasionalis religius. Oleh sebab itu, NasDem berkomitmen turut menjaga tradisi keislaman yang ada di Indonesia "Partai ini menegaskan posisinya sebagai nasionalis religius. Nasionalis yang religius, itulah NasDem. Itu mengapa kita bertugas untuk menjaga negeri yang kita cintai ini." NasDem ingin menjaga keutuhan ini. NasDem itu akan kering kalau tidak ada peran ulama. Ini sekarang dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kami memohon pada Allah SWT sekaligus alim ulama di Cianjur ini maka kami mohon dukungan atas niat baik kita."[40]

[39] Dokumentasi headline News Metro TV 05 Maret 2018.

[40] Begitu disampaikan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat bersilaturahmi dengan para alim ulama se- Kabupaten Cianjur di kediaman Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, di Jalan KH Abdullah Bin Nuh, Cianjur, Jawa Barat, Senin 5 Maret 2018.

Surya Paloh mengatakan partainya memandang peran ulama sangat penting. Oleh sebab itu dirinya memohon dukungan ulama se-Cianjur untuk mendukung perjuangan Partai NasDem di Cianjur. Surya Paloh menyampaikan bahwa kemajuan bangsa Indonesia tidak terlepas dari akhlak masyarakat. Surya Paloh juga menambahkan bahwa:

> "Untuk apa kemajuan bangsa ini hanya di bidang akal, tetapi tidak disertai kemajuan dan keutuhan nurani. Saya titip semangat ukhuwah Islamiyah yang sudah kita pupuk di Cianjur ini harus kita pertahankan. Jangan kasih tempat, dengki, fitnah di Cianjur ini. Kita mau mensyukuri nikmat dari Allah SWT."[41]

Kegiatan Surya Paloh di Cianjur merupakan bagian dari agenda kunjungan kerjanya di Jawa Barat. Surya Paloh ditemani Ketua DPW Jawa Barat Saan Mustopa, Ketua Garnita NasDem Jabar Yeni Nuraini Muchtar, dan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Perwakilan ulama diwakili ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cianjur KH Abdul Halim.

Kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh DPW NasDem Jawa Timur tentunya juga tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dinahkodai oleh DPP sebagaimana DPP Partai NasDem luncurkan aplikasi Alquran Digital yang dilengkapi bahasa asing dan bahasa daerah, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem meluncurkan Al-Qur’an Digital karya anak bangsa. Itu dilakukan saat acara buka puasa bersama yang dilangsungkan di halaman Kantor DPP Partai NasDem. Bahkan, NasDem menjadi Partai pertama di Indonesia yang membuat Aplikasi Alquran Digital Per Kata (word by word Alquran) Tajwid dan dilengkapi terjemahan bahasa

[41] Ibid.,

daerah dan bahasa Internasional. Aplikasi ini bertujuan meningkatkan minat membaca, menghafal dan mengamalkan Alquran sebagai kitab suci umat Islam di Indonesia khususnya dengan terjemahan bahasa daerah.

Selain itu, tujuan konservasi dan pelestarian bahasa-bahasa daerah yang dimiliki Indonesia juga menjadi fokus utama Partai NasDem yang melatarbelakangi gagasan Peluncuran Alquran Digital ini.

Partai NasDem senantiasa berkomitmen membantu pemerintah dan masyarakat khususnya umat Islam Indonesia menjalin hubungan internasional secara harmonis sesuai cita-cita yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 RI. Oleh karena itu, Alquran Digital ini juga dilengkapi dengan Fitur Terjemahan 11 bahasa internasional dan ini sebagai wujud karya nyata Partai NasDem dalam konteks Soft Diplomacy Indonesia dan Umat Islam.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di dampingi Surya Paloh Ketua Umum Partai NasDem dan Hasan Aminuddin Ketua DPP Partai NasDem Bidang Agama dan Masyarakat Adat, saat menghadiri acara buka bersama dan peluncuran Alquran digital yang diselenggarakan Partai NasDem mengapresiasi Al-quran digital yang diluncurkan Partai NasDem. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa:

> "Dengan teknologi yang dewasa ini, zaman sudah berubah. Saya mengucapkan penghargaan yang tinggi kepada Partai NasDem yang merupakan partai Nasionalis tapi terbukti lebih religius dibandingkan dengan partai yang bersimbol Islam. Memang banyak aplikasi Al-quran di Handphone kita tapi yang memiliki berbagai bahasa itu jarang." [42]

[42] Observasi peneliti pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem dalam peluncuran Al-Qur'an Digital karya anak bangsa. Itu dilakukan saat acara

Sementara itu, Ketua Partai NasDem Surya Paloh berharap adanya Alquran digital dapat memperluas syiar agama Islam di Indonesia.

> "Ini merupakan suatu hasil prakarsa yang telah dirilis oleh anak muda NasDem. Semoga setelah diluncurkan semakin memperkuat syiar untuk umat Muslim baik di dalam negeri dan luar negeri. Ini dapat mengakses bahasa internasional dan bahasa daerah."

Setelah memberikan sambutan, Surya Paloh menerima bukti sertifikasi Digital Alquran dari Kementerian Agama Indonesia sebagai bukti keabsahan peredaran Alquran digital. Sejumlah fitur yang terdapat di Alquran digital yang diluncurkan NasDem yakni fitur penunjuk shalat dan imsakiyah di seluruh kota besar maupun kecil di Indonesia, penunjuk lokasi masjid terdekat berbasis GPS, fitur Asmaul Husna, serta fitur murottal Imam Masjidil Haram Abdurrahman as Sudais dan beberapa imam lainnya.

Hadir pula dalam acara tersebut, Ketua DPW Partai NasDem Jatim, yang juga menjabat sebagai (Bupati Kabupaten Malang) Rendra Kresna, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, mantan Ketua MK Jimly Asshidiqqie dan Hamdan Zoelva. Sejumlah menteri kabinet kerja pun hadir di antaranya Menko Polhukam Wiranto, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mentan Amran Sulaiman, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menag Lukman Hakim, serta Jaksa Agung M Prasetyo. Ada pula mantan Menko Perekonomian Chairul Tanjung yang hadir

---

buka puasa bersama yang dilangsungkan di halaman Kantor DPP Partai NasDem Jalan RP Suroso 46 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat pada 28 Mei 2017.

di acara ini. Acara berlangsung santai dengan seluruh hadirin duduk lesehan. Setelah adzan magrib berkumandang, mereka langsung membatalkan puasa dengan buka bersama.[43]

E. Partai NasDem Jawa Timur

1. Dinamika Kepemimpinan

Sejak didirikan hingga periode sekarang ini, Partai NasDem Jawa Timur sudah mengalami empat kali perubahan kepemimpinan. Ketua partai pertama kali dipegang oleh Aminurokhman. Pada awal 2013 Partai NasDem Jawa Timur dinahkodai oleh Laksamana (Pur) Tedjo Edhy Purdijatno. Setelah pemilihan presiden 2014, terjadi lagi pergantian kepemimpinan di mana posisi ketua diserahkan kepada Effendy Choirie. Pada akhir 2016 ketua partai kembali mengalami pergantian. Kali ini bupati Malang dua periode, Rendra Kresna, yang dipercaya mengomandani Partai NasDem sampai September 2018. Selanjutnya Sri Sajekti Sudjunadi ditunjuk menjadi ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur tepatnya pada 9 oktober 2018.

Satu hal yang menarik untuk dicatat ialah bahwa proses alih kepemimpinan dalam Partai NasDem Jawa Timur berjalan secara normal, natural dan tanpa gesekan politik berarti. Kalaupun ada, gejolak politik dalam pemilihan ketua parpol, tidak sampai memunculkan konflik yang bermuara pada perpecahan di kalangan internal parpol. Sebagai parpol baru, tentu saja kondisi semacam ini cukup baik bagi perjalanan partai yang masih dalam tahap

---

[43] Observasi peneliti pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem dalam peluncuran Al-Qur'an Digital karya anak bangsa. Itu dilakukan saat acara buka puasa bersama yang dilangsungkan di halaman Kantor DPP Partai NasDem Jalan RP Suroso 46 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat pada 28 Mei 2017.

konsolidasi. Sebab tidak sedikit partai yang timbul dan tenggelam akibat ketidakmampuannya dalam mengelola gejolak internal yang berujung pada bubarnya atau tidak masuknya partai ke *parliemantary treaslot*.

Sekalipun tidak banyak memunculkan konflik, perjanalan Partai NasDem Jawa Timur pada setiap periode kepemimpinan ketua partai, memiliki dinamikanya sendiri yang unik dan khas. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang potret Partai NasDem Jawa Timur, berikut ini akan diilustrasikan bagaimana dinamika partai selama empat fase kepemimpinan, yakni Aminurokhman, Tedjo Edhy Purdhijatno, Effendy Choirie, Rendra Kresna, dan Sri Sajekti Sudjunadi.

a. Fase Kepemimpinan Aminurokhman (2011-2013)

Aminurokhman adalah Wali Kota Pasuruan dua periode (2000-2010). Ia memimpin Partai NasDem Jawa Timur beberapa hari setelah Ormas NasDem mendeklarasikan berdirinya Partai NasDem pada 1 Februari 2011 di Jakarta, dan menetapkan H. Surya Paloh sebagai Ketua Umum DPP Partai NasDem. Pria yang akrab dipanggil Pak Amin itu menjadi ketua partai hingga awal tahun 2013. Tugas pertama yang dilakukan mantan politisi PKB itu adalah membentuk struktur kepengurusan DPW dengan konsep minimalis dan konfigurasi yang cukup sederhana. Sedangkan kelengkapan pengurus lainnya, seperti dewan pertimbangan, dewan pakar, biro, badan dan lembaga belum dibentuk. Langkah ini dilakukan karena kebutuhan saat itu hanya untuk memastikan bahwa kepengurusan Partai

NasDem Jawa Timur sudah terbentuk, sekaligus sebagai pijakan untuk membentuk kepengurusan hingga level bawah.

Setelah itu, DPP Partai NasDem menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang secara definitif menunjuk Aminurokhman sebagai ketua, Achmad Heri sebagai sekretaris, Arie S. Tyawati sebagai bendahara, dan komposisi lengkap struktur kepengurusan DPW lainnya. Selama masa kepemimpinannya, Amin disibukkan dengan tugas-tugas kepartaian yang bersifat teknis seperti membentuk struktur kepengurusan di tingkat DPD, DPC hingga ke tingkat DPR (ranting),[44] melakukan penataan administrasi partai, serta mempersiapkan verifikasi administrasi dan faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tugas ini tidak ringan, sebab sebagai partai baru yang belum memiliki basis konstituen yang jelas, harus dihadapkan dengan sejumlah persyaratan yang begitu ketat oleh KPU. Untuk lolos menjadi kontestan pemilu 2014, Partai NasDem Jawa Timur harus melengkapi struktur kepengurusan di tingkat kab/kota 100 persen, kepengurusan di tingkat kecamatan 75 persen, serta data anggota sebanyak 1 atau 1000 dari total jumlah penduduk yang ditandai dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai NasDem. Syarat lainnya adalah kelengkapan administrasi kantor seperti surat keterangan domisili, surat perjanjian kontrak atau sewa, rekening bank atas nama partai, papan nama partai, dan sebagainya.

---

[44] DPD (Dewan Pimpinan Daerah) adalah sebutan kepengurusan Partai NasDem di tingkat Kabupaten/Kota; DPC (Dewan Pimpinan Cabang) di tingkat kecamatan, dan DPRT (Dewan Pimpinan Ranting) di tingkat Desa/Kelurahan.

Untuk bisa lolos sebagai parpol peserta pemilu 2014, maka seluruh persyaratan yang ditetapkan KPU itu, harus diselesaikan sebelum dilakukan verifikasi administratif dan faktual. Untuk memenuhi target tersebut, Amin bersama pengurus DPW lainnya bekerja keras dan bergerak cepat tanpa mengenal lelah. Satu persatu sejumlah persyaratan dapat diselesaikan dengan baik, bahkan melampaui target maksimal yang ditetapkan oleh KPU.

Selama tiga bulan bekerja, Aminurokhman berhasil membentuk kepengurusan di tingkat DPD, DPC, dan DPRT dengan capaian 100 persen. Sedangkan data anggota yang berhasil direkrut juga melampaui batas persyaratan yang ditetapkan. Pengurus DPD kabupaten atau kota yang penduduknya di atas 1 juta berhasil merekrut 6 ribu anggota, sementara yang penduduknya di bawah 1 juta berhasil merekrut 3 ribu anggota seluruhnya ber-KTA Partai NasDem.

Dari seluruh hasil kerja Aminurokhman yang dibantu pengurus DPW dan DPD, Partai NasDem Jawa Timur berhasil lolos verifikasi administrasi dan faktual KPU dengan predikat memuaskan. Sukses Partai NasDem Jawa Timur akhirnya juga diikuti oleh pengurus DPW yang lain di seluruh Indonesia, sehingga Partai NasDem secara nasional berhak menjadi kontestan Pemilu 2014 bersama 12 partai lainnya.

Setelah Aminurokhman berhasil membawa Partai NasDem Jawa Timur menjadi kontestan Pemilu 2014, maka pada awal 2013 posisinya digantikan oleh Laksamana TNI (Pur) Tedjo Edhy Purdhijatno, sedangkan

Amin sebagai wakil ketuanya, adapun sekretarisnya dijabat oleh Mirdasy, sementara bendaharanya dipercayakan kepada Yayuk Emilia.

Pergantian kepemimpinan di tubuh Partai NasDem Jawa Timur menurut Aminurrokhman murni untuk penguatan tokoh, sekaligus sebagai peristiwa biasa yang lazim terjadi di tubuh partai. Meskipun Aminurrokhman sudah tidak lagi menjabat ketua DPW, tetapi roda organisasi partai tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan Pak Amin tetap membantu kepengurusan di bawah kepemimpinan Pak Tedjo sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya sebagai wakil ketua bidang pemenangan pemilu.

Ini adalah pelajaran pertama bagi seluruh kader Partai NasDem agar *sami'na wa atha'na* (mendengar dan patuh) kepada seluruh keputusan DPP partai. Kebijakan DPP itu sekaligus merupakan cara Partai NasDem memperkenalkan kultur baru berpolitik bagi seluruh kader-kadernya. Tegas Pak Amin saat itu.[45]

Menurut politisi yang kenyang pengalaman ini, keputusan DPP partai adalah mutlak dan harus diikuti oleh setiap kader Partai NasDem, yang pada saat itu belum memiliki pengalaman mengelola partai secara profesional.Profesionalisme pengelolaan partai diasumsikan oleh Amin baru akan terjadi pada dua sampai tiga kali pemilu ke depan. Oleh karena itu, perubahan konfigurasi struktur kepengurusan pada semua level merupakan salah satu ikhtiar partai untuk terus berbenah sampai partai ini betul-betul

[45] Wawancara bersama Aminurrahkman pada tanggal 5 November 2016 di kantor DPW Partai NasDem Jawa Timur.

kuat dan dipercaya serta menjadi harapan masyarakat untuk perubahan yang lebih baik.

b. Fase Kepemimpinan Laksamana (Pur) Tedjo Edhy Purdijatno (2013-2014)

Ada satu hal yang cukup menarik terkait dengan kepemimpinan Partai NasDem Jawa Timur dilihat dari latar belakang ketuanya. Aminurrahman yang menahkodai partai berasal dari kalangan sipil-santri, mantan partai yang pernah didirikan oleh Abdurrahman Wahi, PKB. Sedangkan, fase kedua kepemimpinan Partai NasDem Jawa Timur, dipegang oleh ketua umum yang berlatar (purn) militer-nasionalis. Perbedaan latar belakang ketua partai, tentu saja akan memberikan warna tersendiri terhadap perjalanan partai.

Sebenarnya, saat Tedjo Edhy menjabat ketum partai, posisinya bukan lagi sebagai militer aktif, melainkan purnawirawan.Karena itu, posisi Tedjo pun sudah beralih menjadi warga negara sipil yang tidak terkait dengan dunia kemiliteran formal. Meski demikian, latar militer Tedjo tentu saja tidak hilang sama sekali dalam sepak terjang kehidupan sipilnya, termasuk dalam memimpin parpol. Kondisi demikian mengingatkan para birokrat dan pejabat pemerintahan (gubernur, bupati, camat) era Orde Baru yang berlatar militer. Sebagaimana *patron*-nya, Suahrto, kepemimpinan yang mereka tampilkan cenderung sentralistik dan otoritarianistik.

Seiring dengan perubahan rezim, dari Orde Baru ke Orde Reformasi, gaya kepemimpinan para pemimpin organisasi politik dan pemerintahan

pun, sedikit banyak mengalami perubahan. Para pemimpin yang berasal dari kalangan militer pun, mau tidak mau, harus beradaptasi dengan tuntutan demokrasi, tidak lagi otoritarianisme. Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, ketika menahkodai Parpol Demokrat dan menjadi pemimpin tertinggi negara (presiden) tidak lagi menampilkan gaya kepemimpinan militeristik khas Orde Baru. Meski demikian, bisa-bisa militerisme tidak hilang sama sekali dari pola kepemimpinan yang ditampilkannya. Demikian halnya dengan Tedjo Edhy ketika mendapatkan mandat dari ketum Surya Paloh untuk menahkodai Partai NasDem Jawa Timur.

Sebagai catatan, kala Tedjo Edhy ditunjuk sebagai ketum Partai NasDem Jawa Timur, ia sendiri sebenarnya masih menjabat sebagai ketua *Task Force* Bidang Kajian Strategis DPP Partai NasDem dan Ketua Dewan Pertimbangan Ormas NasDem. Berkah karir politiknya di DPP NasDem inilah, ia dipercaya untuk memimpin dan membesarkan Partai NasDem Jawa Timur. Karir politiknya di NasDem pula yang akhirnya menghantarkan dirinya menduduki posisi strategis di birokrasi pemerintahan Jokowi, yakni sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam).

Dalam karir non-politiknya, purnawirawan TNI Angkatan Laut (AL) bintang empat ini, pernah mengisi beberapa jabatan strategis di antaranya ialah Pangkoarmabar, Asisten Perencanaan KSAL, Dirjen PerencanaanPertahanan Kementerian Pertahanan, Komandan Sesko TNI, dan Kepala Staf Umum TNI, KSAL pada periode 2008-2009, dan terakhir

sebagai Menkopolhukam RI pada Kabinet Kerja Jilid I di era Pemerintahan Jokowi-JK.

Ditunjuknya Tedjo sebagai Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur, selain karena alasan ketokohan, pertimbangan lainnya adalah soal kian dekatnya penyelenggaraan pemilu 2014. Partai NasDem membutuhkan sosok kuat untuk terus berbenah menjadi partai yang kokoh, solid dan dapat bersaing dengan parpol-parpol lainnya, baik yang baru maupun lama, dalam kontestasipolitik elektoral. Hal ini dirasa ada pada sosoknya. Tedjo Edhy sendiri ditunjuk sebagai ketua Partai NasDem Jawa Timur berdasarkan SK DPP Partai NasDem Nomor: 239-SK/DPP-NasDem/IV/2013, tanggal 3 April 2013.

Setelah secara resmi ditunjuk sebagai ketua Partai NasDem Jawa Timur, kantor DPW yang semula berada di Perum Regency Surabaya akhirnya dipindahkan ke Jl. Raya Darmo, Surabaya. Di kantor inilah seluruh aktivitas dan pergerakan Partai NasDem Jawa Timur dipusatkan. Selama menjadi ketua DPW partai, Tedjo berkonsentrasikepada penyiapan mesin politik partai dan rekrutmen saksi di 86 ribu lebih TPS, serta saksi-saksi di tingkat KPPS, PPK dan KPU se-Jatim menyongsong penyelenggaraan Pemilu 2014.

Bersama pengurus DPW lainnya, Tedjo turun ke bawah (turba) ke seluruh DPD Partai NasDem se-Jawa Timur untuk memastikan bahwa mesin politik partai berjalan dengan baik, efektif, dan optimal. Selain itu, ia juga melakukan penjaringan bagi calon legislatif (bacaleg) di tingkat

provinsi untuk dimasukkan dalam daftar calon sementara (DCS) sebelum akhirnya ditetapkan dalam daftar calon tetap (DCT) DPRD Provinsi periode 2014-2019. Langkah yang samajuga dilakukan oleh pengurus di tingkat DPD se- Jawa Timur. Melalui proses yang begitu ketat, akhirnya DPW Partai NasDem Jawa Timur berhasil menyaring sebanyak 100 orang untuk ditetapkan dalam DCT dan siap berlaga dalam Pemilu 2014.

Pada Pemilu yang digelar pada 9 April 2014 silam, dari Partai NasDem Jawa Timur berhasil memperoleh 7 kursi DPRRI, 4 kursi DPRD Provinsi, dan 103 DPRD kab atau kota. Sebagai partai baru, perolehan Partai NasDem itu cukup menjanjikan, bahkan melampaui perolehan dua partai yang lebih lama berdiri, yaitu PBB dan PKPI yang tidak lolos *parliementary threshold* (PT). Sebaran perolehan kursi Partai NasDem secara nasional juga lebih baik ketimbang PKB dan PAN.

Tidak berselang lama, pengurus DPW Partai NasDem Jawa Timur dihadapkan dengan momentum demokrasi yang tak kalah pentingnya, yakni pemilu presiden (Pilpres). Pada saat Pilpres, Partai NasDem Jawa Timur menggerakkan mesin partai dan seluruh kadernya untuk memenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla bersama partai koalisi lainnya. Di sinilah nama Effendy Choirie mulai diperkenalkan oleh DPP Partai NasDem, dan selanjutnya ia ditunjuk menjadi Koordinator Wilayah (Korwil) untuk pemenangan pasangan Jokowi-JK yang bertanggung jawab di wilayah Jawa Timur. Pilpres yang digelar pada 9 Juli 2014 itu berhasil dengan kemenangan pasangan Jokowi-JK.

Bersama partai koalisi, Partai NasDem Jawa Timur berhasil memenangkan pasangan Jokowi-JK dengan raihan sebesar 11.669.313 suara. Pasangan Jokowi-JK menguasai 24 dari 38 Kab/Kota di Jawa Timur, yaitu: Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Tuban, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Surabaya, dan Kota Batu.

c. Fase Kepemimpinan Effendy Choirie (2014-2016)

Fase ketiga kepemimpinan Partai NasDem Jawa Timur kembali dipegang oleh kalangan sipil-santri dan sekaligus politisi dari parpol yang dilanda perpecahan, yakni PKB. Effendi Choirie adalah mantan aktivis santri dan sekaligus politisi PKB yang setia dengan Gus Dur. Ketika terjadi konflik dan perpecahan di internal PKB antara kubunya Gus Dur *versus* Muhaimin Iskandar, Effendy Choirie lebih memilih untuk tetap setia mendukung PKB versi Gus Dur. Dalam perkembangannya, ia pun terlempar dari posisi struktural di PKB dan sekaligus DPR-RI sebagai akibat dari kekalahan politis PKB Gus Dur dalam memperebutkan legitimasi pemerintah.

Sebagai politisi senior yang sudah kenyang merasakan pahit getirnya perpolitikan praktis, tidak sulit baginya untuk mendapatkan posisi baru di parpol baru. Berbagai tawaran berdatangan dari parpol-parpol di luar PKB, namun pada akhirnya ia pun memutuskan untuk memilih melanjutkan karir politiknya di Parpol NasDem. Keaktifan dan prestasinya, terutama saat

menjadi Koordinator Wilayah (Korwil) Pilpres 2019, di Parpol baru inilah yang kemudian menghantarkannya menjadi ketum Partai NasDem di tingkat DPW Jawa Timur.

Sebagaimana tradisi reformasi kepemimpinan di Partai NasDem, tidak banyak intrik dan konflik politik yang menyertainya. Pergantian ketua DPW dari Tedjo Edhy Purdijatno ke Effendy Choirie berlangsung secara demokratis. Secara formal, pengangkatan Effendy Choirie sebagai ketum Partai NasDem Jawa Timur ditetapkan berdasarkan SK DPP Nomor: 799-SK/DPP-NasDem/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014 yang berisi tentang penunjukan Effendy Choirie sebagai Plt. Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur sekaligus mencabut SK DPP Partai NasDem Nomor: 239-SK/DPP-NasDem/IV/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Kepengurusan DPW Partai NasDem Jawa Timur di bawah kepemimpinan Tedjo Edhy Purdijatno.

Dua bulan berikutnya, tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2014 DPP Partai NasDem kembali menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 1244-SK/DPP-NasDem/X/2014 Tentang Pengesahan Perubahan Pengurus DPW Partai NasDem Jawa Timur. Kali ini, SK DPP Partai NasDem menunjuk tiga orang nama, yaitu Effendy Choirie sebagai Ketua, Aminurokhman sebagai Sekretaris, dan Muzammil Syafi'i sebagai Bendahara DPW Partai NasDem Jawa Timur. Ketiganya diberi mandat antara lain melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan Partai NasDem Jawa Timur mulai dari penyiapan kantor, penataan struktur DPW dan DPD se-Jawa Timur, dan manajemen pengelolaan partai, penataan Fraksi NasDem di DPRD Jatim,

rekrutmen Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan sebagainya yang dianggap perlu.

Kantor DPW yang sebelumnya beralamatkan di Jl. Raya Darmo kemudian dipindahkan ke Jl. Kartini 88 Surabaya. Dari sini Gus Choi sapaan akrab Effendy Choirie memegang kendali organisasi partai untuk melaksanakan mandat DPP dengan penuh tanggung jawab. Dalam melaksanakan mandat DPP, DPW Partai NasDem Jawa Timur berada dalam arahan, bimbingan dan pengawasan Korwil DPP Partai NasDem yang bertugas di Jawa Timur, yaitu Ibu Sri Sajekti Sudjunadi yang akrab dipanggil Bu Janet.

Posisi Korwil adalah unsur perpanjangan tangan yang bersifat langsung dari DPP di tingkat provinsi, yang berfungsi mengkoordinasikan seluruh sumber daya Partai NasDem di wilayah terkait. Ia bertindak atas nama DPP melakukan assessment, evaluasi dan penilaian atas kondisi partai beserta kekuatan, tantangan, hambatan dan peluang pada provinsi dan kabupaten atau kota.

Selama setahun lebih, Gus Choi, Amin dan Muzammil bekerja keras melakukan penataan struktur kepengurusan DPW dan DPD Partai NasDem se- Jawa Timur melalui program Indonesia Memanggil, dan beberapa kegiatan kepartaian dalam bentuk Sekolah Legislatif, serta konsolidasi ke DPD Partai NasDem se- Jawa Timur. Walhasil, kerja kerasnya itu sukses membenahi struktur kepengurusan DPW dan DPD se-Jawa Timur.

Berikutnya, pada 22 Juni 2015 DPP Partai NasDem kembali menerbitkan SK Nomor: 1373-SK/DPP-NasDem/VI/2015 tentang pengesahan susunan pengurus DPW Partai NasDem Jawa Timur dengan komposisi Effendy Choirie sebagai Ketua dengan sekretaris Aminurokhman, dan bendahara Beny Utomo, berikut komposisi lengkap kepengurusan DPW mulai dari Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, dan Biro-Biro.

Selanjutnya, kepengurusan DPW Partai NasDem Jatim, dikukuhkan secara bersamaan dengan pengurus DPD se-Jatim di Gedung JX International, Surabaya, pada 25 Juli 2015 dalam acara bertajuk Konsolidasi Partai NasDem se-Jatim. Hadir dalam acara tersebut adalah Ketua Umum DPP Partai NasDem, H. Surya Paloh dan sejumlah petinggi partai NasDem lainnya, Gubernur Jatim, H. Sukarwo, dan Saifullah Yusuf (Wakil Gubernur Jatim).

Acara yang dihadiri sekitar 3 ribu kader Partai NasDem se- Jawa Timur itu berjalan meriah, karena bersamaan dengan lebaran ketupat. Sebanyak 12 ribu ketupat disuguhkan untuk menjamu tokoh nomor satu di NasDem H. Surya Paloh dan seluruh tamu undangan yang hadir di gedung JX International kala itu. Pada sore harinya, acara dilanjutkan dengan kegiatan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I yang diikuti oleh seluruh pengurus DPW dan DPD se-Jawa Timur. Sedangkan Ketua Umum Partai NasDem melanjutkan tugasnya memberikan kuliah umum di Masjid Al-

Akbar, Surabaya dalam rangka menyambut Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang.

Bertindak sebagai pimpinan sidang dalam Rakerwil adalah Ainul Yakin, Wakil Ketua OKK DPW Partai NasDem Jawa Timur. Rakerwil I Partai NasDem Jawa Timur ini menurut Nico sapaan akrab Ainul Yakin adalah amanat konstitusi partai sebagaimana tercantum di dalam AD/ART Partai NasDem Bab XIV Pasal 70 ayat 2 yang berbunyi Rapat Kerja Wilayah merupakan permusyawaratan pada tingkat Wilayah untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pimpinan Wilayah, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting.

Selain itu, pelaksanaan Rakerwil I merujuk kepada SK DPP Partai NasDem Nomor: 1287-SK/DPP-NasDem/XII/2014 tentang pedoman organisasi program Indonesia memanggil dalam rangka rekrutmen kepengurusan partai NasDem bab IV Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: Setelah menerima Surat Keputusan (tentang Kepengurusan di tingkat Provinsi), Dewan Pimpinan Wilayah wajib melaksanakan rapat kerja wilayah dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Dengan demikian, penyelenggaran Rakerwil Partai NasDem Jawa Timur selain merupakan tuntutan konstitusional partai, juga merupakan keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh DPW Partai NasDem Jawa Timur sebagai alat ukur untuk menguji komitmen pengurus dalam

mengabdikan dirinya kepada Partai NasDem secara holistik dan komprehensif demi tercapainya visi, misi dan tujuan Partai NasDem.

Rumusan-rumusan konsepsional yang ditetapkan di forum rapat kerja itu menjadi guideline bagi seluruh pengurus dalam menjalankan tugas dan amanah partai. Sehingga pengurus partai dapat diukur kinerjanya dalam melaksanakan fungsi dan tugas kepartaian dalam satu periode kepengurusan, dan akan dievaluasi setiap tahunnya.Beberapa materi yang dibahas dalam Rakerwil, antara lain Tata Laksana Organisasi, Program Kerja Restorasi, Sistem Kaderisasi, Sistem Pemenangan Pemilu dan Rekomendasi. Seluruh keputusan yang ditetapkan dalam kegiatan Rakerwil itu dijadikan sebagai pedoman baku bagi seluruh pengurus DPW dan DPD Partai NasDem se- Jawa Timur.

Hasil-hasil yang diputuskan di forum Rakerwil itu diproyeksikan untuk pemenuhan target maksimal dalam tiga momentum demokrasi yangoleh Gus Choi disebut dengan istilah TRI SUKSES, yaitu: Sukses Memperkuat Struktur, Membangun Kultur, dan Membina Basis.Kuatnya struktur, terbangunnya kultur dan terbina dan terbentuknya basis menjadi modal utama menuju TRI SUKSESberikutnya, yaitu Sukses Pilkada 2015, 2017, dan 2018 Sukses Pileg 2019, dan Sukses Pilpres 2019. Ketiga momentum demokrasi tersebut menjadi kata kunci dalam keseluruhan proses kegiatan Partai NasDem di Jawa Timur di masa kepemimpinan Effendy Choirie.

Dari Rakerwil ini seluruh rangkaian kegiatan DPW Partai NasDem Jawa Timur disusun dan dilaksanakan sampai digelarnya acara Sekolah Kader-Sekolah Legislatif, Konsolidasi DPD, DPC, DPRD/RI, serta Sertijab dan Deklarasi Save Jawa Timur dari Narkoba, Korupsi, Terorisme dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada 12-14 Agustus 2016 di Hotel Mercure dan JX International, Surabaya.

Selama dua tahun memimpin Partai NasDem Jawa Timur, anak ideologis Gus Dur itu telah menggelar sebanyak 85 kali pertemuan, (4 kali Sekolah Legislatif, 39 kali Sekolah kader, dan 42 kali pertemuan-pertemuan dalam sejumlah kegiatan Partai NasDem Jawa Timur). Dengan demikian, jika jumlah di atas dihitung rata-rata per bulan, maka setiap bulannya, Partai NasDem Jawa Timur fase kepemimpinan Gus Choi dapat menyelenggarakan sebanyak 2 sampai 3 kali kegiatan.[46]

d. Fase Kepemimpinan Rendra Kresna (2016-2018)

Setelah dipimpin oleh ketum yang berlatar sipil-santri dan militer, pada periode ketiga, kepemimpinan Partai NasDem Jawa Timur dipegang oleh seorang politisi-birokrat. Adalah Rendra Kresna, eks politisi Golkar, sama dengan kopatriotnya Surya Paloh, yang menggantikan Effendy Choirie menahkodai Partai NasDem Jawa Timur. Pengalamannya sebagai politisi Golkar yang tumbuh dan berkembang sejak Orde Baru, tentunya akan memberikan warna tersendiri dalam penglolaan parpol baru (Partai NasDem) yang lahir pada periode pasca Orde Baru.

---

[46] Diadaptasi dari Naskah Buku: *2 Tahun Partai NasDem Jawa Timur Bersama Effendy Choirie*, 14 Agustus 2016 dan wawancara dengan Effendy Choirie, 10 Agustus 2016.

Dalam dunia perpolitikan pasca Orde Baru, sosok Rendra Kresna sendiri sebenarnya bukanlah sosok yang asing.Iaadalah bupati dua periode Kabupaten Malang (2012-2022). Karir politiknya dimulai sejak dekade tahun 1990-an melalui Golkar (kini, Partai Golkar). Selama aktif di Golkar, Rendra terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Malang hingga beberapa periode sebelum akhirnya berkarir di birokrasi menjadi wakil bupati. Pada tahun 2012, Rendra Kresna terpilih menjadi Bupati Malang untuk yang pertama kalinya. Lalu, pada tahun 2016 ia kembali terpilih menjadi Bupati Malang untuk kali kedua yang dijabatnya sampai tahun 2022.

Di penghujung tahun 2016, partai politik yang telah membesarkannya itu dilanda prahara yang tak kunjung usai. Rendra yang memiliki jiwa harmoni itu merasa kurang nyaman dengan situasi dan kondisi yang kala itu menerpa partainya. Ia kemudian memilih NasDem sebagai partai yang dianggap memiliki kemiripan platform dengan partai yang sebelumnya diikuti. Baginya, Partai NasDem adalah partai alternatif dengan karakteristik yang berbeda dengan partai lainnya, termasuk dengan partai yang sebelumnya diikuti. Gerakan perubahan-restorasi Indonesia menjadi catatan penting bagi Rendra untuk memulai debut barunya sebagai ketua Partai NasDem Jawa Timur. Pengalaman politiknya di Golkar, Wakil Bupati, dan sebagai Bupati dua periode di Malang merupakan bekal berharga baginya untuk memenangkan NasDem di Jawa Timur pada Pemilu 2019 mendatang.

Berbekal SK DPP Partai NasDem Nomor: 428-SK/DPP-NasDem/VIII/2016 tertanggal 23 Agustus 2016, Bupati Malang itu secara resmi menjadi Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur menggantikan Effendy Choirie. Pergantian ketua DPW itu dilakukan karena Effendy Choirie dibutuhkan tenaga dan pikirannya di Jakarta untuk membantu tugas-tugas strategis di DPP Partai NasDem. Serah terima jabatan (Sertijab) Ketua DPW akhirnya dikukuhkan pada 14 Agustus 2016 di Gedung JX. International, Surabaya yang dihadiri oleh ribuan kader NasDem se-Jawa Timur. Sebulan kemudian, tepatnya pada 11 September 2016 DPW di bawah kepemimpinan Rendra Kresna melaksanakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) ke-II di Malang.

Menurut Rendra Rakerwil kedua ini merupakan kelanjutan dari Rakerwil pertama di era kepemimpinan Effendy Choirie, yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menjalankan tugas-tugas kepartaian selama ia memimpin. Seluruh keputusan dan ketetapan rakerwil itu oleh Pak Rendra akan dijadikan pijakan untuk menggerakkan Partai NasDem dalam pemenangan Pilkada 2017, 2018, Pemilu 2019 dan Pilpres 2019 (Tri Sukses).

Dalam program pemenangan ini, di era kepemimpinan Rendra Kresna, DPW Partai NasDem Jawa Timur memiliki sejumlah tahapan program, yaitu: (i) penataan dan penguatan struktur dan infra struktur menghadapi verifikasi administrasi dan faktual KPU. (ii) melakukan branding-branding politik untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas

partai. (iii) melakukan rekrutmen Bakal Calon Legislatif menghadapi Pemilu 2019. (iv) membangun basis melalui KTA-nisasi, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai fix voter Partai NasDem sekaligus sebagai basis dasar Partai NasDem di akar rumput (grass root). (v) mengadakan Sekolah Kader dan Sekolah Legislatif untuk memperkuat basis intelektual dan pengetahuan kader NasDem dengan misi restorasi Indonesia-gerakan perubahan dan (6) mengadakan rekrutmen dan pelatihan saksi. Enam agenda penting ini menjadi prioritas program Partai NasDem Jawa Timur di era kepemimpinan Rendra Kresna.[47]

Ketika diselenggarakan Rakerwil II pada 11 September 2016 di Hotel Gajah Mada, Malang. Rendra Kresna menjelaskan bahwa Partai NasDem memiliki modal politik (political strength) yang cukup besar, yaitu: (i) partai nasionalis-religius. (ii) partai baru dengan track record masih baik. (iii) memiliki relasi media yang cukup kuat. (iv) pengurusnya banyak dari kalangan muda yang pro-perubahan. (v) memiliki simpatisan (modal pemilih, pada Pemilu 2014) sebesar 1.495.471 atau 7,5 % dari pemilih yang hadir (voter turn out) dan (vi) Memiliki 7 kursi di 7 dapil serta 4 dapil berpotensi memperoleh 4 kursi (artinya, kekuatan NasDem merata di Jatim).[48]

Selanjutnya ia menguraikan bahwa sebagai partai nasionalis-religius, Partai NasDem memiliki ruang gerak relatif lebih luas, mengingat Jawa

---

[47] Diolah dari hasil wawancara dengan Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur, Rendra Kresna pada 15 Mei 2016 di Malang.

[48] Rendra Kresna, *Paparan Strategi dan Manual Pemenangan Pemilu 2019, DPW Partai NasDem Jatim,* disampaikan pada acara Rakerwil II di Malang pada 11 September 2016.

Timur secara budaya terbagi menjadi empat kluster, yaitu: Mataraman, Pandhalungan, Madura, dan Arek.[49] Sedangkan secara riil politik, ada sekitar 10 juta (pemilih yang bisa berpindah) swing voter atau sekitar 35 % dari total jumlah penduduk. Kenyataan ini akan semakin membuat optimisme Partai NasDem sebagai partai baru yang menjadi simbol perubahan.[50]

2. Aktivitas Partai Politik

Kegiatan Partai NasDem Jawa Timur secara umum merujuk kepada manifesto perjuangan politik Partai NasDem, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), dan Garis Politik Partai NasDem dengan tema restorasi Indonesia-gerakan perubahan. Manifesto perjuangan politik Partai NasDem berisi kerangka filosofi atas cita yang hendak dituju dan diwujudkan oleh Partai NasDem. Sedangkan AD dan ART merupakan pedoman umum yang dijadikan sebagai referensi untuk merumuskan langkah-langkah teknis organisasi. Sementara garis politik partai NasDem dengan restorasi Indonesia-gerakan perubahan merupakan dinamika yang diharapkan selalu lahir dari setiap kader-kader NasDem dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian.

Seluruh rangkaian di atas secara detail di-breakdown dalam kerangka teknis yang diputuskan melalui forum Rakerwil dan forum-forum lain yang sengaja dilakukan untuk menetapkan kebijakan partai.

---

[49] Selain cluster Mataraman, Pendhalungan, Madura, dan Arek – Jawa Timur juga memiliki cluster Tengger (tersebar di empat kabupaten: Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, dan Malang), Osing (Banyuwangi), dan Samin (Bojonegoro).

[50] Rendra Kresna, *Paparan Strategi dan Manual Pemenangan Pemilu 2019, DPW Partai NasDem Jatim,* disampaikan pada acara Rakerwil II di Malang pada 11 September 2016.

Sebagaimana dijelaskan pada uraian terdahulu, forum Rakerwil setidaknya membahas beberapa agenda penting, antara lain: (1) tata laksana organisasi, yang mengatur tugas, pokok, dan fungsi (Tupoksi) masing-masing pengurus partai sesuai bidangnya. (2) merumuskan program kerja. (3) membuat pedoman-pedoman teknis yang digunakan sebagai instrumen untuk melaksanakan program-program strategis kepartaian dan (4) membuat pokok-pokok pikiran dan rekomendasi, baik secara internal maupun eksternal kelembagaan.

Dengan demikian, seluruh ragam kegiatan Partai NasDem Jawa Timur merujuk kepada ketentuan yang telah diputuskan di forum Rakerwil tersebut, yang selanjutnya diimplementasikan dalam berbagai kegiatan dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Di lihat dari jenisnya, kegiatan Partai NasDem Jawa Timur, menurut Nico Ainul Yakin51 dibagi dalam dua katagori, yaitu: program umum dan program khusus. Pertama, yang disebut dengan program umum adalah program partai yang secara operasional dilaksanakan oleh partai secara struktural. Pelaksana kegiatannya pun dilakukan oleh pengurus partai yang ditunjuk oleh partai, seperti HUT Partai NasDem, peringatan hari-hari besar agama dan nasional, musywil, rakerwil, dan sebagainya. Kedua, program khusus, yakni program kepartaian yang terdistribusi kepada Wakil-Wakil Ketua sesuai bidangnya masing-masing. Wakil-Wakil Ketua di Partai NasDem juga dalam dua peran, yaitu:

[51] Nico Ainul Yakin adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) DPW Partai NasDem Jawa Timur. Diwawancarai pada 11 Desember 2016 di Kantor DPW Partai NasDem Jawa Timur, Jl. Kartini 88 Surabaya.

a. Wakil Ketua yang memiliki fungsi kerja kepartaian,[52] terdiri dari:

1) Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu.

2) Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kader (OKK).

3) Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik, dan

4) Wakil Ketua bidang Pendidikan Politik dan Kebudayaan.

b. Wakil Ketua yang memiliki fungsi kebijakan, terdiri dari:

1) Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan.

2) Wakil Ketua Bidang Hukum, Advokasi dan HAM.

3) Wakil Ketua Bidang Otonomi Daerah.

4) Wakil Ketua Bidang Pertanian dan Maritim.

5) Wakil Ketua Bidang Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

6) Wakil Ketua Bidang Energi, SDA, dan Lingkungan Hidup.

7) Wakil Ketua Bidang Agama dan Masyarakat Adat.

8) Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Daerah.

9) Wakil Ketua Bidang Ekonomi.

10) Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak.

11) Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja.

12) Wakil Ketua Bidang Olah Raga, Pemuda dan Mahasiswa.

Dengan konfigurasi struktur kepengurusan yang demikian ini, maka Partai NasDem Jawa Timur memiliki ragam kegiatan yang cukup vareatif dan kualitatif. Namun, untuk kegiatan-kegiatan andalan Partai NasDem Jawa Timur yang memiliki sinergitas dengan materi penelitian ini antara

[52] Wakil Ketua yang memiliki fungsi kerja kepartaian berperan sangat penting di dalam memperkuat mesin politik partai, profesionalitas kader, meningkatkan popularitas dan elektabilitas Partai NasDem, serta membangun persepsi dan image politik masyarakat atas Partai NasDem.

lain: (i) Sekolah Legislatif dan Sekolah Kader. (ii) Ramadhan Mubarak. (iii) Peringatan Hari-Hari Besar Islam. (iv) Kemah Restorasi. (v) Khatmil Qur'an dan Shalawat Nabi.

Sejumlah kegiatan yang dipaparkan di atas, secara detail akan dijelaskan dalam uraian berikut ini.

a. Pendidikan dalam kegiatan Rekerwil

Pendidikan dimaksud adalah proses saling memberikan pemahaman dalam kegiatan Rakerwil yang rutin diadakan satu tahun sekali. Ada dua kegiatan yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun keduanya, Rakerwil I yang diadakan pada saat kepemimpin Effendy Choirie tahun 2015 dan Rakerwil II yang diadakan dalam fase kepemimpinannya Rendra Kresna.

Pada dua Rekerwil yang diteliti ini ditemukan kegiatan pendidikan yang dilakukan. Pada kegitan tersebut ada beberapa hal yang menurut peneliti merupakan kegiatan pendidikan sekaligus merupakan proses strukturasi pendidikan. Kegiatan yang dimaksud adalah diskusi pra pleno komisi.

Dalam kegiatan pra pleno ini dibentuk beberapa forum kajian untuk membahas beberapa hal menyangkut arah pengembangan partai ke depanya. Seluruh kader dari semua kalangan dan bahkan dari beberapa daerah dikelompokkan secara terpadu untuk berdiskusi. Hasil dari kegiatan diskusi yang demikian biasanya akan dibawa ke sidang pleno untuk dibuat aturan bersama.

b. Bimbingan Teknis

Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun satu sampai dua kali. Peserta dari kegiatan ini adalah semua pengurus partai dan beberapa dewan legislatif fraksi Partai NasDem. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan pendidikan politik. Yang demikian ini merupakan kegiatan pendidikan politik NasDem yang diadakan guna memberikan pemahaman yang mendasar tentang arah gerak politik NasDem.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada salah satu kegiatan BIMTEK, ada beberapa hal yang temukan oleh peneliti. Peneliti melakukan obeservasi pada BIMTEK di Hotel Marcure pada tanggal 12 Agustus 2016. Dalam kegiatan ini para peserta diberikan pemahaman tentang isu-isu penting masalah yang dihadapi negara. Misalnya seperti masalah hak asasi manusia, kaderisasi politik, masalah bahaya Narkoba dan sebagainya. Selain isu-isu kotemporer nasional, peserta juga diberi bimbingan gerak politik dan kaderisasi kepartaian.

c. Sekolah Legislatif dan Sekolah Kader

Sekolah Legislatif dan Sekolah Kader merupakan dua jenis pendidikan politik yang dilaksanakan di Partai NasDem Jawa Timur. Dua jenis pendidikan politik ini penyelenggaraannya dilaksanakan secara terpisah dengan peserta yang berbeda. Tetapi adakalanya, keduanya diintegrasikan dalam sebuah kegiatan untuk sebuah alasan efisiensi dan efektifitas.

d. Sekolah Legislatif

Kegiatan Sekolah Legislatif pertama dilakukan di hotel Inna Simpang Surabaya pada 31 Oktober s/d 2 November 2014. Kegiatan ini dilakukan untuk membekali kader-kader Partai NasDem yang terpilih menjadi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota se-jawa Timur agar konsisten memperjuangkan cita-cita dan tujuan Partai NasDem melalui peran-peran legislasi, anggaran, dan pengawasan demi sebesar-besarnya kepentingan bangsa. Yang menjadi nara sumber dalam kegiatan tersebut adalah Prof. Dr. Tjuk K Sukiadi, pengamat Ekonomi Unair, Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur dan nara sumber lainnya dari DPP Partai NasDem.

Berikutnya DPW mengadakan Sekolah Legislatif yang diintegrasikan dengan kegiatan Sekolah Kader di Hotel Savana, Malang pada 12-14 Juni 2014. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pengurus DPW dan DPD Partai NasDem dan anggota DPRD Partai NasDem se-Jawa Timur. Hadir dalam kegiatan tersebut, yaitu: Korwil, Ketua Fraksi NasDem DPR-RI, Viktor buntilu laiskodat; Ketua Fraksi Partai NasDem, Prananda surya paloh; Ketua DPP Bidang media dan komunikasi politik, Saur hutabarat, serta beberapa nara sumber lain yang berbicara masalah-masalah kedewanan.

Sekolah Legislatif berikutnya dilaksanakan di Hotel Aston, Madiun. Yang menjadi peserta dalam kegiatan ini adalah Ketua, Sekretaris dan bendahara DPD Partai NasDem se-Jawa Timur. Kegiatan

ini secara langsung dibuka oleh Korwil sekaligus Ketua DPP Partai NasDem Bidang OKK, Sri Sajekti Sudjunadi. Dalam acara tersebut, hadir beberapa nara sumber, antara lain: Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur; Dr. Mukjizat, Kemendagri; Dr. Aulia Rahman, SH, Sekretaris BPK RI, dan lain-lain.[53]

Sekolah Legislatif ini selain diproyeksikan membekali kader-kader Partai NasDem di parlemen agar mampu dan cakap menjalankan tugas-tugas kedewanan, juga dimaksudkan untuk membekali anggota dewan dari Partai NasDem agar memiliki karakter restoratif.[54] Yang memiliki benang merah dengan nilai-nilai agama dan budaya bangsa yang luhur untuk mencapai tujuan nasional.[55]

e. Sekolah Kader

Setelah Sekolah Legislatif, DPW meresmikan pembukaan Sekolah Kader di kantor Partai NasDem Jawa Timur pada 2 Pebruari 2015. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Pengurus DPW dan utusan dari DPD Partai NasDem se-Jawa Timur. Karena masih awal dan sistemnya belum terbentuk, maka Sekolah Kader pada tahap ini hanya berkisar pada materi ke-NasDem-an. Yang menjadi nara sumber pada kegiatan tersebut adalah ketua DPW, Effendy Choirie, Korwil Sri Sajekti Sudjunadi, dan

---

[53] Selanjutnya kegiatan Sekolah Legislatif dan Sekolah Kader Partai NasDem dilaksanakan di DPD-DPD Partai NasDem se-Jawa Timur (Lihat Lampiran).

[54] Karakter restoratif dalam perspektif NasDem adalah memiliki dedikasi dan jiwa memperbaiki, memulihkan, mengembalikan, dan mencerahkan terhadap dinamika dan bangsa dan negara sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan RI.

[55] Hasil wawancara dengan Muzammil Syafi'i, Ketua Fraksi Partai NasDem Jawa Timur yang juga Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPW Partai NasDem Jawa Timur sekaligus Kepala Sekolah Legislatif, pada 12 September 2016 di kantor DPW Partai NasDem Jawa Timur.

Enggartyasto Lukita, Ketua Bappilu DPP Partai NasDem (sekarang Menteri Perdagangan RI).

Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan Sekolah Kader ini untuk membekali calon-calon pengurus Partai NasDem agar lebih memahami tentang ke-NasDem-an dan misi Restorasi Partai NasDem, serta tata kelola berorganisasi. Disadari bahwa Partai NasDem belum banyak memiliki konsepsi detail tentang berbagai hal yang dibutuhkan partai, salah satunya adalah sistem kaderisasi yang masuk dalam satu kesatuan sistem kepartaian yang diproyeksikan untuk mencetak kader-kader Partai NasDem yang disiplin, berintegritas mulia, mampu dan cakap dalam menjalankan tugas kepartaian, serta loyal terhadap partai dalam rangka masyarakat yang demokratis, berkeadilan dan berkedaulatan.

Oleh karena itu sitem kaderisasi partai merupakan elemen penting dalam manajemen kepartaian untuk menjaga perjalanan dinamika partai. Agar tetap eksis di tengah-tengah masyarakat dan berkelanjutan (sustenibel). Sistem kaderisasi ini disusun berdasarkan AD atau ART Partai NasDem, yang memuat sejumlah ketentuan tentang pendidikan politik, baik secara internal maupun eksternal melalui jenjang pengkaderan, pola pengkaderan dan jenis pengkaderan, serta penyelenggaraannya diatur berdasarkan ketetapan hasil Rakerwil tentang sistem kaderisasi.

Disusunnya konsep kaderisasi Partai NasDem Jawa Timur dimaksudkan untuk (i) mewujudkan kader-kader Partai NasDem yang menjadikan politik sebagai bagian dari ibadah, dengan menanggalkan motif-motif pribadi untuk sebesar-besarnya masyarakat, bangsa dan negara. (ii) menciptakan kader-kader Partai NasDem yang militan yang mampu memahami manifesto politik partai, visi-misi Partai dalam konteks restorasi Indonesia, berwawasan, idealis, handal, menjunjung tinggi moralitas partai dan berani berkorban. (iii) mencetak kader-kader Partai NasDem yang mampu mengimplementasikan program-program partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Adapun metode penyampaian materi sekolah kader dilaksanakan dengan: (i) metode ceramah. (ii) tanya jawab. (iii) diskusi kelompok atau pendalaman materi. (iv) simulasi. (v) presentasi kelompok, dan (vi) kerja kelompok).

Sedangkan materinya meliputi: (i) Ke-NasDem-an: yang berisi: dimensi kesejarahan NasDem, visi misi, tujuan dan fungsi, Manifesto perjuangn politik Partai NasDem. Kemudian garis politik Partai NasDem restorasi gerakan perubahan yang meliputi: Restorasi Indonesia, Restorasi Struktur dan Kultur Berpartai, serta Implementasinya; (ii) Ke-Legislatifan dan Pemerintahan; (iii) Strategi Pemenangan Pemilu. Tiga Materi tersebut menjadi materi pokok yang diberikan pada setiap

penyelenggaraan Sekolah Kader di DPD-DPD se-Jawa Timur.[56] Kegiatan Sekolah Kader selalu ditutup dengan pembacaan Ikrar Kader Partai NasDem.[57]

f. Peringatan Hari-Hari Besar Islam

Pertama, mengadakan Peringatan Tahun Baru Islam. Kegiatan ini diselenggarakan setiap tahun, salah satu kegiatan yang pernah diselenggarakan adalah Halaqah Hijrah yang bertajuk Hikmah Hijrah untuk Restorasi Indonesia yang menghadirkan KH. Hasyim Muzadi, mantan Ketua Umum PBNU sekaligus Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di era Jokowi-JK. Dalam kegiatan tersebut, Pak Hasyim menyebut NasDem sebagai partai dengan karakter yang kuat. Tema restorasi-gerakan perubahan yang diusungnya merupakan watak NasDem untuk melakukan perubahan lebih radikal terhadap negara, pemerintah dan parpol.

---

[56] Diolah dari hasil wawancara dengan Nico Ainul Yakin, Wakil Ketua Bidang OKK sekaligus sebagai Kepala Sekolah Kader Partai NasDem Jawa Timur pada 11 Pebruari 2017 di Kantor DPW Partai NasDem Jawa Timur.

[57] Teks Ikrar Kader: Dengan Menyebut Asma Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita luhur pendiri bangsa dan negara, kami kader Partai NasDem dengan ini berikrar: (1) Sebagai Kader Partai NasDem, siap membela kepentingan masyarakat, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok dan golongan dengan berlandaskan ideologi negara Pancasila; (2) Sebagai Kader Partai NasDem senantiasa berpegang teguh kepada ideologi, manifesto, visi-misi, tujuan dan fungsi, kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang ditetapkan, serta cita-cita mulia para pendiri Partai NasDem; (3) Sebagai Kader Partai NasDem dengan kepala tegak kami terus berderap melangkah maju menjadi kader Partai NasDem dengan garis politik gerakan perubahan untuk restorasi Indonesia; (4) Sebagai Kader Partai NasDem senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan serta menjaga harkat dan martabat Partai NasDem dalam situasi dan kondisi apapun; (5) Sebagai Kader Partai NasDem dalam menjalankan tugas-tugas kepartai pantang menyerah, berani menegakkan kebenaran dan pantang melakukan pembangkangan apalagi pengkhianatan terhadap sendi-sendi yang digariskan Partai NasDem dengan konsekuensi apapun. Padamu Negeri Kami Berjanji, Padamu Negeri kami berbakti, Padamu Negeri kami mengabdi, Bagimu negeri jiwa raga kami. Untuk baiat kader ini biasanya diawali dengan pembacaan syahadat dan komitmen ketauhidan, keislaman, dan kitab suci.

Kedua, Halal bi Halal, penyelenggaraan kegiatan halal bi halal Partai NasDem Jawa Timur dijadikan sebagai agenda tahunan. Momentum ini menjadi tradisi yang diniscayakan oleh umat *Islam* untuk saling bermaafan setelah sebulan penuh menunaikan ibadah puasa. Program Halal bi Halal ini dilaksanakan oleh Partai NasDem Jawa Timur dalam bentuk silaturrahim antara pengurus DPW dan DPD se-Jawa Timur yang kemudian ditindak-lanjuti oleh pengurus DPD dengan melibatkan pengurus DPC dan Ranting.

g. *Ramadlān al-Mubārak* (Kegiatan Ramadhan)

Pada setiap bulan Ramadhan, DPW Partai NasDem Jawa Timur mengadakan serangkaian kegiatan, antara lain: (i) membagi ta'jil; (ii) buka bersama; (iii) taraweh dan tadarus; (iv) *Halaqāh Ramadlān*. Dalam pembagian ta'jil, setiap harinya DPW menyiapkan sebanyak 500 bingkisan yang dibagikan ke para pengguna jalan yang melintas di JL. Kartini 88 Surabaya (depan kantor Partai NasDem Jawa Timur). Kegiatan bagi ta'jil ini berlangsung selama sebulan penuh. Sementara kegiatan buka bersama, lazimnya dilakukan di internal pengurus DPW dan DPD-DPD se-Jawa Timur. Sedangkan untuk kegiatan taraweh dan tadarus diselenggarakan setiap malam di musholla DPW yang diikuti oleh sebagian pengurus DPW, khususnya yang beragama Islam.

Di sela-sela bulan Ramadhan DPW Partai NasDem Jawa Timur juga mengadakan kegiatan *Halaqāh Ramadlān*. Salah satu kegiatan halaqah yang pernah digelar Partai NasDem Jawa Timur, antara lain:

Halaqāh Ramadlān yang bertajuk Menggali Gagasan dan Ideologi Bung Karno dan Gus Dur (Perspektif Restorasi Indonesia). Kegiatan ini dihadiri oleh: Bondan Gunawan (Mensesneg era Presiden Gus Dur); Munib Huda (Jubir Gus Dur); Hermawi Taslim (BAHU NasDem); dan Romo Didik. Hasil *Halaqāh* ini dipublikasikan di Harian Kompas, dan ditulis oleh Nico Ainul Yakin dalam bentuk opini berjudul Bung Karno, Gus Dur dan Surya Paloh Sebagai Mata Rantai. Opini ini juga telah dipublikasikan di beberapa media online.

h. *Khatm al-Qur'ān*

Dalam catatan peneliti, terdapat sejumlah kegiatan *Khatm al-Qur'ān* yang diadakan cukup unik. Disebut unik, karena penyelenggaraannya dilaksanakan dalam perjalanan sambil naik bus. Partai NasDem Jawa Timur setidaknya telah mengadakan kegiatan *Khatm al-Qur'ān The Road* sebanyak dua kali. *Pertama,* di era kepemimpinan Effendy Choirie. Pada saat itu sejumlah pengurus DPW dan sebanyak 9 khuffadz menjadi peserta dalam kegiatan ini. Mereka berkeliling ke sejumlah daerah di Jawa Timur sambil mengkhatamkan al-Qur'an. Ada 11 daerah yang menjadi titik singgah, yaitu, Lamongan, Tuban, Bangkalan, Kabupaten Malang, Probolinggo, Jember, Banyuwangi, Kediri, Ponorogo, Madiun, dan Surabaya.[58] Selama perjalanan, paserta *Khatm al-Qur'ān on the road* mampu menyelesaikan 11 kali khataman.

[58] Tempat persinggahan di setiap daerah adalah kantor DPD Partai NasDem setempat. Wawancara dengan Adi Tirmidzi, Ketua Panitia *Khatmi al-qur'ān on the Road* DPW Partai NasDem Jawa Timur, 5 Januari 2017.

Kedua, di era kepemimpinan Rendra Kresna. Kegiatan *Khatm al-Qur'ān* di era Rendra Kresna memiliki corak yang sama dengan era Effendy Choirie. Pelaksanaannya sama-sama dilakukan sambil berkendara, bedanya terletak pada titik-titik singgahnya. Jika di era Effendy Choirie titik singgahnya di kantor-kantor DPD Partai NasDem, sedangkan di era Rendra Kresna di pesantren. Sejumlah pesantren yang dijadikan sebagai titik singgah, yaitu: Ponpes Langitan Tuban, Ponpes Tebuireng Jombang, Ponpes Al-Hikam Malang, Ponpes Al-Qodiri Jember, dan Ponpes Syaikhona Mochammad Kholil Bangkalan. Di tempat-tempat yang disinggahi itu, peserta berkesempatan bersilaturrahim dengan pengasuh pesantren, sekaligus sebagai momentum untuk menerima masukan dan saran para ulama terkait dengan dinamika bangsa dan negara, serta perjuangan partai NasDem kedepan.

Selain itu, di beberapa tempat yang disinggahi itu, peserta khatmil-qur'an menyempatkan ziarah. Di Tebuireng Jombang, ziarah ke makam Gus Dur dan pendiri ponpes Tebuireng, sedangkan di Bangkalan berziarah ke makam Syaikhona Mochammad Kholil di Martajasah, Bangkalan. Selama perjalanan, peserta mampu menyelesaikan 5 kali khataman.

BAB IV

RELIGIUSITAS PENDIDIKAN POLITIK PARTAI NASDEM JAWA TIMUR

A. Praksis Pendidikan Politik Partai NasDem

1. Kualitas Agen NasDem

Setiap aktivitas kepartaian, termasuk pendidikan politik, tidak bisa dilepaskan dari agen yang menggerakkan roda kepartaian.[1] Pengurus partai tercatat sebagai aktor kunci yang memiliki peran dan tugas dalam mengelola organisasi berikut aktivitas perpolitikannya. Hampir setiap partai memiliki agenda pendidikan politik yang ditujukan pada kader, konstituen dan publik pada umumnya. Hanya saja, ide, gagasan, dan format pendidikan politik yang dilaksanakan oleh setiap partai, tidaklah persis sama. Keberadaan aktor dengan basis sosial dan politiknya, menjadi salah satu kunci yang turut menentukan keragaman praksis pendidikan politik kepartaian. Bagaimanapun, aktor dan tindakan sosialnya dapat diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang bersifat *embedded*.

Kendatipun setiap parpol memiliki pengurus yang plural dilihat dari latarbelakang sosial, ekonomi, profesi, pendidikan, dan keagamaannya, namun wajah dominan pengurus tetaplah tidak sama persis. Parpol-parpol berbasis massa Islam seperti PPP, PKS, PKB, PBB, dan PAN, misalnya, para pengurusnya cukuplah heterogen. Sebagian ada yang berasal dari

[1] Agen yang dimaksud adalah para aktor politik yang memiliki latar belakang dan basis Religius dan Nasionalis. Aktor-aktor tersebut berdealektika yang melahirkan kompromi politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalangan birokrat, pengusaha, militer dan kepolisian (purnawirawan), tokoh agama, tokoh intelektual dan aktivis *civil society*, dan lainnya. Demikian halnya dengan parpol-parpol yang tidak berbasiskan agama seperti PDI-P, Partai Golkar, Gerindra, dan Hanura. Bedanya, kalangan sipil berlatar tokoh agama, intelektual dan aktivis Muslim cenderung dominan mewarnai wajah kepengurusan parpol berbasis massa Islam. Sedangkan kalangan birokrat, militer (purnawirawan), pengusaha dan kaum professional yang mendominasi wajah kepengurusan parpol-parpol nasionalis tersebut.

Seirama dengan parpol-parpol nasionalis lainnya, kepengurusan Partai NasDem juga didominasi oleh kalangan birokrat, pengusaha, militer (purnawirawan), dan intelektual-aktivis. Sebagai partai baru yang elit-elit arus utamanya berasal dari Partai Golkar, Partai NasDem banyak diisi oleh para politisi eks Partai Golkar. Surya Paloh yang nota bene menjadi penggagas dan pendiri Partai NasDem, membawa serta gerbongnya dari kalangan eks politisi Golkar untuk bergabung dan mengisi kepengurusan baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk Partai NasDem Jawa Timur.

Tidak sebatas diisi oleh kalangan politisi eks Partai Golkar, Partai NasDem juga banyak diwarnai oleh eks politisi dari parpol-parpol lainnya. Hasan Aminudin dan Effendy Choiri, misalnya, keduanya dikenal sebagai eks politisi PKB yang kemudian memutuskan hijrah ke Partai NasDem. Sebelumnya, Hasan Aminudin dikenal aktif pula dalam kepengurusan Ormas Nasional Demokrat untuk wilayah Jawa Timur. Seiring dengan konflik di internal PKB yang membuat keduanya tersingkir dari arus utama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepengurusan PKB dan sekaligus pembentukan Partai NasDem yang memberikan peluang lebih besar kepada keduanya untuk tetap eksis dalam dunia politik praktis, membuat keduanya memutuskan untuk hijrah ke Partai NasDem. Dalam kiprahnya, keduanya tercatat sebagai pengurus teras dalam Partai NasDem baik di tingkat pusat maupun provinsi. Bahkan Effendy Choiri sendiri tercatat pernah menduduki pucuk pimpinan Partai NasDem Jawa Timur (periode 2014-2016).[2]

Kalangan pengusaha, birokrat dan militer banyak pula yang direkrut ataupun bergabung ke dalam kepengurusan Partai NasDem. Penting dicatat bahwa ketiganya merupakan pilar utama yang menjadi penopang Golkar dan rezim kekuasaan periode Orde Baru. Sebagai partai yang secara historis elit pendirinya pernah merasakan aktif dalam partai yang dibesarkan oleh rezim Orde Baru (Golkar), Partai NasDem pun tidak bisa mengabaikan keberadaan orang-orang yang memiliki basis finansial, birokrasi pemerintahan dan militer tersebut.

Hal yang sama sebenarnya juga terjadi di hampir semua parpol di Indonesia pasca Orde Baru. Aminurrahman (walikota Pasuruan) dan Rendra Kresna (bupati dua periode kabupaten Malang) merupakan dua birokrat atau politisi yang pernah menjadi birokrat, dan aktif dalam kepengurusan Partai NasDem. Keduanya berkesempatan pula untuk menahkodai DPW Partai NasDem Jawa Timur, Aminurrahman pada periode 2011-2013 dan Rendra Kresna pada periode 2016-2018. Sedangkan Tedjo Edhy Purdijatno

[2] Wawancara dengan Korwil Jatim A. Effendi Choirie pada Hari minggu, 18 Maret 2017 pukul 08.00 di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengurus dan sekaligus pernah menjabat pimpinan DPW Partai NasDem Jawa Timur (2013-2014) yang berasal dari unsur militer.

Selain itu, tokoh-tokoh agama, intelektual dan aktivis NGOs (Non-Government Organizations) ataupun civil society, tercatat sebagai unsur-unsur penting dalam kepengurusan Partai NasDem Jawa Timur. Achmad Heri (sekretaris pada periode kepemimpinan Aminurrahman), Muzammil Syafi'i (bendahara pada periode kepemimpinan Effendy Choiri), Aminurrahman (sekretaris pada periode kepemimpinan Rendra Kresna), merupakan sejumlah intelektual dan sekaligus aktivis sosial-keagamaan yang turut berkiprah dalam kepengurusan Partai NasDem Jawa Timur.[3]

Melihat basis sosial para pengurus DPW Partai NasDem Jawa Timur di atas, dapat dikatakan bahwa mereka yang menjadi pengurus dan penggerak roda partai itu bukanlah aktor biasa, atau orang awam. Pada umumnya, mereka berasal dari kalangan kelas menengah (middle classes) ataupun kelas menengah atas (upper middle classes).4 Dalam konsepsi Weberian, mereka yang disebut dengan kelas menengah itu bukanlah homogen, sebagai satu kelas atau kelompok sosial yang menempati posisi tengah ataupun antara di antara kelas atas dan kelas bawah. Sebaliknya, apa yang disebut dengan kelas menengah itu mengacu pada kelompok-

[3] Wawancara Wawancara dengan KH. Muzammil Syafi'i pada tanggal13 Maret 2017 bertempat di kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Jl. Indrapura Jaya No. 1 Krembangan Selatan, Surabaya.

[4] Jefries dan Rashford mengatakan bahwa status sosial agen yang dikemukan oleh Weber ini didasarkan pada tiga ukuran: kekuasaan (power), privilese (privilege), dan prestise (prestige) mereka membedakan tiga macam stratifikasi, yaitu hierarki kekuasaan (power hierarchies) yang didasarkan pada kekuasaan, hierarki kelas *(class hierarchies*) yang didasarkan pada penguasaan atas barang dan jasa, dan hierarki status (*status hierarchies*) yang didasarkan atas pembagian kehormatan dan status sosial. Lihat. Vincent Jeffries dan H. Edward Ransford, *Social Stratification: A Multiple Hierarchy Approach.* Boston: Allyn and Bacon, 1980), 57-80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok sosial yang plural sehingga muncul klasifikasi ‘menengah, menengah ke bawah (lower middle classes) dan menengah ke atas (upper middle classes).

Sebagai aktor yang tidak biasa-biasa saja, para pengurus Partai NasDem tentunya memiliki keunggulan pengetahuan dan sekaligus kecanggihan dalam menteoritisasikan dunia aktivitas perpolitikan yang mereka lakukan. Sebenarnya, setiap aktor bahkan yang berasal dari kalangan awam pun, dalam perspektif strukturasi, tetap dianggap sebagai teoritisi sosial yang mampu menjelaskan secara rasional dunia sosialnya. Jika aktor awam saja diposisikan sebagai teoritisi sosial, apalagi aktor yang berasal dari kalangan menengah ke atas seperti para pengurus partai dan politisi dari Partai NasDem. Hal ini penting dikemukakan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai aktivisme perpolitikan aktor, termasuk dalam melaksanakan agenda pendidikan politik.

Pada pambahasan ini, peneliti sebenarnya mencoba untuk menjelaskan bahwa dalam merekrut agen, Partai NasDem juga mempertimbangkan experiencesnya. Agen yang ada nampaknya memang memiliki pengalaman yang tidak biasa. Partai NasDem lebih mengupayakan terciptanya ruang struktur yang tentu selain mempertimbangkan determinan sosial, juga mempertimbangkan kecondongan pengalaman yang dimiliki seorang agen rekrutan. Artinya, hal ini dapat disebutkan sebagai pembentukan pola perilaku kader yang diyakini juga bersumber dari jiwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing agen.[5]

Berdasarkan beberapa pengalaman yang dimilikinya ini, beberapa agen diharapkan dapat memproduksi struktur tindakan mereka sendiri. Pada agen yang memiliki pengalaman dalam bidang legislatif akan berguna untuk memproduksi tindakan-tindakan sadar aturan. Begitupun dengan pengalaman agen lainnya, keberagaman mereka dapat memberikan modal untuk memproduksi tindakan politik di kepartaian NasDem. Dengan demikian, rekrutment agen Partai NasDem tidak memiliki pandangan bahwa agen tidak banyak memiliki pengetahuan pada tindakannya sendiri. Sebaliknya, Partai NasDem memiliki pandangan strukturasi seperti yang dikemukakan oleh Giddens. individu adalah agen yang memiliki pengetahuan banyak (knowledgeable agent) dan kemampuan memahami tindakannya sendiri. Mereka bukan lapisan budaya atau para penopang hubungan-hubungan sosial belaka, akan tetapi mereka adalah para aktor terampil yang memiliki pengetahuan yang banyak tentang dunia yang mereka geluti.[6]

Hal demikian berarti sebagaimana dikemukan oleh Thomson tentang pemikiran Giddens. Ia mengemukakan bahwa ada kesadaran rasional dari ide pada tindakan yang akan dilakukan setiap individu pengurus partai. Artinya, sebagaimana yang dikatakan oleh John. B Thompson tentang pemikiran Giddens yang menyatakan bahwa knowledgeable agen dan kapabilitas yang berupa kesadaran untuk memahami tindakannya individu

[5] Anthony Giddens, *Problematika Utama*, 87.
[6] John. B Thompson, *Analisis Ideologi*, 240-241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agen sendiri dalam partai sangat dipertimbangkan, bahkan seharusnya diberikan wadah seluas-luasnya.[7]

Pemahaman tentang penyediaan agar kader paham secara rasional tentang tindakannya, merupakan salah satu upaya yang dilakukan Partai NasDem dalam menyusun agen struktur politik. Dengan memperhatikan dan menyediakan wadah yang tepat dalam menyaring agen, akan dapat berfungsi menghasilkan agen yang dapat memproduksi tindakannya sendiri dengan rasional dan dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk memudahkan pembaca, terkait agen luar biasa yang dimiliki, Partai NasDem berusaha menggambarkan dalam bentuk tabel. Adapun hal tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

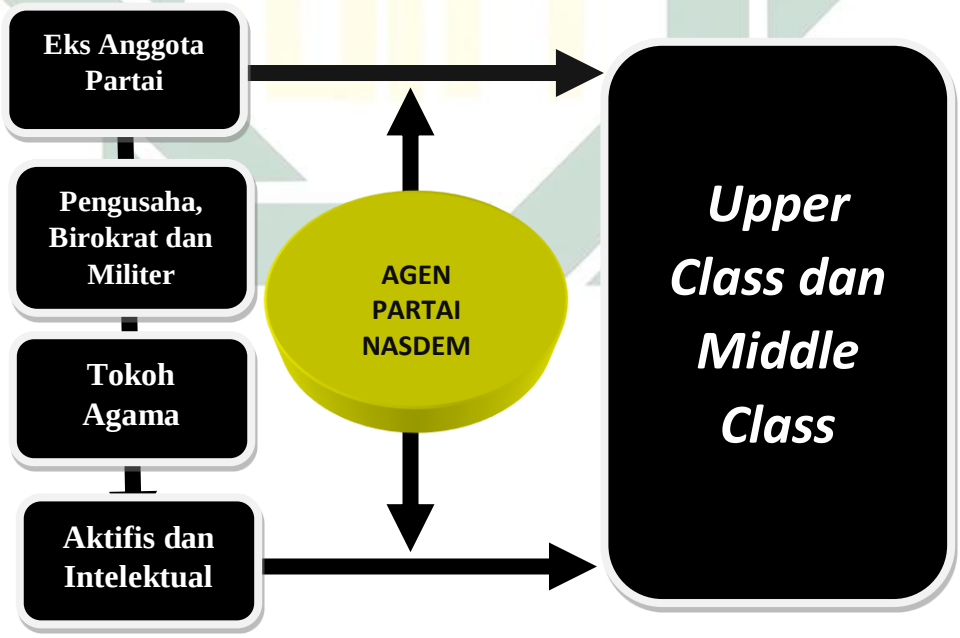

Gambar 4.1
Ragam Agen Partai NasDem

[7] John. B Thompson, *Analisis Ideologi*, 240-241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Melaksanakan Pendidikan Politik

Para elit struktural Partai NasDem Jawa Timur yang sebagian besar berlatar birokrat, militer, intelektual, professional, pengusaha dan aktivis, memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai keberadaan, peranan dan fungsi partai yang harus dijalankannya serta tantangan kepartaian yang harus dihadapinya. Selain mengelola jalannya partai dan terlibat dalam kontestasi kekuasaan untuk menentukan arah perpolitikan baik di tingkat nasional maupun lokal, mereka juga tidak abai terhadap kerja-kerja pendidikan politik. Bagi mereka, mensosialisasikan, mengomunikasikan dan mempromosikan jati diri, visi, misi dan manifesto politik partai sudah menjadi tugas dan kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai pengurus partai. Melalui fungsi pendidikan politik, mereka berkesempatan mengaktualisasikan diri dalam rangka mendidik kader, konstituen dan masyarakat agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban politiknya.

Melihat latar belakang elit struktural Partai NasDem Jawa Timur, tentunya melahirkan pemahaman mengenai peran mereka yang unik dalam menjalankan pendidikan politik. Sebagai representasi elit-elit politik yang menempati kelas menengah dan atas (middle and upper classes), pendidikan politik yang mereka jalankan, tentunya tidak bisa dipisahkan dari imaginasi, selera, dan kepentingan politik mereka. Saat bersamaan, mereka sadar betul bahwa realitas kemasyarakatan dan kebangsaan yang mereka hadapi sangat plural, jamak dan majemuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kenyataan-kenyataan itulah yang membuat mereka sebagai aktor sosial (social agents) tidak memiliki kebebasan mutlak dalam menentukan tindakan sosialnya, dalam hal ini pendidikan politik. Pemahaman ini penting dikemukakan untuk menjelaskan bahwa konstruksi pendidikan politik Partai NasDem Jawa Timur tidak hanya merefleksikan kemampuan mereka dalam merumuskan ide dan gagasan, menjalankan amanah dari manifesto politik partai, melainkan juga melibatkan kompromi dan negosiasi dengan berbagai realitas objektif yang ada di luar diri mereka. Dengan kata lain mereka didorong untuk melakukan komunikasi pada lingkungan mereka. Pada kondisi ini tentunya merupakan awal komunikasi dualitas struktur dalam membentuk struktur tindakan agen Partai NasDem.[8]

Sebagai representasi kelas menengah dan atas, elit-elit Partai NasDem Jawa Timur itu esensinya juga bukanlah satu entitas kelompok maupun kelas yang benar-benar homogen. Pluralitas latar belakang sosial dan professional mereka, turut menentukan pula arah dari praksis pendidikan politik yang dijalankannya. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh DPW Partai NasDem Jawa Timur dalam Rakerwil 1 di era kepemimpinan Effendy Choirie di Jatim Expo Surabaya.[9] Pada situasi ini, fungsi pendidikan politik diarahkan untuk menjadi media pembentukan kesepahaman pengetahuan dan kesadaran. Yang demikian ini tentunya membentuk agen yang berkualitas, sebagaimana disebutkan dalam instruksi

[8] Pada situasi ini, terjadi sebuah proses yang dinyatakan oleh Giddens sebagai proses dialektika dimana praktik sosial, struktur, dan kesadaran diciptakan. Lihat. George Ritzer dan Douglas Goodman, *Teori Sosiologi*, 503.
[9] Rakerwil I dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

presiden RI tahun 1982.[10]

Berdasarkan hasil obsevasi yang dilakukan, dalam acara tersebut ada beberapa kegiatan yang tentunya merupakan bagian dari upaya strukturasi dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Partai NasDem. Salah satunya adalah pada pelaksanaan Rakerwil, sebelum diadakan rapat pleno, ada kegiatan diskusi komisi yang diadakan secara berkelompok. Proses diskusi komisi dalam rangka menyerap aspirasi yang merupakan pengetahuan dari masing-masing agen NasDem.[11]

Setiap kelompok dibentuk dengan memadukan seluruh agen dari berbagai kalangan. Agen yang masuk klasifikasi upper class hingga middle class secara terpadu berdiskusi untuk menyusun kerangka kerja dan arah pengembangan partai ke depan. Baik kalangan birokrat, pengusaha, militer (purnawirawan), dan intelektual-aktivis hingga kalangan santri berdiskusi secara komprehensif pada masing-masing kelompok yang dibentuk.[12]

Pada forum ini, elit partai dari latar birokrat, misalnya, lebih banyak menginisiasi dan mengelaborasi pendidikan politik dalam bentuknya lebih formal, terstruktur dan sistematis. Demikian pula elit partai dari kalangan

---

[10] Berdasarkan aturan ini disebutkan bahwa . Urgensi pendidikan politik adalah untuk memberikan pelajaran pada generasi muda sebagai tonggak masa depan negara. Sebagaimana yang dikemukan dalam instruksi presiden bahwa kaum muda dalam perkembangannya berada dalam proses pembangunan dan modernisasi dengan segala akibat sampingannya yang bisa mempengaruhi proses pendewasaanya sehingga apabila tidak memperoleh arah yang jelas maka corak dan warna masa depan negara dan bangsa akan menjadi lain daripada yang dicita-citakan. Lihat. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda di Jakarta.

[11] Obeservasi, Rakerwil I Pada tanggal 26 Juli 2015.

[12] Proses yang demikian ini terjadi disetiap rakerwil yang diadakan dan menjadi tradisi. Hal ini sebagaimana yang ada pada kegiatan rakerwil I saat era kepemimpinan Effendy Choirie yang dilaksanakan di Jatim Ekspo Surabaya dan Rekerwil II di era kepemimpinan Rendra Kresna pada tahun 2016 di Malang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

militer yang menghendaki, di samping program pendidikan politik yang lebih terorganisir, dimensi patriotisme masuk di dalam pendidikan politik kepartaian. Sebagai contoh, Akademi Bela Negara (ABN) merupakan salah satu lembaga pendidikan partai yang banyak mengajarkan nasionalisme dan patriotisme dalam menjaga keutuhan NKRI. Sementara, aktor dari kalangan intelektual dan aktivis, lebih banyak memunculkan warna sipil dalam aktivitas pendidikan politik Partai NasDem. Selain model pendidikan formal, mereka turut menginisiasi kemunculan model-model pendidikan non-formal dan informal.[13] Sebagaimana pandangan strukturasi seperti yang dikemukakan oleh Giddens bahwa individu adalah agen yang memiliki pengetahuan banyak (knowledgeable agent), Hubungan antara agen dan struktur ditegaskan sebagai hubungan antara aktor atau pelaku dengan struktur yang terdiri atas aturan dan sumber daya. Struktur tersebut pada satu sisi membatasi dan mengekang (constraining), namun pada sisi lain dapat memberdayakan (enabling). Menurut Giddens, hubungan antara aktor dengan struktur merupakan bentuk dualitas (bukan dualisme) dimana antara keduanya tidak terpisahkan namun justru saling mempengaruhi, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh pendidikan politik Partai NasDem Jawa Timur.

Dalam prakteknya, pendidikan politik yang dijalankan Partai

[13] Pendidikan politik secara informal yang sering didengungkan oleh NasDem yaitu politik yang tanpa mahar. Politik ini hendak mengedukasi pada masyarakat umum bahwa politik itu tentu tanpa mahar, artinya perjuangan NasDem sedikitpun tidak bisa ditukar dengan rupiah. Sedangkan pendidikan non formalnya adalah diskusi di DPD, DPW, mengirim untuk menjadi peserta dalam sekolah politisi muda. Wawancara Ainul Yakin pada tanggal 9 April 2017 pukul 14.00 di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NasDem Jawa Timur tidak sebatas berkaitan dengan penyampaian pengetahuan semata (transfer of knowledge) yang bersifat searah, dari pengurus kepada kader dan publik. Menurut sejumlah pengurus, partai memiliki komitmen yang tinggi untuk mengedukasi masyarakat agar mereka memiliki keberdayaan terutama secara politik.

Pendidikan Partai NasDem nampaknya seperti pendidikan politik yang dilakukan pada umumnya. Sebagaimana dimafhum bersama bahwa pendidikan politik (political education) tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan sosialisasi politik (political socialization).[14] Pada sisi ini nampaknya, dapat dikatakan bahwa pendidikan politik yang dilakukan adalah untuk meproklamirkan dan memberikan pemahaman pada setiap agen agar memahami wawasaan yang ada di Partai NasDem.

Melalui pendidikan diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan berpolitik, dalam pengertian melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Menurut mereka, proses perpolitikan dan demokrasi tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa keterlibatan partisipatif dari masyarakat. Tidak sebatas dalam pemilihan umum, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan pula dalam proses pembangunan, perumusan kebijakan dan mengontrol jalannya kekuasaan.

Selain itu, praksis pendidikan politik Partai NasDem diorientasikan pula pada upaya untuk–pertama-tama dan utama–membekali kader partai agar memiliki pemahaman dan kesadaran terhadap partai politiknya sendiri.

[14] Ada yang mengatakan juga bahwa sosialisasi politik sebenarnya juga merupakan doktirn politik yang harus ditanamkan pada setiap anggota partai politik. Lihat. Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo*, 2010, 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengapa kader? Menurut sejumlah pengurus, kader merupakan ujung tombak partai dalam menggerakkan roda partai, organisasi-organisasi yang menjadi sayap partai, dan lembaga-lembaga pemerintahan. Kader pula yang menjadi aktor penting dalam mempromosikan citra, ide, gagasan, dan agenda politik partai kepada publik. Tanpa kader, partai tidak akan berarti sama sekali karena tidak akan dapat menjalankan aktivitas kepolitikannya. Dalam hal ini, Effendy Choirie, ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur, mengatakan bahwa:

> Target pendidikan politik adalah memiliki kader penggerak partai, pengelola, memperjuangkan kepentingan rakyat melalui partai. Maka partai ini akan didukung oleh rakyat, memiliki basis-basis. Basis ini diciptakan oleh kader, sehingga targetnya adalah memiliki anggota Legislatif, Eksekutif. Dengan demikian pertama, diharapkan akan memperjuangkan kepentingan rakyat mengelola kepentingan rakyat, melakukan kebijakan, mengelola anggaran sesuai kepentingan rakyat, tidak memanipulasi, tidak korupsi sehingga memiliki kader yang hebat. Sesuai yang di cita-citakan oleh *founding father* adalah melindungi Negara dan seluruh tumpah darah Indonesia ini. Negara ini harus nyaman di bawah kepemimpinan Legislatif dan Eksekutif, dan Yudikatif, yang itu adalah kader-kader partai terutama legislatif dan eksekutif. Kedua, negara ini rakyatnya harus sejahtera, legeslatif dan eksekutif harus mewujudkan kesejahteraan Indonesia lahir batin. Kader yang menduduki legeslatif, eksekutif membuat aturan yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, cerdas hatinya, emosinya seimbang, antara hati dan pikirannya seimbang antara mulut dan tindakannya. Kemudian ikut menciptakan kedamaian dunia, bahkan bukan sekedar ikut tapi menjadi pemrakarsa, menciptakan kehidupan yang harmonis apapun agamanya, dimanapun wilayahnya, perdamaian dalam negeri dan secara internasional. [15]

Selain membekali wawasan kepartaian, pendidikan politik juga berusaha untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kesadaran kader

[15] Wawancara dengan Korwil Jatim DR. Effendi Choirie pada hari Minggu, 18 Maret 2017 pukul 08.00 di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai persoalan kebangsaan ataupun keindonesiaan. Ini penting karena muara dari cita-cita luhur setiap partai politik, termasuk Partai NasDem, tidak lain adalah terwujudnya Indonesia yang semakin berdaulat, demokratis, dan sejahtera warga negaranya.

Dalam kaitan inilah, materi-materi pendidikan ditekankan pada sejarah perjuangan dan kemerdekaan bangsa, perumusan ideologi Pancasila dan UUD 1945, kebhinekaan, dan lainnya. Melalui wawasan nasionalisme, setiap kader Partai NasDem diharapkan benar-benar menjadi negarawan nasionalis (terkait pandangan, sikap dan perilaku) dalam praksis politiknya.[16]

Dalam pandangan pengurus partai, komitmen terhadap partai dan bangsa merupakan dua hal tidak mungkin bisa dipisahkan. Ibarat dua sisi mata uang, satu sisinya menampilkan wajah partai dan satu sisi lainnya menampakkan wajah bangsa. Karena itulah, dalam pendidikan politik keduanya, kepartaian dan keindonesiaan, menjadi materi yang wajib diajarkan tanpa bisa ditawar-tawar. Setidaknya, pandangan semacam ini secara jelas dikemukakan oleh Effendy Choirie, pengurus pusat dan sekaligus ketua DPW Partai NasDem 2014-2016. Dalam pernyataannya, ia mengatakan bahwa mendidik kader itu pada esensinya adalah:

> Mengajarkan tentang lahirnya partai dan siapa yang mendirikan, mengajarkan unsur yang penting dalam ke-NasDem-an; sejarah partai NasDem, visi misi, manivesto, garis politik, ideologi. Hal ini adalah dasar yang harus dimiliki oleh kader NasDem. Mengajarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki ideologi Pancasila,

[16] Observasi, Sekolah Kader DPD Partai NasDem Kabupaten Sidoarjo di The Sun Hotel Tanggal 24 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Undang-undangnya UUD 1945, ini harus betul-betul dipahami. Unsur yang harus dipahami oleh kader adalah sejarah indonesia. Sejarah kemerdekaan Indonesia, sejarah lahirnya pancasila, memahami tentang budaya bangsa, budaya nusantara. Dengan demikian maka Partai NasDem memiliki komitmen selain memiliki komitmen kepartaian, militansi terhadap partai, juga komitmen kesetiaan kepada negara dan bangsa mengawal kepada bangsa, toleran, mempertahankan NKRI secara terus menerus.[17]

Selain itu, pendidikan politik Partai NasDem Jawa Timur diarahkan pula untuk membentuk kader partai yang memiliki sikap dan perilaku politik yang baik. Partai NasDem mengajarkan kepada kader-kadernya agar menjaga muru'ah (kewibawaan atau nama baik) partai dengan tidak melakukan tindakan-tindakan tercela dan melawan hukum seperti korupsi, kolusi, nepotisme, tindakan asusila, dan sejenisnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dunia perpolitikan praktis itu identik dengan persaingan dan perebutan kekuasaan.[18] Dengan kata lain, Pendidikan politik Partai NasDem harus bukan hanya berkenaan dengan apa yang telah Brownhill jelaskan.[19] Di dalamnya, harus memuat etika, ketaatan hukum, pengembangan loyalitas dan sebagainya. Sehingga, orientasinya bukan hanya menjadi politisi ulung, tetapi menciptakan negarawan yang luar biasa.

Dalam prakteknya, perebutan kekuasaan oleh para politisi itu, kerap mempertontonkan tindakan-tindakan yang jauh dari kata 'beradab'. Saling sikut antar-parpol ataupun politisi dengan menghalalkan berbagai macam cara, merupakan pemandangan yang lumrah dijumpai dalam dunia

---

[17] Wawancara dengan Korwil Jatim A. Effendi Choirie pada Hari minggu, 18 Maret 2017 pukul 08.00 di Surabaya.

[18] Wawancara dengan Muzammil Syafi'i pada tanggal13 Maret 2017 bertempat di kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Jl. Indrapura Jaya No. 1 Krembangan Selatan, Surabaya.

[19] Brownhill, Robert and Patricia Smart. *Political Education*, London; New York: Routledge, c1989, 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perpolitikan di Indonesia dewasa ini. Politik yang esensinya merupakan sebuah seni untuk mengelola pemerintahan secara demokratis, dalam kenyataannya masih jauh panggang dari api. Karena itulah, pengurus partai memandang penting untuk mendidik kader-kadernya agar amanah dalam berpolitik. Muzammil Syafi'i, salah seorang pengurus DPW Partai NasDem Jawa Timur, menegaskan bahwa;

> Partai politik itu identik dengan kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu tidak disalah gunakan, perilaku politikusnya mempunyai akhlaq yang baik, dua hal ini yang sangat ditekankan oleh Partai NasDem supaya jangan sampai kader NasDem melakukan tindak korupsi, kalau ada yang melakukan maka diminta untuk memilih antara dipecat atau mundur, seperti yang telah dilakukan oleh Ketum kepada Sekjend. DPP NasDem beberapa waktu yang lalu. Pendidikan yang diberikan adalah aplikasi untuk kader supaya berprilaku baik artinya bahwa Partai NasDem mengajarkan kepada kader agar menjaga muru'ah, menjaga nama baik Partai NasDem dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum seperti korupsi, tindakan asusila, dan lain sebagainya. Jika melakukan hal yang bertentangan dengan aturan yang telah ditentukan partai, maka baik DPW/DPP NasDem tidak segan-segan untuk memberikan hukuman.[20]

Pandangan senada dikemukakan pula oleh Achmad Heri yang mengatakan bahwa:

> Saya secara pribadi ingin menjelaskan terkait dengan amanah yang di berikan kepada saya selaku perwakilan rakyat yang sekarang duduk di legislatif, kita harus menjalankan prinsip-prinsip berpolitik yang diamanahkan, kita tau berpolitik itu cendrung abu-abu dan cendrung mencari aman, maka kalau kemudian politik yang di sertai nurani dan pendekatan religius maka di situ akan ada pertanggung jawaban baik itu kepada konstituen, kepada publik atau pun secara vertikal kepada Allah SWT. Maka diharapkan dengan pendidikan politik Partai NasDem dapat melahirkan politisi yang religius.[21]

---

[20] Wawancara dengan Muzammil Syafi'i SH, M.Si pada tanggal13 Maret 2017 bertempat di kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Jl. Indrapura Jaya No. 1 Krembangan Selatan, Surabaya.

[21] Wawancara dengan Achmad Heri pada tanggal 22 Maret 2017 pada pukul 19.00 di Surabaya. Pria kelahiran Bangkalan Madura pernah nyantri di PP Mambaul Maarif Denayar Jombang,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan temuan di atas, sudah dapat dijelaskan bahwa pendidikan politik yang diadakan adalah berorientasi pada pembentukan agen yang bermutu. Bermutu disini, maksudnya adalah memiliki pengalaman, pengetahuan, loyalitas dan moralitas. Sehingga, nantinya setiap agen mampu berkomitmen tinggi dalam menjalankan tugas kepartaiannya.

3. Varian-varian Pendidikan Politik

Ikhtiar para pengurus Partai NasDem Jawa Timur untuk memperkenalkan identitas partai dan mentransmisikan visi, misi, dan manifesto politik partai dalam bingkai keindonesiaan dilakukan melalui saluran pendidikan politik, formal, non-formal dan informal. Pendidikan politik formal diwujudkan dalam bentuk Sekolah Legislatif dan Sekolah Kader, sedangkan non-formal dan juga informal diaktualisasikan dalam bentuk-bentuk kegiatan seperti diskusi, seminar, dialog, perayaan hari-hari besar agama, dan berbagai kegiatan non/informal lainnya.[22]

Achmad Heri, anggota DPRD Provinsi NasDem Jawa Timur menjelaskan bahwa:

> Dalam jenjang pendidikan di Partai NasDem ada pendidikan formal, non-formal dan informal dan materinya adalah bahwa cermin agama tidak harus nampak dalam ritualitasnya namun harus mewujud dalam tindakan politik kader yang pro terhadap kebenaran dan rakyat kecil. Cermin keagamaan tidak harus nampak agamanya taruklah Islamnya, kristennya ataupun hindunya tetapi cukup bagi kita mentelaah dimana nili-nilai spiritualitas itu tercermin dalam tindakan politiknya, tercermin bagaimana dia menuangkan perundang-undangannya atau peraturan-peraturan daerah bagaimana dia

mantan aktivis PMII Komisariat IAIN Surabaya, Ketua Forum Remas Surabaya, Pernah menjadi pimpinan pusat IPNU dan Wakil Ketua Lakpesdam NU Jatim.

[22] Wawancara dengan Korwil Jatim A. Effendi Choirie pada hari minggu, 18 Maret 2017 pukul 08.00 di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> menuangkan anggaran angaran yang pro rakyat bagaimana memperjuangkan anggaran pendidikan, kemudian anggaran terkait dengan penguatan ekonomi kerakyatan UMKM dan lain-lain itu juga kesehatan yang pro rakyat kesehatan murah dan terjangkau untuk rakyat.[23]

Bagi kader-kader yang ada di luar sistem, atau mereka yang belum mendapatkan posisi di legislatif dan menjadi pegiat pengurus partai, mereka diberikan pelatihan-pelatihan berjenjang yaitu short course untuk melakukan tugas-tugas kepartaian seperti halnya ada Akademi Bela Negara (ABN) yang terdiri dari pemuda-pemuda terdidik lulusan S1 dan minimal D3.

Mereka dididik untuk memahami keberadaan, arti dan fungsi partai politik bagi pembangunan bangsa. Selain itu, dalam ABN, mereka juga dibekali pengetahuan dan bekal ketrampilan untuk menjadi kader bangsa yang memiliki loyalitas dan kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bersama-sama dengan para pengurus di tingkat cabang (kabupaten), DPW juga terlibat dalam pelaksanaan agenda pendidikan politik. Dalam hal ini, Joko Cahyono, selaku ketua DPD NasDem kabupaten Pasuruan, mengatakan bahwa :

> Kalau pendidikan politik informal hampir tiap hari mbak, contohnya bagaimana kita mencoba melakukan *branstorming*, siapun itu yang mau memerdekakan dirinya baik dari komunitas yang mereka punya yang layak di indonesia mereka juga berhak memperoleh masa depan yang baik tidak dipandang sebelah mata kalau misal hari ini mereka seperti itu, itu kan dalam proses. Kemaren ada beberapa yang kerumah saya sampaikan kon nom-nom ojhok jadi senuk yo jangan membuat panggung untuk politisi tapi harus membuat panggung sendiri. Jangan hanya pandai berkata *ngerasani negoro*

[23] Wawancara dengan H. Achmad Heri pada tanggal 22 Maret 2017 pada pukul 19.00 bersamaan dengan kegiatan Rakoornas NasDem di Surabaya. Pria kelahiran Bangkalan Madura pernah nyantri di PP Manbaul Ma'arif Denayar Jombang, mantan aktivis PMII Komisarian IAIN Surabaya, Ketua Forum Remas Surabaya, Pernah menjadi pimpinan pusat IPNU dan Wakil Ketua Lapesdam NU Jatim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> (mengkritik negara) atau para pemimpin tapi kamu tidak pandai untuk memotivasi dirimu sendiri ke depan. Ini saya lagi *ngomong* (bicara) sama temen DPD agar *arek-arek* (kader-kader) ini diberi kesempatan *onok seng teko* (ada yang datang dari) Bondowoso untuk diberi rekomendasi dari Pasuruan kan ada anak liga yang dari pasuruan, tak rekomendasi tapi dengan catatan kamu nanti kembali ke daerah.[24]

Iwan Afif Makshum selaku Politisi dari Gresik juga mengatakan bahwa:

> Kegiatan pendidikan di Gresik secara formal sudah terprogram oleh DPW dan DPP, bahkan pendidikan secara formal tersebut sudah berjalan secara rutin. Sedangkan pendidikan politik secara informal yang sering didengungkan oleh Partai NasDem yaitu politik yang tanpa mahar. Politik ini hendak mengedukasi pada masyarakat umum bahwa politik itu tentu tanpa mahar, artinya perjuangan NasDem sedikitpun tidak bisa ditukar dengan rupiah.[25]

Secara lebih detil gambaran mengenai varian-varian pendidikan politik Partai NasDem, dalam bentuknya yang formal, non-formal dan informal, dapat dikemukakan di bawah ini.

a. Pendidikan dalam kegiatan Rekerwil

Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, yang dimaksud dalam pendikan politik pada kegiatan ini adalah proses saling memberikan pemahaman antar peserta. Maksudnya ada beberapa bagian dari kegiatan Rakerwil yang oleh peneliti dianggap merupakan kegiatan pendidikan. Nama kegiatan adalah diskusi komisi pra pleno.

Dalam diskusi yang diadakan ini, beberapa agen NasDem dari beberapa daerah dan kelas membentuk kelompok. Masing-masing

[24] Wawancara dengan Joko Cahyono ketua DPD NasDem kabupaten Pasuruan pada tanggal 22 Maret 2017 pukul 16.00 di Surabaya.

[25] Wawancara dengan Iwan Afif Makshum, Selaku putra dari KH. Afif Makshum pengasuh PP. Ihyaul Ulum Dukun Gresik pada tanggal 9 Maret 2017 pukul 13.00 di Gresik. Gus Iwan panggilan akrab Iwan Afif Maksum adalah ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok diikuti oleh agen yang beragam. Mulai dari agen yang berasal dari kelas atas hingga menengah menjadi satu kelompok. Masing-masing kelompok membahas satu bahasan. Berdasarkan observasi yang dilakukan, masing-masing agen dalam kelompok berdiskusi dengan kapasitas keilmuan yang dimilikinya.[26]

Berdasarkan keterangan Muzammil Syafi'i,

> "Dalam kegiatan komisi yang diadakan ini semua peserta memberikan pendapatnya pada masalah yang dikaji. Pada kegiatan inilah semua peserta memiliki kesempatan untuk menyumbangkan gagasannya pada partai. Hasil dari kajian mereka akan serta merta dibawa ke rapat pleno. Kemudian akhirnya dapat diresmikan menjadi aturan formal yang dipakai ke depannya".[27]

Perkataan Muzammil ini dapat menggambarkan adanya proses strukturasi dalam kegiatan ini. Pada konteks inilah agensi begitu sangat berpengaruh pada struktur yang terbentuk di Partai NasDem. Dalam artian, NasDem dalam sisi ini sama sekali tidak fungsionalis. Sebab, tidak mengenyampingkan pengalaman dan pengetahuan agensi kadernnya. Jadi strukturalisme yang ada dalam kegiatan Rekerwil merupakan konstruksi yang tidak menafikan peran Agensinya. Hal ini yang kemudian searah dengan konstruksi strukturalisme Giddens. Sebagaimana dijelaskan sejak awal bahwa strukturalisme dalam

[26] Observasi, Rakerwil I di Expo Surabaya tanggal 26 Juli 2015.
[27] Wawancara, Muzammil Syafi'i, Ketua Fraksi Partai NasDem Jawa Timur yang juga Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPW Partai NasDem Jawa Timur, pada 12 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paparannya tidak menafikan peran individu. Strukturalismenya menjelaskan adanya peran agen dalam terbentuknya struktur.[28]

Adapun beberapa hal yang dimungkinkan ada dalam gagasan agen pada kegiatan diskusi ini, tentu salah satunya juga meliputi dimensi religius yang ada pada masing-masing diri agen. Sebagaimana dikemukan oleh Effendy Choirie. Ia menjelaskan bahwa diskusi yang diadakan dalam kegiatan ini bahwa para kader saling bertukar pendapat tentang hal yang dikaji. Tentu bukan hanya pengetahuan yang mendasari pendapatnya. Melainkan juga moralitas religius yang mereka pahami. Maksudnya, dalam argumentasi yang mereka sampaikan pasti memuat tentang dua aspek penting yang ada dalam tubuh NasDem.

Adapun keduanya adalah nasionalitas dan moralitas. Beberapa masalah yang diangkat dasar utamanya selain pengetahuan juga didasarkan pada rasa cinta pada negara dan perbaikan moralitas politik. Pada aspek moralitas politik inilah beberapa dimensi yang dipakai meliputi kesadaran etis agama dan kesadaran etis humanis.[29]

Fakta demikian itulah yang kemudian menjadi dasar dirumuskannya beberapa aturan NasDem. Menurut Nico hasil dari forum diskusi yang diadakan ini kemudian dirumuskan menjadi aturan yang disebut Hasta Tekad. Menurutnya, aturan tersebut tentu begitu sangat nyata, di dalamnya ada nilai-nilai religius dan nasionalis. Hasil yang

[28] Hal ini dipaparkan dalam B. Herry Priyono,. *Sebuah Terobosan Teoretis.* Dalam Basis Nomor 02. Tahun ke-49, Januari-Februari 2000, 17.
[29] Wawancara dengan Korwil Jatim DR. Effendy Choirie pada hari Minggu, 18 Maret 2017 pukul 08.00 di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa aturan ini tentu menggambarkan bagaimana varian kesadaran agensi yang menyusunnya.[30]

Berdasarkan serangkaian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendidikan yang ada dalam diskusi juga merupakan proses strukturalisme NasDem. Dalam kegiatan ini para kader menyumbangkan pengalamannya, berdiskusi dengan membentuk komisi-komisi merumuskan rangkaian program, kegiatan, tata aturan yang tetap merujuk kepada visi, misi, manivesto, platform dan AD/ART DPP Partai NasDem. Segenap kader NasDem sebagai aktor atau pelaku berdialektika dengan berbagi pengalaman antara kader yang berlatar belakang nasionalis dan religius secara terus menerus dengan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang dimilikinya hingga melahirkan sebuah struktur yang berupa aturan-aturan (hasil rakerwil dan hasta tekad) yang dapat menjadi pengekang constraint segala bentuk tindakan dan etika berpolitik mereka dalam kegiatan partai.

b. Bimbingan Teknis

Kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun satu sampai dua kali ini juga merupakan varian pendidikan Partai NasDem. Kegiatan ini meliputi beberapa hal yang penting, utamanya untuk meningkatkan tata kerja dan prilaku agen atau kader NasDem. Beberapa bimbingan yang ada dalam kegiatan ini meliputi sosialisasi aturan dan konstruksi gerak kepartaian.

[30] Wawancara dengan Nico Ainul Yakin, Wakil Ketua Bidang OKK sekaligus sebagai Kepala Sekolah Kader Partai NasDem Jawa Timur pada 11 Pebruari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Effendy Choirie, ada materi kepartaian yang diharapkan dapat memperdalam pemahaman kepartaian agen. Ada juga materi tentang fungsi anggota legislatif sebagai agen partai. Efendy Choirie mengatakan,

> Yang terpenting dari semua materi yang adalah mensosialisasikan norma dan aturan partai. Norma partai yang berdasar pada adanya sikap nasionalis kenegarawanan dan sikap etis humanis keagamaan. Adanya dua nilai ini diharapkan dapat menjadi pondasi tindakan kader dimanapun dia berada dan dimanapun dia menjabat".[31]

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada BIMTEK di Hotel Marcure pada tanggal 12 Agustus 2016, nampaknya acara tersebut digunakan oleh partai sebagai sosialisasi misi partai. Ada konstruksi struktur Partai NasDem yang diupayakan dapat menjadi garis pedoman kerja kepartaian untuk semua kalangan agensi. Baik yang sebagai kader biasa maupun sebagai anggota legislatif.[32] Jadi dalam pendidikan yang ada dalam bimbingan tehnis yang dilakukan oleh Partai NasDem ini juga gambaran konstruksi strukturasinya. Sebagaimana yang ditemukan dalam observasi dijelaskan bahwa dalam konteks kegiatan tersebut, tujuan utama strukturasinya adalah sosialisasi aturan yang harus dipahami dan diikuti oleh peserta agensi yang hadir.

Dengan demikian, strukturasi yang tergambarkan dalam kegiatan ini, merupakan konstruksi fungsional struktur NasDem pada sejumlah agensinya. Artinya pada konteks ini, strukturasinya nampak dilakukan

[31] Wawancara dengan Korwil Jatim A. Effendy Choirie pada hari Minggu, 18 Maret 2017 pukul 08.00 di Surabaya.
[32] Obeservasi pada BIMTEK di Hotel Marcure pada tanggal 12 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menguatkan upaya peran constraining strukturnya pada para agensi yang hadir dalam acara tersebut. Namun ada beberapa temuan lagi yang nampaknya peran struktur tidak hanya berhenti pada sisi constrainingnya saja. Nico menjelaskan bahwa bukan hanya sosialisasi aturan. Akan tetapi juga memberikan pemahaman tentang masalah negara yang dihadapi. Materi yang diberikan berupa menceritakan tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat secara ilmiah.

Tujuan dari materi yang diberikan itu diharapkan dapat memberikan pencerahan dan arah pandang dalam melakukan gerakan politiknya. Beberapa agensi yang jadi peserta dalam kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemaksimalan kerjanya sebagai agen politik. Ada sebagian agensi tidak ambil bagian sebagai penyelesai masalah-masalah disebab mereka tidak paham masalah yang ada tersebut. Pada sisi inilah materi wawasan isu-isu nasional dapat mengarahkan mereka untuk mengambil peran.[33]

Berdasarkan dari observasi inilah nampak dalam proses strukturasinya yang terjadi dalam kegiatan ini, tidak hanya memposisikan struktur sebagai instrumen constraining. Akan tetapi juga memperankannya sebagai enabling agensi.[34] Dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah terkait dengan memberikan arah peran agensi ikut

[33] Wawancara dengan Nico Ainul Yakin, Wakil Ketua Bidang OKK sekaligus sebagai Kepala Sekolah Kader Partai NasDem Jawa Timur pada 11 Pebruari 2017.
[34] Hal demikian artinya dengan pendapat Giddens yang mengatakan struktur memiliki peran ganda. Baca pemikiran Giddens yang memusatkan kajian pada proses dialektika dimana praktik sosial, struktur, dan kesadaran diciptakan, Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*,508.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpartisipasi dengan pengetahuannya pada masalah yang dihadapi negara.

c. Sekolah Legislatif

Sekolah Legislatif dimaksudkan untuk membentuk kader calon legislatif dan anggota dewan dari Partai NasDem agar memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai fungsi-fungsi legislatif sebagai perpanjangan tangan dan lidah rakyat. Kader harus paham dengan tugas-tugas legislasi seperti *controlling* dan *budgeting*. Ini tugas kepartaian yang ada di parlemen, selain itu penguatan internal organisasi. Lebih lanjut Ainul Yakin mengatakan bahwa:

> Pelaksanaan sekolah legislatif itu tidak lain adalah untuk meningkatkan kinerja anggota dewan dari Partai NasDem di dalam melaksanakan tugas-tugas kedewanan sesuai fungsinya seperti fungsi kontrol dan penganggaran. Ini kan soal teknik, ya masalah teknik ini memang tidak banyak di kuasai oleh anggota dewan yang baru. Lebih dari itu proses yang dilakukan itu harapan Partai NasDem, anggota dewan Jawa Timur mampu menjadi agen visi dan misi Partai NasDem untuk sampai pada sifat kebijakan jadi melahirkan undang-undang, peraturan daerah (Perda) biar ada warna di restorasi itu. Itu harapan. Sementara kurikulum dan matrikulasinya belum ada tetapi setiap keseharian kita katakan informal misalkan menugaskan kader-kader mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian mengirim duta-duta NasDem untuk sekolah-sekolah politik muda itu kita kirim seperti yang ke Jogja. Sementara yang non-formal kita dalam keseharian menjadi kepanitian dalam suatu kegiatan.[35]

Kegiatan Sekolah Legislatif pertama dilakukan di hotel Inna Simpang Surabaya pada 31 Oktober sampai 2 November 2014. Kegiatan ini dilakukan untuk membekali kader-kader Partai NasDem yang terpilih

[35] Wawancara dengan Ainul Yakin yang akrab disapa Nico Ainul Yaqin yang pernak aktif di organisasi kemahasiswaaan PKC PMII Jatim, kepemudaan dan keagamaan Yaitu NU serta pernah menjadi Wartawan. Wawancara pada tanggal 9 April 2017 pukul 15.00 di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota se-Jawa Timur agar konsisten memperjuangkan cita-cita dan tujuan Partai NasDem melalui peran-peran legislasi, anggaran, dan pengawasan demi sebesar-besarnya kepentingan bangsa. Yang menjadi nara sumber dalam kegiatan tersebut adalah Prof. Dr. Tjuk K Sukiadi, pengamat Ekonomi Unair, Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur dan nara sumber lainnya dari DPP Partai NasDem.[36]

Berikutnya DPW mengadakan Sekolah Legislatif yang diintegrasikan dengan kegiatan Sekolah Kader di Hotel Savana, Malang pada 12-14 Juni 2014. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pengurus DPW dan DPD Partai NasDem juga anggota DPRD Partai NasDem se-Jawa Timur. Hadir dalam kegiatan tersebut, yaitu: Korwil Jawa Timur, Ketua Fraksi NasDem DPR-RI, Viktor buntilu laiskodat; Ketua Fraksi Partai NasDem, Prananda surya paloh; Ketua DPP Bidang media dan komunikasi politik, Saur hutabarat, serta beberapa nara sumber lain yang berbicara masalah-masalah kedewanan.[37]

Sekolah Legislatif berikutnya dilaksanakan di Hotel Aston, Madiun. Yang menjadi peserta dalam kegiatan ini adalah Ketua, Sekretaris dan bendahara DPD Partai NasDem se-Jawa Timur. Kegiatan ini secara langsung dibuka oleh Korwil sekaligus Ketua DPP Partai NasDem Bidang OKK, Sri Sajekti Sudjunadi. Dalam acara tersebut, hadir beberapa nara sumber, antara lain: Saifullah Yusuf, Wakil

[36] Observasi, Sekolah Legislatif pertama dilakukan di hotel Inna Simpang Surabaya pada 31 Oktober s/d 2 November 2014.
[37] Observasi, Sekolah Kader di Hotel Savana, Malang pada 12-14 Juni 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gubernur Jawa Timur; Dr. Mukjizat, Kemendagri; Dr. Aulia Rahman, SH, Sekretaris BPK RI, dan lain-lain.[38]

Sekolah Legislatif ini selain diproyeksikan membekali kader-kader Partai NasDem di parlemen agar mampu dan cakap menjalankan tugas-tugas kedewanan, juga dimaksudkan untuk membekali anggota dewan dari NasDem agar memiliki karakter restoratif.[39] Yang memiliki benang merah dengan nilai-nilai agama dan budaya bangsa yang luhur untuk mencapai tujuan nasional.[40]

d. Sekolah Kader

Setelah Sekolah Legislatif, DPW meresmikan pembukaan Sekolah Kader di kantor Partai NasDem Jawa Timur pada 2 Pebruari 2015. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Pengurus DPW dan utusan dari DPD Partai NasDem se-Jawa Timur. Karena masih awal dan sistemnya belum terbentuk, maka Sekolah Kader pada tahap ini hanya berkisar pada materi ke-NasDem-an. Yang menjadi nara sumber pada kegiatan tersebut adalah ketua DPW, Effendy Choirie, Korwil Sri Sajekti Sudjunadi, dan Enggartyasto Lukita, Ketua Bappilu DPP Partai NasDem (sekarang Menteri Perdagangan RI).

---

[38] Selanjutnya kegiatan Sekolah Legislatif dan Sekolah Kader Partai NasDem dilaksanakan di DPD-DPD Partai NasDem se-Jawa Timur (Lihat Lampiran).

[39] Karakter restoratif dalam perspektif NasDem adalah memiliki dedikasi dan jiwa memperbaiki, memulihkan, mengembalikan, dan mencerahkan terhadap dinamika dan bangsa dan negara sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan RI.

[40] Hasil wawancara dengan Muzammil Syafi'i, Ketua Fraksi Partai NasDem Jawa Timur yang juga Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPW Partai NasDem Jawa Timur, pada 12 September 2016 di kantor DPRD Provinsi Jawa Timur Jl. Indrapura No. 1 Krembangan Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan Sekolah Kader ini untuk membekali calon-calon pengurus Partai NasDem agar lebih memahami tentang ke-NasDem-an dan misi Restorasi Partai NasDem, serta tata kelola berorganisasi. Disadari bahwa Partai NasDem belum banyak memiliki konsepsi detail tentang berbagai hal yang dibutuhkan partai, salah satunya adalah sistem kaderisasi yang masuk dalam satu kesatuan sistem kepartaian yang diproyeksikan untuk mencetak kader-kader Partai NasDem yang disiplin, berintegritas mulia, mampu dan cakap dalam menjalankan tugas kepartaian, serta loyal terhadap partai menuju masyarakat yang demokratis, berkeadilan dan berkedaulatan.

Nico Ainul Yaqin, wakil ketua OKK DPW Partai NasDem Jawa Timur mengatakan bahwa :

> Sekolah kader itu di proyeksikan untuk membuka peluang kader-kader terutama pengurus agar mereka faham bagaimana organisasi itu dikelola dengan baik sesuai dengan kinerja masing masing terkait dengan sekolah legeslasi itu biasanya dilaksanakan pada bimtek (bimbingan teknis) semacam pembekalan untuk diberikan materi-materi tentang kedewanan.[41]

Oleh karena itu sitem kaderisasi partai merupakan elemen penting dalam manajemen kepartaian untuk menjaga perjalanan dinamika partai. Agar tetap eksis di tengah-tengah masyarakat dan berkelanjutan (sustenibel). Sistem kaderisasi ini disusun berdasarkan AD atau ART Partai NasDem, yang memuat sejumlah ketentuan tentang pendidikan politik, baik secara internal maupun eksternal melalui jenjang

[41] Dengan Ainul Yakin yang akrab disapa Nico Ainul Yaqin yang pernak aktif di organisasi kemahasiswaan PKC PMII Jatim, kepemudaan dan keagamaan Yaitu NU serta pernah menjadi Wartawan. Wawancara pada tanggal 9 April 2017 pukul 15.00 di kantor DPW Partai NasDem Jawa Timur Jl. RA Kartini No.8 Dr. Soetomo Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengkaderan, pola pengkaderan dan jenis pengkaderan, serta penyelenggaraannya diatur berdasarkan ketetapan hasil Rakerwil tentang sistem kaderisasi.

Disusunnya konsep kaderisasi Partai NasDem Jawa Timur dimaksudkan untuk (i) mewujudkan kader-kader Partai NasDem yang menjadikan politik sebagai bagian dari ibadah, dengan menanggalkan motif-motif pribadi untuk sebesar-besarnya masyarakat, bangsa dan negara. (ii) menciptakan kader-kader partai NasDem yang militan yang mampu memahami manifesto politik partai, visi-misi Partai dalam konteks restorasi Indonesia, berwawasan, idealis, handal, menjunjung tinggi moralitas partai dan berani berkorban. (iii) mencetak kader-kader Partai NasDem yang mampu mengimplementasikan program-program partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Adapun metode penyampaian materi sekolah kader dilaksanakan dengan: (i) metode ceramah. (ii) tanya jawab. (iii) diskusi kelompok atau pendalaman materi. (iv) simulasi. (v) presentasi kelompok, dan (vi) kerja kelompok). Sedangkan materinya meliputi: (i) Ke-NasDem-an: yang berisi: dimensi kesejarahan NasDem, visi misi, tujuan dan fungsi, Manifesto perjuangan politik Partai NasDem. Kemudian garis politik Partai NasDem restorasi gerakan perubahan yang meliputi: Restorasi Indonesia, Restorasi Struktur dan Kultur Berpartai, serta Implementasinya; (ii) Ke-Legislatifan dan Pemerintahan; (iii) Strategi Pemenangan Pemilu. Tiga Materi tersebut menjadi materi pokok yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan pada setiap penyelenggaraan Sekolah Kader di DPD-DPD se-Jawa Timur.[42] Kegiatan Sekolah Kader selalu ditutup dengan pembacaan Ikrar Kader Partai NasDem.[43]

Pendidikan politik yang sama juga diberikan di kabupaten lain seperti di Kabupaten Sumenep yang menekankan pada pentingnya komitmen dan loyalitas kader. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Azis ketua DPD NasDem kabupaten Sumenep, bahwa :

> DPC Sumenep baru melakukan pendidikan politik dasar, materinya tentang memberikan komitmen dan loyalitas kader agar dapat mengembangkan kepada masyarakat agar bisa mencintai dan memahami terhadap Partai NasDem. Karena kalau cinta apapun bisa di lakukan kalau modalnya mudah tapi kalau tidak cinta tapi ada dalam sebuah organisasi tidak faham terhadap isi organisasi maka tidak akan mampu berjuang maksimal apalagi memenangkan mengajak masyarakat banyak karena di jiwanya tidak ada kecintaan terhadap partai, itulah kenapa perlunya pendidikan dasar agar supaya mereka memahami dulu sebelum mengambil tindakan-tindakan/langkah-langkah yang lebih jauh.[44]

---

[42] Diolah dari hasil wawancara dengan Nico Ainul Yakin, Wakil Ketua Bidang OKK sekaligus sebagai Kepala Sekolah Kader Partai NasDem Jawa Timur pada 11 Pebruari 2017 di Kantor DPW Partai NasDem Jawa Timur Jl. RA Kartini No.8 Dr. Soetomo Surabaya..

[43] Teks Ikrar Kader: Dengan Menyebut Asma Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita luhur pendiri bangsa dan negara, kami kader Partai NasDem dengan ini berikrar: (1) Sebagai Kader Partai NasDem, siap membela kepentingan masyarakat, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok dan golongan dengan berlandaskan ideologi negara Pancasila; (2) Sebagai Kader Partai NasDem senantiasa berpegang teguh kepada ideologi, manifesto, visi-misi, tujuan dan fungsi, kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang ditetapkan, serta cita-cita mulia para pendiri Partai NasDem; (3) Sebagai Kader Partai NasDem dengan kepala tegak kami terus berderap melangkah maju menjadi kader Partai NasDem dengan garis politik gerakan perubahan untuk restorasi Indonesia; (4) Sebagai Kader Partai NasDem senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan serta menjaga harkat dan martabat Partai NasDem dalam situasi dan kondisi apapun; (5) Sebagai Kader Partai NasDem dalam menjalankan tugas-tugas kepartai pantang menyerah, berani menegakkan kebenaran dan pantang melakukan pembangkangan apalagi pengkhianatan terhadap sendi-sendi yang digariskan Partai NasDem dengan konsekuensi apapun. Padamu Negeri Kami Berjanji, Padamu Negeri kami berbakti, Padamu Negeri kami mengabdi, Bagimu negeri jiwa raga kami. Untuk baiat kader ini biasanya diawali dengan pembacaan syahadat dan komitmen ketauhidan, keislaman, dan kitab suci.

[44] Wawancara dengan M. Aziz Shabibi pada tanggal 22 Maret 2017 pukul 22.00 di hotel Shangrila Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambaran yang relatif sama diungkapkan pula oleh Abdullah Ibrahim, ketua DPD NasDem Kabupaten Pamekasan. Ia mengatakan bahwa:

> Pendidikan formal adalah sekolah kader, yang memberikan pembelajaran pada diri kader NasDem bagaimana kader memiliki pengetahuan berpolitik yang benar, misalnya ketika menjadi legeslatif dapat membahas anggaran dan mengelolanya dengan Benar. kemudian pendidikan non formal untuk di Madura adalah politik aqidah-akhlaq, yaitu pendidikan akhlaqul karimah. Materi yang disampaikan bagaimana membahas anggaran, cara berdiskusi, cara memimpin rapat berdasarkan kerangka akhlaqul karimah. Pada prinsipnya yang dilakukan NasDem khususnya di kabupaten Pamekasan, dimensi religiusnya cukup tinggi hal ini karena kabupaten yang hampir 99 % mayoritas penduduknya agamis, terutama ada dua kekuatan ormas besar keagamaan seperti NU dan SI. Melalui pendidikan politik diharapkan bagaimana kader NasDem Pamekasan bisa memahami betul karakteristik dari masing-masing dapilnya. Jumlah dapil pamekasan ada lima, dan kelima-limanya tersebut berbeda.[45]

Dalam menjelaskan karakter masyarakat Pamekasan, Abdullah mengatakan bahwa:

> Karakter dapilnya Ada dua kecamatan yang berbasis SI, pada aspek itu pendekatannya tidak bisa di lakukan dengan gaya ke NU-an, karena lebih keras tatapannya kepada orang. Kalau dia ingin diikuti oleh orang lain maka kader harus jadi orang paling terdepan atau tokoh baik agamanya maupun tokoh-tokoh yang lain. seperti batu marmar, jika ada salah satu tokoh bilang A maka masyarakat semua akan mematuhi, hidup dan mati, taruhannya adalah nyawa. Berbeda dengan dikalangan NU bagian selatan seperti kecamatan Pademawu, Gelis, Teja dan Pelengaan, lebih pada pendekatan lebih santun dan saling menyapa dll. Jadi Kader NasDem harus memahami masing karakter wilayah sehingga pendidikan politiknya lebih produktif. Religius lebih condong pada letak geografis masyarakat yang ditempati, artinya suatu tempat menentukan bahwa golongan yang dominan yang sangat

[45] Wawancara dengan Abdullah Ibrahim yang akrab di panggil Ra Dullah, putra dari KH. Abdusshomad pengasuh PP. Darussalam Jember, salah satu kyai sepuh di Jember, beliau juga orang tua dari KH. Muhyiddin Abdusshomad, ketua Syuryah PC NU Jember sekaligus pengasuh PP. Nurul Islam Jember. Abdullah Ibrahim adalah ketua DPD NasDem kabupaten Pamekasan. Wawancara pada tanggal 22 Maret 2017 pukul 21.00 di hotel Shangrila Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kuat dan kental dengan budaya-budaya di lingkungannya. NU dan SI merupakan ormas besar yang kental dengan religius. Maka, ajaran-ajaran yang harus diterapkan tidak boleh keluar dari syar'at Islam.[46]

Hal senada juga disampaikan oleh Politisi Partai NasDem Kabupaten Jombang Muklina. Ketua DPD NasDem Kabupaten Jombang ini menyatakan bahwa:

> Sekolah kader Jombang sudah dilaksanakan, dengan nara sumber dari DPW NasDem Jawa Timur, pendidikan politik di Jombang memiliki target yaitu meningkatkan militansi baik di tingkat DPC, DPW dan DPP. Jadi kader-kader NasDem harus militan dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, lebih-lebih di tingkat DPD sangat sulit mencari kader militan. Kader yang militan dapat menggerakkan roda organisasi dengan baik, sehingga pendidikan politik Partai NasDem diarahkan untuk membentuk militansi tersebut.[47]

e. Peringatan Hari-Hari Besar Agama

Kegiatan ini diselenggarakan setiap tahun, salah satu kegiatan yang pernah diselenggarakan adalah Halaqah Hijrah yang bertajuk Hikmah Hijrah untuk Restorasi Indonesia yang menghadirkan KH. Hasyim Muzadi, mantan Ketua Umum PBNU sekaligus Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di era Jokowi-JK. Dalam kegiatan tersebut, Pak Hasyim menyebut NasDem sebagai partai dengan karakter yang kuat. Tema restorasi-gerakan perubahan yang diusungnya merupakan watak NasDem untuk melakukan perubahan lebih radikal terhadap negara, pemerintah dan parpol.

---

[46] Wawancara dengan Abudllah Ibrahim pada tanggal 22 Maret 2017 pukul 21.00 di hotel Shangrila Surabaya.

[47] Wawancara dengan Muklina ketua DPD NasDem Jombang pada tanggal 18 April 2017 bertempat di PP Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Halal bi Halal, penyelenggaraan kegiatan halal bi halal Partai NasDem Jawa Timur dijadikan sebagai agenda tahunan. Momentum ini menjadi tradisi yang diniscayakan oleh umat Islam untuk saling bermaafan setelah sebulan penuh menunaikan ibadah puasa. Program *Halal bi Halal* ini dilaksanakan oleh Partai NasDem Jawa Timur dalam bentuk silaturrahim antara pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Jawa Timur yang kemudian ditindak-lanjuti oleh pengurus DPD dengan melibatkan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Ranting (DPRT).

Bukan hanya kegiatan besar agama Islam saja, kegiatan besar keagamaan lainnya juga dilakukan oleh Partai NasDem. Dewan Pimpinan Wilayah Partai (DPW) NasDem Jawa Timur juga menyelenggarakan perayaaan hari besar agama lain. Salah satu contohnya adalah kegiatan peringatan hari besar agama kristen. Ada dua kegiatan yang dirayakan, yakni peringatan hari natal dan kenaikan Isa al-Masih.

f. *Ramadhān Mubārak* (Kegiatan Ramadhan)

Pada setiap bulan *Ramadlān* Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Timur mengadakan serangkaian kegiatan, antara lain: (i) membagi *ta'jīl*; (ii) buka bersama; (iii) *tarāweh* dan *tadārus*; (iv) *Halāqah Ramadlān*. Dalam pembagian *ta'jīl*, setiap harinya DPW menyiapkan sebanyak 500 bingkisan yang dibagikan ke para pengguna jalan yang melintas di JL. Kartini 88 Surabaya (depan kantor Partai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NasDem Jawa Timur). Kegiatan bagi *ta'jīl* ini berlangsung selama sebulan penuh. Sementara kegiatan buka bersama, lazimnya dilakukan di internal pengurus DPW dan DPD-DPD se-Jawa Timur. Sedangkan untuk kegiatan taraweh dan tadarus diselenggarakan setiap malam di musholla DPW yang diikuti oleh sebagian pengurus DPW, khususnya yang beragama Islam.

Di sela-sela bulan *Ramadlān* DPW Partai NasDem Jawa Timur juga mengadakan kegiatan *Halāqah Ramadlān*. Salah satu kegiatan *Halāqah* yang pernah digelar Partai NasDem Jawa Timur, antara lain: *Halāqah Ramadlān* yang bertajuk Menggali Gagasan dan Ideologi Bung Karno dan Gus Dur (Perspektif Restorasi Indonesia). Kegiatan ini dihadiri oleh: Bondan Gunawan (Mensesneg era Presiden Gus Dur); Munib Huda (Jubir Gus Dur); Hermawi Taslim (BAHU NasDem); dan Romo Didik. Hasil Halaqah ini dipublikasikan di Harian Kompas, dan ditulis oleh Nico Ainul Yakin dalam bentuk opini berjudul Bung Karno, Gus Dur dan Surya Paloh Sebagai Mata Rantai. Opini ini juga telah dipublikasikan di beberapa media online.

g. Khatm al-Qur'ān

Dalam catatan peneliti, terdapat sejumlah kegiatan *Khatm al-Qur'ān* yang diadakan cukup unik. Disebut unik, karena penyelenggaraannya dilaksanakan dalam perjalanan sambil naik bus. Partai NasDem Jawa Timur setidaknya telah mengadakan kegiatan *Khatm al-Qur'ān On The Road* sebanyak dua kali. *Pertama*, di era

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemimpinan Effendy Choirie. Pada saat itu sejumlah pengurus DPW dan sebanyak 9 khuffadz menjadi peserta dalam kegiatan ini. Mereka berkeliling ke sejumlah daerah di Jawa Timur sambil mengkhatamkan al-Qur'an. Ada 11 daerah yang menjadi titik singgah, yaitu, Lamongan, Tuban, Bangkalan, Kabupaten Malang, Probolinggo, Jember, Banyuwangi, Kediri, Ponorogo, Madiun, dan Surabaya.[48] Selama perjalanan, paserta *Khatm al-Qur'ān on the road* mampu menyelesaikan 11 kali khataman.

Kedua, di era kepemimpinan Rendra Kresna. Kegiatan *khatm al-Qur'ān* di era Rendra Kresna memiliki corak yang sama dengan era Effendy Choirie. Pelaksanaannya sama-sama dilakukan sambil berkendaraan, bedanya terletak pada titik-titik singgahnya. Jika di era Effendy Choirie titik singgahnya di kantor-kantor DPD Partai NasDem, sedangkan di era Rendra Kresna di pesantren. Sejumlah pesantren yang dijadikan sebagai titik singgah, yaitu: Ponpes Langitan Tuban, Ponpes Tebuireng Jombang, Ponpes Al-Hikam Malang, Ponpes Al-Qodiri Jember, dan Ponpes Syaikhona Mochammad Kholil Bangkalan. Di tempat-tempat yang disinggahi itu, peserta berkesempatan bersilaturrahim dengan pengasuh pesantren, sekaligus sebagai momentum untuk menerima masukan dan saran para ulama terkait dengan dinamika bangsa dan negara, serta perjuangan Partai NasDem kedepan. Selain itu, di beberapa tempat yang disinggahi itu, peserta

[48] Tempat persinggahan di setiap daerah adalah kantor DPD Partai NasDem setempat. Wawancara dengan Adi Tirmidzi, Ketua Panitia *Khatm al-qur'ān on the Road* DPW Partai NasDem Jawa Timur, 5 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khatm al-Qur'ān menyempatkan ziarah. Di Tebuireng Jombang, ziarah ke makam Gus Dur dan pendiri ponpes Tebuireng, sedangkan di Bangkalan berziarah ke makam Syaikhona Mochammad Kholil di Martajasah, Bangkalan. Selama perjalanan, peserta mampu menyelesaikan 5 kali khataman.

h. *Halāqoh* Restorasi Indonesia

Pada 4 Juli 2015 Partai NasDem Jawa Timur menggelar *Halāqah Ramadlān* bertajuk Menggali Ideologi dan Gagasan Bung Karno dan Gus Dur Untuk Restorasi Indonesia. Acara yang di gelar di aula DPW NasDem Jatim Jawa Timur Jl. RA Kartini 88 Surabaya itu dihadiri sekitar 300 kader NasDem dengan pembicara: (1) Wakil Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf, (2) Bondan Gunawan, Soekarnois dan mantan Mensesneg era pemerintahan Gus Dur, (3) Hermawi Fransiskus Taslim, sahabat Gus Dur sekaligus Ketum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia/Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum Partai NasDem , (4) Romo Tri Budi Utomo Pr, Vikaril Jenderal Keuskupan Surabaya, (5) Munif Huda, mantan sekretaris pribadi Gus Dur, dengan moderator Tri Agung Tristanto, Redaktur Senior Harian Kompas.[49]

Dalam pengantar *halaqāh*, pada waktu itu Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur A. Effendy Choirie mengatakan, Partai NasDem sebagai partai baru dengan membawa misi Restorasi Gerakan Perubahan Indonesia, harus berbeda dengan partai lain yang sudah tua. Salah satu

[49] Observasi, Orasi politik Effendy Choirie Pada 4 Juli 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembedanya adalah Partai NasDem harus secara terus menerus menggali ideologi, gagasan dan pemikiran besar para pendiri dan pemimpin negeri ini.[50]

Khusus di Jawa Timur wajib hukumnya bagi Partai NasDem Jawa Timur untuk menggali pikiran Bung Karno, Gus Dur, bahkan HOS Tjokroaminoto dan pemimpin besar lain yang lahir di Jatim Jawa Timur. Hal ini penting, selain untuk memperkaya khasanah dan perspektif kader Partai NasDem dalam menjalankan misi restorasi, pun menjadi inspirasi untuk langkah selanjutnya. Artinya Partai NasDem tidak boleh lepas dari sejarah dan akar kulturalnya. Dengan demikian maka, Partai NasDem tidak terjebak pada rutinitas dan pragmatisme kekuasaan dan uang.

Dalam konteks inilah Partai NasDem memulai tradisi intelektual melalui kajian terhadap gagasan, idelologi, pemikiran Bung Karno dan Gus Dur. Ini cukup menarik untuk dibahas mengingat Bung Karno dan Gus Dur merupakan tokoh besar yang pernah memimpin negeri ini dengan tradisi kepemimpinan yang visioner dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Meskipun kedua pemimpin itu telah tiada, namun ideologi dan gagasan-gagasannya sangat universal dan masih sesuai dengan dinamika kehidupan kekinian dan keakanan.

4. Orientasi Pendidikan Politik Partai NasDem

Berdasarkan beberapa varian yang dijelaskan di atas, Nampak terlihat ada beberapa macam yang dikategorikan sebagai proses pendidikan

[50] Dokumentasi orasi politik Nico Ainul Yaqin pada Pada 4 Juli 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agen yang dilaksanakan oleh Partai NasDem Jawa Timur yakni pendidikan formal, non formal dan Informal. Dari Beberapa varian tersebut, masing-masing tentunya memiliki orientasi tertentu.

Untuk melihat orientasi pendidikan politiknya, tentu hal demikian sangat berkaitan dengan isi materi atau acara dalam masing-masing proses pendidikan yang dilaksanakan. Beberapa penjelasan sebelumnya menyatakan bahwa ada dua inti materi yang disajikan dalam pendidikan yang dilaksanakan, yakni materi kepartain dan kebangasaan.[51] Jika dilihat dari materinya, ada dua pengetahuan yang ingin ditanamkan dalam diri para agen Partai NasDem. Adapun keduanya adalah pemahaman tentang falsafah tujuan partai dan falsafah Negara Kesatuan Indonesia. Selain kedua pemahaman ini, juga nampak terlihat ada pemahaman lain yang berusaha diupayakan guna membentuk tindakan agen. Hal demikian ini terlihat dalam adanya beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan oleh DPW Partai NasDem Jawa Timur. Adanya kegiatan keagamaan ini juga memiliki orientasi tertentu.

Sebagaimana dipahami sejak awal, beberapa kegiatan keagamaan yang diadakan bertujuan untuk memberikan suntikan unsur religius dalam pendidikan politik. Masuknya unsur religi, sebenarnya untuk membangun persepsi bahwa Partai NasDem bukanlah partai nasionalis sekuler

[51] Isi materi kepartaian diantaranya, lahirnya partai dan siapa yang mendirikan, mengajarkan unsur yang penting dalam keNasDem-an; sejarah partai NasDem, visi misi, manivesto, garis politik dan ideologi. Sedangkan materi kebangsaan isinya adalah seluruh pengetahuan tentang falsafah negara dan kitab suci konstitusinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebaliknya partai nasionalis religius. Sangat bersyukur akhirnya masyarakat mengerti dan mau menerima hal ini.

Selain itu, berdasarkan beberapa wawancara yang dilakukan, adanya kegiatan keagamaan juga dijadikan upaya penanaman nilai luhur agama. Pastinya, nilai luhur agama yang dapat ikut serta membentuk keluhuran tindakan politik masing-masing agen partai.

Apabila disearahkan bahwa pendidikan politik Partai NasDem sama dengan konsep pendidikan pada umumnya, maka pendidikan yang dilakukan bukan merupakan upaya transfer of knowledge saja. Lebih dari itu, juga merupakan transfer of value. Artinya, seluruh pembelajaran yang dilakukan bukan hanya berorientasi menciptakan pemahaman saja, tetapi juga berorientasi pada terbentuknya nilai tindakan agen Partai NasDem.[52]

Orientasi transfer nilai dan pengetahuan mengindikasikan adanya proses pembelajaran sekaligus doktrinasi pada proses pendidikan Partai NasDem. Ada upaya pengintegrasian penanaman nilai-nilai dan pengetahuan politik yang harus ada dalam diri kader partai. Yang demikian ini dapat disebut juga sebagai upaya pewarisan NasDemiologi.[53]

Jadi, penekanan orientasi pelatihan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya adalah terbentuknya kader yang baik pengetahuan dan moralitasnya. Pada sisi ini, pendidikan politik yang ada di Partai NasDem merupakan hal yang disebut David Easton dan Jack Dennis sebagai

[52] Pandangan pendidikan sebagai tranfer nilai adalah pandangan terkait pendidikan agama. Lihat. Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Agama Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 75.
[53] NasDemilogi adalah sebutan peneliti pada nilai dan pegetahuan politik partai NasDem yang diajarakan pada kader partai mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

development process which persons acquire orientation and paterns of behaviour.[54]

Dengan demikian, orientasi penyelenggaraan pendidikan Partai NasDem sudah ideal. Hal ini sebagaimana Alfian yang mengatakan bahwa pendidikan politik merupakan upaya sadar proses sosialisasi politik pada masyarakat guna memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.[55]

Pada aspek transfer pengetahuannya, tentu sudah jelas bahwa pemahaman yang berusaha diajarkan adalah pemahaman kepartaian, kebangsaan dan keagamaan. Tetapi, jika ditelisik aspek trasnfer nilainya, tentu tidak demikian. Untuk mengetahui sisi ini, harus diperas lebih dahulu nilai-nilai yang dalam content ketiga materi tersebut.

Pada materi kepartaian, kader diajari tentang pemahaman bahwa NasDem sangat peduli pada rakyat kecil. NasDem memiliki misi Restorasi Indonesia baru yang sejahtera. Sejahtera yang dimaksud tentu adalah kemakmuran rakyat Indonesia. Pada sisi ini, jelas sekali upaya nilai yang ingin ditanamkan adalah humanis.

Humanist Value ini nampaknya juga terlihat pada aspek materi kebangsaan. Baik materi tentang falsafah Pancasila, UUD dan lainnya, sama terlihat sebagai upaya penanaman kemanusiaan yang adil dan beradab bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, konklusi dari keduanya adalah terbangunnya

---

[54] David Easton and Jack Dennis, *Children in the Political System: Origins of Political Legitimacy*, Pp. xvi, 440. New York: McGraw-Hill, 1969), 95.
[55] Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, Kumpulan Karangan*, Jakarta: PT Gramedia, 1981, 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai humanis yang didasarkan pada visi misi partai dan dasar negara Indonesia.

Adapun kegiatan keagamaan, tentu merupakan pertanda bahwa Partai NasDem juga berusaha mengambil intisari nilai keagamaan untuk memperkokoh nilai yang ada di kedua materi sebelumnya. Adanya kegiatan keagamaan dijadikan sebagai media internalisasi nilai religius. Jadi, seluruhnya ada dua orientasi nilai yang ditanamkan dalam pendidikan politik Partai NasDem, yakni humanis dan religius.

Selanjutnya, kedua nilai inilah yang menurut A. Effendy Choirie adalah untuk memenuhi cita-cita berupa komitmen Hasta Tekad yang dimiliki Partai NasDem Jatim.[56] Hasta Tekad yang dimaksud adalah sebagaimana berikut ini:

a. Mempertahankan dan melaksanakan Pancasila sebagai Falsafah, Azas dan Ideologi final bagi Bangsa dan Negara Indonesia;
b. Mempertahankan dan melaksanakan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Wawasan Nusantara, serta menghormati lambang Negara;
c. Mempertahankan dan Meneguhkan NKRI sebagai bentuk final Negara Indonesia;
d. Melaksanakan UUD 1945 dan Membangun Kesadaran Berkonstitusi bagi Bangsa Indonesia;
e. Meneguhkan dan Melestarikan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Persatuan Nasional serta menghormati seluruh produk budaya Bangsa

[56] Menurut Gus Choi, Hasta (Bahasa Sansekerta) berarti: delapan. Tekad berarti kemauan (kehendak) yang pasti, kebulatan hati, *I'tikad (*niat) yang bulat (KUBI). Observasi, Sekolah Kader DPD Partai NasDem Kabupaten Sidoarjo di The Sun Hotel Tanggal 24 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai kekayaan Nusantara;

f. Membangun Budaya Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Perbuatan tercela lainnya;

g. Tunduk dan Patuh melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, dan seluruh kebijakan Partai NasDem Melalui Restorasi Gerakan Perubahan sebagai garis politiknya;

h. Selalu hadir membela dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan rakyat.

Untuk lebih lengkapnya terkait dengan semua penjelasan di atas adalah sebagaimana berikut;

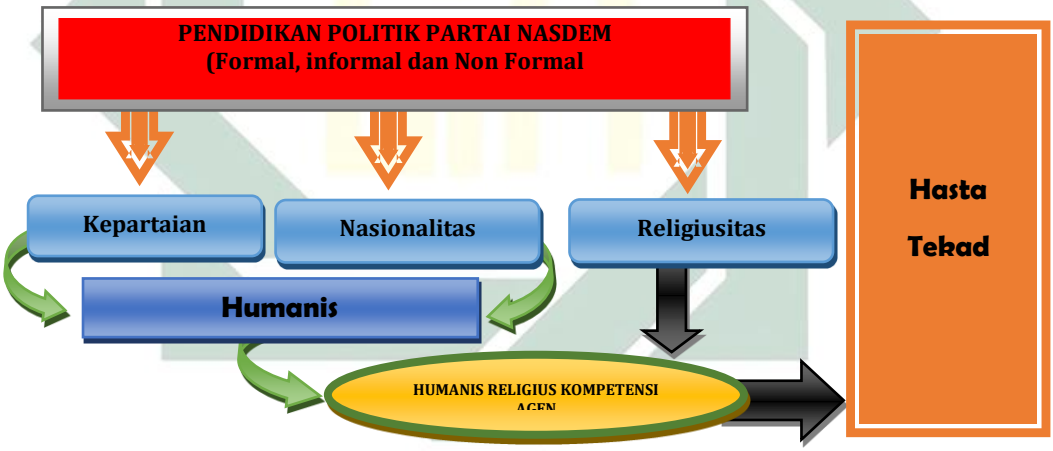

Gambar 4.2
Pendidikan Formal Dan Orientasinya

5. Struktur Peluang dan Tantangan

Kegiatan-kegiatan pendidikan Partai NasDem di berbagai daerah menghadapi berbagai kendala, sebagaimana dikatakan Zulfikar bahwa:

> Baginya berat membawa Partai NasDem yang Nasionalis di tengah-tengah Masyarakat yang agamis. Misalnya di Probolinggo yang dihuni oleh masyarakat Muslim santri terutama mereka warga Nahdiyyin yang sangat loyal, apalagi pengurus Partai DPC NasDem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> banyak dari mereka. Kendala yang dihadapi oleh Partai NasDem Probolinggo kata Zulfikar terkait dengan keberadaan beberapa politisi NasDem yang tidak seagama dengan mayoritas kader NasDem. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Partai NasDem Probolinggo. Tetapi untuk mendekatkan NasDem pada masyarakat tentu harus melalui kegiatan-kegiatan yang menjadi adat kebiasaan masyarakat, kegiatan ini selain untuk mendekatkan partai dan kader pada masyarakat tentu untuk membangun persepsi bahwa Partai NasDem bukanlah partai nasionalis sekuler sebaliknya partai nasionalis religius. Partai NasDem untuk meyakinkan serta komitmennya pada masyarakat bawah tentang partai Nasionalis yang religius dibuktikan dengan memasuki ruang aktivitas kebiasaan masyarakat, misalnya acara *sarwaan*.[57]

Zulfikar juga menambahkan bahwa:

> Kader hadir pada acara-acara tersebut sekaligus ikut memfasilitasinya. Selain itu Partai NasDem menyumbang kepada masyarakat yang mengahadapi musibah misalnya kematian, disini NasDem ingin menegaskan bahwa NasDem akan hadir dihati masyarakat. Pola lain untuk menyakinkan bahwa Partai NasDem tidak sekuler artinya partai NasDem masih memposisikan agama sangat krusial dalam tradisi berpolitik. DPC probolinggo menggandeng para kyai-kyai mushalla untuk menjadi bagian corong perubahan yang telah digariskan oleh Partai NasDem.[58]

Kegiatan pendidikan tersebut mematahkan sedikit demi sedikit persepsi buruk masyarakat tentang partai dan para politisinya, bahwa politik tidak selamanya kejam, kotor dan jahanam. Politik hanyalah alat untuk berkuasa dengan membawa kemungkaran menjadi kebaikan, memperjuangkan hak-hak kaum lemah, serta menguatkan pondasi kegiatan-kegiatan kegamaan yang berkembang dimasyarakat. Hadirnya para tokoh

---

[57] *Sarwaan* adalah ritual keagamaan yang biasanya dilakukan oleh ummat Islam. Kagiatan tersebut biasanya berisi pembacaan yasin, tahlil dan lain sebagainya. Kegitan tersebut guna mendo'akan secara bersama-sama arwah keluarga yang telah meninggal. Hal dipaparkan dalam, Wawancara dengan Zulfikar Ketua DPD Partai NasDem Kota Probolinggo yang juga sebagai anggota DPRD kota Probolinggo pada tanggal 14 April 2017 di kantor DPD NasDem kota Probolinggo.

[58] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama dalam politik Partai NasDem akan membawa uswah baru dalam dunia politik yang tentu uswah itu sudah ada pada guru-guru Bangsa.

Kesulitan yang demikian ini sebenarnya adalah terkait bagaimana sekolah politik Partai NasDem memposisikan strukturnya sebagai *constraining* sekaligus *enabling* bagi tindakan agen. Pada sisi *constraining*nya, struktur dan seperangkat aturan yang tercipta dari hasil perumusan formal visi dan misi harus diupayakan untuk tidak mengalami *gap* dengan seperangkat pengalaman dan pengetahuan ataupun habituasi agama agen yang sudah menjadi wisdom. Pada sisi *enabling*nya, struktur berguna akan dapat membebaskan para agen untuk berkereatif mengembangkan partainya. Pada situasi ini, Partai NasDem ada pada posisi proses strukturasi yang sama sebagaimana digambarkan oleh Giddens. Satu sisi, proses strukturasinya tidak boleh terperangkap dalam fundamentalisme subyektif, dan sisi lainnya, juga tidak boleh fundamentalisme obyektif.[59]

Sebagai partai Nasionalis tentunya Partai NasDem memiliki ideologi kebangsaan yang plural dan homogen. Keanggotaan struktur partai tentunya juga diisi oleh orang-orang yang memiliki latar homogen. Walaupun mayoritas masyarakat Jawa Timur adalah Islam, sebagai partai Nasionalis, Partai NasDem tetap ingin meramu homogenitasnya. Pada konteks ini, timbullah sebuah masalah besar menyangkut homegenitas agen yang memiliki latar berbeda dan struktur partai yang ingin menciptakan

[59] Lihat; George Ritzer, Goodman, Douglas. *Teori Sosiologi Modern*. Terjemahan Alimandan. Jakarta: Prenada Media, 2004, 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasionalitas bersama dalam perbedaan tersebut. Yang demikian inilah menjadi tantangan Partai NasDem dalam mewujudkan strukturasi partainya.

Untuk menghadapi tantangan ini, tentu tidak mudah. Sebagaimana dijelaskan oleh Zulfikar, rintangan yang dihadapi NasDem sangat sulit dan dapat juga dikatakan rawan konflik. Salah satunya misalnya, ditengah masyarakat yang fumentalis Islamnya tinggi, NasDem akan secara otomatis tidak disenangi. Bukan hanya tidak disenangi oleh masyarakat luas, dalam menyatukan emosional agen internal pun, juga membutuhkan upaya yang sunguh-sungguh.[60]

Upaya tersebut tentunya merupakan usaha mengharmonikan struktur partai pada kondisi latar belakang agen. Ketika usaha ini mengalami kebuntuan, tentu akan menjadikan struktur Partai NasDem tidak terintegrasi dan terorganisir. Dengan kata lain, proses strukturasi atau pembentukan agen akan kacau.

Jika rintangan tersebut tidak dapat diatasi, stuktur akan kehilangan peran constrainingnya. Sebaliknya peran enablingnya, akan membuat para tindakan agen akan jauh pada cita-cita yang telah disusun oleh Partai NasDem. Para agen yang sebenarnya menurut Gidden, mampu menciptakan tindakan mereka sendiri dan bahkan mereproduksi struktur,[61] akan membuat partai kehilangan pijakan struktur yang telah dirumsukan. Bisa jadi, pada

[60] Sebagaimana yang diceritakan di awal. Zulfikar menghadapi masalah penolakan masyarakat bahkan diceritakan juga hampir mengalami keretakan kepengurusan karena masuknya beberapa pengurus partai yang beragama Kristen di kepengurusan partai NasDem. Wawancara dengan Zulfikar pada tgl 14 April 2017.

[61] Baca pemikiran Giddens yang memusatkan kajian pada proses dialektika dimana praktik sosial, struktur, dan kesadaran diciptakan, Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*,508.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi ini partai akan menghadapi masalah disintegrasi agen yang tidak mampu berkompromi dengan struktur partai.

Selain itu, sebagaimana dijelaskan di atas, upaya ini jika diorientasikan pada penegasan bahwa Partai NasDem tidak sekuler. NasDem berupaya menjaga enabling nilai pengalaman agama agen, agar mampu masuk dan harmonis dengan perjuangan partai. Hal ini nampaknya juga diupayakan melalui pendidikan religiusitas yang memakai bentuk acara-acara keagamaan sebagaimana disebutkan dalam bahasan sebelumnya. Pada upaya ini sangat terlihat sekali bagaimana struktur Partai NasDem memengupayakan enabling kemampuan spiritual agen agar mampu menjadi motivasi perjuangan partai.[62]

B. Dimensi-Dimensi Religius dalam Pendidikan Politik Partai NasDem Jawa Timur

1. Varian Dimensi Religius dalam Pendidikan Politik Partai

Pembahasan kali ini akan menguraikan mengenai jenis dimensi religius dalam pendidikan politik Partai NasDem. Berdasarkan data yang ditemukan, terdapat beberapa jenis kegiatan atau upaya religiusitas dalam pendidikan politik Partai NasDem Jawa Timur. Peneliti mencoba mengelompokkan menjadi dua varian besar pendidikan politiknya. Dua varian tersebut adalah pendidikan religius ritual simbolik dan pendidikan substantif religius.

[62] Salah satu contohnya seperti pengadaan sarwaan, perayaan natal dan lain sebagaimanya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Wawancara dengan Iwan Afif tanggal 11 Maret 2017 pukul 14.00 di Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dua penggolongan ini didasarkan pada term agama pada segi sosiologis sebagaimana yang dijelasakan oleh Roland Robertson. Dalam bukunya yang berjudul the social interpretation of religion, ia mengemukakan bahwa dalam kegiatan sosial keagamaan memiliki dua dimensi, yakni nominal dan riil.[63] Dimensi nominal agama adalah menjelaskan agama sebagai media interaksi Tuhan dan hambanya. Agama dianggap sebagai kumpulan ritual dengan sifat manifest praktis berupa kegiatan atau tindakan yang merupakan bentuk komunikasi vertikal antara makhluk dan Tuhannnya. Sebaliknya, dimensi rill agama merupakan penjelasan agama yang memiliki implementasi rill sosiologis sebagai seperangkat aturan tindakan moral dan etis kehidupan sosial yang empiris.

Berdasarkan penjelasan di atas, kemudian peneliti memutuskan untuk menggolongkan dimensi agama yang ada di DPW Partai NasDem Jawa Timur menjadi dua varian besar dimensi religus yakni dimensi ritual simbolik dan dimensi substantif.

Pada dimensi ritual simbolik DPW Partai NasDem Jawa Timur mengupayakan penyelenggaraan keagamaan yang sifatnya ritual. Hal ini dapat terlihat pada sejumlah kegiatan yang dijelaskan sebelumnya. Ritual tersebut berbentuk kegiatan keagamaan yang biasa dilaksanakan oleh kaum agama.[64] Kegiatan seperti sarwaan, tahlilan, maulidan, kenaikan Isa al-Masih dan perayaan natal adalah pendidikan agama yang memiliki dimensi ritual simbolik. Sejumlah varian pendidikan religius ritual simbolik ini

[63] Ia menyebut keduanya sebagai *nominal difinition* dan *rill difination.* Lengkapnya baca, Roland Robertson, *The social interpretation of religion*, (Oxford:Brasil Blackwell,1972), 33.
[64] Pada sisi ini, kaum agama yang dimaksud adalah ummat Kristen dan ummat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan upaya Partai NasDem untuk menguatkan simbol agama dalam partai. Secara simbolik Partai NasDem melalui kegiatan simbolik agama, nampaknya ingin mengupayakan penguatan simbol terkait dengan eksistensi ideologi partainya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rendra Kresna bahwa secara simbolik, adanya kegiatan keagamaan adalah guna menunjukkan Partai Nasdem tidak sekuler.

Selain menggunakan pendidikan agama melalui kegiatan ritual, secara simbolik dimensi relgiusitas simbolik agama juga secara bebas dapat digunabebaskan pada para agen untuk membawa simbol agama dalam kegiatan partai. Artinya, simbol agama pada sisi ini adalah beberapa simbol keagamaan yang masuk menjadi atribut atau instrumen kegiatan parpol. Perihal yang demikian ini misalnya adalah terkait dengan atribut pakaian muslim dan muslimah. Hal ini salah satu contoh dalam kegiatan-kegiatan sekolah kader yang atribut busana para pengurus dan kader partai menggunakan pakaian keislaman.[65] Nyata sekali, sebagai partai Nasionalis melalui dimensi ini ingin memproklamirkan diri sebagai partai yang mengupayakan integrasi falsafah pancasila dan falsafah religiusitas. Yang demikian ini dikuatkan dalam pendapat yang di sampaikan oleh ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur bahwa NasDem adalah partai nasionalis, ketika nasionalisme dalam konteks ke-Indonesia-an harus berbasis religius, kalau nasionalis tanpa religius itu bukan pancasilais tapi sekuler.[66]

---

[65] Observasi Sekolah Kader DPD Partai NasDem Kabupaten Sidoarjo di The Sun Hotel Tanggal 24 April 2016.

[66] Wawancara dengan Ketua DPW NasDem Jawa Timur, Rendra Kresna pada tanggal 5 Mei 2017 pukul 14.00 di Kantor Bupati Malang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, Partai NasDem mengupayakan simbol keagamaan untuk menyatukan pemaknaan agama pada simbol perjuangan partai. Penyatuan makna ini untuk mengupayakan pencapaian elektabilitas partai melalui pembangunan makna simbol agama. Telah disebutkan diawal, kehidupan masyarakat Jawa Timur tidak dapat dilepaskan dari keberagaman. Maka, penguatan pemaknaan simbol agama pada partai merupakan cara yang tepat untuk meningkatkan elektalibilitas Partai NasDem.

Salah satu hal yang menjadi penguat pernyataan di atas ini adalah masuknya kegiatan keagamaan menjadi strategi pemenangan calon yang diusung Partai NasDem. A. Effendy Choirie dalam membekali beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Partai NasDem seringkali memberikan motifasi kepada kader dalam kegiatan keagamaan sebagai salah satu hal yang penting untuk diterimanya Partai NasDem dihati masyarakat. Ia mengatakan,

> Bappilu harus melaksanakana kegiatan keagamaan seperti pembacaan tahlil dan yasinan bersama di kantornya. Ini demi adanya spirit dalam menuju kemenangan. Kegiatan agama seperti pembancaan al Quran dan sholawat akan dapat memberikan sinar pada Partai NasDem. NasDem akan secara mudah diterima oleh masyarakat. Sinar dari kegiatan keagamaan akan secara penuh menarik perhatian masyarakat dan membuka hati masyarakat. Jika ini hati mereka sudah tertarik, NasDem akan cepat diterima. Tanpa disuruh pun, masyarakat akan tertarik dan memilih NasDem.[67]

Hal ini juga senada sebagaimana dikatakan oleh Nining Indra

[67] Observasi, Sambutan A. Effendy Choirie pada peresmian Bappilu Partai NasDem Jember tanggal 28 September 2018 Jam 09.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saleh[68] sebagai Sekjend DPP Partai NasDem, menyatakan bahwa :

> Tentang religiusitas di dalam Partai NasDem ini memang tidak bicara terang-terangan, tetapi secara substansi kita bisa menangkap kenapa itu ada? NasDem melihat ini sebuah realitas politik Indonesia, ini adalah Negara yang berideologi karna itu menganut sekian banyak agama yang dominan Islam, tentu agama itu menjadi bagian tertentu di dalam konsep kebangsaan dan kemasyarakatan, jadi seperti itu secara politik itu juga menjadi bagian dari strategi karena tanpa kalangan komunitas agama partai ini kayaknya menjadi ngambang dan kekuatan-kekuatan politik selalu menjadikan isu agama untuk menjadi mudah di dalam mengumpulkan suara, oleh karena itu misalkan PDP itu murni. Misalnya Demokrat tetapi dia masih menggunakan jargon keislaman. PDIP itu masih ada baitul muslimin, di demokrat itu ada majlis zdikir nurul iman di golkar malah lebih banyak kalau jaman waktu dulu banyak sekali jargonnya di Golkar menyebutkan sebagai kino kalau NasDem kan menyebutkan sayap ada laskar ulama' ada majlis dakwah Islam ada usaha perbaikan pendidikan Islam ada pengajian alhidayah ini ada semua.[69]

Berdasarkan penjelasan ini, pendidikan keagamaan yang berbentuk ritual dijadikan sebagai taktik politik untuk membuka hati masyarakat. Gus Choi sapaan akrab A. Effendy Choirie mengibaratkan kegiatan agama sebagai sinar. Secara simbolik sinar yang terpancar akan mampu memanggil masyarakat. Masyarakat akan secara benderang melihat NasDem sebagai partai yang baik dan memiliki ruh perjuangan agama. Dengan serta merta, pandangan masyarakat pada partai akan memiliki nilai teologis. Pada sisi inilah, persepsi keagamaan yang ada dalam diri setiap individu masyarakat akan memuncul dan mendorong pada terbentuknya cara pandang yang etis

[68] Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sekaligus wakil ketua bidang pemerintahan dan komunikasi politik DPW Partai NasDem Jawa Timur.
[69] Wawancara dengan Nining Indra Saleh, waktu itu sebagai Sekjend DPP Partai NasDem pada Tgl 22 Maret 2017 di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada NasDem.[70]

Untuk terciptanya penguatan pada dimensi ritual simbolik ini, partai juga terlihat mengupayakan lahirnya dimensi nilai religius yang tertransformasikan secara antro-teologis. Artinya, ada dimensi nilai antroposentri agama yang berusaha ditanamkan dalam kegiatan pendidikan politik Partai NasDem. Dimensi inilah yang peneliti sebut sebagai dimensi religius substantif. Nilai Substanstif yang dimaksud di sini adalah intisari ajaran agama yang bermuara pada nilai moralitas kehidupan sosial. Nilai substansi agama merupakan perasaan dari sebuah anggapan bahwa agama memiliki peran *humanity value control*. Peran agama pada konteks ini dipandang sebagai sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan manusia dan menjadi pendorong, penggerak dan pengontrol tindakan moral manusia. Tentunya yang demikian ini agar tidak menyimpang dari norma kemanusian.[71]

Dimensi religius Partai NasDem terbilang merupakan hal yang tepat. Tepat secara konseptual baik pada misi restorasi yang dibawa Partai NasDem dan juga tepat jika dipandang sebagai solusi realitas perpolitikan dewasa ini. Ditanamkannya nilai substantif riligiusitas merupakan upaya

---

[70] Anggapan bahwa kegiatan agama seperti pembacaan al-quran dan sholawat akan melahirkan sinar, menurut Gus Choi bersumber dari ajaran Islam. Dalam sambuatannya ia menyebutkan ayat yang berbunyi,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
Ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang perintah Tuhan untuk bertaqwa. Menurut Gus Choi kegiatan keagamaan adalah manifestasi dari Taqwa kepada Allah SWT. Jadi kegiatan yang berupa pembacaan al Qur'an akan melahirkan sinar Tuhan yang merupakan petunjuk bagi masyarakat lainnya. Tuhan memberikan Sinar pada kader NasDem yang bertakqwa. Sinar itulah yang akan membuat ekektabilaitas partai meningkat. Wawancara, A. Effendy Choirie Konsolidasi Caleg Partai NasDem di Hotel Bintang Mulya Jember tanggal 28 September 2018 Jam 14.30 WIB.

[71] Muh. In`am Ilsam, *Teologi Islam:Isu-Isu Kontemporer*, (Malang:UIN Malang Press, 2008), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

senada dengan arah semangat gerakan perubahan yang didengungkan oleh Partai NasDem.

Nilai substantif religius searah dengan misi gerakan perubahan Partai NasDem, sebab merupakan wujud transformasi manifestasi agama dari yang vertikal ke humanis horizontal. Agama yang sebelumnya hanya memiliki transenden teologis berubah menjadi lebih humanis. Pada sisi ini, ajaran agama diperas menjadi substansi moral dan dapat digunakan sebagai penggerak perubahan. Sehingga, adanya nilai agama sebagai basis gerakan dapat terimplementasikan secara penuh oleh agen partai dalam melakukan restorasi perubahan di negeri ini.

Penjelasan di atas berpijak pada beberapa data temuan observasi yang dilakukan peneliti dalam materi sekolah kader. Beberapa pemateri mengaitkan atau mendasarkan restorasi gerakan perubahan Partai NasDem pada sejumlah ajaran agama. Salah satu contohnya, misalnya pada materi sekolah kader yang diadakan di Kabupaten Sidoarjo bertempat di The Sun Hotel. Pada materi restorasi Indonesi, pemateri selalu menghubungkan semangat gerakan perubahan pada sebuah ajaran Islam tentang perubahan.[72] Salah satu ayat al Qur'an yang sering kali dikutip pada penjelasannya adalah :

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٞ مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ يَحۡفَظُونَهُۥ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِۗ
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ

[72] Observasi, Materi Restorasi Indonesia dalam Sekolah Kader DPD Partai NasDem Kabupaten Sidoarjo di The Sun Hotel Tanggal 24 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.[73]

Gus Choi dalam beberapa kesempatan juga menuturkan,

> Warisan pikiran ini mesti terus ditularkan dan dilanjutkan kepada generasi sekarang dan masa mendatang dengan berbagai cara, termasuk melalui jalur pendidikan politik. Alat untuk mencapainya, tidak lain dan tidak bukan dengan partai politik, Partai NasDem. Selain itu, saya juga cocok dengan semboyan Restorasi Gerakan Perubahan. Perubahan itu adalah perintah Allah. Seperti firmanNya: Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang berjuang untuk mengubahnya.[74]

Dasar restorasi perubahan yang akan dilakukan oleh Partai NasDem adalah nilai dasar substantif agama. Menurutnya, agama juga memiliki semangat perubahan. Demi terwujudnya ketentraman dan kesejahteraan agama mendorong manusia untuk selalu melakukan perubahan dalam kehidupannya. Perubahan yang dimaksud tentu kearah yang lebih baik. Bukan hanya agama Islam, seluruh agama secara substantif mendorong ummatnya untuk melakukan yang demikian ini.[75]

Bukan hanya agama Islam, beberapa tokoh agama Kristenpun juga mendorong semangat agama sebagai motif perjuangan kemanusian. Misalnya dikenalnya konsep teologi pembebasan dalam agama Kristen. Salah satu tokoh konsepsi ini adalah Gustavo Gutierres.[76] Bagi Gutierrez

---

[73] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan, (Bandung: CV Diponegoro,. 2010), 136.
[74] Observasi, A. Effendy Choirie dalam Konsolidasasi Pemenangan Calon Legislatif DPRD di hotel Bintang Mulia Jember tanggal 28 September 2018.
[75] Wawancara dengan Nico Ainul Yaqin pada tanggal 9 April 2017 pukul 15.00 di Surabaya.
[76] Gustavo Gutierrez Merino Lahir pada tanggal 8 Juni 1928 di Monserat, sebuah kawasan miskin di Lima, Ibu kota Peru. Ia berasal dari keluarga sederhana yang berdarah Mestizo, keturunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada tiga cara berteologi. *Pertama*, teologi sebagai sumber hidup rohani. *Kedua*, teologi sebagai pengetahuan rasional. *Ketiga*, teologi sebagai refleksi kritis dalam terang Sabda Allah atas praksis hidup orang Kristen. Gutierrez menekankan fungsi yang ketiga, meskipun fungsi ini tidak dapat dipisahkan dari kedua fungsi lainnya.

Teologi pembebasan Gutierrez adalah refleksi kritis dalam terang Sabda Allah atas praktis hidup orang Kristen, yang ikut melibatkan diri dalam usaha pembebasan. Motivasi dasarnya adalah keyakinan bahwa masyarakat yang tidak adil sama sekali tidak sesuai dengan tuntutan injil. Mereka merasa tidak pantas disebut orang Kristen jika tidak ikut berjuang melakukan perubahan, meskipun kesadaran ini masih dalam taraf intuisi serta meraba-raba.

Tugas teologi adalah menunjukkan dengan jelas hubungan antara iman dan perjuangan pembebasan. Namun, bukan berarti bahwa refleksi teologi dimaksudkan sebagai justifikasi praksis yang sudah ada. Sebaliknya, refleksi teologi, menurut Gutierrez, harus menunjukkan nilai positif dan nilai negatif yang ada dalam praksis pembebasan atau sebuah gerakan perubahan. Bahkan, dari refleksi teologi diharapkan ada koreksi-koreksi atas kesalahan-kesalahan yang mungkin ada, misalnya ada aspek hidup Kristen yang dilupakan karena orang terlalu tergesa-gesa mengambil tindakan politik. Inilah yang dimaksud dengan teologi sebagai refleksi kritis atas

---

campuran Hispanic (Spanyol) dan Indian. Gutierrez adalah satu-satunya anak laki-laki dari tiga bersaudara. Meskipun ada kesulitan-kesulitan ekonomi, ia tidak mengalami kekurangan cinta dari keluarganya. Lihat. Francis Wahono, *Teologi Pembebasan: Sejarah, Metode, Praksis, dan Isinya*, (Yogyakarta: LKIS, 2000),18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan sosial masyarakat.[77]

Berdasarkan penjelasan diatas ini, Partai NasDem memantabkan tekad untuk mengusung semangat restorasi berdasarkan nilai-nilai substansi agama. Beberapa kegiatan pendidikan politik agen selalu dibangun dengan motivasi teologis. Dimensi agama substantif yang diupayakan guna memberikan semangat hidup para agen partai. Hal yang demikian ini tentunya agar kepercayaan agamanya tidak membuat dirinya teralienasi sebagaimana anggapan Marx tentang agama.[78] Nilai agama secara substantif dalam Partai NasDem berperan sebagai motivasi sebagaimana pandangan Ishomudin yang secara komprahensif telah menjelaskan fungsi agama dalam kehidupan sosial.[79]

Pada intinya, adanya dimensi religius substatif dalam pendidikan Partai NasDem, semata-mata untuk lebih mengembangkan dimensi keagamaannya. Maksudnya, dimensi religiusnya tidak semata-mata simbolik saja, akan tetapi lebih dari itu, yakni penguatan terhadap nilai substantifnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rendra Kresna,

> "Setiap pengkaderan harus menjadi bagian inhern atau bagian yang penting dan secara otomatis disetiap partai politik dan Partai NasDem harus menjadi basis setiap partai, tapi karna NasDem partai nasionalalis bukan partai yang mendasarkan pada agama tertentu maka kita tidak sekedar menggunakan religi dalam bentuk simbolik

[77] Suryawasita, *Teologi Pembebasan Gustavo Gutierrez*, (Yogyakarta: Jendela, 2001), 19.

[78] Marx mengatakan semakin manusia menyifati dirinya dengan Tuhan, dia tidak akan mempunyai kehidupan dalam dirinya. Lihat dalam, Rober J Tucker, *The Marx Engels Reader*, (New York:Norton Company,1978), 71.

[79] Ia mengatakan agama berfungsi edukatif, tranformatif, social control, pendamaian, pemupuk solodaritas, sublimatif dan kreatif. Berdasarkan hal inilah kemudian ia menjelaskan bahwa agama merupakan motivasi bagi setiap individu manusia dalam kehidupannya. Nilai agama mampu secara penuh tertransmisikan dalam kehidupan sosial masyarakat sebagaimana anggapan Durkheim. Lihat. Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia-UMM Press, 2002), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tapi religiusitas secara substantif."[80]

Religiusitas Partai NasDem bukan religius Simbolik, artinya artibut-artibut atau simbol-simbol tidak dibawa pada ranah politik, karena religiusitasnya menjelma secara substantif dalam aktivitas politik. Nasionalisme religius menjadi tuntutan Partai NasDem yang harus mengakui kebhinekaan bangsa. Bangsa yang majemuk baik suku, agama, ras dan aliran menempatkan Nasionalisme sebagai arah ideologis bangsa yang plural. Kemudian Agama menjadi bagian dari kebangsaan dan kerakyatan. Jadi Nasionalisme-religius harus terpatri serta inhern pada diri kader-kader NasDem.

Religius menurut James menekankan pada perasaan dan pengalaman beragama. Menurutnya, agama memberikan energi spiritual, dimana agama dapat menggairahkan semangat hidup, meluaskan kepribadian, memperbarui daya hidup, dan memberikan makna dan kemuliaan baru pada hal-hal yang biasa dalam kehidupan.[81] Orang yang beragama akan mencapai perasaan tentram dan damai. James juga mengatakan bahwa agama adalah sumber kebahagiaan yang dapat melahirkan kekuatan. Energi spiritual yang dikembangkan pada politik NasDem sebagai kekuatan dalam menjalankan politik ke dalam dan keluar agar menghasilkan kader-kader yang berkarakter religius dan humanis. Hal inilah yang kemudian mendasari NasDem memfungsikan nilai substantif agama sebagai motivasi gerakan NasDem.

---

[80] Wawancara dengan Ketua DPW NasDem Jawa Timur, Rendra Kresna pada tanggal 5 Mei 2017 pukul 14.00 di Kantor Bupati Malang.
[81] Munir, Mulkhan. *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, Yogyakarta: Sipress, 1999, 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana disebutkan di awal, nilai substantif religius ini juga sangat tepat konteksnya pada keadaan perpolitikan dewasa ini. Dalam penelitian Max Weber dikatakan bahwa ada pengaruh nilai-nilai agama terhadap perilaku agen ekonomi. Dalam bukunya yang terkenal, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, ia berusaha menjelaskan mengapa kapitalisme modern berkembang di Eropa Barat dan Amerika, dan tidak berkembang di wilayah lainnya.[82] Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa suatu kegiatan unik yang bersifat keagamaan, yaitu reformasi Protestan (Calvinism), telah melahirkan nilai-nilai baru secara mendasar, yang memberikan pengesahan kepada usaha-usaha yang bercorak ekonomi.[83]

Sejalan dengan penelitian ini, Muhammad Musthofa pernah menyebutkan dalam penelitiannya bahwa kawasan Asia terkenal sebagai masyarakat yang memiliki akar keagamaan yang tinggi. Sayangnya, agama tidak dapat berbuat banyak untuk membebaskan masyarakat dari ketidakadilan, kemelaratan, ketertindasan dan pertikain. Agama dalam perpolitikan malah ditunggangi oleh kelompok elit masyarakat demi melanggengkan legitimasinya dan kemakmuran mereka sendiri.[84]

Pada konteks inilah kemudian sangat dirasa perlu, sebuah partai politik (seperti NasDem) kembali melakukan rethingking terhadap keberagaman masyarakat, terutama bagi praktisi dunia politik. Dimensi

---

[82] Lengkapnya baca, Max Weber, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, (terj. TW. Uotomo Yogyakarta: pustaka pelajar, 2006), 65-66.
[83] Ajat Sudrajat, *Etika Protestan dan Kapitalisme Barat: Relevansinya dengan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara,1997), 1-11.
[84] Muh Musthofa, "Hidup Merdeka Bersama", Juranal Gamma, 4 April 2001, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama yang selalu digunakan hanya dalam penguatan authority kaum elit, seharusnya mulai dicarikan cara untuk bertransformasi menjadi nilai perbaikan moral politik. Agama harus hadir menjadi pengarah dan penggerak perjuangan masyarakat. Bukan malah sebaliknya, agama dijadikan topeng dan pembenaran terhadap ketidak adilan, korupsi dan penindasan baik pada sesama manusia serta lingkungannya.

Transformasi nilai agama yang substansif menjadi kunci jawaban bagi problem yang demikian ini. Strukturasi nilai substansi dapat secara massif mengubah peran agama menjadi lebih humanis. Daniel L Pas yang mengembangkan pemikiran Emile Durkheim mengatakan, moralitas, agama dan realitas tidak bisa dipisahkan. Masing-masing memiliki hubungan yang dependen. Keyakinan beragama akan secara penuh mengatur pandangan moral dalam realitas kehidupan masyarakat. Dengan demikian, NasDem yang menghubungkan ketiganya ini, sangat tepat untuk menjawab problema perpolitikan dewasa ini.[85]

Beberapa penjelasan diatas telah menguatkan bahwa Partai NasDem mengupayakan perasan nilai substantif ini pada nilai-nilai kebangsaan. Dengan kata lain, ingin mensinergikan ruh al-watāniah dan ruh al-dịniyah. Dimensi substansi religius dianggap sangat berselaras dengan falsafah masyarakat bangsa ini. Hal ini yang dirasakan beberapa agen penggerak NasDem.[86]

---

[85] Daniel L. Pas, *Eight Theories of Religion*, (New York: Oxford University Press, 2006), 91-92.

[86] Dalam pengantar buku NasDem yang ditulis oleh Gus Choi dinyatakan bahwa banyak orang bertanya, mengapa gus Choi hijrah bukan ke partai sejenis seperti PPP misalnya, tapi justru ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan seluruh penjelasan dapat dikonklusikan bahwa ada dua dimensi religius yang ada dalam pendidikan politik Partai NasDem. Ada dimensi ritual simbolik dan dimensi substantif. Kedua dimensi ini memiliki peran masing-masing dan saling berhubungan. Keduanya berhubungan erat serta selaras dengan Dimensi religius substansi yang juga dikuatkan. Dimensi Ritual untuk penguatan hubungan manusia yang vertikal, yakni bertujuan meningkatkan spiritual keagaman. Sedangkan dimensi substantif diorientasikan pada shaleh kehidupan sosial agen.

Penjelasan singkat dan sederhananya sebagaimana gambar di bawah ini;

partai nasionalis yang pendirinya bukan orang NU dan bukan aktivis gerakan keagamaan seperti latar belakang dirinya. Ini karena semasa beliau masih aktif di PMII, bergaul dengan teman-teman dari PMKRI, GMNI, GMKI, HMI dan lainnya. Itulah awal beliau yang merasakan nikmatnya keberagaman. Ia pernah *nyantri* kepada Gus Dur yang perilaku dan visi politiknya amat pluralis dan nasionalistis. Gemblengan itu membuat dirinya nyaman berada di lingkungan mana pun. Apalagi, ajaran pendiri NU Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari tidak pernah mempertentangkan antara kebangsaan dan ke-Islaman. Menurut kakek Gus Dur ini: Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama, dan keduanya saling menguatkan. Dari sini pula muncul pemikiran-pemikiran, tentang pentingnya sebuah bangsa dan negara. Seperti diutarakan oleh KH Hasyim Asy'ari yang juga Pahlawan Nasional itu, bahwa setiap anak bangsa Indonesia wajib menyintai tanah air (*hubbul wathan minal iman*). Obeservasi, Pengantar Effendy Choirie Dalam dokumentasi Partai NasDem.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

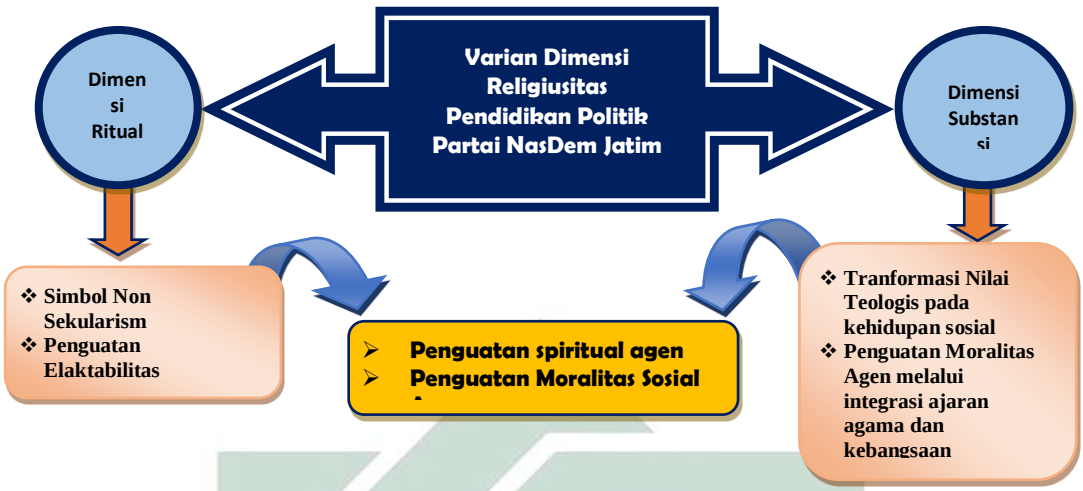

Gambar. 4.3.
Varian Dimensi religius Partai NasDem

2. Orientasi Pembentukan Tindakan Agen

Adapun yang dimaksud dengan pembentukan tindakan agen disini, sebenarnya terkait dengan bagaimana dimensi religisuitas memberikan pengetahuan dan pengalaman pada agen. Yang demikian ini tentunya agar dapat membentuk rasionalitas dalam tindakannya**.** Dengan kata lain, dua dimensi yang disebutkan sebelumnya tentu memiliki orientasi khusus dalam membentuk rasionalaitas para agen Partai NasDem.

Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa dalam proses strukturasi terdapat dua *authority* yang berwenang. Bukan hanya kekuatan struktur, para agen juga memiliki kuasa dalam prosesnya. Pada konteks ini, Partai NasDem sepertinya sangat memahami bagaimana pentingnya peran agen dalam proses reproduksi struktur Partai NasDem. Pendidikan politik Partai NasDem mengupayakan hal ini melalui penguatan dimensi ritual simbolik agama dan dimensi substansi religius.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemahaman NasDem yang demikian ini menjelaskan bahwa budaya politik Religius dibentuk dan dikembangkan oleh pelaku politik religius dan apa yang akan ditentukan oleh pelaku politik sebagai ciri-ciri utama budaya politik mereka sampai batas tertentu, dipengaruhi oleh pendidikan mereka. Jadi hubungan antara budaya politik dan pendidikan bersifat tidak langsung. Ini berarti pendidikan tidak secara final membentuk pelaku politik. Pendidikan memberi dasar-dasar kepada tiap calon pelaku politik. Jika dasar-dasar ini baik dan kokoh, besar kemungkinan (probabilitasnya) akan lahir pelaku-pelaku politik yang baik. Namun, jika dasar-dasar yang diberikan oleh pendidikan jelek dan rapuh, kemungkinan besarnya ialah yang akan muncul di kemudian hari adalah pelaku-pelaku politik yang jelek dan rapuh pula.

Berdasarkan generalisasi ini dapat dipahami mengapa perilaku para pelaku politik dari masyarakat dengan sistem pendidikan yang baik berbeda dengan perilaku pelaku politik yang berasal dari masyarakat dengan sistem pendidikan yang kurang memadai. Dalam masyarakat, misalnya, para pelaku politik dengan latar belakang pendidikan pesantren yang baik, berbeda perilakunya dengan pelaku politik yang datang dari pendidikan yang kurang terpelihara atau dari latar belakang pendidikan yang berbau aristokrasi dan meritokrasi feodal atau militer. Tentu orientasi pendidikan politik Partai NasDem sangat tepat jika beberapa dimensi religiusnya juga diorientasikan membentuk agen yang ada.

Dimensi religius pada sisi ini digunakan oleh Partai NasDem sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguatan kesadaran para agen. Sebagaimana dikatakan oleh Gidden bahwa tindakan agen berbasis pada tiga kesadaran. Ketiganya ini dapat diperkuat melalui penguatan Dimensi religius yang memiliki sisi spiritual dan praksis. Kemudian tindakan yang tercipta secara simultan–menurut Gidden–agen akan dapat mereproduksi tindakan yang baru untuk dikembangkan.[87]

Guna terciptanya pembahasan yang rinci dan sistematis, peneliti akan mencoba menggambarkan dan menjelaskan satu persatu orientasi dimensi ritual simbolik dan orientasi substantif religius pendidikan politik Partai NasDem. Kedua varian di atas memiliki orientasi saling berhubungan dalam menciptakan kesadaran dari tindakan agen. *Pertama*, terkait dengan dimensi ritual simbolik, nampak ditujukan pada pengautan landasan spiritual partai. Yang demikian ini berkenaan dengan peningkatan keimanan agen pada Tuhan yang Maha Esa dan peneguhan ajaran agama sebagai basis perjuaangan. Pendidikan keagamaan yang berbentuk ritual ingin meneguhkan pondasi keimanan sebagai awal pemahaman agen dalam bertindak. Terkait dengan agama sebagai dasar tindakan politik ini sebagaimana diungkapkan oleh Rendra Kresna;

> NasDem berbasis nasionalis tetapi gerakannya tidak meninggalkan apa yang menjadi ajaran dan aturan dari agama apa itu Islam apa itu Hindu, Budha, dan sebagainya, lebih-lebih Islam karena memang pengurus maupun kadernya 85 persen lebih adalah muslim lebih lebih pendirinya orang Aceh. Islamnya ini adalah Islam yang tidak diragukan, sedang Islam itu mempengaruhi corak dari pada perkembangan NasDem yang menjadi pijakan Partai NasDem. Jadi nasionalis tetapi religius, kenapa dibilang religius bukan agamis karena kita memang berbasis agama tetapi religius dikarenakan pengurus dan kader-kadernya sebagian besar agama yang di

[87] John. B Thompson, *Analisis Ideologi*, 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> perbolehkan oleh Indonesia lebih-lebih agama Islam. Tidak ada satupun visi misi kemudian aggaran dasar, anggaran rumah tangga, program umum itu yang bersinggungan apa lagi bertentangan dengan norma ajaran dari agama.[88]

Jadi pada sisi dimensi spritual politik NasDem yang berbentuk ritual dioerientasikan sebagai simbol penekanan pada terhubungkannya kesadaran agama dalam politik. Artinya, melalui ritual simbolik keagamaan Partai NasDem ingin menciptakan pemahaman bersama terkait dengan hubungan agama dan politik. Partai NasDem yang berbasis Nasionalis mampu mengkonsolidasikan ideologinya ke dalam dialog kebangsaan dan keagamaan. Pancasila menjadi sesuatu yang urgen mempertemukan realitas kebangsaan dan keagamaan. Disini bangsa dan agama atau politik dan agama adalah dua entitas yang berkait-kelindan. Keterkaitan itu bukan hanya disebabkan bahwa keduanya merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari manusia, melainkan juga karena sifatnya yang saling melengkapi; politik bersifat komunal, sementara agama bersifat individual, sehingga perlu selalu didialogkan dalam kontek keindonesiaan. lebih jauh lagi Zulfikar menjelaskan relasi Nasionalis dengan agama bahwa:

> Memang Partai NasDem berbasis nasionalis tapi pada kenyataannya kurun waktu perjalanan. Kami Partai NasDem dengan mengusung gerakan perubahan menarik bagi kami serta dengan perubahan yang apa namanya gerakan perubahan memang kita ketahui bersama berkaitan dengan konteks politik dan agama sangat tidak bisa dipisahkan antara agama dan politik. Kita melihat bahwa sejak berdirinya kemerdekaan Indonesia tahun 1945 disana juga termasuk dalam UUD 45 dan juga pancasila tidak lepas dengan kaidah-kaidah keagamaan termasuk dengan religiusnya. Kalau kita melihat terkait dengan dimensi religius dikaitkan dengan politik NasDem yang

[88] Wawancara dengan Ketua DPW NasDem Jawa Timur DR. Rendra Kresna pada tangga l5 Mei 2017 pukul 14.00 di Kantor Bupati Malang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengusung gerakan perubahan ini sangat terkait erat.[89]

Politik tidak bisa dipisahkan dengan agama, begitu pula agama dan politik. Berdirinya bangsa ini karena perjuangan fisik dan diplomatik yang disertai oleh nilai-nilai perjuangan agama. Hal inilah yang kemudian menjadi latar kegiatan kegamaan partai seperti *Khatm al-Qur'ān* Keliling.[90] Usaha dan do'a sebagaimana UUD 45 menjadi bukti bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukan semata-mata perjungan yang tanpa nilai-nilai agama. Kemerdekaan Indonesia adalah pemberian Tuhan yang Maha Esa.

Jadi dalam konteks ke Indonesiaan agama dan politik tidak bisa dipisahkan, ulama' dan umara bergandengan tangan membebaskan dan membangun Bangsa Indonesia. Jadi hal inilah yang menyatukan pandangan politik Partai NasDem bahwa Nasionalis-Religius bersatupadu dalam mengawal Restorasi Indonesia. Konstruksi politik dan agama ditegaskan kembali oleh KH. Malik Sanusi bahwa:

> Berbicara persolalan politik itu, sebenarnya tidak semua ajaran agama mengikutinya, tokoh-tokoh sufi yang menganggap bahwa kekuasaan itu bisa menghancurkan dirinya maka tidak semua ulama' berpolitik dan ini contohnya juga banyak jadi ulama'-ulama' yang berpolitik di Jawa timur nanti masa-masa lalu seperti tahun 71 atau sebelumnya menjadi lari seolah-olah kekiaiannya menjadi hina karena image pesan masyarakat bahwa kiai yang berpolitik itu adalah kiai yang mencari uang, bagi pemahaman saya bahwa politik itu siasah/agama itu siasah bahwa agama itu adalah politik. Bagaimana ajaran-ajaran itu bisa berkembang, untuk ajaran, tidak ada ajaran menang tapi untuk menyebarkan agama untuk jadi undang-undang itu, jadi ulama harus menempati tempat itu salah satunya adalah lembaga legeslatif, lembaga legislatif itu adalah salah satu penetapan undang-undang sehingga apa yang menjadi ketetapan

[89] Wawancara dengan Zulfikar pada tgl 14 April 2017 ketua DPD NasDem kota Probolinggo sekaligus wakil ketua DPRD Kota Lumajang.
[90] Observasi, Kegiatan Khotmil Qur`an Keliling Partai NasDem Jatim 25 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> undang-undang yang berkaitan dengan peraturan pemerintah atau yang nyerempet urusan agama-agama harus ada orang Islamnya disitu.[91]

Ulama' memiliki berbagai pandangan tentang hubungan agama dan politik, ada yang dapat merusak agama ada pula yang berpandangan bahwa ajaran agama akan kuat jika disana ada ulama'. Ini sebenarnya terlepas dari dua teori relasi agama dan politik dalam penjelasan Norhaidi Hasan.[92] Menurut pernyataan ini, politik adalah *siyāsah* dalam bahasa agama. Agama akan berkembang bilamana ulama' memasuki arena politik, sebab ajaran agama bukan ajaran menang kalah namun ajaran menyebarkan, jadi adanya ulama akan menyebarkan agama melalui legislasi yang ada, lebih-lebih bila urusan agama. Ajaran agama perlu diperjuangkan melalui undang-undang, kehadiran ulama menjadi sesuatu yang krusial dalam politik meskipun saat ini sebagian masyarakat memandang ulama' dipolitik dengan nada pejoratif. Malik Sanusi menambahkan bahwa:

> Lah saya pribadi memahami agama itu adalah politik jadi saya tidak sepakat jika ada orang yang mengatakan orang berpolitik itu tidak baik urusan laku bagi saya pribadi itu adalah milik Allah, untuk *kulillāhumma mālik al-mulki man tasyā wa tu'izzu mantasyā'* yang memberikan pangkat adalah Allah yang mencabut pangkat itu Allah, jadi urusan laku tidaknya itu dari Allah. Saya dulu memang sebelum masuk politik ada orang bilang jangan kiyai kalau sampean ke politik habis dach sampean sekarang laris larisnya jadi pendakwah, kiyai zainuddin itu tokoh paling laris tetapi ketika dia masuk ke PPP harcur dia tidak ada yang ngundang dia, kalau saya takut masalah itu berarti saya takut pada pangkat jabatan, takut kepada karisma yang saya miliki jadi saya takut kepada Allah, jadi intinya laku tidaknya saya bagi saya tidak masalah orang benci saya tidak masalah, yang

[91] Wawancara dengan KH. Malik Sanusi Ketua DPD NasDem Kabupaten Bondowoso juga pengasuh PP. Nurus Syam Kec.Wringin Bondowoso pada tgl 25 April 2017.
[92] Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer, Konsep, Genealogi, dan Teori. Yogyakarta: Suka Press: UIN Sunan Kalijaga, 2012*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> penting Allah suka sama saya kalau Allah benci saya karena pangkat jabatan itu yang saya tidak suka artinya saya punya keyakinan saya masuk di partai yang mana partainya bisa melihat keadaan.[93]

Bagi Malik Sanusi bahwa agama dan politik tidak bisa dipisahkan, meskipun masyarakat memiliki pandangan yang berbeda bahwa menjauhnya ulama' akan membuat agama menjadi bersih. Tapi sebaliknya semakin ulama' menjauh maka politik semakin kotor. Memang taruhan seorang ulama' dipolitik adalah nama baiknya. Tetapi hal itu wajar bagi masyarakat yang mengalami luka dan trauma masa lalu ketika politisi dari kalangan ulama' yang berpolitik kesandung kasus tertentu.

Pada sisi ini sebenarnya juga berhubungan dengan sebuah anggapan bahwa ulama` yang lumrah disebut kyai, diakui ataupun tidak memiliki peran politis. Mau tidak mau, dalam melayani masyarakat ada tanggung jawab peran politis baik untuk memperjuangkan agama, dan memperjuangkan ummat. Peran politis sudah melekat dalam diri mereka.[94]

Hubungan politik dan agama tidak bisa dipisahkan karena agama itu sendiri adalah politik menurut sebagian ulama'. Partai NasDem memproklamirkan diri sebagai partai Nasionalis dan agamis karena nasionalitas berdasarkan agama. Mencintai Agama kewajiban pemeluknya, bila pemeluk mencintai agamanya maka juga harus mencintai negaranya karena mencintai Negara adalah bagian dari kewajiban di dalam agama. Ihwan menambahkan bahwa:

---

[93] Wawancara dengan KH. Malik Sanusi pada tgl 25 April 2017 Ketua DPD NasDem Kabupaten Bondowoso dan menjadi pengasuh PP.Nurus Syam Kec.Wringin Bondowoso.

[94] Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat Kiai Pesantren-Kiai Langgar* (Jakarta:LKIS,1994), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dari situlah mengapa dikatakan nasionalis agamis, karena memang berdasarkan kepada agama, karena nasionalis sendiri berdasarkan agama. Kita untuk mencintai agama adalah kewajiban kita, ini adalah ajaran agama tetapi mencintai negara kita ini tapi jangan mencintai dengan jalan-jalan yang salah. Kalau kita cinta berarti kita harus menggerakkan bangsa ini agar lebih baik, nah untuk lebih baik ini juga agamis, ini agama yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, jadi kalau yang terkait dengan masalah religius.[95]

Adapun yang *Kedua,* terkait dengan dimensi substansinya, nampak Partai NasDem melakukan upaya yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai universalitas agama dalam memberikan kesadaran pada agennya. Hal ini terlihat dari beberapa temuan peneliti baik dalam wawancara yang dilakukan maupun dalam observasi di beberapa acara Partai NasDem. Di dalam temuan penelitian, peneliti menemukan upaya pembentukan kesadaran tindakan melalui penyerapan nilai antroposentris pemahaman keagamaan yang lebih universal sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Pembentukan nilai substansi religius dipandang sebagai salah satu cara terbaik untuk menguatkan kesadaran tindakan politik agen Partai NasDem. Melalui nilai ini, jiwa agen mendapatkan standar pemahaman moralitas yang mapan dalam memproduksi tindakannya. Hal ini kerena nilai substasi lebih humanis.[96] Sebagaimana dijelaskan diawal, dimensi ini berperan sebagai pelengkap dan penyempurna dimensi ritual simbolik yang ada dalam proses pendidikan politik partai. Artinya, Partai NasDem

---

[95] Wawancara dengan Gus Iwan pada tgl 9 April 2017, Dewan Pembina DPD NasDem Kabupaten Gresik.

[96] Nilai substansif memberikan kesan dan menciptakan standar moral kader. Memang nilai ini tidak dapat dicerna oleh akal budi dari logika manusia. Tetapi, kepercayaan dan kemanusiaan pada saat melakukan hal tersebut akan membentuk Sesuatu yang rasional juga. Samuel Soitoe mengatakan akan mempengaruhi jalan pikiran yang rasional. Lihat. Samuel Soeitoe, *Psikologi Pendidikan Untuk Para Pendidik Dan Calon Pendidik*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1982), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki pandangan bahwa jika hanya menekankan pada unsur simbolik keagamaan tanpa mengupayakan hal-hal yang substantif dari nilai ajaran agama itu sendiri tentu tidak akan berarti apa-apa. Nilai substantif itulah yang dapat memberikan injeksi moralitas yang lebih luas dan lebih bermanfaat.

Mengambil substansi nilai agama sebagai landasan nilai perjuangan dalam politik kenegaraan, akan lebih memiliki karakter keagamaan yang lebih pluralistis. Ajaran agama akan lebih menjadi rahmatan lil ‘ālamịn yang benar-benar berorientasi pada kemakmuran masyarakat. Ajaran agama akan lebih inklusif dan diterima sebagai landasan moralitas bersama oleh para agen. Pada konteks inilah, Partai NasDem mengupayakan keterpaduan nilai substansi seluruh agama (bukan hanya agama Islam yang dianut mayoritas) menjadi seperangkat nilai yang dijunjung bersama-sama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur;

Pada umumnya memang religius itu banyak diartikan atau diidentikkan dengan Islam. Akan tetapi religius Partai NasDem itu berbeda. Nilai-nilainya berasal dari semua agama. semuanya mengajarkan kebaikan dan semuanya menolak kejelekan. Agama apa saja seperti Islam, Kristen dan yang lain pasti sama dalam hal moral ini. Jadi kalau ada statment yang mengarah kepada Islam saja, itu keliru. Religiusitas Partai NasDem mengambil ajaran kemanusiaan dari seluruh agama. [97]

[97] Ungakapan Rendra Kresna menandakan bahwa NasDem memposisikan nilai-nilai seluruh agama dalam membentuk kesadaran moral para agennya. Wawancara dengan Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur DR. Rendra Kresna pada tanggal 5 Mei 2017 pukul 14.00 di Kantor Bupati Malang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gagasan yang demikian ini sebenarnya agak mirip dengan gagasan tokoh-tokoh bangsa yang terdahulu. Diantara pemikiran tokoh-tokoh yang dianggap senada pada orientasi idiologi ini adalah Soekarno dan Abdurrahman Wahid. Seokarno yang merupakan presiden pertama memiliki ideologi pemikiran yang dikenal dengan marhenisme dan Gus Dur yang juga merupakan mantan presiden memiliki pemikiran yang bercorak plural-multikultural.

Diantara sekian banyak ideologi dan gagasan kedua tokoh di atas yang sangat populer sampai sekarang adalah marhaenisme dan pluralisme-multikulturalisme. Marhenisme adalah pemikiran Soekarno yang memiliki karakter gerakan sosio-nasionalisme. Karakter yang mampu memperbaiki keadaan-keadaan di dalam masyarakat. Sehingga keadaan yang kini pincang menjadi keadaan yang sempurna, tidak ada kaum yang tetindas, tidak ada kaum yang celaka dan tidak ada kaum yang sengsara.[98] Sedangkan pluralisme Gus Dur adalah implementasi nilai Islam untuk integrasi keragaman budaya lokal. Bukan sebagai nilai yang bersaing dengan budaya tersebut.[99]

Ideologi Marhaenisme Bung Karno yang sangat terkenal itu mampu merubah mindset masyarakat Indonesia dari mental terjajah serta membebaskannya dari keterkungkungan penindasan dan pemerasan kapitalisme, kolonialisme/imperealisme dan feodalisme. Gerakan

[98] Soekarno, *Pokok-Pokok Ajaran Marhaenisme Menurut Bung Karno*, (Yogyakarta: Media Pressindo, Anggota IKAPI, 2001), 27.
[99] Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Jakarta: Desantara, 2001), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyadaran yang dibangunnya dalam waktu yang cukup lama ini telah menjadi pintu masuk *(entry point)* untuk meraih kemerdekaan Indonesia dengan cita idealnya yakni membangun masyarakat adil makmur dan beradab, bebas dari segala penindasan dan pemerasan, baik oleh bangsa atas bangsa maupun manusia atas manusia. Aliran ini membenci sekali imperalisme negara.[100]

Ajaran-ajaran Bung Karno ini telah mengilhami sejumlah pemimpin dunia, khususnya di kawasan Asia dan Afrika, serta Negara-negara lain yang sedang terpuruk karena penjajahan. Dari sini mereka bangkit dan melawan untuk memerdekakan bangsa dan negaranya dari cengkeraman bangsa penjajah. Tidak sedikit pemimpin Negara yang menjadikan nama sang proklamator itu sebagai nama jalan di negaranya masing-masing, sebuah penghormatan yang diberikan kepada Presiden pertama RI.

Begitupun dengan ajaran gagasan Gus Dur. Paham Pluralisme-Multikulturalisme Gus Dur mulai dikenal luas sejak dekade tahun 1980-an, terutama sejak ia terpilih menjadi Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-27 NU di Situbondo, 1984. Selama tiga periode memimpin NU (1984-1999), Gus Dur mampu menjadikan Islam sebagai sumber universal kemanusiaan, kebangsaan dan peradaban dunia. Menurut Gus Dur Islam

[100] Bagi Bung Karno stratifikasi masyarakat yang didasarkan pada dimensi superioritas dan inferioritas harus dihilangkan. Bung Karno meletakkan dimensi kebangsaan dan kemanusiaan dalam posisi yang universal, determinan dan egalitarianistik (kesetaraan), di mana ujungnya adalah kesejahteraan serta terbentuknya harmoni antara kemerdekaan individu dan keadilan sosial. Bung Karno sangat menentang keras segala macam bentuk hegemoni, baik oleh bangsa atas bangsa maupun manusia atas manusia. Menurutnya, posisi manusia sebagai manusia dan sebagai bangsa memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan dengan hak-hak dasar yang harus diberikannya, seperti hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk bersarikat, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk hidup aman dan sebagainya. Lihat. Ali Sastromidjojo, *Dasar-dasar Pokok Marhenism*e, (Jakarta:Partai Nasional Indonesia, 1961), 13 dan 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai sumber keselamatan, perdamaian, keadilan dan toleransi yang dapat menembus lebih dari sekadar batas-batas kebangsaan dan teritorial sebuah Negara. Pikiran-pikiran inilah yang banyak menginspirasi sejumlah kalangan dan pemimpin agama di negeri ini maupun di dunia internasional. Meleburkan agama demi kemaslahatan semua bangsa.[101]

Dibawah kepemimpinannya, NU mampu melahirkan sejumlah gagasan dan pemikiran besar tentang kebangsaan dan kenegaraan yang dapat mengakhiri perdebatan seputar asas Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gagasan-gagasannya tentang demokrasi dibangun melalui Forum Demokrasi (Fordem) yang dipimpinnya di awal tahun 1990-an. Di forum ini, ia menyemaikan gagasan-gagasan strategis tentang demokrasi dan pembangunan yang berbasis kepada kesejahteraan rakyat, melawan status quo, dan diskriminasi. Sejak sebelum dan selama reformasi berjalan Gus Dur merupakan salah satu tokoh kunci yang mendorong transisi demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara.

Presiden ke-4 RI itu juga menjadikan Bhineka Tunggal Ika sebagai pilar dan ajaran hidup bagi sebuah bangsa yang beragam seperti Indonesia. Bagi Gus Dur, perbedaan (keberagaman) adalah domain Ketuhanan yang bersifat sunnatullah, sedangkan domain kemanusiaan adalah menghormati, dan menghargai keberagaman itu dalam sebuah harmoni sebagai bangsa dan sebagai manusia melalui ucapan, sikap dan perilaku untuk bersatu dalam

[101] Benyamin F. Intan, *Damai Bersama Gus Dur*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberagaman.

Gagasan Gus Dur tentang keberagaman ini merupakan bentuk penghormatannya (tidak hanya) kepada kemajemukan ide dan identitas yang bersumber dari perbedaan agama, kepercayaan, etnik dan kedaerahan, tetapi sebuah pengakuan spiritualitas yang tinggi sebagai insan beragama yang meniscayakan ketundukan mutlak kepada Tuhannya (Al-Khāliq). Karena alasan itu pula Gus Dur ketika menjadi pemimpin negeri ini membuka gerbang cukup lebar bagi masyarakat Tionghoa sebagai salah satu etnis mayoritas di negeri ini untuk berekspresi dengan kebudayaannya di sebuah negeri yang mayoritas Islam. Salah satu peristiwa yang monumental yang pernah dilakukan Gus Dur adalah menerbitkan Keppres No. 6/2000, dan mencabut Inpres 14/1967 yang dinilai memarginalkan etnis Tionghoa selama puluhan tahun. Lalu, Gus Dur kembali menerbitkan Keppres No. 19/2001 yang menetapkan Imlek sebagai hari libur fakultatif. Itulah di antara sederetan ajaran Gus Dur tentang pluralism-multikulturalisme yang menjadi pembuka jalan bagi dimensi kemanusiaan dan kebangsaan dalam perspektif ke-Indonesiaan yang majemuk. Bagi kebenaran bisa datang dari semua kelompok maupun agama.[102]

Berdasarkan hal inilah kemudian, partai berusaha untuk menguatkan nilai substansi agama demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai mata rantai dari gagasan dan ideology Bung Karno dan Gus Dur, Surya Paloh telah melakukan langkah-langkah nyata dengan Restorasi

[102] Abdurrahman Wahid, "Intelektual di Tengah Eksklusivisme" dalam majalah Prisma, No. 3, Jakarta: LP3S, 1991.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia-gerakan perubahan yang mendasarkan gerakannya itu kepada visi Negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur.[103]

Berangkat dari hal inilah, DPW Partai NasDem Jawa Timur mengorientasikan terbentuknya kesadaran yang lahir dari substansi ajaran agama. Upaya sublimasi ini diorientasikan Pertama, membentuk karakter humanis Agen. Pada sektor ini, upaya sublimasi nilai pengabdian agama pada pengabdian masyarakat. Penjelmaan Religius dalam kebangsaan Partai NasDem baik aktivitas ubūdiyah mahdlāh dan ghairu mahdlāh. Kegiatan ritual peribadatan kader menjadikan sejadah masyarakat sebagai bentuk perjuangan.104

Ritual ibadah bagi kader Partai NasDem merupakan ibadah dalam memperjuangkan nasib masyarakat, keadilan, kemakmuran dan mengabdi pada Negara dan bangsa. Kebangsaan dan Agama tidak bisa dipisahkan sebagaimana Ihwan dalam pernyatannya;

> Sesungguhnya sebutan religius bagi saya cukup mendekati, saya setuju dengan itu sehingga kata-kata religius itu tidak kemudian cenderung dan identik dengan kegiatan-kegiatan ubudiyah, bagaimanapun kita mengetahui ubudiyah itu ada yang mahdhoh dan ghairuh mahdhoh dalam dinamika politik kita, aktivitas kita, kemudian persujudan kita ada di sajadah masyarakat yang cukup luas dan cukup dinamis maka kemudian sebagai kader Partai NasDem tatkala dia mengadakan ubudiyah yang ghairuh mahdhoh dengan aktivitas politik inilah sebuah bentuk perjuangan dan pengabdian demi bangsa dan Negara dalam bentuk nasionalisme dalam membimbing masyarakat untuk keadilan dan kemakmuran

[103] Partai NasDem memiliki misi sama dengan amanah dasar hukum negara ini. searah dengan Alinea II Pembukaan UUD 1945). Obeservasi, Visi dan Misi Partai NasDem Tanggal 13/02/2010.
[104] Observasi, Konsolidasi Partai NasDem Jatim Bulan Ramadhan 19 Juli 2015 jam 20:31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ini bagian dari kegiatan keagamaan.[105]

Nasionalisme dan religius dapat termanifestasi dalam aktivitas ubudiyah sosial, artinya persembahan atau ritualitas dalam agama dapat menjadi ritual yang dipersembahkan pada masyarakat. Ritualitas sebagai wujud vertical akan berharmoni dengan wujud horizontal berupa penghambaan pada kepentingan rakyat. Perjuangan tersebut bagian dari kegiatan dalam menjungjung nilai-nilai agama. Kader berkewajiban menjadikan perjuangan sebagai bagian dari ibadah baik yang bersifat vertical maupun ibadah yang bersifat horizontal. M. Heri menambahkan bahwa:

> Kita tau mengangkat derajat kemanusiaan mulai dari kemampuan secara ekonomi mulai dari ketidak mampuan pendidikan formal kemudian mulai dari ketidak mampuan berusaha, ini semua dilakukan dalam kegiatan politik bagi kami politik itu tergantung siapa orangnya yang memegang, ibarat pisau itu politik siapa yang memegang pisaunya kalau yang megang pisau itu ibu rumah tangga maka dipakai sebaik-baiknya memasak di dapur untuk menyiapkan makanan bagi keluarganya tetapi ibarat pisau itu politik yang di pegang penjahat walaupun toh itu pisaunya baik tapi kemudian yang megang tidak baik maka akan digunakan merampok, maka dari itu saya sangat setuju kalau Partai NasDem ini ada sebutan bahwasanya partai dengan dua dimensi yaitu dimensi nasioanalis dan dimensi religius, inilah kemudian khusus anggota DPRD tingkat-1 di jawa timur yang terdiri dari 4 orang semuanya adalah kebetulan muslim semuanya dan kegiatan-kegiatannya cukup melakukan pendekatan secara agama dan Alhamdulillah rata-rata dari keempatnya itu adalah santri semua.[106]

Partai NasDem Jawa Timur dikomandoi oleh politisi dari kalangan santri, hal ini tentu menjadi warna tersendiri bagi partai. Kegiatan politik

[105] Wawancara dengan Gus Iwan pada tgl 9 April 2017, Dewan Pembina DPD Partai NasDem Kabupaten Gresik.
[106] Wawancara dengan Heri pada tgl 22 Maret 2017, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sekaligus wakil ketua bidang pemerintahan dan komunikasi politik DPW NasDem Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kader cukup bernuansa religius. Perjuangan kemanusiaan yang diusung oleh Partai NasDem menjadi hal yang tidak terpisahkan dari berjuang di jalan agama, lebih-lebih bila menyangkut nasib orang pinggiran yang notabenya umat Islam. Mereka marginal secara ekonomi dan belum sepenuhnya mendapat pendidikan yang layak. Dengan hadirnya santri dipanggung politik menjadi daya tarik tersendiri bagi relasi kebangsaan dan keagamaan, lebih-lebih antara relasi keindonesiaan dan keislaman. Perjuangan membangun bangsa sama halnya berjuang dijalan agama. Ruh Partai NasDem bukan hanya semangat kebangsaan namun juga semangat keagamaan.

Partai NasDem yang Nasionalis-Religius tidak tinggal diam melihat kesewenang-wenangan. hal ini bukan perintah partai namun perintah agama. Perintah agama yang dinamis melihat ketimpangan, ketidakadilan dan ketidakbenaran harus diperjuangkan. Partai NasDem memilih restorasi sebagai jalan perubahan Indonesia kearah yang lebih baik sebagaimana perintah agama bahwa jangan bungkam melihat ketimpangan. Restorasi yang berlandaskan agama sebagaimana yang digambarkan oleh Ihwan bahwa :

> Islam mengajarkan tidak boleh tinggal diam untuk melakukan perubahan, ini selalu yang disuarakan oleh Partai NasDem. Partai NasDem sudah melakukan yang namanya restorasi perubahan dan lain-lain. Itu semuanya kalau kita pelajari bahkan dipesantren selalu diajarkan *Falyughayyir Biyādi* melihat kemungkaran maka harus melakukan perubahan, itu harus kita rubah dengan kekuataan kita, dengan tangan kita dan dengan kekuasaan kita. Partai NasDem memiliki riil pergerakan yang jelas dan tidak pernah menyimpang dari ajaran agama, ini gambaran dari nasionalis yang religius di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partai NasDem ini.[107]

Partai NasDem memahami petunjuk agama atau dakwah agama pada perjuangan melawan ketimpangan sebagai bagian dari dakwah, jika melihat kemungkaran maka perangilah dengan kekuatan tangan jika belum mampu maka gunakan kekuasaan. Disini tafsir Partai NasDem pada perjuangan agama adalah restorasi Indonesia, kemungkaran harus ditumpas oleh perubahan.

Restorasi Indonesia bagian dari anjuran agama dalam menghancurkan kemungkaran, namun restorasi Indonesia tidak melokalisir perjuangan yang lain. Restorasi bukan berorintasi menghancuran kemungkaran *ansịch* namun restorasi menyentuh sendi-sendi penyelamatan kehidupan berbangsa dan bernegara. *Kedua,* Kesadaran Urgensi Amanah dan Keadilan Tindakan Agen. Pada orientasi ini Partai NasDem mengupayakan tindakan agen didasarkan kepercayaan bahwa semua apa yang dilakukannya adalah amanah yang harus dilaksanakan. Hal ini sebagaimana yang dikemukan oleh Gus Iwan;

> Kalau yang berbentuk sosial misalkan kita melaksanakan khitanan, terus pembagian sembako misalkan, itukan dimensinya sosial, khotmil qur'an itu juga pernah kita lakukan. Sudah tidak di hitung lagi dan konsolidasi pastinya nilai-nilai yang kita sampaikan nilai-nilai religius juga kan yang disampaikan NasDem bisa membangun kultur baru di partai politik sehingga kita meninggalkan rapat menghindari pragmatism, kita harus jujur dan dapat amanah. itukan sebetulnya nilai-nilai religius yang di sampaikan ke kader.[108]

Orientasi ini akan secara serta merta akan menguatkan komitmen

[107] Wawancara dengan gus Iwan pada tgl 9 April 2017, Dewan Pembina DPD NasDem Kabupaten Gresik.

[108] Wawancara dengan Lutfi, Ketua DPD NasDem Kabupaten Kediri, bertempat di rumah kediamannya di Kediri pada pukul 21.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan agen yang responsible dan transparan. Rasa amanah ini pun yang juga akan mendorong kader untuk selalu bersikap adil. Seorang kader partai dilarang keras masuk partai hanya semata mencari elektabilitas, popularitas dan kekuasaan. Ibadah harus tertanam kuat pada diri kader terutama keihklasannya mengurusi bangsa dan Negara. Sehingga kader mampu adil dan amanah. Niat tulus berkorban selalu ditekankan pada kader. Nilai-nilai ibadah, ikhlas, berkorban, setia kawan dan selalu menolong dalam kebajikan. Identitas religius tersebut harus memancar pada diri kader Partai NasDem. Sehingga kader memiliki amanah dan sikap adil dalam poltik, terutama ketika menjadi pemimpin.

Lebih jauh lagi uraian religius dalam Partai NasDem disampaikan oleh Gus Choi bahwa;

> Dunia ini ada empat pilar yang penting Menurut hadis qiwaamuddunnya alal arba'in bi'ilmil 'ulama, Negara ini harus ada ulama, bi'adlil umaro'; harus ada pemimpin yang adil yang direkrut dari partai, NasDem yang merekrtut pemimpin yang berjiwa adil. ketiga, bisakhowatil aghniyaa'; pengusaha yang berdarma yang memiliki komitmen dan memiliki jiwa kesadaran utk memberi kepada bangsa, keempat, ada rakyat yang selalu meninggikan pemimpinnya. Jika kader NasDem memiliki kesadaran ini, maka ini yang dinamakan dimensi religius substantif. dalam Islam tidak ada jaminan, pemimpin yang adil walaupun bukan Islam lebih bagus dari pada pemimpin Islam tetapi tidak adil, atau yang lebih luas lagi bahwa Negara ini bisa terjamin jika dipimpin oleh orang yang bukan Islam ketika pilih Islam tapi tidak adil atau sebaliknya. Jadi keadilan menjadi titik penting dalam agama, ini subtansi dalam nilai Islam bukan simbol Islam.[109]

Sebagaimana disampaikan oleh Koordinator Wilayah Partai NasDem Jawa timur, bahwa dalam konteks hubungan berpolitik dan agama,

[109] Wawancara dengan Korwil Jatim DR. Effendi Choirie pada hari minggu, 18 Maret 2017 pukul 08.00 di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka dunia ini harus ada hubungan yang sinergis dan simetris antara *Ulamā', Umarā'*, pengusaha dan rakyat. Partai NasDem merekrut mereka-mereka menjadi bagian dari tangan perubahan. *Umarā'* adalah para pemimpin yang adil, pengusaha yang dermawan dan rakyat yang berkesadaran tinggi.

Mereka semua harus berkomitmen dan memiliki kesadaran tinggi untuk memberi kepada bangsa dan negaranya. Kesadaran inilah yang dimaksud dalam dimensi religius subtantif partai. Pemimpin dari agama manapun harus adil karena keadilan adalah substansi ajaran agama. Dalam Islam tidak ada jaminan, pemimpin yang adil walaupun bukan Islam lebih bagus dari pada pemimpin Islam. Atau yang lebih luas lagi bahwa Negara ini bisa terjamin jika dipimpin oleh orang yang bukan Islam ketika memilih Islam tapi tidak adil atau sebaliknya. Jadi keadilan menjadi posisi penting dalam ajaran agama. Disini Partai NasDem tidak membeda-bedakan kader dari agama manapun selagi bisa memberikan keadilan, maka dia layak menjadi seorang pemimpin.

Keadilan menjadi point penting Partai NasDem dalam memperjuangkan hak-hak kebangsaan. Keadilan harus ditegakkan, maka semua pihak berkewajiban menjungjung keadilan, sebab keadilan adalah bagian dari ajaran agama. Jadi tidak ada alasan pemeluk agama jika tidak memperjuangkan keadilan. Politik hanya alat atau media untuk memperjuangkan keadilan tersebut, maka politik adalah salah satu jalan dalam menegakkan ajaran agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Effendi Choirie Menambahkan bahwa:

> Seluruh yang kita lakukan harus bernilai ibadah *wamā kholaqt al-jinna wal insāna illā liya'budụn.* Saya ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada-Ku. Muaranya yang dilakukan adalah persembahan kepada Allah SWT, harus ikhlas, kalau tidak ihklas tidak akan ada artinya, maka di dalam Islam juga disebut semua manusia akan rusak kecuali yang berilmu, yang berilmu itu akan rusak kecuali yang di amalkan ilmu pengetahuannya, yang mengamalkan ilmu pengetahunnya itu akan rusak kecuali yang ikhlas, itu hadis nabi Jadi Dimensi religiusnya ketika kemudian berkuasa juga ada ajarannya disini. Partai ini adalah alat dan harus baik.[110]

Seluruh kegiatan Partai NasDem berdimensi ibadah. Artinya apa yang dilakukan oleh pengurus dan kader akan dipertanggungjawabkan pada Allah.SWT. dengan demikian ibadah politik tersebut harus ikhlas karena ibadah tanpa keikhlasan akan sia-sia. Manusia akan rusak kecuali yang berilmu, yang berilmu akan rusak kecuali yang di amalkan, ilmu pengetahuannya juga akan rusak kecuali yang ikhlas. Pada sisi ini, manusia pada hakekat memiliki paradigma mempertimbangkan untung rugi dalam bertindak.[111] Maka menurut Al Qordhawi, perlulah manusia memperhatikan urgensitas internalisasi ikhlas dalam dirinya.[112]

A. Effendy Choirie juga menambahkan bahwa :

> Ibarat kita ingin mencapai tujuan lebih enak ketika naik kereta yang enak bagus dll. di dalam alat harus indah, baik, menarik, harus dihuni oleh orang yang bagus, bersih, alatnya bagus tetapi penghuninya tidak bersih bau tidak wangi ya rusak juga kacau juga tidak indah juga. *Mālā yatimmul wājib illā bihị wahuwa wājibun, Al-Thoriqatu ahammu minal mahdā*. Jadi Tujuan itu baik, mulya

[110] Wawancara dengan Korwil Jatim A. Effendi Choirie pada hari minggu, 18 Maret 2017 pukul 08.00 di Surabaya.
[111] Shofaussamawati, *Ikhlas Perspektif al-Quran, Kajian Tafsir Maudhu'i*, (Jawa Tengah: STAIN Kudus, 2013), 331.
[112] Yusuf al-Qaradhawi, *Niat dan Ikhlas* (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 1996), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> caranya, alat untuk mencapai tujuan yang baik itu harus baik, tujuan itu penting cara itu juga penting. Alat partai bertujuan mewujudkan cita bangsa, dalam islam disebut *tashorruf al-imām 'alā al- ru'yah wal maslahah*. Kebijakan seorang pemimpin arahnya adalah untuk kemaslahatan rakyat, ini semua sudah saya ceritakan dalil dalam sekolah kader level DPD dan DPW. Tapi dimensi religius bukan simbolik tapi substantif, maksudnya bukan partai Islam, ummat Islam harus mendukung Islam seperti PPP tapi pendukungnya tidak ada.[113]

Kader Partai NasDem yang bergerak digarda depan pembangunan Bangsa harus membawa nilai-nilai religius kedalam perjungannya, kader tidak hanya fokus pada perebutan kursi kekuasaan namun lebih dari pada itu harus mampu membawa nilai-nilai perubahan kedalam ruang kehidupan, karena itu sekolah-sekolah atau pendidikan yang ada di Partai NasDem sarat akan penyampaian-penyampaian, nilai-nilai yang harus diunggah kedalam praktek politik yang ada, Hal ini sesuai dengan pernyataan dr. Faida MR. Bupati Jember bahwa:

> Saya kira itu sesuatu yang mutlak harus ada tanpa dimensi religius partai politik itu bukan apa-apa, mengapa demikian karena orang-orang yang bergerak di partai politik itu adalah garda garis depan dalam mengawal pembangunan garis depan dalam mengawal perubahan-perubahan pembangunan oleh karenanya kalau yang berada di dalamnya adalah orang-orang yang tidak berdimensi religius tentu arah partai politik ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Cara mentranformasikan nilai-nilai religius di dalam partai politik saya lihat untuk Partai NasDem ini khususnya sangat betul untuk urusan ini terbukti dengan menyelenggarakan sekolah-sekolah politik, sekolah-sekolah untuk kader dimana nilai-nilai religius itu menjadi bagian dari materi itu artinya ini komitmennya Partai NasDem. Insane politik Partai NasDem adalah insan-insan yang mempunyai religius dalam berpartai politik. Tanda religius yang di tetapkan dalam pendidikan politik Partai NasDem Jawa Timur itu yang saya nilai adalah terutama waktu ada pengarahan dari gus Choi, waktu itu selaku ketua DPW Jawa Timur. itu pertama kali saya

[113] Wawancara dengan Korwil Jatim DR. Effendi Choirie pada hari minggu, 18 Maret 2017 pukul 08.00 di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendengarkan materi-materi yang disampaikan sangat religius.[114]

Jadi berdasarkan penjelasan ini maka dapat disimpulkan bahwa seluruh dimensi religius yang diupayakan oleh DPW Partai NasDem Jawa Timur memiliki orientasi pembentukan kesadaran agennya. Seluruh agennya didorong agar mengembangkan kepercayaan agamanya sebagai dasar perjuangan dalam partai. Yang demikian ini tentu sebagaimana dijelaskan di atas, tetap berorientasi pada terciptanya jiwa agen yang selain memiliki karakter sholeh spiritual juga sholah sosial.

[114] Wawancara dengan dr. Faida MR, Bupati Jember yang diusung Partai NasDem sekaligus Dewan Pertimbangan DPW Partai NasDem Jawa Timur, bertempat di Pendopo Kabupaten Jember pukul 11.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam gambar di bawah ini,

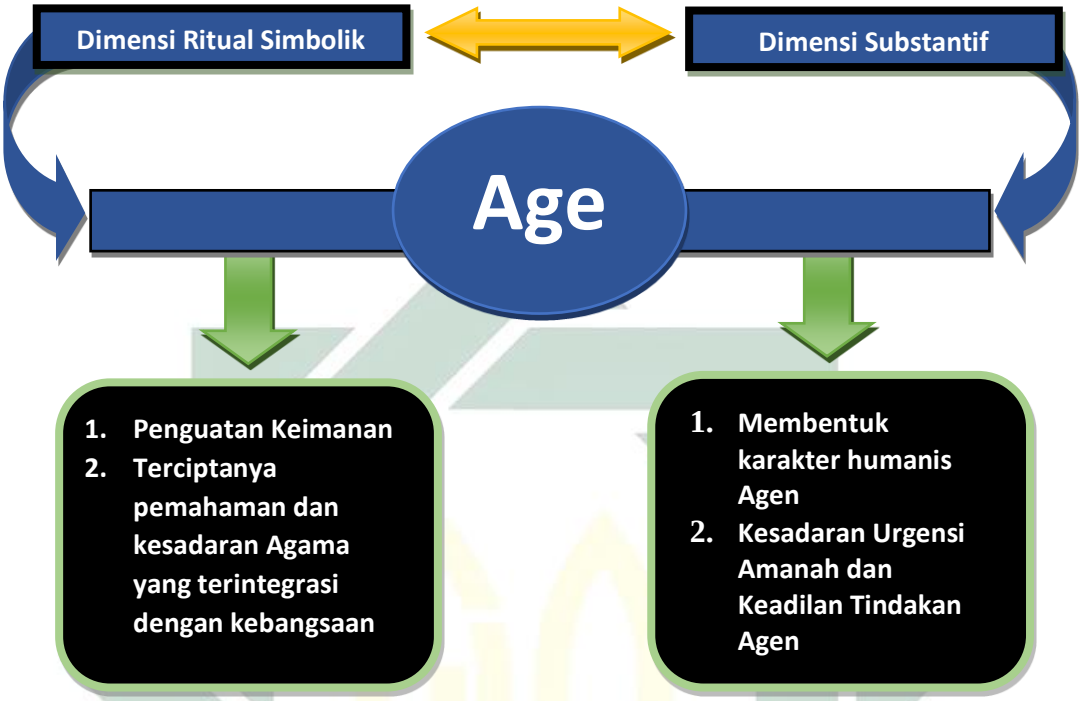

Gambar 4.4
Orientasi Riligiusitas Dalam Pembentukan Tindakan Agen

3. Orientasi Dimensi Pembentukan Struktur

Budaya politik Religius dibentuk dan dikembangkan oleh pelaku politik religius dan apa yang akan ditentukan oleh pelaku politik sebagai ciri-ciri utama budaya politik mereka sampai batas tertentu, dipengaruhi oleh pendidikan mereka. Jadi hubungan antara budaya politik dan pendidikan bersifat tidak langsung. Ini berarti pendidikan tidak secara final membentuk pelaku politik.

Pendidikan memberi dasar-dasar kepada tiap calon pelaku politik. Jika dasar-dasar ini baik dan kokoh, besar kemungkinan (probabilitasnya) akan lahir pelaku-pelaku politik yang baik. Namun, jika dasar-dasar yang diberikan oleh pendidikan jelek dan rapuh, kemungkinan besarnya ialah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan muncul di kemudian hari adalah pelaku-pelaku politik yang jelek dan rapuh pula. Jika pelaku poltiknya jelek dan rapuh struktur partai pun akan rapuh.

Salah satu upaya yang dilakukan dengan pendidikan politik Partai NasDem ialah dengan memasukkan dimensi religius pada prosesnya. Tentunya selain diorintasikan untuk membentuk agen dan pelaku yang rapuh sebagaimana dijelaskan di atas, juga untuk menguatkan struktur partai yang memiliki fungsi constraining sekaligus enabling dalam terbentuknya strukturasi partai.[115] Pada situasi inilah, masuknya Dimensi religius diharapakan mampu memperkuat peran struktur yang demikian tersebut.

Berdasarkan temuan yang didapatkan, kekuatan struktur Partai NasDem sebagai constraint tindakan agen juga nampak dikuatkan oleh dimensi nilai religius. Seperangkat aturan formal dan upaya-upaya penguatannya, dilakukan melalui atau berdasarkan pada ajaran agama. Ruh diniyah yang memiliki kepercayaan pada Dzat Yang Maha Esa dan kuasa menjadi ruh bahkan power bagi struktur yang tercipta di Partai NasDem.

Struktur Partai NasDem diciptakan dengan mendasari pada seluruh varian dimensi nilai-nilai agama. Baik dari dimensi ritual simboliknya hingga yang substansi. Kadua varian ini sama menjadi dasar penyusun struktur partai yang dibentuknya. Dua dimensi ini membentuk sebuah norma dan karakter Partai NasDem yang membebaskan dan sekaligus mengontrol para agen. Guna pembahasan yang lebih terperinci, tentu

[115] Sebagaimana pandangan Gidden terkait fungsi struktur pada tindakan agen, lihat. Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*,508.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebaiknya mengetahui dulu bagaimana struktur norma hukum dan seperangkat aturan komunitas politik Partai NasDem terbentuk. Aturan struktur kepartaian ada yang berupa aturan oraganisasi dan beberapa selogan yang dipakai. Kedua varian yang juga dijelaskan di atas nampak juga termanifestasi di dalamnya.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Rendra Kresna bahwa walaupun Partai NasDem bukan partai Islam tetapi dimensi religius dapat terpancar atau diusahakan dapat tertanam dalam diri agen dan seperangkat aturan kepartaian. Ia mengatakan;

> NasDem bukan partai yang berbasis agama, beda halnya dengan PKB, PAN, PPP dan PKS itu agama menjadi pijakan pertamanya meskipun tentu tidak bertentangan dengan pancasila bahwa kita sepakat satu-satunya landasan ideologi itu pancasila memang nasionalis tetapi kita itu segala sesuatunya tentang keagamaan itu khususnya tentang masalah releginya artinya pelaksanaan dalam beragama keyakinannya itu mewarnai dari semua pengurus kader dan juga perangkat partai, baik struktur maupun non struktur contohnya di anggaran dasar satu di anggaran rumah harus bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam pelaksanaan program-programnya harus ada kejujuran harus berpihak untuk membahas kemiskinan. Kita bisa mencontohkan nilai-nilai keagamaan dari aktivitas pengurus dan sebagainya taat melaksanakan perintah-perintah agama, yang Islam yang Budha dan sebagainya, juga di perangkat organisasi baik itu visi, misi, AD/ART, tidak ada yang bertentangan dengan pancasila.[116]

Berdasarkan pendapat ini, dua dimensi varian yang dijelaskan sebelumnya, nampak menjadi instrument pengembangan AD/ART dan seperangkat aturan yang ada di Patai NasDem. Pendidikan politik yang diadakan sebenarnya ingin mempertegas atau ingin melengkapi dan memperselaraskan struktur yang telah disepakati bersama.

[116] Wawancara dengan Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur Rendra Kresna pada tanggal 5 Mei 2017 pukul 14.00 di Kantor Bupati Malang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dimensi ritual simboliknya, difungsikan sebagai penguatan identitas partai dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Menurut Sudijono Sastroatmodjo ditentukan pula oleh identitas bersama yang dimiliki masyarakat.[117] Artinya, untuk menguatkan identitas bahwa Partai NasDem bukan partai Nasionalis yang sekuler, kegiatan keagamaan menjadi hal yang perlu dilakukan. Partai yang sekuler tidak mungkin dapat mengintegrasikan kegiatan yang berisifat religius pada kegiatan kepartaian. Sebab menurut pemahaman sekulerisme, agama merupakan urusan pribadi yang tidak boleh campur aduk dengan urusan publik seperti kenegaraan. Partai NasDem bukan partai sekuler, karena itulah Partai NasDem mengupayakan kegiatan ritual keagamaan boleh menjadi kegiatan DPW Partai NasDem Jawa Timur.

Dimensi religius tidak lepas dari karakter dan budaya yang ingin dibangun oleh Partai NasDem. Dimensi religius melekat pada masing-masing pemimpin di masing-masing tingkatan. Penyampaian misi religius dilakukan melalui media-media, baik langsung seperti rapat maupun kegiatan-kegiatan partai. Kegiatan-kegiatan partai memang tidak lepas dari dimensi-demensi religius baik itu model-model yang seremonial maupun model pesan (tausiyah) kepada kader misalnya dalam membangun budaya partai, semua kader Partai NasDem harus amanah, harus jujur harus dapat di parcaya.[118]

Pesan dimensi religius tidak pernah ditinggalkan dalam momentum-momentum partai, baik kegiatan seremonial, pengkaderan maupun acara

[117] Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), 228.
[118] Wawancara dengan Lutfi, Ketua DPD NasDem Kabupaten Kediri, bertempat di rumah kediamannya di Kediri pada pukul 21.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rapat partai. Kegiatan-kegiatan yang diselipkan pada acara tersebut misalnya ada acara pengajian, tahlilan dan lain sebagainya. Dengan upaya ini masing-masing individu nyata membentuk identitas kesepahaman bersama. Selain itu, terkait pembentukan identitas bersama menurut Ramlan Surbakti mencakup identitas primordial, sakral, personal, dan civilitas.[119] Faktor primordial antara lain berupa kekerabatan, kesukuan, kebahasaan, kedaerahan, dan adat istiadat yang diramu dari kultur keindonesian dan kejawatimuran.[120]

Dengan demikian ketika seseorang mengeskpresikan perilaku politiknya, kemungkinan yang bersangkutan menyandarkannya kepada faktor kekerabatan, satu suku, bahasa, daerah, dan adat istiadat. Faktor sakral pada umumnya didasarkan karena keagamaan yang sama. Dengan demikian, adanya pluralitas agama dan corak pemikiran keagamaan dalam suatu agama dengan sendirinya dapat pula membentuk identitas bersama kepartaian NasDem Jawa Timur.

Penguatan identitas bersama partai melalui ritual keagamaan merupakan cara untuk menguatkan struktur partai yang didasarkan kepada pengakuan pada keEsaan Tuhan. Amanah AD/ART tersebut menandakan adanya dorongan untuk menselaraskan semangat ke-Tuhanan dengan identitas perjuangan Partai NasDem. Dengan kata lain, seluruh perjuangannya didasarkan juga pada semangat nilai universalitas keyakinan

[119] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010. 44-47.
[120] Kultur Jawa Timur dibentuk oleh dua Suku Besar yaitu Jawa dan Madura.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada ajaran agamanya.[121]

Penegasan pada terbentuknya identitas bersama juga dilakukan dengan mengupayakan dimensi simbolik melalui direkrutnya beberapa tokoh agama sebagai agen penggerak partai. Hal ini sebagaimana diungkap oleh Faida;

> Kebetulan insan-insan di Partai NasDem ini, saya melihatnya merupakan insan-insan yang agamis, senior-seniornya juga agamis sehingga dalam arah perspektif simbolik maupun subtantifnya saya lihat sangat nyata untuk NasDem Jawa Timur meskipun ini partai yang nasionalis.[122]

Religiusitas Partai NasDem bisa dilihat pada tokoh-tokoh Senior Jawa Timur yang cukup representative dalam menyuarakan nilai-nilai agama. Tokoh menjadi pembawa perspeketif simbolik maupun substantif nilai-nilai religi yang bisa dilihat oleh masyarakat umum. Karena bagaimanapun seorang pemimpin termasuk politisi harus membawa kemanfaatan pada publik berdasar pada ajaran agama tentunya. Kebijakan pemimpin arahnya adalah untuk kemaslahatan rakyat.

Pemahaman tentang hal ini, nampak sangat berkaitan dengan pembentukan struktur yang juga menekan pada kekuatan agen dalam mereproduksi struktur partai. Situasi yang demikian ini sebagaimana yang

---

[121] Yang dimaksud dengan ajaran universalitas pada konteks ini adalah ajaran semua agama, bukan hanya satu agama saja. Religius Partai NasDem tidak hanya di dominasi oleh agama tertentu yang saling monopoli. Ajaran agama manapun menopang kehidupan beragama, tidak bisa ajaran agama tertentu menjadi dasar dari segala tindakan politik. Tetapi ruh ajaran agama adalah kebenaran dan kebaikan, jadi kebaikan yang datang dari agama manapun harus diakomodir ke dalam setiap perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini di ungkapkan dalam Wawancara dengan Ketua DPW NasDem Jawa Timur Rendra Kresna pada tanggal5 Mei 2017 pukul 14.00 di Kantor Bupati Malang.

[122] Wawancara dengan dr. Faida MR, Bupati Jember yang diusung partai NasDem sekaligus Dewan Pertimbangan DPW NasDem Jawa Timur, bertempat di Pendopo Kabupaten Jember pukul 11.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diungkapkan oleh Giddens bahwa agen berdialektika dan melahirkan kompromi politik baru. Dengan demikian, struktur Partai NasDem merupakan pola yang digunakan oleh hubungan antara momen dengan totalitas untuk mengekspresikan dirinya dalam reproduksi sosial.[123]

Untuk memperkokoh orientasi dimensi religius ritual simbolik dalam hal pembetukan identitaas bersama ini, Partai NasDem juga mengembangkan seperangkat nilai substansi riligius sebagai dasar jargon politik dan seperangkat norma tindakan kader partai. Yang demikian ini diupayakan sebagai pengikat sekaligus dan sebagai pemberi dorongan pada terbentuknya tindakan agen Partai NasDem.

Jargon gerakan politik Partai NasDem yang sangat termashur adalah "Restorasi Gerakan Perubahan". Jargon ini merupakan kalimat yang selalu didengungkan kepada para agen agar dapat dijadikan sebagai alat pendorong terciptanya perubahan. Slogan ini biasanya dibahas dengan diintegrasikan pada ajaran-ajaran agama. Beberapa diantaranya sebagaimana yang dibahas oleh Aminur Rohman;

> Kalau berbicara restorasi gerakan perubahan, itu sangat berhubungan dengan ajaran agama. Banyak kader yang hafal dalil seperti *lā yughoyyirumā biqaumin hattā yughoyyirūma bi anfusihim.* Sebagaimana dalil agama yang menegaskan gerakan perubahan yang disebutkan oleh pak Rendra dalam pidatonya hari ini. Selain itu juga ada yang menyebutnya restorasi perubahan didasarkan pada ajaran agama yang mendorong kehidupan manusia harus lebih baik dari hari kemarin. Ajaran seperti ini sering kita dengan dari para mubaligh dalam saat melaksanakan kegiatan Muharron dan Maulid Nabi lalu Halal bihalal kemudian selain itu ada kegiatan khotmil Qur'an tapi ini tidak simbolik tapi subtansif, subtansinya ada di

[123] Sebagaimana yang dikatakan tentang dualitas struktur. Dalam, Anthony Giddens, *Problematika Utama Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Terjemahan oleh Maufur dan Daryanto. (2010. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1984).124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diklat Partai NasDem.[124]

Ada juga yang menyebutnya bahwa slogan restorasi perubahan didasarkan pada ajaran substansi profetik agama Islam. Perubahan yang dilakukan Partai NasDem disearah pahamkan dengan ajaran spirit hijrahnya nabi. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Dewa, anggota DPR-RI Fraksi Partai NasDem;

> Kalau kita ngomong gerakan perubahan, hijrah itu kan sudah jadi sunnahnya rasul hijrah kepada kebaikan yang di implementasikan sendiri, kita sudah punya pegangan untuk berubah lebih baik ini aja sudah sejarahnya kanjeng nabi, ya sudah sangat religi menurut saya kan gitu.[125]

Perubahan yang menjadi konsen diskursus Partai NasDem adalah sunnah dalam warisan Rasulullah. Hijrah kearah yang lebih baik sebagai tradisi dalam agama. Maka restorasi partai berbasis nasionalis-religiuas tersebut akan membawa arah kebangsaan yang dibawa oleh nilai-nilai keagamaan. Perubahan kearah yang lebih baik, jadi nilai-nilai keagamaan yang dipraktekkan Rasullulah menjadi nilai-nilai dalam berpolitik. Dengan tujuan individu sendiri dituntut untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Sebagaimana semua *mafhūm* bahwa dengan sikap profetik akan mendorong manusia untuk menjadi agen perubahan dengan nilai-nilai warisan Rosulullah. Sikap profetik akan menciptakan manusia kamil yang

---

[124] Wawancara dengan Aminur Rohman pada tanggal 8 April 2017 Sekretaris DPW Partai NasDem Jawa Timurdi Kantor DPW NasDem Jl. Pertiwi Surabaya.

[125] Wawancara dengan Dewa pada tanggal 22 April 2017, Anggota DPR-RI Partai NasDem dapil Jawa Timur sekaligus wakil ketua pemuda dan olah raga DPW Partai NasDem Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berguna bagi dirinya dan masyarakat.[126] Jadi, Partai NasDem memilih penegasan slogannya tersebut didasari dengan nilai-nilai agama substantif yang bukan hanya pada penegasan identitasnya. Akan tetapi, juga entitas dalam struktur budaya politiknya.

Penegasan nilai-nilai religius yang demikian ini juga disampaikan oleh korwil DPW Partai NasDem Jawa Timur;

> Menjadi kader NasDem ini berniat ibadah dan itu religi, masuk partai bukan semata mencari kekuasaan, atau bersifat sekuler dan kekuasaan bersifat fisik. Tapi diniati ibadah, karna partai itu mengurusi banyak orang dan pada akhirnya mengurus bangsa dan Negara. Kedua, Dalam sekolah kader juga dikemukakan bahwa menjadi kader itu harus ikhlas, jangan karena ingin dapat gengsi, kehormatan, balas budi, balas jasa itu tidak boleh, harus ikhlas berkurban, tidak berpretensi datang ke partai ingin mendapatkan jabatan dll. Ini diajarkan oleh pak Surya niat ibadah ikhlas, berkorban, setia kawan, *ta'āwanū 'alā al-birri wa al-taqwā walā ta'āwanū 'alā al-istmi wal 'udwān*, ini semua ajaran Islam niat ibadah dan ini saya tanamkan terus ketika dalam saya berpidato.[127]

Pernyataan yang demikian ini menandakan bahwa dimensi religius dalam pendidikan Partai NasDem mendorong adanya ajaran-ajaran substantif keagamaan menjadi fondasi dasar perjuangan gerakan perubahan yang didengungkan. Ajaran substantif universal dititik tekankan sebagai ruh perjuangan struktur partai agar dapat menguatkan tindakan perjuangan politisi partai NasDem. Maksud dari menguatkan dapat dijelaskan sebagai dorongan yang menggerakkan dan memberikan kesempatan agen untuk mengupayakan tindakan kearah perubahan yang lebih baik. Pada kontek ini, adanya pengembangan dimensi substansif religius berorientasi sebagai

[126] Zakiyah Daradjat. dkk., *Ilmu Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 29.
[127] Wawancara dengan Korwil Jatim DR. Effendi Choirie pada hari minggu, 18 Maret 2017 pukul 08.00 di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

enabling tindakan kader agar mampu dan termotivasi untuk selalu melakukan perubahan.

Hal ini memberikan bukti bahwa struktur Partai NasDem melalui Dimensi religiusnya dapat berperan sebagai norma aturan yang mengikat dan juga injeksi semangat pemberdayaan. Yang demikian ini persis sama dengan apa yang diungkapkan oleh Giddens dalam teori strukturasinya.128 Selain selogan ini, Partai NasDem juga memiliki slogan Politik Tanpa Mahar. Slogan ini tentunya juga merupakan seperangkat aturan yang mengikat tindakan agennya. Dasar substansi ajaran agama dalam slogan yang demikian ini adalah ketaatan pada menjaga moralitas politik.129 Sudah semua tahu bahwa realitats perpolitikan di Indonesia dipenuhi dengan konsepsi mahar dalam perebutan kekuasaan. Padahal secara de jure, mahar politik dilarang oleh hukum positif negeri ini. Adanya mahar dalam politik tentu dipahami bersama sebagai hal yang akan menyebabkan political cost sangat tinggi. Akibatnya, untuk memenuhi hal ini banyak politisi yang menggunakan cara imoral seperti melakukan korupsi besar-besaran. Tindakan ini yang kemudian melahirkan banyak pemimpin yang tidak amanah terutama dalam menyelasaikan tugasnya. Dengan kata lain, banyak pemimpin yang tidak jujur dan korup dalam menjalankan tugasnya.

Masuknya dimensi substansi religius pada slogan politik tanpa mahar diposisikan sebagai constraining struktur yang mencegah tindakan immoralitas agen terjadi. Dengan demikian, lengkap sudah penjelasan

[128] Menurut Gidden, struktur berisikan aturan dan pemberdayaan. Priyono menyebutnya sebagai *rules and resources*. Baca, B. Herry Priyono, *Anthony Giddens, Sebuah Terobosan* 19-20.
[129] Moralitas politik yang dimaksud adalah moralitas hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait orientasi beberapa dimensi religius dalam pembentukan struktur agen di pembahasan ini. Berdasarkan semua penjelasan di atas, dapat dikonklusikan bahwa adanya kedua dimensi yang ada dalam pendidikan politik Partai NasDem diorientasikan pada pemaksimalan constraining dan enabling tindakan agennya.

Pada sisi pengaturannya terletak pada adanya seperangkat aturan yang mengikat seperti AD/ART dan slogan yang merupakan rambu tindakan agen. Sedangkan pada sisi pemberdayaannya, terletak pada injeksi nilai yang berbentuk dorongan tindakan yang didasarkan pada agama. Salah satu contohnya sebagaimana dasar agama yang dijadikan sebagai ruh nilai dalam slogan “restorasi gerakan perubahan”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

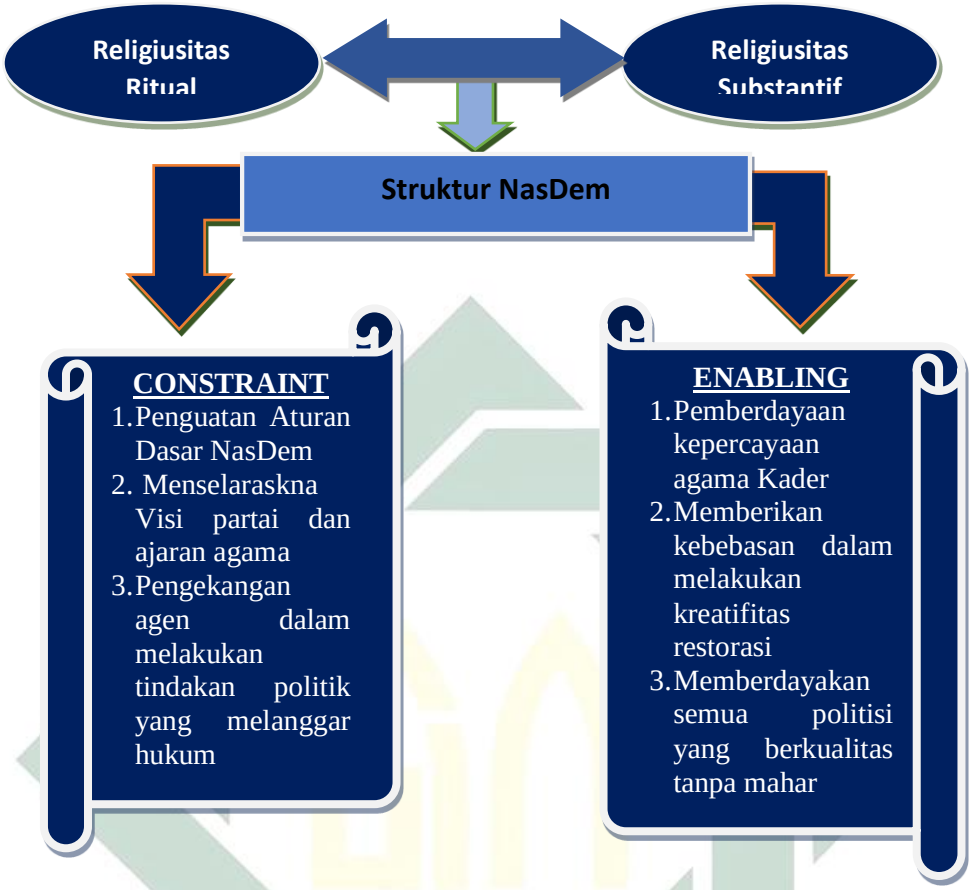

Gambar 4.5
Orientasi Nilai Religius Pada Struktur NasDem

C. Implikasi Penerapan Dimensi Religius dalam Pendidikan Politik Partai NasDem Jawa Timur

Pembahasan ini ditujukan untuk menggambarkan realitas yang terjadi setelah dilaksanakan oleh Partai NasDem sebagai upaya untuk memperkuat struktur dan agennya dalam mereproduksi ulang struktur sosial realitas dunia politik dewasa ini. Pada sisi ini peneliti tetap akan memakai strukturasi Giddens agar dapat secara penuh menggambarkan proses strukturasi di dalam maupun luar partai yang terjadi. Secara umum–baik pada sisi struktur maupun agennya– berdasarkan temuan, nampak mengarah pada terciptanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

struktur dan agen menjadi satu karakter yakni Nasionalis-Religius.

1. Implikasi Pada Fungsi Struktur Partai NasDem Jawa Timur (*Constraining and Enabling Structur Contextual*)

Struktur Politik Partai NasDem Jawa Timur adalah pelembagaan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan itu. Struktur politik sebagai satu spesies struktur pada umumnya, selalu berkenaan dengan alokasi-alokasi nilai yang bersifat otoritatif yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan orang-orang yang berwatak Nasionalis Religius. Kekuasaan adalah sebuah kapasitas, kapabilitas atau kemampuan untuk mempengaruhi, meyakinkan, mengendalikan, menguasai, memerintah orang lain dan menguasai publik.[130] Kapasitas demikian erat hubungannya dengan wewenang *(authority)* Hak (*right*), dan kekuasaan *(force, naked power).* Pada sektor ini, dimensi religusitas yang dikembangkan oleh Partai NasDem diupayakan sebagai nilai yang dapat menyanggah *constraining* strukturnya sebagai konsensus yang mengikat pada element di dalamnya.

Partai politik yang notabene dihuni sekelompok politikus haus kekuasaan sesungguhnya tak peduli akan kebaikan bagi orang lain. Mereka hanya peduli pada kekuasaan itu sendiri. Tujuan akhir mereka setelah berkuasa hanyalah mendatangkan keuntungan bagi diri mereka sendiri atau kelompok mereka. Masa bodoh dengan rakyat.

Sebagai contoh, pada 21 Mei 1998, dua puluh satu tahun silam,

[130] Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik*, (Malang: SETARA press, 2009), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soeharto mundur dari puncak kekuasaan yang digenggamnya erat-erat selama 32 tahun. Itu sekaligus menandai berakhirnya rezim Orde Baru yang korup dan otoriter. Rezim yang disokong militer dan birokrat itu secara formal tutup buku. Reformasi digulirkan. Rakyat berharap akan perubahan menuju masa depan bersama yang lebih baik. Tapi apa lacur?

Sejak kejatuhan Soeharto lebih dua windu lalu, empat pemilu dan lima presiden telah datang dan pergi. Namun, perubahan yang digadang-gadang itu tak kunjung terjadi. Rakyat masih terjepit kesulitan hidup. Kesejahteraan ekonomi masih angan-angan. Penegakan hukum secara adil masih jadi impian. Keadilan sosial masih hanya retorika. Sementara, para politikus busuk sibuk menggarong uang negara dan bertengkar sesama mereka demi kekuasaan. Begitu busuknya aroma para politikus di parlemen sehingga mereka membutuhkan anggaran lebih dari 2 miliar setahun hanya untuk pewangi ruangan. Persetan nasib rakyat yang dibelit kemiskinan dan harus terlunta-lunta mencari keadilan seperti para petani Kendeng. Bahkan, yang baru terungkap, triliunan dana untuk proyek raksasa KTP elektronik pun diembat dan dijadikan bancakan beramai-ramai oleh para politikus terhormat dan pejabat terpelajar di jajaran eksekutif dan parlemen. Jika Pramoedya Ananta Toer pernah menulis bahwa seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, mereka itu justru sudah korup sejak dalam pikiran. Padahal, seperti yang juga pernah dinyatakan Pramoedya dalam novel Bumi Manusia, Semakin tinggi sekolah bukan berarti semakin menghabiskan makanan orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harus semakin mengenal batas.[131]

Batas-batas tersebut akan dikenal bila legitimasi politik telah menghasilkan para aktor-aktor religius dan berpolitik, hilangnya agama dalam percaturan politik sebagian dipengaruhi oleh hilangnya orang-orang religius dalam politik, sehingga partai politik semakin krisis orang-orang baik dan sebaliknya partai politik semakin dibanjiri oleh orang-oarang yang haus kekuasaan dan tidak bermoral,

Penjelasan ini tentu merupakan indikasi struktur politik yang tidak lagi mampu memproduksi para aktor-aktor unggul sekaligus tidak mampu menjadi moral force dalam memberantas kebiadaban dalam politik dan memberi jaminan kemaslahatan pada ummat. Seluruh kegiatan kader diyakini sebagai aksi moralitas etis ketuhanan, sehingga semua amanah yang mereka miliki akan mendapat tanggung jawab dari Tuhan.[132]

Problem yang demikian ini tentu merupakan sisi akut yang harus cepat-cepat diatasi oleh partai politik. Legitimisi struktural partai yang seharusnya juga mengambil peran dalam penanggulangan masalah tersebut. Untuk melakukan upaya ini, salah satu yang dapat digunakan dalam meredam tingginya moralitas politisi partai adalah mengupayakan legalitas struktur yang berdasar pada dimensi religius manusia.

Adapun yang nampak diupayakan oleh struktur Partai NasDem Jawa Timur untuk membendung dunia politik yang carut marut ini, pada

---

[131] Pramodaya Ananta Toer, *Bumi Manusia*,(Jakarta:Hasta MItra,1980), 135.
[132] Sebagaimana yang Azra jelaskan bahwa kekuasan dan kedudukan politik adalah yang akan mintai pertanggung jawaban. Lihat. Azyumardi Azra, *Kesalehan Priyayi…*, xxvii-xxix.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sisi constrainingnya ialah pertama, penanaman nilai agama sebagai landasan aturan partai. Artinya, dirumuskan beberapa aturan harus juga didasari dan diimani degan kepercayaan kegunaan yang substantif. Dengan kata lain, secara formal struktur keimanan pada Tuhan harus menjadi ruh seluruh varian aturan struktur Partai NasDem Jawa Timur.133 Kedua, semangat restorasi yang memadukan nilai Pancasila yang humanis dan nilai agama. Nilai agama selalu dikait eratkan dengan semangat gerakan dan perjuangan partai. Masuknya dimensi religisuitas pada semangat Pancasila menjadikan struktur Partai NasDem Jawa Timur melahirkan kebijakan yang humanis dan religius.

Pada sisi humanisnya, Partai NasDem Jawa Timur menjadi partai yang selalu ingin tampil dalam perlawanan kebijakan politik yang tidak pro pada kepentingan rakyat. Bagaimana pun caranya, Partai NasDem Jawa Timur berkomitmen untuk terus pengawal perubahan yang manusiawi. Salah satu implikasi nyatanya sebagaimana yang terjadi di Bondowoso.

Kader NasDem Bondowoso sedikit demi sedikit berusaha mengamalkan visi dan misi partai, meskipun yang di DPR hanya 3 kursi tidak nyampek satu komisi karena dalam satu komisi harus ada 6 DPR. Jadi di Bondowoso hanya dapat 3 kursi maka dari itu harus bergabung dengan Gerindra untuk jadi satu komisi karena partai Gerindra juga memiliki 3 kursi. Kualisi Partai ini disebut koalisi Gerindra & NasDem

[133] Misalnya sebagaimana disebutkan di atas, dalam AD/ART Partai NasDem kepercayaan pada kuasa Tuhan yang Esa, menjadi hal dasar dalam perumusan dan gerak institusional Partai NasDem.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(GRANAD). Adanya koalisi ini sebagai cara dalam memperjuangkan arah gerakan perubahan yang telah digaungkan oleh NasDem. Menurut Malik Sanusi, GRANAD secara lantang dalam beberapa musyawaarah dengan berani melawan dan menolak kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat.[134]

Hal yang demikian ini juga dijelaskan oleh Amin. Ia mengatakan Perjuangan untuk rakyat, bangsa dan negara masih terus berlangsung, dan bukan tidak mungkin halangan dan hambatan selalu menghadang. Namun semangat dan jiwa restorasi yang kuat tertanam diyakini akan mampu menembus segala rintangan yang ada. Maka di awal tahun ketiga Fraksi Partai NasDem, Kader masih tetap menggelorakan Restorasi Tiada Henti. Lebih lanjut Amin menyampaikan bahwa :

> Saya memerintahkan pada semua kader ketika ada di tengah-tengah masyarakat kalau ada masyarakat yang butuh bantuan segera, contohnya ada orang sakit tanpa berbicara apapun langsung dibawa kerumah sakit kalau yang tidak mampu, kalau orang mampu bisa sendiri donk kalau orang tidak mampu membutuhkan sampai di rumah sakit ditelfonkan anggota DPRD ketepatan yang satunya komisi D kan langsung dapat pelayanan yang baik ini kan contoh konkrit kan, ini yang kedua teman-teman membantu masyarakat yang anak-anaknya tidak bisa sekolah mereka mencarikan jalan agar bisa masuk sekolah ini contoh-contoh kecil yang di terapkan oleh teman-teman di wilayahnya, yang ketiga saya minta keteman-teman atau kader NasDem yang ada di bawah tingkat paling bawah itu ranting untuk selalu melakukan adaptasi dengan masyarakatnya ketika melakukan apapun kerja bakti turun ke bawah, Jadi, teman-teman jemput bola. Mereka harus humanis secaara aktif menghadapi problem masayrakat.[135]

Sedangkan pada aspek religiusitasnya, Partai NasDem Jawa Timur

---

[134] Wawancara dengan KH. Malik Sanusi pada tgl 25 Februari 2017 dirumah kediamannya kabupaten Bondowoso.

[135] Wawancara dengan Sekretaris Partai NasDem Jatim Aminur Rohman pada tanggal 8 April 2017 di kantor NasDem Jawa Timur Jl. Kartini no. 88 Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selalu menghubungkan amanah restorasi dengan perintah agama. Di beberapa sosialisasi amanat gerakan restorasi, beberapa pimpinan Partai NasDem selalu menghubungkan materi sosialisasinya dengan semangat perjuangan agama. Sebagaimana yang dijelaskan di awal bahwa beberapa pimpinan seperti Rendra Kresna, Nico, dan A. Effendy Choirie dalam menjelaskan restorasi selalu mengutip ajaran agama,[136]

Ketiga, gema aturan formal struktur "politik tanpa mahar". Pada sisi ini Partai NasDem tampil sebagai partai yang mendidik dan membuat aturan pencegahan terhadap keserakahan para politisinya. Partai NasDem Jawa Timur nampak mau melakukan perlawanan pada persepsi masyarakat yang sejak awal menganggap politik mahal harganya.

Menurut Dewa, Partai NasDem memang menggunakan politik tanpa mahar. Maksudnya, jika sebelumnya caleg yang mau duduk ingin menduduki kursi masih bayar dengan angka yang ditentukan. Kali ini di Partai NasDem tidak. Menurutnya, jika budaya lama yang demikian itu masih dilestarikan, tidak menutup kemungkinan akan banyak sisi mafsādatnya. Para Caleg yang sudah banyak mengeluarkan uang, dan ujung-ujungnya setelah jadi akan mengembalikan modal itu. Hal tersebut akan sangat merugikan rakyat, ada potensi munculnya tindakan korupsi. Dari itu kemudian Partai NasDem mengupayakan bagi setiap orang yang berkompetisi, cukup partai memverifikasi kualitas kemampuan, komitmen,

[136] Observasi kegiatan Partai NasDem DPW Jatim seperti kegiatan pendidikan politik, konsolidasi kemenangan dan tentunya dalam beberapa kegiatan besar keagamaan seperti Natal dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggung jawab, dan loyalitasnya terhadap partai.[137]

Partai NasDem mengedepankan politik tanpa mahar. Partai NasDem menjadi pioner bagi partai lain dan pelan-pelan akan mengubah pemahaman masyarakat bahwasanya politik tidak hanya identik dengan uang atau istilah lain membeli suara pada saat pemilu. Untuk menepis pemahaman dan anggapan masyarakat yang mengatakan politik menghalalkan segala cara dalam mendapatkan suara atau dukungan. Politik tanpa mahar Partai NasDem ditujukan sebagai cara bijak untuk menekan kemunculan politik yang tidak bermoral. Artinya, acuan kerja politik para agen bukan lagi terkekang tanggungan mahar politiknya. Akan tetapi, lebih pada penguatan aturan politik yang lebih memprioritaskan moral side para agennya.

Pendidikan politik berdimensi religius pada sisi ini lebih menekankan pada terciptanya sebuah kewajiban moralitas politik dari pada loyalitas material kepartaian. Struktur Partai NasDem nampak membentuk dan mengarahkan para agensinya untuk keluar dari iklim politik yang sudah terbangun sebelumnya. Mau tidak mau dan tidak boleh tidak, untuk aktif di dunia politik, Partai NasDem melarang mereka untuk mengeluarkan atau mentrasaksikan keputusan dan kebijakan politiknya.

Implikasi yang mengedepankan militansi dari pada mahar politik membuat Partai NasDem menjadi partai dengan sistem proporsional terbuka. Zulfikar, Ketua DPD NasDem kota Probolinggo, menyatakan

[137] Observasi, Rapat DPW Jatim penetapan Persayatan Calon 06/05/2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa dari materi, sistem dan tujuan sekolah kader yang dilakukan Partai NasDem sangat baik untuk anggota Legislatif, tetapi sebagian besar masih 20% yang peduli kepada partai. Salah satu penyebab tidak pedulinya kader kepada partai adalah kurangnya komunikasi antara pengurus dengan kader, pengurus dengan pengurus, dan kader dengan kader. Oleh sebab itu, usaha yang dilakukan oleh Partai NasDem Jawa Timur selama ini baik dari pengurus dan ketua Partai NasDem menjalin komunikasi yang instens, artinya, Partai NasDem Jawa Timur menggunakan sistem politik yang mengandung proporsional terbuka. Hal ini memberikan kesan meskipun bukan asli kader Partai NasDem akan tetapi kalau memiliki militansi dan ikut memperjuangkan Partai NasDem bagaimana awalnya terbentuk, boleh masuk dan berproses politik melalui Partai NasDem Jawa Timur.

Darsono selaku ketua DPD Partai NasDem kota Surabaya mempertegas tentang implikasi dimensi religius dalam pendidikan politik yang berbasis pada nilai-nilai religius, bahwa politik Partai NasDem tidak bisa ditukar dengan apapun, hal ini jelas orang yang baik dan berkomitmen pada Agama, Negara dan Bangsa mendapat tempat dihati Partai NasDem, sehingga dalam proses politik di Partai NasDem tidak dikenal dengan politik Mahar tetapi politik tanpa mahar, sehingga ikatan yang tanpa mahar tersebut sebagai jaminan atas siapapun generasi Bangsa memiliki peluang sama dalam membangun Bangsa bersama Partai NasDem, Menurutnya;

> Politik tanpa mahar saya kira NasDem menjadi pionir untuk politik tanpa mahar yang tidak dilakukan oleh partai-partai lain salah satu contoh saja kalau saya secara pribadi pernah diminta'in rekom calon wali kota dikasik duit lah inilah bedanya Partai NasDem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dengan partai yang lain, yang kedua saya tau betul kalau masalah duit itu urusan di belakang. Jujur mbak DPR bukan tujuan utama bagi saya berpolitik ketika di kumpulkan dan ditanya oleh Gus Choi sampean nyaleg dimana jadinya dipaksa kalau saya pengen jadi DPR dari dulu sudah jadi DPR, untuk menepis anggapan masyarakat tentang politik yang mengatakan politik itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dukungan, cara yang dilakukan NasDem dengan berperilaku sopan dan berakhlak, karena sopan dan berakhlak suatu tata cara bagaimana menghormati dan menghargai masyarakat.[138]

Demi terseleksinya calon yang didasari pada aspek moral (bukan maharnya) Saat ini menurut Lutfi proses pendaftaran caleg berlangsung selama dua tahun, tentu partai menginginkan kader-kader yang sesuai dengan visi dan misi partai. Menurutnya :

> Saya kira ini bagus karena proses pendaftaran dua tahun sehingga kita bisa menyeleksi orang yang cinta NasDem ketika masuk kita lihat prilakunya apakah bisa mengikuti irama NasDem dan saya kira cukup waktu itu untuk meNasDemkan orang yang tidak NasDem ketimbang orang yang NasDem tapi orangnya tidak NasDem hanya namanya NasDem tapi tidak NasDem, tapi ketika mendaftar sebagai caleg berarti dia niat untuk berNasDem dan kita tinggal mengevaluasi melihat, menilai dalam proses sampai caleg ini bercaleg sampai caleg seperti apa mereka apa betul-betul NasDem yang jelas pelajaran-pelajaran politik di NasDem itu bisa didapat. Kalau dulu mungkin cuma 3 sampai 4 bulan.[139]

Aturan terkait penjelasan yang dipaparkan Lutfi di atas, menunjukkan begitu kuatnya orientasi moral seleksi calon agen politisi NasDem yang ingin mencolonkan diri. Partai NasDem nampak ingin mengupayakan secara serius setiap individu yang diusungnya. Tentunya yang dipertimbangkan adalah aspek-aspek moral perilakunya tersebut.

---

[138] Wawancara dengan Darsono ketua DPD Partai NasDem Kota Surabaya bertempat di kantor DPW Partai NasDem Surabaya pada tanggal 22 Maret 2017.

[139] Wawancara dengan Lutfi, Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Kediri, bertempat di rumah kediamannya di Kediri pada pukul 21.00. pada tanggal 18 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada aspek ini, constraining Struktur Partai NasDem Jawa Timur benar-benar menjadi norma yang mengikat. Pengurus sebagai pelaksana dari struktur partai melaksanakan tugas partai sesuai dengan amanah partai. Tidak ada istilah potongan atau ongkos jasa di NasDem. Kader Partai NasDem sudah sangat menghormati jargon dari NasDem itu sendiri dan suatu misal ada sumbangan, maka kader tidak pernah menekan untuk memberi seikhlasnya kalaupun tidak memberi kader tidak pernah mempermasalahkan.

Keempat, terciptannya contraining norma etis struktur dalam politik. Dalam hal ini, pendidikan politik religius agen membentuk konsensus moral etis yang mengikat tindakan agen. Etis yang dimaksud dalam hal ini adalah terkait moralitas politik yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun yang menjadi bagian dari Partai NasDem. Dimensi agama yang ada dalam memberikan kekuatan struktur dalam mengikat moralitas para kader. Nilai agama dengan seperangkat orientasi moralnya menjadi dasar dikuatkannya persepsi agen terkait perbuatan tercela yang ada di partai.

Seperangkat nilai religius mampu tampil sebagai standar tindakan berpolitik. Agen Partai NasDem harus memiliki moralitas publik sosial. Moralitas public yang berdasarkan nilai substnsi agama menjadi batasan tindakan agen dalam melakukan aktifitas politiknya. Setiap agen yang melanggar aturan moral secara tegas akan dikeluarkan dari keanggotaan agen Partai NasDem. Yang demikian ini tentu merupakan constraining

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tegas sebagai struktur Partai NasDem dalam menjaga moral etis pada politisinya.

Pada persoalan ini, salah satu implikasi realnya adalah diwajibkannya seluruh agen untuk membuat pakta interitas bagi setiap politisi yang ingin berkarir di Partai NasDem tanpa terkecuali. Setiap orang yang ingin bersama dalam dunia politik bersama Partai NasDem, harus menyepakati dan berjanji tidak akan melanggar pakta integritas itu. Pakta integritas Partai NasDem Jawa Timur berisikan konsensus aturan moral yang harus ditaati oleh siapapun yang ingin melakukan kegiatan politik melalui partai. Isinya adalah terkait moralitas publik yang terdiri dari ketaatan terhadap hukum dan publik etis.

Menurut Jeaned Sudjunadi, pakta integritas itu menegaskan agar seluruh kader taat hukum dan tetap menjaga sikapnya sebagai politisi. Mereka harus memiliki komitmen kuat untuk tidak melakukan kecacatan moral politik. Jika melanggar, mereka harus siap mengundurkan diri atau dipecat dari kepengurusan dan sebagai politisi NasDem.[140]

Berdasarkan hal ini, constraining yang terstruktur terasa sangat kuat dan mengikat. Pendidikan politik yang diselenggarakan benar-benar menciptakan struktur dengan constraining kuat pada penegakan moralitas agennya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dimensi agama menjadi pondasi kebertahanan kuasa struktur pada aspek penguatan etika politik agennya.

[140] Wawancara, Jeaned Sudjunadi tanggal 15 Juni 2017 di Hotel Elmi Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun terkait kontekstual enabling pada strukturnya, pendidikan politik Partai NasDem juga nampak memberikan kemerdekaan ruang dan waktu pada agennya. Seluruh politisi Partai NasDem Jawa Timur diberdayakan potensi dan kemampuannya dalam melakukan perubahan. Nuansa religius cukup mengakomodir dan tentu juga mencerahkan (tidak mengekang) pengembangan dan pengetahuan yang dimiliki mereka. Dengan kata lain, struktur Partai NasDem Jawa Timur yang dilahirkan dari resapan pengetahuan dan kesadaran pendidikan politik yang dilakukan, juga mampu menghasilkan struktur pemberdayaan kemampuan kader dalam melakukan tindakan.

Implementasi pendidikan politik berdimensi religus Partai NasDem Jawa Timur memberikan pemberdayaan pada terciptanya agen yang sama mengembangkan unsur kemampuan agennya. Pertama, menumbuhkan dan merawat keyakinan agen terkait keTuhanan yang maha Esa. Sisi ini terletak pada pengakuan Partai NasDem terkait kepercayaan agama dalam aturan formil yag telah dirumuskannya. AD/ART Partai NasDem Jawa Timur yang berselaras dengan sila pertama, mengakui dan memberikan kebebasan untuk mengekspresikan politik dengan landasan kepercayaannya pada Tuhan yang maha Esa.

Letak enablingnya adalah terletak pada dibukanya pintu lebar-lebar dalam mendasari gerakan politiknya pada Tuhan kepercayaannya. Semua dapat mafhum bahwa dasar ke-Esaan Tuhan pada konteks ini bukan dijuruskan pada kepercayaan satu agama saja. Akan tetapi, membuka pintu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selebar-lebarnya pada semua agama yang percaya Tuhan itu esa. Bangsa Indonesia memiliki akar kepercayaan monoteisme (bukan panteisme) yang meyakini Tuhan adalah satu-satunya Dzat yang mulia dan disembah.[141]

Kayakinan agen pada agamanya tidak dikerangkeng dan diarahkan pada satu agama, Partai NasDem menghormati bahkan mendorong penanaman nilai ajaran agama dari kepercayaan mereka masing-masing. Sisi ini, Partai NasDem ingin mengupayakan pengembangan kepercayaan agama keder-kadernya agar dapat menjadi ruh pengabdian dan perjuangannya di partai politik.

Melalui konsensus mempertemukan kepercayaan ke-Esaan Tuhan para agen. Partai NasDem Jawa Timur mengupayakan pemberdayaan teoantroposentri keagamaan pada wilayah perjuangan partai. Teoantroposentris ini berorientasi melahirkan konsepsi perjuangan agen yang tidak harus lepas dari kepercayaa pada Tuhan. Ajaran semua agama dapat menjadi ruh perjuangan sosial kemanusian. Itulah kenapa Partai NasDem Jawa Timur memberikan tempat pada reproduksi tindakan agen yang mendasarkan pada kepercayaan agamanya masing-masing.

Adanya pengakuan dan pengupayaan landasan agama ini merupakan wujud struktur Partai NasDem Jawa Timur dalam pembebasan

[141] Pada sisi ini terkait pada penjelasan bahwa panteisme berbeda dengan monoteisme. Panteisme meyakini alam semesta, termasuk manusia, merupakan sebagian dari Allah. pandangan ini adalah sesuai dengan pengalaman manusia tentang kesatuan fundamental dari segala yang Ada. Menurut politeisme terdapat lebih dari satu Tuhan, ini sesuai dengan pengalaman manusia, bahwa alam semsesta mempunyai segi-segi yang berbeda-beda, yang semuanya mencerminkan suatu kekuatan ilahi. Menurut Monoteisme Allah tidak boleh dicampurkan dengan hal-hal dunia, Allah itu satu dan tidak dapat dibagikan kemuliaan-Nya. lihat Theo Huijbers, *Mencari Tuhan: Pengantar ke dalam Filsafat Ketuhanan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengalaman keagamaan agen dalam bertindak politis. Struktur yang demikian memberikan tempat seluas-luasnya pada agen membawa ruh keagamaannya dalam kegiatan partai. Hal ini kemudian yang juga mendasari beberapa agen termasuk pengurus DPW Partai Partai NasDem Jawa Timur menganggap penting penyelenggaraan acara-acara keagamaan yang berorientasi pada pendayagunaan ruh ilahiyah sebagai representasi dari semangat perjuangan agen Partai NasDem.

Hal ini sebagaimana yang dikemukan oleh kordinator wilayah Partai NasDem Jawa Timur;

> Pengakuan pada ke-Esaan Tuhan itu sangat penting sebagaimana dalam sila pertama di falsafah negara ini. Aturan dasar ketuhanan yang maha Esa merupakan konsensus kesepahaman beberapa ajaran agama resmi negeri ini. Kepercayaan pada ajaran agama, baik agama Islam, Kristen dan lain-lain diberikan tempat dalam struktur partai. Bebas diekspresikan dalam tubuh partai. Yang demikian ini tentu agar ruh Tuhan yang mereka yakini masuk menjadi semangat perjuangannya.[142]

Selanjutnya, kedua, enabling semangat restorasi agen. Pandangan hal ini mengacu pada sebuah persepsi bahwa masing-masing agen Partai NasDem memiliki semangat perubahan ke arah yang terus menerus membaik. Pada konteks restorasi gerakan perubahannya, Partai NasDem Jawa Timur memposisikan pengalaman agen sebagai pioneer arus gerak pengupayaan restorasi perubahan dunia politik negeri ini.

Partai NasDem Jawa Timur mempertimbangkan kemampuan kader yang lebih varian dalam melakukan sebuah perubahan yang terorganisir

[142] Wawancara, Jeaneta Sudjunadi di Hotel Ilmi Tanggal 15 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan terarah. Sebagaiman dijelaskan sebaelumnya, agen dengan kemampuan yang variatif untuk membuat perubahan yang komprehensif. Seluruh warga yang memiliki semangat perubahan direkrut oleh Partai NasDem untuk bersama-sama membangun negeri ini. Hal ini misalnya terlihat pada proses rekrutment agen yang biasanya diselenggarakan melalu program "Indonesia memanggil".

Pada kegiatan rekrutmen terbuka, ada materi yang mengambil tema "Indonesia Memanggil (Panggilan Kebangsaan Untuk Perubahan)". Selain berisikan tentang syarat, visi dan misi kepengurusan, materi ini berlatar belakang pembentukan kader yang memiliki prinsip patriotistik dan demokrasi. Dalam konteks latar materinya, memasukkan point tentang keharusan partai politik untuk membuka diri selebar-lebarnya bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam kepengurusan partai.[143] Pada sebuah kesempatan, Gus Choi menjelaskan kepada seorang wartawan bahwa Partai NasDem memberikan wadah seluas-luasnya bagi individu masyarakat yang punya gagasan brilian. Jadi, dengan rekrutmen yang dibuka luas diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi semua orang yang memiliki ide cemerlang untuk negeri ini.[144]

Jadi berdasarkan temuan ini sudah dapat dijelaskan bahwa struktur

---

[143] Kalimat lengkapnya adalah "Partai politik harus membuka diri seluas mungkin dalam sisi kepengurusan dan partisipasi masyarakat". Observasi, materi PPT "Indonesia Memanggil" dipresentasikan oleh A. Effendi Choirie acara 'Sekolah Legislatif' bagi legislator Partai NasDem asal Jawa Timur, di Hotel Inna Simpang Surabaya, tanggal 2/11/2014.

[144] Penjelasan tersebut diterbitkan media pada, "NasDem Buka 'Lowongan' Bagi Masyarakat Umum untuk Kepengurusan di Jatim" https://news.detik.com/berita-jawa-timur/2736737/NasDem-buka-lowongan-bagi-masyarakat-umum-untuk-kepengurusan-di-jatim (03/07/2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepartaian NasDem bukan hanya mengandalkan sistem partai yang dibuat. Akan tetapi, juga menghargai setiap gagasan para anggotanya. Dengan kata lain, gerakan politik yang akan dilakukan juga didasarkan pada ide, pikiran dan harapan para kadernya. Dengan demikian jelas bahwa strukturasi Partai NasDem ditopang dan dilandaskan pada gagasan Indvidu kepengurusan partainya.

Maka pada konteks strukturasi sosialnya tidak berpijak pada anggapan bahwa agen tidak banyak memiliki pengetahuan dan kesadaran. Mereka hanya dibentuk oleh fungsionalitas dari sistem yang ada. Berdasarkan rekrutmen yang dilakukan, malah beranggapan sebaliknya. Hal yang demikian ini sebagaimana yang dikatakan oleh Giddens.[145] Ada kesadaran rasional dari ide pada tindakan yang akan dilakukan setriap Individu pengurus partai. Artinya, sebagaimana yang dikatakan oleh John. B Thompson tentang pemikiran Giddens yang menyatakan bahwa knowledgeable agen dan kapabilitas yang berupa kesadaran untuk memahami tindakannya individu agen sendiri dalam partai sangat dipertimbangkan, bahkan diberikan wadah seluas-luasnya.[146]

Ide dari pengalaman agen digunakan sebagai satu instrument yang siginifikan dalam menyelenggarakan misi restorasi gerakan perubahan Partai NasDem. Gema gerakan perubahan tentu tidak akan terealisasikan tanpa bahan kesadaran bergerak yang dimiliki agen. Kesadaran ini tentunya dari pengetahuan dari pengalaman mereka dalam bidangnya

[145] Giddens mengatakan bahawa pengetahuan merupakan hal yang juga melatar belakangi perilaku sosial yang dilakukannya. Lihat. Anthony Giddens, *Teori Strukturalisasi*, xxxiv.
[146] John. B Thompson, *Analisis Ideologi*, 240-241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing. Pada konteks inilah fungsi enabling Partai NasDem nampak sekali. Semua agen diberikan kebebasan menurut kemampuan mereka sendiri untuk melakukan sebuah perubahan yang lebih baik.

Fungsi enabling yang terakhir, ketiga adalah pemberdayaan kualitas dan loyalitas agen malalui aturan tanpa mahar. Pada konteks pemberdayaan agen, aturan politik tanpa mahar merupakan program yang memberikan ruang dan waktu pada seluruh pihak untuk berkarir di politik melalui Partai NasDem. Aturan tanpa mahar bagi para politisi merupakan berkah tersendiri, sebab menjadi oaese dalam dunia politik yang mahal harganya. Jelas, aturan tersebut memberikan hak setara bagi politisi dalam membangun karir politiknya. Semuanya memilih hak bergerak, berjuang dan mengekspresikan dirinya. Asal punya kemauan, berkomitmen dan loyal, pasti berkesempatan besar karirnya bagus. Dengan kata lain, hak karir politik di Partai NasDem tidak dipengaruhi seberapa besar mahar politik yang dikeluarkannya.

Partai NasDem Jawa Timur memberdayakan kader-kader yang memiliki kemampuan dan moral. Siapapun yang pantas baik dari segi moralitas dan kualitasnya, akan NasDem berdayakan tanpa mahar. Partai tidak memungut apapun pada figure yang didukungnya. Rekomendasi struktur partai bukan barang yang bernilai materi dan dapat diperjual belikan, tetapi merupakan media pemberdayaan bagi individu yang memang pantas mendapatkan dukungan politik karena kualitasnya.

Aturan yang demikian ini terbukti banyak melahirkan tokoh-tokoh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politisi baru yang berani muncul kepermukaan. Partai NasDem menjadi satu-satunya partai yang memperjuangkan dan mengusung mereka tanpa syarat apapun. Di tingkat Nasional, misalnya terkait dukungannya pada presiden Jokowi yang tanpa syarat. Begitupun ditingkat propinsi, menurut Gus Choi banyak calon legislatif baru yang muncul mempertunjukkan kualitasnya.[147]

Terkait penjelasan di atas ini, peneliti mencoba membuat tabel yang menjelaskan implikasi nyata dimensi religius dalam pendidikan politik Partai NasDem Jawa Timur. Adapun tabel tersebut sebagaimana gambar dibawah ini;

Gambar. 4.6
Implikasi Pendidikan Politik Pada Peran struktur NasDem

2. Implikasi pada Tindakan Agen

Pendidikan politik berdimensi religius selain berimplikasi pada

[147] Wawancara, A. Effendy Choirie tangggal 23 Oktober 2017 di kantor DPW Partai NasDem Jawa Timur bertempat di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

struktur, juga berimplikasi besar pada terbentuknya kesadaran rasional pada jiwa agen. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, selain mentransfer ilmu pengetahuan juga mentransfer nilai yang dapat menjadi basis kesadarannya. Kesadaran ini kemudian menjadi rasional mereka untuk melakukan sebuah tindakan.

Pendidikan politik Partai NasDem Jawa Timur, baik yang berdimensi ritual simbolik maupun substantif, sama-sama memiliki implikasi pembentukan kesadaran diri agen-agennya. Dimensi ritual simbolik seperti pemakaian simbol agama dan penyelenggaraan ritual keagamaan, meningkatkan kualitas hubungan antara agen dengan Tuhan mereka. Dimensi religius ritual simbolik memfokuskan pada terciptanya konstruksi ketuhanan pada dirinya. Pada konteks dimensi ini, pengupayaan integrasi kegiatan agama dengan kegiatan siyasah.

Kesadaran yang tercipta dari dimensi ritual simbolik merupakan kesadaran dasar yang mempertemukan atau membuang tabir pemisah antara amalan *mahdah* dan *ghoiru mahdāh*. Artinya dimensi tersebut mendorong terciptanya pemahaman yang tidak sekuler (menjauhkan urusan ibadah agama pada urusan sosial dunia). Kegiatan pendidikan berdimensi ritual agama membentuk kondisi ketergabungan urusan agama dan politik. Artinya, dengan kegiatan itu para agen akan terbiasa menghadirkan nilai-nilai keagamaan dalam melakukan tindakan kepartaiannya. Kegiatan yang berdimensi agama ini memiliki kekuatan konstruksi kesadaran agama agen partai. Dengan kata lain, menghindari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesadaran sekularisme agen.

Tidak sekuler maksudnya, memahami bahwa aktif dipartai juga harus diniati ibadah. Jika perjuangan dalam Partai NasDem diniati dengan ibadah, tentu para aktornya akan menganggap kegiatan partainya sebagai kegiatan ibadah. Hal yang demikian ini, tentu juga memberikan kesadaran bahwa perilaku salah dalam perjuangan merupakan dosa yang kelak perlu dipertanggung jawabkan pada Tuhan yang Maha Esa. Penjelasan ini, sangat nampak sebagaimana yang dikatakan beberapa agen terkait adanya kegiatan keagamaan ritual simbolik dalam kegiatan partai. Menurut Gus Choi;

> Menjadi kader Partai NasDem ini berniat ibadah dan itu religi, masuk partai bukan semata mencari kekuasaan, atau bersifat sekuler dan kekuasaan bersifat fisik. Tapi diniati ibadah, karna partai itu mengurusi banyak orang dan pada akhirnya mengurus bangsa dan Negara. Kedua, Dalam sekolah kader juga dikemukakan bahwa menjadi kader itu harus ikhlas, jangan karena ingin dapat gengsi, kehormatan, balas budi, balas jasa itu tidak boleh, harus ikhlas berkurban, tidak berpretensi datang ke partai ingin mendapatkan jabatan dan lain-lain. Ini diajarkan oleh pak Surya niat ibadah ikhlas, berkorban, setia kawan, *ta'āwanū 'alā al-birri wat al-taqwa walā ta'āwanu 'alā al-istmi wal 'udwān*.[148]

Jadi jelas implikasi dimensi simbolik adalah upaya konstruksi kesadaran yang berorietasi pada pemahaman non sekularis aktor partai. Kebiasaan melakukan ritual keagamaan memberikan efek pada masuknya kesadaran religius yang menjadikan perjuangan partai sebagai ibadah pada Tuhan. Dimensi inilah yang kemudian menjadi dasar terbentuknya atau bisa disebut penguatan dimensi substastif keagamaan para aktor DPW

[148] Wawancara dengan Korwil Jatim DR. Effendy Choirie pada hari minggu, 18 Maret 2017 pukul 08.00 di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partai NasDem Jawa Timur.

Dimensi ritual simbolik memiliki implikasi peran mendasar pada masuknya kepercayaan agama dalam tindakan aktor partai. Secara keseluruhan, tindakan agen memiliki dua dasar yang terintegrasikan yakni kesadaran agama dan kesadaran kebangsaaan. Kesadaran kebangsaan dibentuk sejak awal dibentuk dari materi yang diberikan dalam pendidikan politik formal Partai NasDem seperti sekolah Kader. Sedangkan kesadaran keagamaan ditumbuhkan dengan ritual simbolik keagamaan yang diselenggarakannya.

Dengan demikian, kedua kesadaran inilah yang menimbulkan pemahaman ketidak sekuleran kader dalam melakukan kegiatan politiknya. Kesadaran agama ini menjadikan para agen memiliki persepsi bahwa untuk membangun Partai NasDem bukanlah partai nasionalis sekuler sebaliknya Partai NasDem adalah partai nasionalis religius.[149] Tindakan mereka pun terbentuk dari rasionalitas dua kesadaran ini. Mereka membatasi tindakannya dan mengarahkan pada perbuatan yang sesuai dengan persepsinya terhadap partai, yakni nasional sekuler. Artinya, melakukan perjuangan untuk negara dengan tanpa menghilangkan atau tetap berpijak pada keyakinan agama yang sudah tertanam kuat dalam jiwanya.

Adapun yang terkait pendidikan politik Partai NasDem Jawa Timur yang berdimensi religius substantif, menjadi penyempurna dari kesadaran

[149] Wawancara dengan Rendra Kresna Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur pada tgl 18 Maret 2017 bertempat di Kantor DPW Partai NasDem Jawa Timur Jl. Kartini No.88 Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agen pada tindakannya. Pada sisi ini ada upaya transformasi ajaran agama yang hanya berkutat pada persoalan amaliyah dan ritual menjadi hal yang lebih sosiologis. Dimensi ritual simbolik yang hanya berperan membentuk sebuah persepsi tentang dibukanya gerbang pemahaman agama dalam partai, lebih terpupuk menjadi basis kesadaran dan pemahaman rasional aktor dalam melakukan tindakannya. Dimensi substansi religius membahasakan ajaran agama sebagai ajaran yang mendasari ghirah perjuangan yang dilakukan dalam partai.

Dimensi religius substantif merupakan bentuk penerjemahan ajaran agama dalam konteks perjuangan yang akan dilakukan aktor Partai NasDem Jawa Timur. Ajaran agama kemudian tampil menjadi nilai yang terkonstruksi secara terintegrasi secara komprehensif dan membentuk rasional tindakan agen sebagai manusia yang beragama dan mencintai negaranya yang homogen. Pada konteks ini, terbangunlah sebuah rasional tindakan yang mempersepsikan bahwa perjuangan partai juga merupakan konsekuensi logis dari keberimanan agen sebagai hamba pada Tuhannya.

Dimensi religius yang demikian ini memberikan definisi luas terkait apa yang sebenarnya disebut sebagai ibadah pada Tuhan. Ibadah pada Tuhan bagi mereka tidak lagi hanya persoalan hubungan pada Tuhannya, akan tetapi juga berkaitan tentang kewajiban memperjuangkan nasib masyarakat, keadilan, kemakmuran dan mengabdi pada bangsa dan Negara. Dengan kata lain, ada ketersambungan antara nilai patriotistik dan nilai ketaatan sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal demikian ini sebagaimana penjelasan Iwan yang mengatakan,

> Bagaimanapun kita mengetahui ubudiyah itu ada yang mahdhoh dan ghairu mahdhoh dalam dinamika politik kita aktivitas kita kemudian persujudan kita ada di sajadah masyarakat yang cukup luas dan cukup dinamis maka kemudian sebagai kader Partai NasDem tatkala dia mengadakan ubudiyah yang ghairu mahdhoh dengan aktivitas politik inilah sebuah bentuk perjuangan dan pengabdian demi bangsa dan Negara dalam bentuk nasionalisme dalam membimbing masyarakat untuk keadilan dan kemakmuran yang ini bagian dari kegiatan keagamaan.[150]

Nasionalisme dan religius dapat termanifestasi dalam aktivitas ubudiyah sosial, artinya persembahan atau ritualitas dalam agama dapat menjadi ritual yang dipersembahkan pada masyarakat. Ritualitas sebagai wujud vertikal akan berharmoni dengan wujud horizontal berupa penghambaan pada kepentingan rakyat. Perjuangan tersebut bagian dari kegiatan dalam menjunjung nilai-nilai substantif agama. Kader berkewajiban menjadikan perjuangan dalam partai sebagai bagian dari ibadah baik yang bersifat vertikal maupun ibadah yang bersifat horizontal.

Ada beberapa implikasi real pendidikan politik yang berdimensi religius substantif tersebut. Hal tersebut berusaha peneliti jabarkan dalam beberapa sikap yang muncul pada tindakan kader dalam pengamatannya. Yang demikian ini yaitu, pertama, tindakan humanistis. Tindakan ini didasarkan pada kewajiban manusia sebagai hamba yang memiliki kewajiban peduli pada makhluk ciptaan sang khāliq. Seluruh agama pastinya searah dan sepandangan bahwa manusia memiliki kewajiban sosial untuk saling menolong dan membantu sesamanya.

---

[150] Wawancara dengan Gus Iwan pada tgl 9 April 2017, Dewan Pembina DPD NasDem Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tertanamnya dimensi substantif religius ini meningkatkan kepedulian agen pada kemanusian. Bagaimana pun cara dan strategi pemenangan dalam konstalasi politik, yang tidak boleh ditinggalkan adalah kebermanfaatan pada rakyat yang diperjuangkannya. Perjuangan dan pengorbanan dalam merealisasikan sebuah cita menuju perubahan untuk sesuatu yang lebih baik bukan tidak mungkin halangan dan hambatan selalu menghadang. Namun semangat dan jiwa restorasi humanis yang kuat, tertanam dan diyakini, akan mampu menembus segala rintangan yang ada.

Fraksi Partai NasDem Jawa Timur tidak henti-hentinya menggelorakan kewajiban humanis setiap politisi Partai NasDem agar mampu terus tanggap pada keinginan dan harapan rakyat. Dalam hal ini Amin mengatakan;

> Saya memerintahkan pada semua kader ketika ada di tengah-tengah masyarakat kalau ada masyarakat yang butuh bantuan segera, contohnya ada orang sakit tanpa berbicara apapun langsung dibawa kerumah sakit kalau yang tidak mampu kalau orang mampu bisa sendiri donk kalau orang tidak mampu membutuhkan sampai di rumah sakit ditelfonkan anggota DPRD ketepatan yang satunya komisi D kan langsung dapat pelayanan yang baik ini kan contoh konkrit kan, ini yang kedua teman-teman membantu masyarakat yang anak-anaknya tidak bisa sekolah mereka mencarikan jalan agar bisa masuk sekolah ini contoh-contoh kecil yang di terapkan oleh teman-teman di wilayahnya, yang ketiga saya minta keteman-teman atau kader NasDem yang ada di bawah tingkat paling bawah itu ranting untuk selalu melakukan adaptasi dengan masyarakatnya ketika melakukan apapun kerja bakti turun ada apa turun, Jadi, teman-teman jemput bola.[151]

[151] Wawancara dengan Sekretaris NasDem Jatim Aminur Rohman pada tanggal 8 April 2017 di kantor NasDem Jawa Timur Jl. Kartini no.88 Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kader Partai NasDem yang berada diujung tombak masyarakat, menurut Amin harus menjemput bola. Kader-kader NasDem setidaknya proaktif dengan masyarakat bawah. Ini membuktikan sebagai titik tekan dari penerapan pendidikan partai politik, karena politik tidak hanya untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan tetapi lebih dari pada itu partai politik harus hadir ditengah-tengah masyarakat. Kehadiran partai politik dan politisinya dapat merekam langsung jejak kehidupan masyarakat.[152]

Masyarakat tidak butuh suguhan pencitraan politik, tetapi masyarakat bawah membutuhkan uluran bantuan langsung dari partai karena itu sebagai wujud implikasi dari pendidikan politik, sangat tepat bila kader yang ada diujung perjuangan tersebut ikut terlibat langsung pada persoalan-persoalan langsung yang ada dimasyarakat. Sehingga kader dapat menangkap langsung denyut kehidupan masyarakat. Amin melanjutkan tentang kehidupan masyarakatnya :

> Pernah kejadian ada orang sakit penyakitnya sudah tidak bisa di sembuhkan karena sudah tidak punya apa-apa rumahnya. Kebocoran terus tidurnya di kursi sampai semua diurusi dia datang ke walikota saya harus bantu ini kalau anak buah sampean gak bantu saya akan bantu ini. Perilaku yang teman-teman lakukan itu dan sudah saya tanamkan betul nilai-nilai perjuangan yang tentunya berdasarakan agama juga, Partai NasDem tidak seperti partai yang lain walaupun DPR pasti turun, gimana kita mau jalan sementara ada instruksi seperti ini yang mementingkan hak pribadi. Yang demikian secara spontan dilakukan. Tidak ada yang nyuruh justru teman-teman *enjoy*.[153]

---

[152] Wawancara dengan Sekretaris NasDem Jatim Aminur Rohman pada tanggal 21 April 2017 di kantor NasDem Jawa Timur Jl. Kartini no.88 Surabaya.

[153] Wawancara dengan Sekretaris NasDem Jatim Aminur Rohman pada tanggal 8 April 2017 di kantor NasDem Jawa Timur Jl. Kartini no.88 Surabaya. Pernah aktif di IPNU, PC NU 1987 s/d 1998 Pasuruan serta aktif di DPW PKB tahun 2008 s/d 2010, Mantan DPRD Pasuruan dan Walikota Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, agen Partai NasDem Jawa Timur juga membantu masyarakat yang anak-anaknya tidak bisa sekolah. Mereka akan dicarikan jalan agar bisa sekolah. Itu hanya contoh kecil yang dilakukan NasDem, selain itu juga ada instruksi untuk kader NasDem yang ada ditingkat paling bawah seperti ranting untuk beradaptasi dan ikut serta dalam kegiatan masyarakat terutama masalah pendidikan. Selain pendidikan, kader NasDem juga peduli terhadap kesehatan masyarakat atau misalnya ada masyarakat yang sakit tetapi tidak punya biaya, Partai NasDem Jawa Timur turun langsung menyelesaikan proses administrasinya.

Partai NasDem menjadi partai terdepan dalam memihak dan memperjuangkan apa yang dibutuhkan rakyat. Bahkan banyak kader NasDem yang berani melawan arus semata-mata demi tindakan politik yang pro terhadap rakyat. Beberapa kader NasDem secara terbuka sering menolak kebijakan yang tidak pro rakyat. Ada beberapa contoh bentuk penolakan yang dilakukan, salah satunya misalnya oleh fraksi Partai NasDem di kabupaten Kediri. Fraksi NasDem Kediri melakukan *pertama*, keterbukaan RAKERDA peraturan daerah. *Kedua*, melakukan RAKERDA pengangkatan perangkat Desa yang tidak pernah dilakukan oleh Legislatif dan eksekutif. *Ketiga*, Partai NasDem kabupaten Kediri dua kali keluar dari sidang paripurna karena bupati tidak pernah datang pada sidang paripurna. Hal yang demikian ini juga sebagai bentuk semangat restorasi gerakan perubahan yang dilakukan oleh para agen Partai NasDem.

Dengan hadirnya Partai NasDem di kabupaten Kediri, ingin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perubahan yang luar biasa terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini merupakan bentuk kepedulian partai kepada masyarakat khususnya pada bangsa. Untuk kabupaten Kediri memang masih banyak hal atau sistem dari pemerintahan yang harus diperbaiki. Banyak peraturan yang masih belum pro terhadap kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sesuai dengan jargon partainya, para agen tetap berjuang ingin melakukan perubahan yang lebih baik. Kader akan menolak setiap kebijakan yang tidak pro rakyat kecil, seperti penolakan dana aspirasi yang dianggap hanya akan memperkaya anggota legislatif. Beberapa kasus anggota DPR yang diseret kemeja hijau tidak lain karena mereka banyak yang menyelewengkan uang negara yang seharusnya untuk rakyat kecil.

Pada beberapa persoalan Partai NasDem keluar rapat paripurna misalnya, aktor NasDem beranggapan anggota dewannya saja tidak didengarkan apalagi rakyatnya. Maklum pada mereka menyatakan protes dan keluar dari sidang paripurna. Pemahaman meraka bupati harus mendengarkan aspirasi rakyat yang ditampung dalam rapat paripurna legislatif. Tentunya, hal ini berkenaan sinergitas kerja pemerintah dalam mengayomi dan mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya.

Insan kamil kader partai juga harus selalu bermanfaat pada sesamanya. Salah satunya, mislanya dengan berbagi rezeki. Sudarsono menambahkan bahwa :

> Pendidikan itu sangat menjurus di komisi-komisi itu jadi jelas ini yang seharusnya dibicarakan dan ini yang di NasDem urusan ini berhasil jadi sedikit tau dengan komisi yang mereka harus lakukan tapi satu kali lagi kalau tidak ada nuansa agama ini hanya berbicara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> di internal DPR tapi kalau nilai-nilai religiusnya ada implikasinya itu ada. Kalau dari gaji DPRnya paling tidak ada shadaqah lah meskipun tidak langsung berupa uang, apa berupa bakti sosial dengan biasa yang bebas itu atau baju-bajulah untuk wanita jompo itu. Inikan implikasi dari komitmen keagamaan mereka terhadap dirinya.[154]

Nilai-nilai religius yang terdapat pada diri kader Partai NasDem akan tercermin dengan sendirinya, seperti apa yang dilakukan oleh anggota DPR Partai NasDem setiap kali menerima gaji pasti sebagian gajinya tersebut di*shadaqah*kan ke orang yang kurang mampu. *Shadaqah* yang diberikan tidak langsung berupa uang, melainkan berupa pakaian yang diberikan kepada panti jompo yang dikemas dengan bakti sosial. Jadi, kader Partai NasDem untuk melakukan kebaikan kepada masyarakat tidak usah menunggu banyak uang, tapi seadanya yang penting ikhlas.

Selain berupaya secara serus memperjuangkan rakyat dalam pembahasan program dan kebijakan pemerintah. Sebagai bentuk manifestasi implikasi kongkrit dimensi religius substansif pendidikan politik partai, para politisi NasDem tidak jarang turun secara langsung pada masyarakat. Maksudnya, mereka secara langsung membantu kebutuhan masyarakat. Ada beberapa jenis bantuan NasDem sebagaimana yang disampaikan oleh Lutfi dalam wawancara lanjutan, mengatakan,

> Bantuannya NasDem Kepada RT/RW kalau ada rukun kematian, terus kita menyentuh kepada pemberian kain kafan, kain kafan ini harganya murah tapi sangat menyentuh dan ini yang bisa dikatakn religi dan tidak bisa dilupakan meskipun kegiatannya sangat sederhana dan saya ada foto-fotonya. Yang tidak religius juga saya lakukan seperti bantu warung yang dipinggir jalan ini memberikan alat masak itu dalam rangka pemberdayaan meningkatkan ekonomi

[154] Wawancara dengan Darsono tanggal 14/02/2018 di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dan itu masuk kegiatan sosial mbak itu atas nama NasDem bantuannya dan sasarannya disumbangkan ke warung-warung disekitar pengurus hal seperti itu tetep saya jalankan. Hal seperti itu dari pribadi atau ada bantuan dari jasmas gitu? Kalau jasmas nilainya kan besar kalau yang ini nilainya kan kecil kita hanya ambilkan dari iuran DPR yang tiap bulan itu dan kegiatan itu hampir rutin setiap bulan kita lakukan tapi objeknya berbeda.[155]

Berdasarkan penjesan di atas, ada dua bentuk bantuan yang diberikan oleh Partai NasDem Jawa Timur kepada masyarakat adalah bantuan bersifat keagamaan dan menjadi kebutuhan urgen masyarakat.[156] Jadi, bentuk konkrit dari pendidikan politik Partai NasDem yang berdimensi religius sudah dilakukan oleh kader NasDem, sebagaimana contoh di atas yang menjelaskan bahwa kader nampak peduli dan memberikan bantuan kepada warga yang terkena musibah yang keluarganya ada yang meninggal, misalnya berupa bantuan memberikan kain kafan. Walau kain kafan harganya tidak seberapa, tetapi hal tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang signifikan.

Selain itu, ada bantuan yang bersifat pemberdayaan. Misalnya membantu warung yang dipinggir jalan, memberikan alat masak dalam rangka pemberdayaan, meningkatkan ekonomi dan itu masuk kegiatan sosial. Biasanya, bantuan Partai NasDem dan sasarannya ke warung-warung disekitar pengurus. Kegiatan bantuan ini biasanya rutin dilakukan pada objek yang berbeda dan tempat yang berbeda. Selain implikasi humanis agen, yang kedua implikasi substantif religius pendidikan politik

[155] Wawancara dengan Lutfi, Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Kediri, bertempat di rumah kediamannya di Kediri pada pukul 21.00.tanggal 18 April 2017.
[156] Adapun sumber dana berasal dari iuran kader partai NasDem yang menjadi anggota legislatif dan kegitan bakti sosial dilakukan tiap bulan satu kali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partai NasDem adalah terbentuknya sikap etika profetik. Sikap profetik ini misalnya seperti keikhlasan, sopan santun dan lain sebagainya. Pada sisi ini Lutfi, Ketua DPD NasDem Kediri menyampaikan bahwa pendidikan politik di NasDem berpengaruh pada jati diri kader bertindak secara sukarela. Hal ini sebagaimana pernyataannya :

> Setidak-tidaknya kita merasakan keikhlasan menjadi pengurus parlemen itukan salah satu implikasi dari nilai-nilai dimensi religius kita ikhlas berjuang di partai NasDem ketika urunan kita senang, salah satu nilai-nilai religius yang kita tanamkan di partai NasDem. Kalau di Kediri ini kita rapat itu tanpa disangoni itu biasa kalau yang lain kan gak kadernya. Kita undang rapat DPC itu tanpa dikasik transport itu biasa tapi kita bekali dengan pengetahuan-pengetahuan misalkan peraturan perda jadi mereka datang itu mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan tentang pemerintahan untuk meningkatkan kapasitas kader baik intelektual, maupun sikapnya selalu kita lakukan, itu sangat bermanfaat nilai-nilai implikasinya yang kami berikan.[157]

Para pengurus belajar untuk ikhlas dalam memperjuangkan Partai NasDem, nilai-nilai religius yang pertama ditanamkan untuk pengurus Partai NasDem, bersikap tauladan pada masyarakat agar dapat dicontoh. Misalkan ketika diundang rapat DPC itu tanpa dikasik transport itu biasa tapi kita bekali dengan pengetahuan-pengetahuan misalkan peraturan perda jadi mereka datang itu mendapatkan ilmu mendapatkan pengetahuan tentang pemerintahan untuk meningkatkan kapasitas kader baik intelektual serta sikapnya.

Selain keikhlasan, sikap profetis Nabi yang terimplikasikan adalah tindakan sopan santun. NasDem akan diterima secara suka rela dan terbuka jika Kadernya berperilaku sopan dan menghargai masyarakat.

[157] Wawancara dengan Muklina pada tanggal 18 April 2017 di Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada sisi ini nampak sikap profetik yang dikembangkan dan ditanamkan pada diri kader Partai NasDem. Sopan Santun dan menghargai masyarakat masuk dalam hal akhlak yang juga diajarkan Rosul. Nabi turun sebagai penyempurna akhlak. Menyempurnakan akhlak manusia berarti meningkatkan akhlak yang sudah baik menjadi lebih baik dan mengikis akhlak yang buruk agar hilang serta diganti oleh akhlak yang mulia. Itulah kemuliaan hidup manusia sebagai makhluk Allah yang utama. Betapa pentingnya membangun akhlak sehingga melekat dengan kerisalahan Nabi.[158] Dasar ini nampaknya menjadi dasar pengutamaan sopan santu kader NasDem.

Perubahan yang menjadi konsen diskursus Partai NasDem pada konteks ini adalah sunnah dalam warisan Rasulullah. Sebenarnya merupakan pendalalaman integrasi ajaran agama pada restorasi gerakan perubahan Partai NasDem. Restorasi gerakan perubahan dipahami sebagaimana upaya hijrah nabi. Hijrah kearah yang lebih baik sebagai tradisi dalam agama. Maka restorasi partai berbasis nasionalis-religius tersebut akan membawa arah kebangsaan yang dibawa oleh nilai-nilai keagamaan.

Jadi nilai-nilai keagamaan yang dipraktekkan Rasullulah SAW. menjadi nilai-nilai dalam berpolitik. Dengan tujuan individu sendiri dituntut untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Seluruh sikap yang profetik ini merupakan manifestasi nilai profetik yang berguna pada

[158] Haidar Nashir, *Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Budaya*. Yogyakarta: Multi Presindo, 2013, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebagaimana semua mafhum bahwa dengan sikap profetik akan mendorong manusia untuk menjadi agen perubahan dengan nilai-nilai warisan Rosulullah. Sikap profetik akan menciptakan manusia kamil yang berguna bagi dirinya dan masyarakat.[159]

Demi tercapainya penjelasan yang komprehensif dan lebih jelas, peneliti membuat kerangka penjelasan sebagaimana berikut ini,

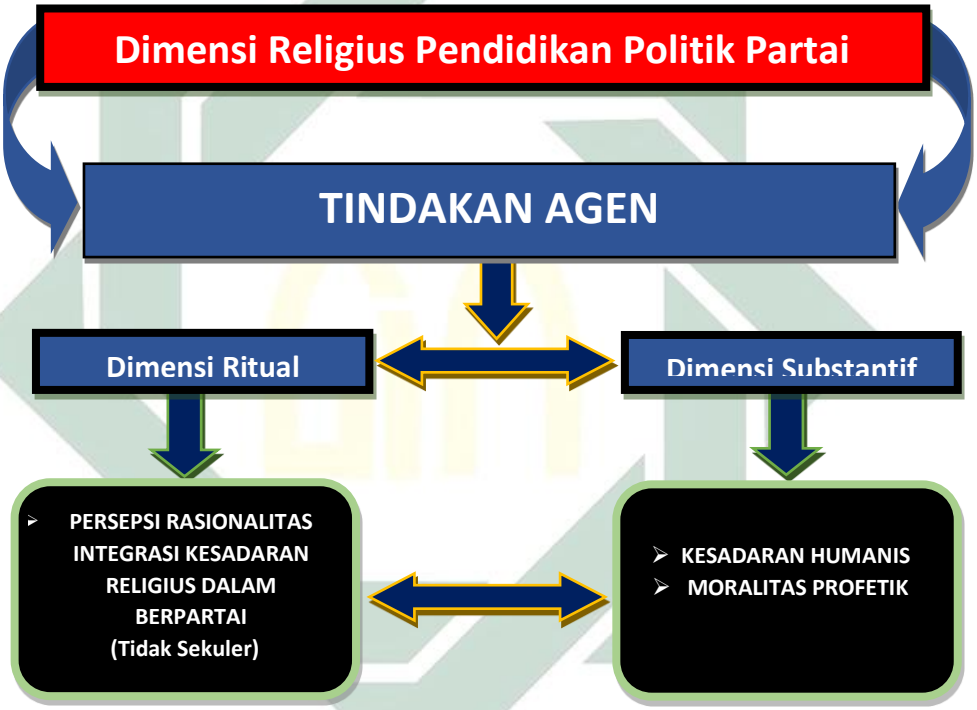

Gambar. 4.7
Implikasi Pendidikan Politik Pada tindakan Agen

[159] Zakiyah Daradjat. dkk., *Ilmu Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Implikasi Pada Reproduksi Budaya Strukturasi Partai NasDem Jawa Timur

Pasca pembahasan implikasi pada masing-masing komponen strukturasi, pembahasan kali ini akan membahas tentang bagaimana relasi implikasi pendidikan Partai NasDem Jawa Timur pada hubungan komponen tersebut. sebagaimana diketahui bersama bahwa urusan strukturasi adalah hubungan antara manusia dan masyarakat atau tindakan dan struktur sosial berada pada inti persoalan teori sosial dan filsafat ilmu sosial.[160] Perdebatannya berkaitan diantara mana yang lebih penting antara individu dan struktur. Biasanya, beberapa pemecahan yang diambil dititikberatkan pada satu istilah dengan cara mengabaikan yang lain, baik struktural sosial yang diambil sebagai objek pokok penerapan analisanya dan alat yang secara efektif justru berlebihan. Atau individu-individu yang hanya dilihat sebagai unsur pokok dari kelompok aksi dan reaksi sosial.[161] Jadi pada intinya, pembahasan ini menyoal hubungan antara agen dan struktur politik Partai NasDem Jawa Timur.

Terkait dengan komponen-komponen yang tersebut diatas, peneliti mencoba menjabarkan terlebih dahulu varian komponen yang ada. Pada wilayah strukturnya, komponennya terdiri dari realitas budaya (norma dan kebiasaan) yang terjadi dalam dunia politik baik yang terjadi di dalam

---

[160] John. B Thompson, *Analisis Ideologi*; Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia. Terjemahan oleh Haqqul Yakin. 2003. Yogyakarta: Ircisod, 1984, 56.

[161] Penjelasan demikian berkaitan dengan teori sosial yang berusaha menjawab pertanyaan yang kadang diajukan sebagai keinginan kuat untuk membangun analisa yang mapan, seperti pertanyaan bagaimana dan dengan cara apa tindakan yang dihasilkan agen-agen individu berkaitan dengan ciri-ciri struktural masyarakat yang didiami. Lihat. John. B Thompson, *Analisis Ideologi*, 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partai maupun yang secara umum terjadi dalam diskusrus politik nasional. Sedangkan pada wilayah agennya adalah kemampuan dan kualitas pengetahuan dan kesadaran agen baik sebagai manusia yang beragama maupun sebagai manusia yang memiliki kepentingan serta kebutuhan.

Secara internal, norma Struktur Partai NasDem sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sudah nampak mengimplementasikan pemahaman religius dalam aturan formalnya. Bahkan dimensi religius seperti sudah terintegrasi secara komprehensif sebagai dasar visi dan misi gerakan partai. Tentu yang demikian ini merupakan wujud kongkrit implementasi pengetahuan dari pola pendidikan yang dilakukannya.

Adapun yang terkait dengan struktur pengekang yang berasal dari struktur budaya politik global, sangat berkaitan dengan budaya politik di Indonesia. Dengan kata lain, berkaitan dengan realitas yang terjadi dalam perkembangan iklim politik. Pada sisi ini, hal-hal yang menjadi catatan adalah terkait dengan seperangkat aturan formal legal dan kebiasaan dalam budaya politi dewasa ini. Berbicara aturan legal, mungkin sudah sangat jelas bahwa aturan hukum politik sudah terbilang lengkap sebagai contrait tindakan atau kebiasan para politisi. Akan tetapi berbicara konsesus tindakan secara kultur, tentu berikatan erat dengan kebiasaan yang lumrah dilakukan dan pada umumnya diamini secara kaprah. Misalnya, budaya korupsi yang profit dibagi secara merata, budaya mahar politik dan sebagainya. Hal yang demikian ini tentu merupakan aspek yang serta merta ikut melakukan constraining dalam proses strukturasi Partai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NasDem Jawa Timur.

Sedangkan pada sisi komponen agennya, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa berhubungan dengan seberapa kuat kulitas kesadaran dan pengetahuannya. Maksudnya, bagaiamana para agen NasDem yang memiliki varian kualitas pengalaman dan pengetahuan melakukan proses strukturasi di partai. Apakah resionalitas tindakannya berdasarkan pada kesadarannya sendiri atau malah terbentuk dari kekuatan struktur yang ada.

Secara teoretik, implikasi pendidikan politik Partai NasDem Jawa Timur sudah dapat dipandang telah membentuk kader yang memiliki kepribadian humanis dan religius. Kemudian sangat berdampak pada menguatnya struktur dan kultur serta meningkatnya kinerja kader baik secara internal di kepartaian dan eksternal di pemerintahan serta kemasyarakatan. Dimensi religius baik yang ritual simbolik dan substansif secara umum memiliki dampak positif dalam proses strukturasi yang terjadi.

Dampak positif yang terjadi adalah semakin kuatnya kontrol struktur pada tindakan agen. Dampak ini disebabkan pendidikan politiknya yang berdimensi religius telah membangun persepsi bahwa struktur yang disusun partai sudah bersinergi bahkan bahkan berdasar dari pengetahuan dan kesadaran beragama agen. Implikasi pendidikannya selain itu sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat melahirkan struktur internal partai yang humanis.[162] Selain itu, struktur juga nampak melakukan upaya enabling kemampuan dan pengalaman agen-agennya. Pemberadayaan struktur sudah nampak dalam penghargaan dan dorongan melakukan kreatifitas gerakan perubahan dengan tetap berdasarkan ability yang dimiliki dan kepercayaan yang diyakini.

Sedangkan terkait dengan agen, sebagaimana yang juga dijelaskan di atas, pendidikan partai nampak memberikan injeksi pemahaman dan kesadaran tindakan agen. Telah terpancar pada diri aktor, sikap religius dan humanis kader bisa dalam tindakan pada momentum-momentum politik, kegamaan, sosial dan lain sebagainya. Selain itu juga terlihat dalam kebiajakan-kebijakannya yang pro rakyat kecil. Pendidikan politik yang dijalankan Partai NasDem Jawa Timur telah berimplikasi pada terbentuknya kader yang memiliki kompetensi humanis dan religius yang dalam hal ini, diartikan sebagai kader memiliki kecerdasan kemanusian baik politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Berdasarkan temuan inilah, menjadi sangat jelas bahwa secara teoritik pendidikan politik Partai NasDem yang berdimensin religius telah membentuk kebersamaan struktur dan agen melakukan reproduksi struktur partai yang berpijak pada kesadaran humanis dan religius. Strukturnya membangun constrait dan enabling yang berorientasi pada terbentuknya

[162] Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, implikasi pendidikan politik berdimensi religisu melahirkan kesadaran moralitas sosial keagamaan yang tinggi. Hal ini terlihat pada integrasi pemahaman religius pada semangat restorasi gerakan perubahan serta slogan politiknya yang mendorong humunistis dalam tindakan agen-agennya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agen yang humanis dan juga religius. Begitupun aktornya, peran pendidikan politik pada proses struturasi partai melahirkan kader yang selain beriman juga memiliki kepedulian penuh pada kemanusiaan. Dengan kata lain, juga memiliki dorongan untuk menjadi aktor yang sholah secara sosial dan sholah secara spiritual. Penjelasan yang demikian ini sebagaimana gambar berikut ini;

Gambar 4.8
Implikasi Strukturasi Partai NasDem
Dalam Reproduksi Struktur dan Agen

Berdasarkan gambar diatas, sangat jelas implikasi teroritiknya. Partai NasDem sebagai partai yang berbasis gagasan, dapat ditemukan kolaborasi paradigmatic. Ada paradigma yang berkolabarasi dalam proses rostorasinya. Ada paradigma humanis yang antroposentris dan ada juga paradigma teologis. Paradigma teosentris sebagai landasan kader dalam menjadikan politik sebagai manifestasi dari *Abdullāh* yang setiap amal perbuatan seorang hamba akan dipertanggungjawabkan secara vertikal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihadapan Tuhannya. Selain itu paradigma antroposentris sebagai wujud dari seorang hamba yang menjadi *khalifatullāh*. Ini berarti tanggungjawab kemanusiaan melekat pada diri kader. Sehingga jika paradigma teosentris dan antroposentris mewujud dalam satu kesatuan integratif, maka akan menjadi teoantroposentris dalam berpolitik.[163]

Cara pandang teoantroposentris meskipun tidak secara formal dikonseptualisasikan dalam gerak partai tetapi secara substansial cara pandang keagamaan sudah larut dalam gerak partai dalam membangun visi dan misinya. Dengan demikian, kader akan menjadi kader sosok politisi yang humanis dan religius. Inilah yang kemudian disebut oleh Giddens sebagai dualitas struktur yang saling mempengaruhi. Struktur yang terbangun mempersyaratkan kemampuan instrospeksi dan mawas diri (*reflexive monitoring*) dari para agen di dalam, dan sebagai bentuk, *durèe* aktivitas sosial sehari-hari.[164] Dengan demikian dapat digambarkan bahwa implikasi peran pendidikan politik Partai NasDem menciptakan dua paradigma yang berkolaborasi dan membentuk aktor humanis dan religius.

[163] Teoantroposentri juga disetarakan dengan makna memanusiakan teologi sebagaimana penjelasan Rusmadi dalam bukunya, lihat. Rumadi, *Masyarakat Post-Teologi Wajah Baru Agama dan Demokrasi Indonesia*, (Jakarta: mustika bahraid, 2000), 23.
[164] Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam gambar di bawah ini,

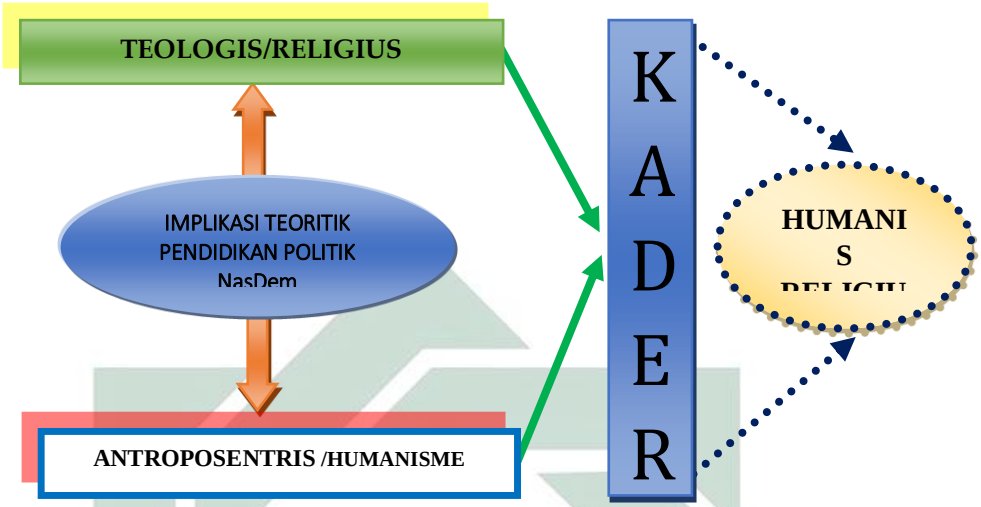

Gambar 4.9
Implikasi Teoritik Strukturasi NasDem

Humanis dalam praktek tindakannya dipahami sebagai cerdas dalam berpolitik, sedangkan religius sebagai kecerdasaan yang dimiliki kader terkait pemahaman bahwa politik tidak hanya dipahami urusan duniawiyah atau relasi horizontal, tetapi politik adalah urusan dengan agama, sehingga prilaku politik kader tidak menistakan ajaran agama, atau berpolitik sebagai jalan mendakwahkan ajaran agama. Politik tidak dipahami hanya sebagai kepentingan merebut kekuasaan, tetapi politik yang dijalankan Partai NasDem memiliki nauansa religius karena para aktor Partai NasDem Jawa Timur adalah para tokoh yang dalam ruang hidupnya adalah para tokoh yang kental dengan religiusitas.

Jadi, secara umum baik relasi kesadaran agen maupun struktur internal partai sudah mengarah proses strukturasi positif. Strukturasi yang dilakukan telah nampak mengarah pada satu orientasi tertanamnya nilai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

humanis religius. Konsensus keduanya dalam proses strukturasinya sama dan senada dalam penguatan nilai-nilai itu. Dengan demikian, sentuhan agen dan struktur nampak berperan beriringan dalam membentuk budaya humanis religius partai. Maksudnya, strukturasinya membentuk norma struktur yang senada dengan kesadaran dan pemahaman tindakan agennya.

Agen dan struktur masing-masing mempengaruhi dan mendukung terciptanya kultur dan struktur positif dalam menggerakkan partai. Pada sisi inilah juga dapat dikatakan Partai NasDem telah mampu berperan aktif dalam membangun perpolitikan yang lebih baik. Menguatnya paradigma religius humanis pada diri seseorang, menurut Baharuddin, akan menguatkan mereka membentuk struktur yang dapat menjadi jawaban masalah global dewasa ini. Hancurnya rasa kemanusiaan dan terkikisnya semangat religius, serta kaburnya nilai-nilai kemanusiaan dan hilangnya jati diri budaya bangsa merupakan kekhawatiran manusia paling klimaks (memuncak) dalam kanca pergulatan global.[165]

Pendidikan politik Partai NasDem Jawa Timur adalah menguatkan struktur kepartaian yang berlaku ke dalam dan keluar. Berlaku ke dalam artinya seluruh kebijakan partai dikhususkan untuk menguatkan struktur Partai NasDem yang bertujuan untuk memberi otoritas, ligitimasi, rekomendasi dan lain sebagainya.

[165] Baharuddin dan Moh. Makin, *Pendidikan Humanistik, Konsep, Teori, dan Aplikasi Praksis dalam Dunia Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, humanisme religius aktor juga berdampak pada penguatan budaya berpolitik kader. Budaya politik juga berlaku ke dalam dan keluar, berlaku kedalam dalam arti kata budaya politik partai telah terbangun kebudayaan politik yang humanis dan religius, relasi antar aktor diikat oleh ikatan nilai-nilai kepartaian yang berbasis pada pondasi agama dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga interaksi kader di dalamnya tidak terlepas dari ikatan tersebut.

Sedangkan berlaku keluar yang dimaksud adalah tindakan agen dan kebijakan politik Partai NasDem Jawa Timur untuk kepentiangan rakyat dan Bangsa, struktur politik berperan aktif menyuarakan seluruh aspirasi rakyat. Kebijakan-kebijakan politik Partai NasDem Jawa Timur nampak pada kegiatan-kegiatan para aktor di masyarakat, baik kegiatan kegamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan. Kultur yang dibangun keluar sebagaimana kultur ke dalam, yang berbasiskan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Disini relasi aktor dengan aktor partai lain diikat oleh tali agama dan kemanusiaan, misalnya politik tanpa mahar yang sampai hari ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan para calon kepala daerah. Namun Partai NasDem Justru melamar para calon yang terbaik meskipun bukan para kadernya, NasDem memilih para kandidat kepala daerah yang sevisi dan senafas dengan perjuangannya, ini budaya politik Partai NasDem keluar yang mengedepankan maslahah kolektif untuk kepentingan ummat yang lebih besar. Dari kultur inilah perilaku aktor terbangun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbicara masalah sentuhan implikasi struktur pendidikan politik Partai NasDem, pada satu sisi terasa telah berperan besar pada dunia politik di Negara Indonesia. Tetapi disisi lainnya, strukturasi yang berkembang masih memiliki kelemahan jika dikontekskan pada proses yang pencapaian cita-citanya sebagai partai pembaharuan dunia politik. Strukturasi yang diupayakan Partai NasDem tidak dapat menjauhkan diri dari budaya politik pengaruh negatif nilai dan kondisi perpolitikan Nasional. Dewasa ini reproduksi struktur di dunia politik, yang menjadi masalah terbesar adalah semakin membudayanya perilaku korup dan nepotisme berjamaah. Perilaku ini oleh para politisi dianggap sebagai perilaku yang sudah membudaya dalam perpolitikan. Salah satu sebabnya tentunya adalah biaya politik yang mahal. Masyarakat modern yang semakin pragmatis membuat harga karir politik sangat mahal. Budaya yang demikian ini tentu juga dapat dianggap sebagai konsensus nilai yang nampak berpengaruh pada upaya strukturasi budaya yang dibangun oleh partai.

Budaya politik dibentuk dan dikembangkan oleh pelaku politik dan apa yang akan ditentukan oleh pelaku politik sebagai ciri-ciri utama budaya politik mereka sampai batas tertentu, dipengaruhi oleh pendidikan mereka. Jadi hubungan antara budaya politik dan pendidikan bersifat tidak langsung. Ini berarti pendidikan tidak secara final membentuk pelaku politik. Pendidikan memberi dasar-dasar kepada tiap calon pelaku politik. Jika dasar-dasar ini baik dan kokoh, besar kemungkinan (probabilitasnya)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan lahir pelaku-pelaku politik yang baik. Namun, jika dasar-dasar yang diberikan oleh pendidikan jelek dan rapuh, ,kemungkinan besarnya ialah yang akan muncul di kemudian hari adalah pelaku-pelaku politik yang jelek dan rapuh pula.[166]

Berdasarkan generalisasi ini dapat dipahami mengapa perilaku para pelaku politik dari masyarakat dengan sistem pendidikan yang baik berbeda dengan perilaku pelaku politik yang berasal dari masyarakat dengan sistem pendidikan yang kurang memadai. Dalam masyarakat, misalnya, para pelaku politik dengan latar belakang pendidikan Madrasah yang baik, berbeda perilakunya dari pelaku politik yang datang dari pendidikan Madrasah yang kurang terpelihara atau dari latar belakang pendidikan yang berbau aristokrasi dan meritokrasi feodal atau militer.

Secara umum landasan yang baik adalah pendidikan yang dalam jargon politik disebut pendidikan manusia seutuhnya dalam hal ini pendidikan politik NasDem berbasis pada pilar religiusitas dan humanitas. Dengan kata lain, pendidikan politik religius-humanis. Religius adalah nilai yang menjadi kerangka moral dan pendidikan, humanisnya adalah menggunakan manusia untuk kemanusiaan sebagaimana yang Henryk Dkk

[166] Daya yang dimaksud disini adalah lingkup daya pengetahuan yang dimiliki oleh para aktor dan daya kuasa memobilisasi baik pada dirinya sendiri ataupun pada orang lain. Lihat. Anthony Giddens, *Teori Strukturasi…,*17. Untuk dirinya tentunya adalah konsekuensi-konsekuensi tindakan yang tidak dikendaki *(unintended consequences of action)* atau kondisi-kondisi tindakan yang tidak diketahui *(unacknowledge condition of action).* Konsekuensi yang tidak disengaja dapat menjadi kondisi-kondisi yang tidak diketahui sepanjang konsekuensi yang tidak disengaja tersebut merupakan pengembangan dari struktur yang akan memungkinkan tindakan selanjutnya. Lihat. John. B Thompson, *Analisis Ideologi*, 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

katakan.[167]

Kultur politik dengan demikian ditentukan oleh prilaku para aktor yang ada di dalam struktur politik tersebut, tidak salah bila sekolah Partai NasDem diselenggarakan diseluruh kabupaten dan kota, hal ini tentunya untuk membentuk prilaku kader sholeh individual dan sosial yang akhirnya tercipta budaya politik yang santun dan bermartabat.

Berdasarkan temuan yang ada, implikasi sekolah kader berdampak pada struktur dan kultur atau berdampak pada internal partai lebih-lebih berdampak secara eksternal yaitu rakyat kecil. Implikasi Pendikan politik yang dilakukan manghasilkan struktur dan kultur budaya yang dapat dikatakan positif. Adapun implikasi strukturnya, Pertama. Melaksanakan AD/ART, peraturan organisasi, keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan Partai NasDem sebagai Pedoman final dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian. Kedua, Struktur kepengurusan partai disusun berdasarkan prinsip heterogenitas etnik, representasi daerah, dan keterwakilan kuota perempuan, serta perimbangan antara senioritas dan yunioritas.

Ketiga, menjalankan amanat Partai NasDem sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing pengurus dalam jabatan/posisi strukturalnya sesuai dengan tata laksana organisasi. Sami'nā wa Atha'nā (mendengar dan taat) kepada H. Surya Paloh sebagai Ketua Umum sekaligus Imam Politik Partai NasDem.

---

[167] Henryk Misiak dan Virgini Staudt Sexton, *Psikologi Fenomenologi, Eksistensial, dan Humanistik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga implikasi ini dapat dikategorikan sebagai implikasi struktur yang berorientasi pada terciptanya nilai kedisiplinan kader. Nilai ini oleh Zayadi masuk dalam kategori al-Wafã.[168] Kader patuh pada pimpinan dan memenuhi aturan AD/ART, berarti kader yang konsisten pada komitmen janjinya.

Selain ketiganya, implikasi yang keempat adalah membangun semangat *collective coligial* dan egalitarianistik dalam memimpin, serta memperkuat soliditas, semangat gotong royong, dan solidaritas pengurus dan kader dalam menjalankan roda organisasi. Juga membuka ruang gagasan dan gerakan kepada pengurus dan kader untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasan dan gerakan-gerakan baru yang berdampak positif kepada partai. Sekaligus membentuk kader-kader baru Partai NasDem yang memiliki kemampuan organisasi, responsible dan akuntabel dalam menjalankan tugas-tugas partai. Tidak lupa juga melaksanakan program-program kreatif yang berbasis kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat, bangsa dan Negara.[169]

Adapun implikasi kulturnya adalah : Pertama, Menjadikan kultur Ke-Indonesiaan dan kearifan lokal (local wisdom) pada satu sisi, dan menghargai modernitas pada sisi yang lain sebagai khazanah budaya yang luhur (adiluhung) dalam membangun partai. Kedua, Mentradisikan kemerdekaan berpikir bagi lahirnya sebuah gagasan dan tindakan baru yang dilakukan secara cepat dan tepat, berani, waspada, percaya diri serta

[168] Ibid, 95.
[169] Observasi, HUT ke-4, Partai NasDem Jatim Bulan Restorasi, 03 Oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teguh dalam berjuang. Ketiga, Membentuk sikap gotong royong dan membangun kebersamaan untuk satu tujuan yang mulia. Kelima, menjunjung tinggi kesetaraan sosial (social egalitarianistic) di tengah-tengah masyarakat. Keenam, memperbaiki sesuatu, dari yang jelek menjadi baik; mengembalikan sesuatu pada tempatnya dan kepada yang berhak atau tidak mengambil hak orang lain. Artinya, memulihkan atau menormalisasi keadaan menjadi sesuatu yang kondusif. Juga dapat dikatakan, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat dan juga tidak membodohi apalagi memanipulasi.

Seluruh implikasi yang ditemukan dalam kultur kader Partai NasDem adalah mengarah pada transformasi nilai religius pada aspek humanitas tindakannya. Maksudnya, religiusitas membentuk sikap kader yang amanah dan intinya berkomitmen pada kebermanfaatan sebagai manusia. Sesuai dengan hadist Nabi;

خَيْرُ النـاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنـاسِ

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. [170]

Selain itu, peran pendidikan politik pada strukturasi di Partai NasDem telah mendorong lahirnya budaya dan operasionalitas partai yang baik. Strukturasi yang menjalankan integrasi kesadaran nasionalis dan religius ini berimplikasi pada lahirnya operasionalitas partai yang positif. Nilai positifnya adalah sebagaimana berikut ini;

[170] HR. Ahmad, ath-Thabrani, Ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul* Jami' no: 3289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

HUMANISME RELIGIUS	
Berpikir Rasional	Memperjuangkan Aspirasi Publik
Mundur saat status Tersangka	Politik tanpa Mahar
Politik Terbuka	Menolak dana Aspirasi, Dana Saksi, larangan ke Luar Negeri selama Anggaran Defisit
Disiplin	Militan
Bertanggung jawab	Ikhlas
Berakhlakul karimah	

Tabel 4.1
Implikasi Operasional Sekolah Kader

Pendidikan politik Partai NasDem berimplikasi pada kinerja kader di partai politik, pemerintahan, kemasyarakatan. Pendidikan etika politik yang diajarkan Partai NasDem, tidak dapat dianggap sudah sesuai standar atau ideal. Masing-masing personal kader memiliki penilaian sendiri, namun secara garis besar partailah yang memiliki ukuran-ukuran idealitasnya. Zulfikar secara pribadi memberi pandangan bahwa :

> Kalau secara personal atau secara umum saya tidak bisa menjawab kalau yang secara personal menurut saya sudah cukup karena kalau masalah religi ini dikembalikan pada kita sendiri personal kita ketika kita melakukan sesuatu kita jadikan untuk partai tapi kalau kita sudah dalam konsep umum belum tentu bagi kita baik gitu kalau bagi saya sendiri sudah cukup karena saya sendiri juga punya nilai-nilai yang saya pegang, meskipun tidak di jalankan oleh partai. Jadi kita tidak usah ngomongin ideal apa tidak tapi itu cukup.[171]

Pendidikan politik Partai NasDem sudah masuk dalam katagori

[171] Wawancara dengan Zulfikar pada tgl 14 April 2017 ketua DPD NasDem kota Probolinggo sekaligus wakil ketua DPRD Kota Lumajang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ideal, artinya dilihat dari pribadi kader Partai NasDem sudah kebanyakan menerapkan dari materi yang sudah diberikan. Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai NasDem kalau secara umum belum bisa dikatakan ideal menurut zulfikar, karena kalau penilaian orang atau penilaian masyarakat itu sangat beragam. Tetapi kalau secara personal pendidikan politik Partai NasDem meskipun belum mencapai kesempurnaan ideal akan tetapi sudah cukup. Karena kalau berbicara masalah religius itu dikembalikan kepada individu masing-masing.

Pendidikan politik Partai NasDem juga bisa dikatakan masuk kategori ideal, dilihat dari kepribadian kader-kader NasDem sudah banyak yang menerapkan atau mempraktekkan nilai-nilai yang diajarkan pendidikan politik Partai NasDem. Selain itu tergantung pada setiap orang atau karakter masing-masing kader karena yang bisa menilai orang itu baik atau tidak tergantung masyarakat yang menilainya. Hal ini juga dibicarakan oleh Giddens Sebagai struktur yag merupakan standar nilai untuk menilai tindakan agen sendiri.[172]

[172] Anthony Giddens, *Problematika Utama*, 96-98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Aziz, implikasi pendidikan atau sekolah kader implikasinya adalah kedisiplinan.[173] Partai mengajarkan kader agar disiplin, prilaku pengurus semakin baik, semakin disiplin dengan kesadaran tanpa diberi bayaran, dan ini memperkuat struktur dan kultur DPD Kabupaten Sumenep, bagi yang mengikuti sekolah kader secara total.

Peran pendidikan politik memiliki andil besar dalam memproduksi kader-kader politik Partai NasDem yang tidak hanya cerdas dalam berpolitik tetapi berpolitik moral yang melekat pada dirinya kepentingan-kepentingan vertikal (*Abdullāh*) dan horizontal (*Khalifatullāh).* Pada sisi inilah implikasi positif Partai NasDem begitu penting untuk dilaksanakan.

[173] Wawancara dengan M. Aziz Shabibi, ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Sumenep pada tanggal 22 Maret 2017 pukul 22.00 di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk penjelasan terkait dengan implikasi praktisnya, peneliti mencoba menyusun sebuah bagan sebagaimana gambar berikut ini;

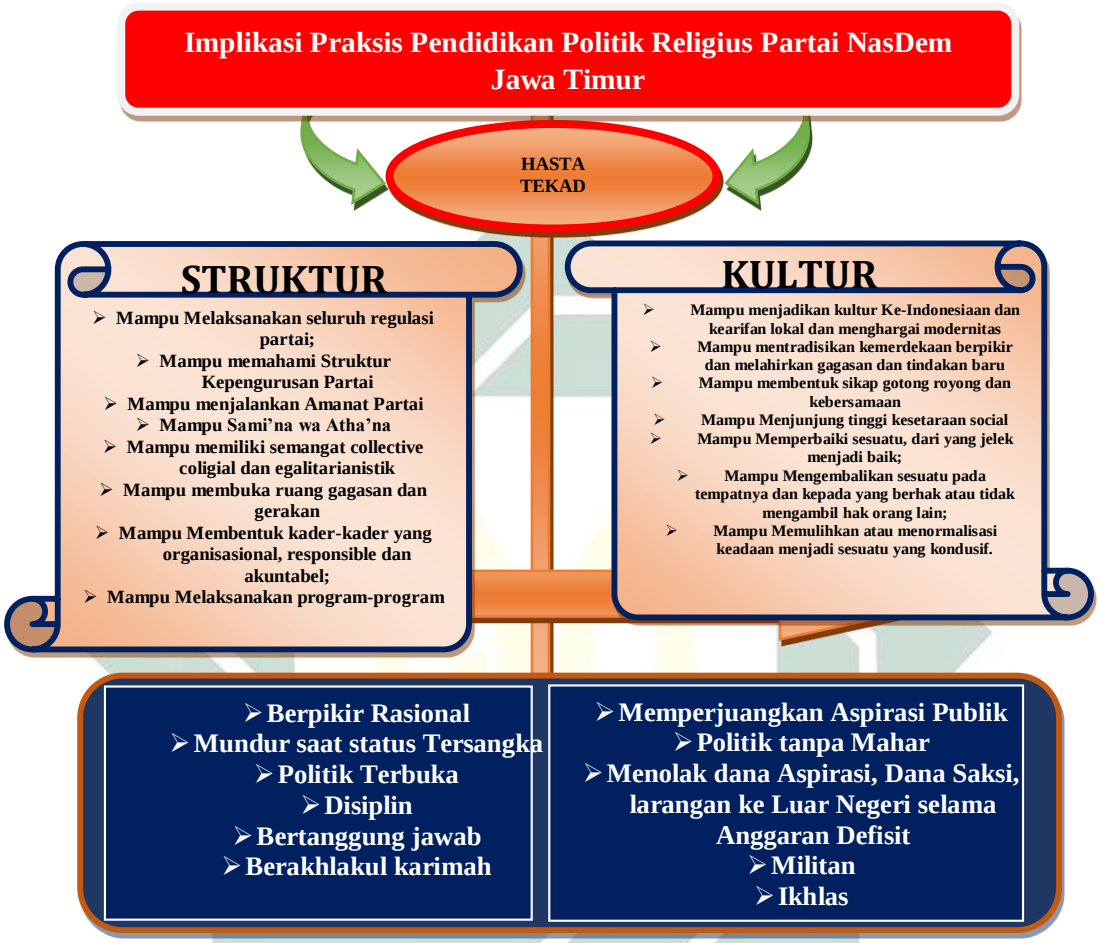

Gambar. 4.10
Implikasi Praksis Pendidikan Politik Partai NasDem

Namun disamping temuan implikasi konkrit sebagaimana dijelaskan di atas, peneliti juga menemukan masih adanya kelemahan terjadi dalam proses struktursi Partai NasDem. Sumber perilaku politik pada dasarnya adalah budaya politik, yaitu kesepakatan antara pelaku politik tentang apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kesepakatan ini tidak selalu bersifat terbuka, tetapi ada pula yang bersifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertutup. Partai NasDem yang mengikrarkan diri sebagai partai politik terbuka, pada sisi ini mengalami dan bersentuhan dengan kesepakatan yang demikian. Misalnya, kesepakatan yang tidak mencerminkan spirit keterbukaan, untuk menerima amplop setiap kali dilakukan pembahasan Perda.

RUU merupakan kesepakatan gelap (illicit agreement). Membayar "uang pelicin" kepada para petinggi politik untuk mendapatkan dukungan partai dalam rebutan jabatan Bupati, Walikota, dan Gubernur merupakan tindakan yang dianggap sah dalam budaya politik saat ini. Justru Partai NasDem membangun antitesa dengan budaya politik tersebut dengan budaya politik tanpa mahar.

Suatu budaya politik biasanya berlaku selama periode tertentu. Ketika datang perubahan penting dalam konstalasi politik, datang pula para pelaku baru dalam gelanggang politik, terbukalah kesempatan untuk memperbarui budaya politik. Di negara Indonesia, budaya politik para perintis kemerdekaan berbeda dari budaya politik pada zaman demokrasi parlementer, dan ini berbeda dengan budaya politik yang tumbuh dalam zaman Orde Baru. Zaman reformasi ini juga melahirkan budaya politik baru, yang kemudian melahirkan perilaku politik yang menyusahkan banyak orang. Sementara dikalangan budaya politik disebut dengan "budaya politik aji mumpung".

Struktur budaya yang demikian, dijelaskan dalam struktur yang masih dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Konsep ruang dan waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Giddens bersifat konstitutif, yakni dengan adanya ruang dan waktu maka individu melakukan tindakan dan pengorganisasian masyarakat.174 Hal ini jugalah yang dipahami oleh instruktur pendidikan politik Partai NasDem. Struktur yang berkembang di NasDem tentu juga dipengaruhi oleh hal global yang terjadi dalam dunia politik.

Pada konteks inilah Partai NasDem nampak masih kewalahan dalam mengupayakan strukturasi sebagaimana yang telah dirumuskan dan diharapkan. Walaupun sedikit, nampak beberapa agen NasDem masih tidak berdaya menghadapi realitas politik yang terjadi. Beberapa kader partai masih ada yang masih masuk dalam jeratan hukum. Hal ini sebagaimana yang dikemukan oleh Nico. Menurutnya, kenyataan terkait beberapa kader yang mengundurkan diri dari partai karena kasus hukum, merupakan indikasi kuatnya pengaruh budaya politik yang kurang baik di negeri ini. Untuk mencapai puncak kekuasaan, harganya cukup mahal. Untuk mendapatkan suara banyak hitung-hitungan politik hari ini adalah dengan uang atau program. Hal ini yang kemudian nampak banyak membuat para politisi terkena pelanggaran hukum.[175]

Dengan demikian, walaupun Partai NasDem berupaya sekuat tenaga melakukan gerakan perubahan serta membangun budaya politik tanpa mahar, masih tidak dapat secara maksimal mengubah iklim politik di negeri ini. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Gus Choi bahwa memang Partai NasDem sudah mencoba sekuat tenaga untuk

[174] Lihat, B. Herry Priyono, *Anthony Giddens,* 19-20.
[175] Wawancara, Nico tanggal 16/09/2017 hotel Bintang Mulya Jember.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminimalisir mahalnya budaya politik dengan mencoba melakukan gerakan menolak mahar dalam partai politik. Akan tatapi, kondisi masyarakat saat ini matrelistis. Mereka berasumsi dan melumrahkan budaya mahar politik. Tanpa mahar, politisi tidak mungkin mengantongi banyak suara. Hal inilah yang hingga hari ini tanpa lelah dan putus asa, mencari solusi tepat mengahadapi realitas yang bermasalah ini. NasDem terus melakukan upaya maksimal melalui pendidikan politiknya.[176] Orientasinya tetap, yakni melakukan restorasi gerakan perubahan yang nantinya dapat mewujudkan peradaban negeri yang lebih baik.

[176] Wawancara, A. Effendi Choirie tangggal 23 Oktober 2017 di kantor DPW Partai NasDem Jawa Timur Jl. Kartini No.88 Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praksis Pendidikan Politik Partai NasDem

Persoalan pertama yang dijawab dalam penelitian ini ialah mengenai pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai NasDem Jawa Timur. Hasil penelitian memperoleh temuan bahwa Partai NasDem Jawa Timur termasuk partai politik yang aktif menjalankan fungsinya dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Melalui pendidikan politik inilah, Partai NasDem berkepentingan untuk tidak sebatas mempromosikan identitas, ide, pemikiran, cita-cita dan *platform* politik partainya kepada public. Lebih dari itu, pendidikan politik dimaksudkan pula untuk ikut mengajak public mendukung dan terlibat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita politik Partai NasDem untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis, berkeadilan dan berkemakmuran.

Tidak sebatas diorientasikan pada public, pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai NasDem diproyeksikan pula pada kader-kadernya. Tujuannya tidak lain adalah untuk melahirkan kader-kader negarawan yang berjiwa nasionalis, religius dan demokratis. Kader-kader inilah yang diharapkan tidak hanya dapat menjadi tulang punggung partai yang dapat berperan penting dalam membesarkan Partai NasDem semata, melainkan juga mentransformasikan manifesto politik Partai NasDem yang mencita-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

citakan terwujudnya Indonesia yang lebih berdaulat, adil, makmur dan demokratis.

Pada tataran praksis, pelaksanaan pendidikan politik Partai NasDem Jawa Timur diformulasikan ke dalam tiga varian utama, yakni pendidikan formal, infomal dan nonformal. Pendidikan formal diwujudkan dalam bentuk sekolah kader dan sekolah legislatif yang dalam pelaksanaannya memang didesain secara formal: proses pembelajaran dilaksanakan di kelas, seleksi peserta didik, kurikulum dan materi ajar yang terstruktur, dan melibatkan penilaian (evaluasi) untuk menentukan kelulusan peserta didik. Pendidikan informal dan non-formal diwujudkan dalam bentuk kegiatan sosial (bakti sosial), keagamaan (peringatan hari besar agama) dan berbagai program kegiatan lainnya.

2. Dimensi-dimensi religius dalam Pendidikan Politik Partai NasDem

Dalam proses pelaksanaannya, pendidikan politik Partai NasDem Jawa Timur melibatkan dimensi-dimensi keagamaan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa nilai-nilai agama cukup fungsional dalam membentuk karakter *(character building)* kader yang nasionalis-religius sebagaimana cita-cita partai. Nilai-nilai religius seperti keikhlasan, kedisiplinan, tanggung jawab, akuntabilitas dan sejenisnya, dimasukkan ke dalam kurikulum dan materi ajar yang disampaikan dalam pendidikan formal (pembelajaran di kelas) maupun pendidikan informal dan non-formal (acara-acara sosial-keagamaan). Dalam konteks demikian ini, Partai NasDem Jawa Timur menjadikan ajaran agama bukan sebagai landasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ideologis formal, melainkan sebagai sumber etik, moral, sikap dan perilaku politik para kadernya.

Ada dua aspek keagamaan yang terkandung dalam pendidikan politik Partai NasDem. Dimensi religius yang pertama adalah yang bersifat ritual-simbolis sebagaimana yang terkandung dalam berbagai program dan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh Partai NasDem seperti *istigātsah, khotm-al-qur'ān, Shalawatan,* pengajian akbar oleh tokoh-tokoh agamawan nasional, *Ramadhān Mubārak* (Kegiatan Ramadhan), Peringatan Hari-Hari Besar Islam dan lain sebagainya. Dimensi religius yang kedua adalah yang bersifat substantif. Berbeda dengan dimensi yang bersifat ritual-simbolik, dimensi ini mengajarkan nilai-nilai keagamaan yang sejalan dengan nilai-nilai keadaban modern seperti sikap rasional, militan, disiplin dan bertanggungjawab, terbuka, memperjuangkan aspirasi publik, memihak pada kepentingan rakyat, politik tanpa mahar, *akhlāq al-karīmah* dan selalu *ikhlās***.**

Kedua dimensi itu, ritual simbolik maupun dimensi substantif religius, diorientasikan pada upaya peningkatan citra diri kepartaian dan kader-kader Partai NasDem yang berkarakter nasionalis, religius dan demokratis. Karakter demikian ini dipandang penting di tengah sorotan dan kritik publik yang cukup tajam terhadap keberadaan partai-partai politik yang terjebak dalam arus pragmatisme, kolusi, korupsi dan nepotisme.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Implikasi Penerapan Pendidikan Politik Berdimensi Religius

Partai politik yang memiliki konsep kaderisasi kader berkarakter humanis dan religius, menghasilkan kader-kader yang saleh secara individual dan saleh secara sosial. Menguatkan struktur dan kultur berpolitik dan dapat meningkatkan kinerja kader baik secara internal di kepartaian dan eksternal di pemerintahan, serta kemasyarakatan.

Pendidikan politik Partai NasDem yang berdimensi religius begitu nyata telah mendorong terbentuknya strukturasi yang melahirkan reproduksi struktur partai yang humanis dan religius. Partai NasDem melalui pendidikan politiknya mampu menciptakan struktur dan kultur yang secara nyata melahirkan implikasi positif baik ke dalam internal partai maupun pada ekternal partai itu sendiri.

Pada strukturnya, strukturasi yang terjadi mendorong *pertama*, terciptanya aktor yang dapat melaksanakan seluruh peraturan organisasi, keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan Partai NasDem sebagai Pedoman final dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian. *Kedua*, Struktur kepengurusan partai disusun berdasarkan prinsip heterogenitas etnik, representasi daerah, dan keterwakilan kuota perempuan, serta perimbangan antara senioritas dan yunioritas. *Ketiga*, menjalankan amanat Partai NasDem sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing pengurus dalam jabatan/posisi strukturalnya sesuai dengan tata laksana organisasi. Dan *keempat*, membangun semangat *collective coligial* dan egalitarianistik dalam memimpin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun implikasi pada kulturnya adalah *Pertama*, Menjadikan kultur Ke-Indonesiaan dan kearifan lokal *(local wisdom)* pada satu sisi, dan menghargai modernitas pada sisi yang lain sebagai khazanah budaya yang luhur (*adiluhung*) dalam membangun partai. *Kedua*, Mentradisikan kemerdekaan berpikir bagi lahirnya sebuah gagasan dan tindakan baru yang dilakukan secara cepat dan tepat, berani, waspada, percaya diri serta teguh dalam berjuang.

Ketiga, Membentuk sikap gotong royong dan membangun kebersamaan untuk satu tujuan yang mulia. *Keempat*, menjunjung tinggi kesetaraan sosial (*social egalitarianistic*) di tengah-tengah masyarakat. *Kelima*, memperbaiki sesuatu, dari yang jelek menjadi baik; mengembalikan sesuatu pada tempatnya dan kepada yang berhak atau tidak mengambil hak orang lain. Artinya, memulihkan atau menormalisasi keadaan menjadi sesuatu yang kondusif. Juga dapat dikatakan, mencerahkan, memberdayakan masyarakat dan juga tidak membodohi apalagi memanipulasi.

Nampak sekali bahwa implikasi pendidikan politik yang dijalankan sudah melahirkan sesuatu yang baik bagi internal partai. Konkritnya, pada implikasi internalnya, nampak mampu meningkatkan kerja operasional kepartaian. Namun, dirasa masih perlu pengembangan lebih lanjut. Salah satunya adalah terkait dengan implikasi eksternalnya yang masih lemah dan bahkan kurang mampu melakukan restorasi gerakan perubahan kultur politik yang masih matrialistis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi dari temuan penelitian ini mencakup dua hal yakni implikasi teoritis dan praktis. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagaimana berikut,

1. Implikasi Teoretis

Kajian mengenai dinamika Partai NasDem Jawa Timur dalam melaksanakan pendidikan politik berdimensi agama, memunculkan sejumlah implikasi teoretis penting. *Pertama*, penelitian ini berimplikasi pada cara pandang pragmatis terhadap partai politik sebagaimana dikemukakan oleh Carl Friendrich. Menurut Begawan politik ini, partai politik itu tak ubahnya sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil yang bertujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan. Begitu pula dalam teori pembangunan yang melihat parpol sebagai produk modernisasi sosial-ekonomi yang berorientasi pada kepentingan pragmatis.

Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, penelitian ini menyikap hal yang berbeda. Partai politik di Indonesia, khususnya NasDem, tidak hanya menekankan pada perebutan kekuasan dengan menghalalkan berbagai macam cara. Bagi Partai NasDem berpolitik tak ubahnya sebagai sarana bagi kader-kadernya untuk ikut memperbaiki proses perpolitikan agar lebih beradab dan demokratis. Melalui pendidikan politik, Partai NasDem berkepentingan untuk ikut melahirkan insan-insan politik yang memiliki jiwa nasionalisme-religius yang kuat dan pada gilirannya ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang berkemakmuran,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkeadilan dan demokratis.

Agen yang tergabung dalam Partai NasDem yang memiliki jiwa-jiwa nasionalisme yang humanis dan religius. Dalam praktek politiknya tidak hanya bertujuan merebut kekuasaan, dan memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan, tetapi lebih dari pada itu ikut membumikan ajaran-ajaran agama di dalam politik, sehingga politik menjadi alat untuk menyebarluaskan ajaran-ajaran agama. Agen Partai NasDem memahami agama bukan sebagai entitas formal dan simbolik di dalam politik.

Agama menjadi kerangka substantif pada perilaku kader. Maka pendidikan politik yang dijalankan Partai NasDem sangat kental dengan nilai-nilai religiusitas. Praktek pendidikan yang dijalankan Partai NasDem memiliki dimensi-dimensi, politik, sosial, kebangsaan dan keagamaan. Hal ini dipengaruhi oleh para agen baik pendidik dan peserta didiknya yang berlatar belakang penganut agama yang taat serta memiliki nasionalisme yang tinggi.

Kedua, hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kenyataannya bahwa teori-teori politik dan pendidikan yang diselenggarakan lebih banyak menggunakan teori-teori sekuler, tentu sangat cocok bila diterapkan pada masyarakat liberal seperti di Barat. Akan tetapi, beda halnya dengan negara-negara yang memiliki kecondongannya menganut budaya timur. Negara-negara berbudaya timur seperti Indonesia, masih kental dengan dimensi tradisi dan keasadaran religius.

Partai politik di Indonesia memposisikan politik bukan hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merebut dan mempertahankan kekuasaan, lebih dari pada itu sebagai media dalam menginternalisasikan nilai-nilai kedalam kehidupan, sehingga politik bukan semata permainan duniawi namun untuk kepentingan ukhrawi. Dalam hal ini temuan penelitian menguatkan teori integrasi agama dan politik yang menjadikan agama sebagai kerangka nilai substanstif dalam berpolitik, bukan dengan pengertian agen sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan. Memperkuat teori strukturasi Giddens terkait dengan peran aktor dan sekaligus struktur yang berperan penting dalam mewujudkan tindakan sosialnya, dalam hal ini (praksis pendidikan politik berdimensi religius).

Ketiga, terkait dengan kurikulum yang dikembangkan dalam pendidikan politik partai. Robert Brownhill mengajukan beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam proses pembuatan kurikulum pendidikan politik, yang murni hanya berbicara persoalan politik. Konsep Robert Brownhill bila dilihat dari kondisi di Indonesia sudah tidak memadai lagi karena kurikulum pendidikan politik berorientasi pada politik praktis, kasus di Indonesia tidak bisa serta merta mengembangkan secara total konsep Robert Brownhill, namun perlu mengakomodir materi lain misalnya, materi agama yang berhubungan dengan politik serta kurikulum yang berbasis pada nilai-nilai lokalitas. Maka Partai NasDem yang memiliki model pendidikan politik berbasis religius menghasilkan partai politik yang memiliki konsep kaderisasi kader berkarakter humanis dan religius, menguatkan struktur dan kultur berpolitik yang dapat meningkatkan kinerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kader, baik secara internal dan eksternal di pemerintahan.

a. Temuan Formal

Berdasarkan temuan substantif maka peneliti mengabstraksikan dalam temuan formal sebagai berikut;

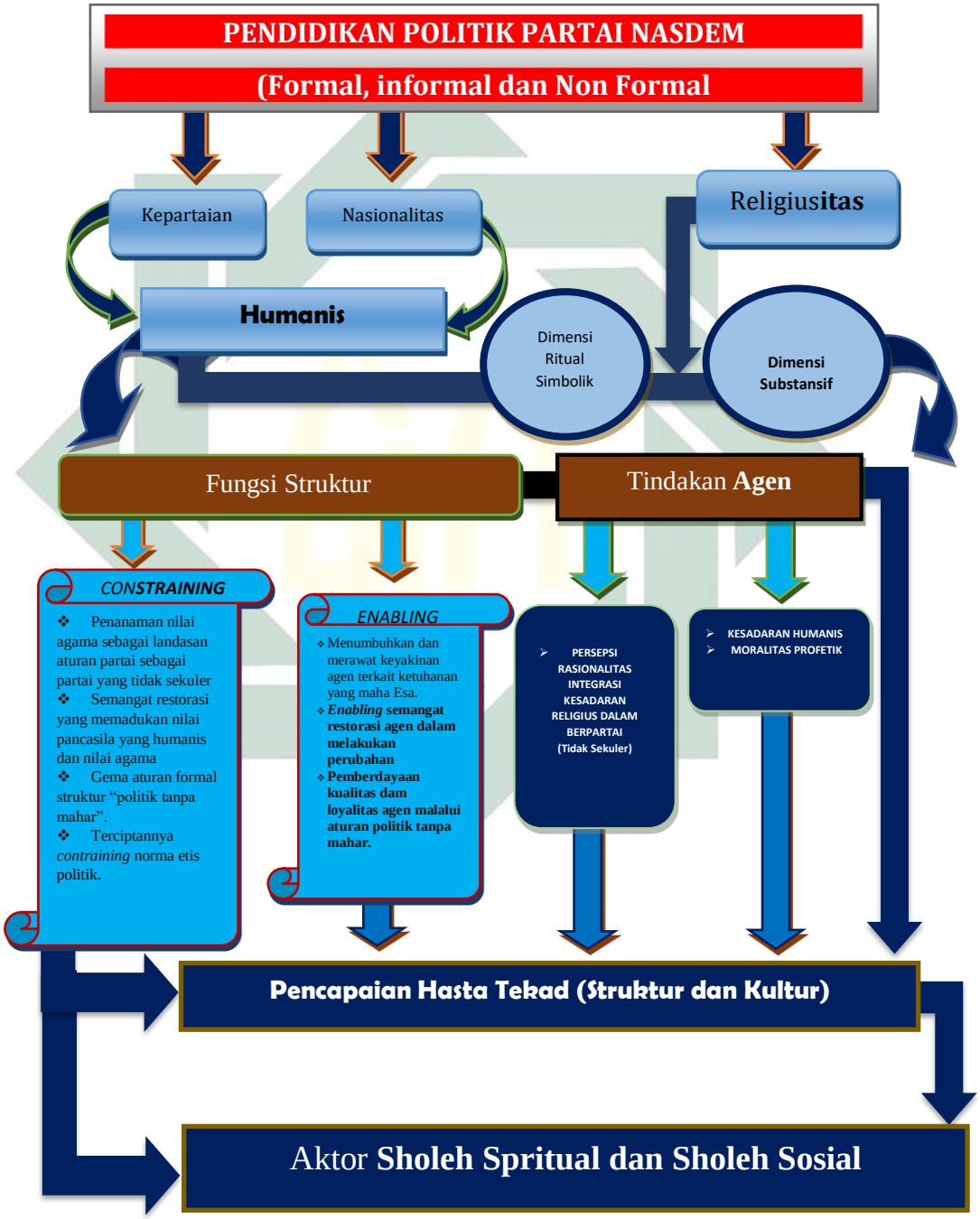

Gambar 5.1
Formulasi Temuan Model Pendidikan Politik Berbasis Religius

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Implikasi Praktis

Implikasi praktis hasil penelitian pendidikan politik dan dimensi Religius adalah:

a. Memberikan informasi kepada seluruh masyarakat politik bahwa agama harus menjadi bingkai dalam kegiatan politik.
b. Memberikan informasi pada para jajaran pengurus Partai NasDem tentang pentingnya pendidikan politik bagi kader secara berkelanjutan.
c. Memberikan acuan yang jelas dan sistematis kepada para pelaku politik tentang kegiatan pendidikan politik yang harus beradaptasi dengan aspek lokalitas.
d. Pentingnya membawa agama kedalam kehidupan politik, baik doktrin maupun ritualitasnya.
e. Pelaku politik yang memiliki latar belakang pengalaman pendidikan masa lalu sangat berpengaruh pada dinamika politik yang ada.

C. **Keterbatasan Studi**

Salah satu keterbatasan dalam studi penelitian yang ditulis peneliti adalah minimnya literatur tentang hubungan politik dan agama, literatur hubungan politik dan agama lebih bersifat kasuistik diberbagai Negara, selain itu minimnya literatur yang membahas pendidikan politik yang berbasis agama, literatur-literatur yang ada banyak membahas kaitan pendidikan politik pada hal-hal yang bersifat normatif seperti pengertian dan fungsi lembaga-lembaga politik, sehingga peneliti merasa kesulitan pada tahap analisis, namun dari keterbatasan tersebut penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penelitian lanjutan tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang sama dengan fokus yang berbeda.

Penelitian ini sebatas mengkaji topik dari sudut pandang teori Strukurasi Giddens, masih diperlukan penjelasan yang lebih komprehensif untuk dapat mengkaji topik ini. Perlu ada pendekatan teori lain untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Misalnya salah satunya dalam menganalisa model pendidikannya, tentu perlu teori-teori managemen pendidikan yang dapat dipakai sebagai pendekatan analisisnya.

Selain itu, penelitian ini juga terbatas oleh waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada skala tahun 2013-2019, sebagai obyek penelitian Partai NasDem Jawa timur. Kemungkinan akan terjadi perubahan pada skala waktu dan tempat tertentu. Maka dari itu, perlu ada kontinuitas penelitian dalam waktu dan tempat yang berbeda. Yang demikian ini tentu harapannya adalah adanya gambaran hasil penelitian yang universal.

D. Rekomendasi

Penelitian dalam disertasi ini masih kurang spesifik yang ditekankan pada pendidikan, dimensi dan implikasinya, belum pada kurikulum yang spesifik pada hubungan kurikulum politik dan agama. Agama hanya menjadi bingkai dalam pendidikan politik yang ada. Untuk selanjutnya pada komponen kurikulum perlu mengintegrasikan materi khusus tentang relasi agama dan Politik dan kajian perbandingan misalnya tentang *fiqh siyasah*. Pentingnya memasukkan kurikulum khusus tentang hubungan agama dan politik seperti *fiqh siyasah*, agar para kader tidak memahami politik hanya sebatas pada kekuasaan sekuler, fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif, tetapi agama sangat penting

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam memberi petunjuk dan pedoman dalam setiap aktivitas politik yang ada.

Terkait hubungan pendidikan politik dan agama perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan fokus yang berbeda. Kajian akademik yang berhubungan dengan dunia politik perlu mendapat porsi yang besar karena saat ini partai politik disinyalir hanya menghasilkan para politisi dan minus negarawan. Hal ini juga yang kemudian memunculkan budaya politik negatif. Oleh karena itu Partai NasDem harus terus mendorong perubahan-perubahan politik dan pendidikan politiknya untuk menghasilkan para negarawan-negarawan handal yang cerdas dan berpihak pada rakyat kecil serta memiliki prinsip religius yang kuat.

Direkomendasikan kepada peneliti yang memiliki peminatan topik yang sama dengan melihatnya dari perspektif teori lainnya seperti pendekatan strukturalisme dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al Muchtar. Suwarma *Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia,* Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2000.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Niat dan Ikhlas* Jakarta: Pustaka al-kautsar, 1996.

Alfian. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, Kumpulan Karangan,* Jakarta: PT *Gramedia,* 1981.

Amir Piliang, Yasraf, *Tran Politika: Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas,*Bandung: *Jalasutra,* 2006.

Anonim. *Konsep dan etika kerja dalam Islam,* Almadani, 1997.

Anonim, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* Depag, 1990.

Ardiansyah Kajian Magister Ilmu Hukum Garis Politik Hukum Indonesia Menurut Konstitusi, costumlawyer.wordpress, 2017.

Basrowi, Muhammad. Soenyono, *Teori Sosial dalam Tiga Paradigma.* Surabaya: Yayasan Kamousina, 2004.

Baharuddin dan Moh. Makin, *Pendidikan Humanistik, Konsep, Teori, dan Aplikasi Praksis dalam Dunia Pendidikan,* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Borgatta, Edgar F. Montgomery, Rhonda J. V. *Encyclopedia of Sociology Second Edition Vol. 1*. New York: Macmillan Reference USA, 2000.

Bryman, Alan, *Research Methods and Organization Studies.* London and New York: Routledge, 1989.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Bush, Robin, *Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia,* (Singapore: ISEAS,2009), 49-52.

Cholisin, *Konsolidasi Demokrasi Melalui Pengembangan Karakter Kewarganegaraan Jurnal Civic* Vol. 1, No. 1, Juni, pp, 2004.

Clark. Wach, Joachim, *Recent Religious Psychology,* Edinburgh, 1984

Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di* Antara Lima PendekatanYogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Dallmayr, Fred. *The Theory Strucuturation: a Critique. Dalam Anthony Giddens. Anthony Giddens Profile and Critiques in Social Theory*. Los Angeles: University of California Press,1982.

David Easton And Jack Dennis, *Children in the Political System: Origins of Political Legitimacy,* Pp. xvi, 440. New York: McGraw-Hill, 1969).

Daradjat. Zakiyah .dkk., *Ilmu Pendidikan Agama Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dirdjosanjoto, Pradjarta. *Memelihara Umat Kiai Pesantren-Kiai Langgar* Jakarta:LKIS,1994.

Djamari, *Ilmu Fisafat dan Agama*, Surabaya: Penerbit Bina Ilmu,1988.

Elearning Pendidikan. *Membangun Karakter Religius Pada Siswa Sekolah Dasar*. dalam, http://www.elearningpendidikan.com, diakses 11 April 2014).

Gabriel Almond dan Verba,. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan* Demokrasi *di Lima Negara,*Jakarta: Bumi Aksara,1984.

Giddens, Anthony. *Problematika Utama dalam Teori Sosial; Aksi, Struktur, dan Kontradiksi dalam Analisis Sosial*. Terjemahan oleh Dariyatno. 2009. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1979.

Giddens, Anthony. *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Terjemahan oleh Maufur dan Daryanto. 2010. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1984.

Giddens, Anthony. *Metode Sosiologi Kaidah-Kaidah Baru*. Terjemahan oleh Eka Adi Nugraha dan Wahmuji, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Giddens, Anthony. *Conversation Anthony Giddens Making Sense of Modernity*. Nottingham, 1998.

Hasan, Noorhaidi. *Islam Politik di Dunia Kontemporer, Konsep, Genealogi, dan Teori.* Yogyakarta: Suka Press: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Hariyanti, Cecep Darmawan, dan Iim Siti Masyitoh, "*The Role of Political Parties in Building Loyalty Women Cadres through Political Education," Proceedings of the Annual Civic Education Conference* (ACEC 2018), 2018, 123.

H.D. Silahuddin, *Politik Islam di Indonesia: Kajian Tentang Partai Masyumi* Tesis-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research.* Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Hamid, *Kejujuran dalam Perspektif Islam*. Dalam http://hasmidepok.org/ kajian-islam/ kejujuran-dalam-islam.html, 24 Juni 2015.

Harrison, Lisa, *Political Research: An Introduction.* New York and London: Routledge, 2001.

Haryanto, Sindung, *Sosiologi agama:dari klasik hingga postmodern,* Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2016.

Huijbers, Theo. *Mencari Tuhan: Pengantar ke dalam Filsafat Ketuhanan*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

HR. Ahmad, ath-Thabrani, Ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul* Jami' no: 3289.

Intan, Benyamin F. *Damai Bersama Gus Dur*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Idi Subandi dan Bachruddin Ali Akhmad,. *Komunikasi & Komodifikasi: Mengkaji Media dan Budaya dalam* Zainuddin Maliki, *Agama Priyayi: Makna Agama di Tangan Elite Penguasa,* Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.

Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia-UMM Press, 2002).

Ilsam, Muh In`am.*Teologi Islam:Isu-Isu Kontemporer*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Jeffries, Vincent dan H. Edward Ransford, *Social Stratification: A Multiple Hierarchy Approach.* Boston: Allyn and Bacon*,* 1980.

Jalaluddin, *PsikologiAgama*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005.

John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions* London: Sage Publications, 1998.

J. Porter, Donald. *Managing Politics and Islam in Indonesia* (London: Routledge, 2002), 4-5.

Jeffries, Vincent dan H. Edward Ransford, *Social Stratification: A Multiple Hierarchy Approach.* Boston: Allyn and Bacon*,* 1980.

Kantaprawira, Rusadi, *Sistem Polilik Indonesia: Suatu Model* Pengantar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.

Kartono, Kartini. W*awasan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional,* Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1990.

Khan, Qomaruddin, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyyah,* terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1983.

Viktor, B. Laiskodat. *Restorasi Parlemen Dua Tahun Fraksi NasDem DPR RI Bersama Rakyat,* (Jakarta: RMBOOKS dan Fraksi Partai NasDem, 2017), 3-6.

Lely, Arrianie. *Komunikasi Politik: Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik,* Bandung: Penerbit Widya Padjajaran, 2010.

Lewis, Bernard. *The Political Language of Islam,*Chicago: Univesity of Chicago press, 1988.

Lincoln, *Naturalistic Inquiry* New Delhi: Sage Publication, inc, 1995.

Loyal, Steven. *The Sociology of Anthony Giddens*. London: Pluto Press. Pierson, Christopher, 2003.

Madjid, Nurkholis. *Masyarakat Religius* (Jakarta: Lazis Paramadina, 1997), 137-139.

Manivesto Partai NasDem, Jakarta, 26 Juli 2011.

Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Agama Islam* Bandung: PT Remaja *Rosdakarya*, 2002.

Misiak, Henryk dan Virgini Staudt Sexton, *Psikologi Fenomenologi, Eksistensial,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Humanistik, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

Miles, &Huberman, *qualitatif analysis*, Penerjemah: Rohidi, R. T, Jakarta: UI-Press, 1992.

Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Rosdakarya: Bandung, 2000.

Moh.Suardi, *Pengantar Pendidikan Teori dan Aplikasi*, Jakarta, PT. Indeks

Mulkhan, Abdul Munir, *Runtuhnya Mitos Politik* Santri, Yogyakarta: Sipress, 1999.

Musthofa, Muh."Hidup Merdeka Bersama", Juranal Gamma, 4 April 2001.

Mumtazah Akhtar, Memaknai hidup dengan memberi Manfaat bagi orang *lain,* Dalam http;//rajapena.org/author/ masq@mkaindonesia.org, Asp 4 Juni 2015

Naim, Ngainun. *Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa.* Jogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012.

Nashir, Hadedar,. *Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Budaya*. Yogyakarta: Multi Presindo, 2013.

Nottingham, Elizabeth K. *The Religion of Java,* Penerjemah Aswab Mahasin, *Abangan Santri*, *Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*,Jakarta: Pustaka Jaya, 1985.

Nurhakim, Moh. *Pemaknaan Agama Dalam Partai Politik Dalam Konteks Reformasi, Studi Perbandingan PPP, PKB dan PAN*. *Jurnal Humanity*, Volume 1 Nomer 1, September, 2005.

Pas, Daniel L. *Eight Theories of Religion*, New York: Oxford University Press, 2006.

Panuju, Panuju. "*The Politicization of Religion, Ironi of Ideology and Clash of Discourse Approaching 2019 General Election*," Jurnal Penelitian, 11 Mei 2018, 1, v 15.1357.

Priyono, B. Herry. *Sebuah Terobosan Teoritis. Dalam Basis Nomor 02. Tahun ke-49*, Januari-Februari 2000.

Richard, Steven. *Phenomenological Approaches to the Study of Conscious Awareness dalam Max Velmans, ed, Investigating Phenomenal Consciousness* Philadelphia: John Benjamins Publishing Co, 2000.

Ritzer, George. Goodman, Douglas. 2003. *Teori Sosiologi Modern.* Terjemahan Alimandan. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Robert A. Dahl, *Modern Political Analysis,* New Delhi: Prentice-Hall of India Limited, 1979.

Robert, Brownhill. and Patricia Smart. *Political Education*, Lodon; New York: Routledge, c1989.

Robertson, Roland,. *Religion And Society*, Penerjemah Abdul Muis Naharong,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama *dan Masyarakat:* Suatu *Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta: Rajawali Press.ed, 1997.

Rumadi, *Masyarakat Post-Teologi Wajah Baru Agama dan Demokrasi Indonesia*, Jakarta: mustika bahraid, 2000.

Robertson, Roland. *The social interpretation of religion*, Oxford:Brasil Blackwell,1972.

Sastrapratedja, *Sociology of Religion,*Victoria: Penguin Books Australia Ltd.ed, 1982.

Sabri, Muhammad. Ikhsan, Muh. dan Wekke Suardi Ismail. "*Citizens Democracy Education-Based Religions And Cultures: Consideration Of Democracy School In Jeneponto, Indonesia,*" 9 November 2017, https://doi.org/10.31227/osf.io/7ud3a.

Sastromidjojo, Ali.*Dasar-dasar Pokok Marhenism*e, Jakarta:Partai Nasional Indonesia,1961.

Suryanef dkk., "*Political Education for Female Cadres as an Effort to Gender Equality in Politics," Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences and Interdisciplinary Studies* (ICSSIS 2018), 2019, 38.

Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), 228.

Sutarto, Ayu, *Menguak Pergumulan antara Seni, Politik, Islam, dan Indonesia*, (2004).

Soeitoe, Samuel.*Psikologi Pendidikan Untuk Para Pendidik Dan Calon Pendidik*, Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1982.

Smith, Donald Eugene. *Agama dan Modernisasi Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.

Shofaussamawati, *Ikhlas Perspektif al-Quran, Kajian Tafsir Maudhu'i*, Jawa Tengah: STAIN Kudus, 2013.

Sunarso, *Politik Pendidikan Tiga Rezim* Kajian Dinamika Pendidikan KewarganegaraanOrde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi,2010.

Soekarno, *Pokok-Pokok Ajaran Marhaenisme Menurut Bung Karno*, Yogyakarta: Media Pressindo, Anggota IKAPI, 2001.

Suparlan, Pendidikan Karakter Sedemikian Pentingkah dan Apa yang Harus *Kita* Lakukan, dalam http://www.suparlan.com, asp 4 September 2012).

Suryawasita, *Teologi Pembebasan Gustavo Gutierrez*, Yogyakarta: Jendela, 2001.

Sudrajat, Ajat.*Etika Protestan dan Kapitalisme Barat: Relevansinya dengan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara,1997.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik,* Jakarta: Grasindo, 2010.

Sutopo, H.B, *Telaah Karya Penelitian, Sumbangsih Jurnal* Penelitian Universitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelas Maret, No 1 Volume IV, 1988.

S, Prawiroatmodjo. *Bausastra Jawa-Indonesia*, jilid 1, cetakan 3 (Jakarta; PT Karya Unipress), 1988.

Tucker, Rober J.*The Marx Engels Reader*, New York:Norton Company,1978.

Thompson, John. B. *Analisis Ideologi;Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia*. Terjemahan oleh Haqqul Yakin. 2003. Yogyakarta: Ircisod, 1984.

Thontowi, A. *Hakekat Religiusitas*. Dalam http://www.sumsel. kemenag.go.id, asp (4 September 2012).

Tim Peneliti INFID dan LIPI, *Partai Politik, Pemilihan Umum, dan Ketimpangan Sosial & Ekonomi di Indonesia* Jakarta: Pustaka Sempu, Infid dan LIPI, 2014.

Turner, Jonathan H. *The Theory Structuration. American Journal of Sociology*, Volume 91, Issue 4 (Jan. 1986).

Toer, Pramodaya Ananta.*Bumi Manusia,*Jakarta:Hasta MItra,1980.

Wahid, Abdurrahman."Intelektual di Tengah Eksklusivisme" dalam majalah Prisma, No. 3, Jakarta: LP3S, 1991.

Willy Aditya, *Indonesia di jalan Restorasi Politik Gagasan Surya Paloh*, Jakarta; Populis Institute, 2013.

Wahono, Francis.*Teologi Pembebasa: Sejarah, Metode, Praksis, dan Isinya,* Yogyakarta: LKIS, 2000.

Wahid, Abdurrahman. *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, Jakarta: Desantara, 2001.

Weber, Max. *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, terj. TW. Uotomo Yogyakarta: pustaka pelajar, 2006.

Yvonne Darlington and Dorothy Scott, *Qualitative Research in Practice* Newsouth Wales: Allen and Unwin, 2002.

Zayadi, *Desain Pendidikan Karakter*, Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id